

MEMIMPIN KEUANGAN  
BERKELANJUTAN  
**DI ERA BARU  
BANK EMAS**





# MEMIMPIN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI ERA BARU BANK EMAS

BSI melangkah ke tahun 2025 dengan keyakinan bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan, tetapi amanah. Sebagai Bank Syariah yang menyediakan layanan Bank Emas pertama di Indonesia, BSI membawa perspektif baru tentang bagaimana keuangan syariah dapat menjadi kekuatan perubahan, menghubungkan nilai spiritual, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam satu perjalanan yang utuh.

Dalam era baru ini, BSI menempatkan keberlanjutan sebagai fondasi setiap langkah, dari memperkuat pembiayaan hijau, menghadirkan solusi digital yang inklusif, mendorong pemberdayaan masyarakat, hingga menghidupkan potensi sosial melalui instrumen ZISWAF dan wakaf produktif.

BSI percaya bahwa keberlanjutan tumbuh dari nilai, komitmen, dan konsistensi. Karena itu, Perseroan terus membangun kemitraan, memperluas gerakan ekonomi hijau, memperkuat literasi syariah, dan menghadirkan ekosistem yang mendukung generasi mendatang untuk hidup lebih baik. Dengan memimpin era baru Bank Emas, BSI menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya dikejar, tetapi juga diwariskan, sebagai manfaat, sebagai keberkahan, dan sebagai masa depan yang lebih seimbang bagi Indonesia.

# DAFTAR ISI

- 1** MEMIMPIN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI ERA BARU BANK EMAS
- 2** DAFTAR ISI
- 4** KONTRIBUSI KEBERLANJUTAN 2025
- 8** PENCAPAIAN PENTING



## TENTANG LAPORAN

- 13** Tentang Laporan
- 14** Proses Penentuan Topik Material
- 17** Pengelolaan Topik Material
- 20** Hubungan dengan Pemangku Kepentingan



## STRATEGI KEBERLANJUTAN

- 23** Penjelasan Strategi Keberlanjutan
- 31** *Policy Commitment*
- 35** Proses untuk Memulihkan Dampak Negatif



## IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

- 37** Kinerja Aspek Ekonomi
- 39** Kinerja Aspek Lingkungan Hidup
- 40** Kinerja Aspek Sosial



## PROFIL PERUSAHAAN

- 43** Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan
- 46** Identitas Perusahaan
- 48** Skala Perusahaan
- 48** Informasi Mengenai Pegawai
- 52** Wilayah Operasional
- 54** Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan
- 55** Rantai Pasok
- 55** Entitas Hilir dan Relasi Bisnis lainnya
- 56** Keanggotaan Asosiasi
- 56** Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan pada Organisasi



## LAPORAN DIREKSI

- 59** Laporan Direksi
- 66** Tanggung Jawab Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025



## TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

- 69** Struktur dan Komposisi Tata Kelola
- 71** *Conflict of Interest*
- 72** Nominasi dan Seleksi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
- 73** Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
- 74** Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- 76** Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

<b>77</b>	Kode Etik	<b>147</b>	Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan
<b>77</b>	<i>Whistleblowing System</i>	<b>148</b>	Bantuan Finansial dari Pemerintah
<b>78</b>	Anti-Korupsi, <i>Anti-Fraud</i> , dan Pengendalian Gratifikasi	<b>149</b>	Praktik Pengadaan Barang dan Jasa
<b>83</b>	Perdagangan Orang Dalam	<b>151</b>	Kinerja Lingkungan Hidup
<b>83</b>	Pelindungan Data Pribadi	<b>151</b>	Aspek Umum
<b>86</b>	Penerapan Standar dan Pedoman Keberlanjutan Internasional ISO 26000:2010 – <i>Guidance on Social Responsibility</i>	<b>152</b>	Aspek Material
<b>88</b>	Aktivitas Lobi dan Kontribusi Politik	<b>152</b>	Aspek Energi
<b>88</b>	Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	<b>155</b>	Aspek Air
<b>89</b>	Penerapan Keuangan Berkelanjutan	<b>157</b>	Aspek Keanekaragaman Hayati
<b>89</b>	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	<b>157</b>	Aspek Emisi
<b>93</b>	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	<b>161</b>	Aspek Limbah dan Efluen
<b>95</b>	Manajemen Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	<b>162</b>	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup
<b>98</b>	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	<b>163</b>	Kinerja Sosial
<b>100</b>	Memperkuat Tata Kelola BSI pada Risiko dan Peluang Terkait Iklim	<b>163</b>	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen
		<b>172</b>	Aspek Ketenagakerjaan
		<b>190</b>	Aspek Masyarakat
		<b>200</b>	Privasi dan Keamanan Data Nasabah
		<b>203</b>	Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keberlanjutan
		<b>203</b>	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan
		<b>203</b>	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan
		<b>204</b>	Dampak Produk/Jasa
		<b>204</b>	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali
		<b>205</b>	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa
		<b>206</b>	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen
		<b>207</b>	Lembar Umpan Balik
		<b>208</b>	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun 2023
		<b>209</b>	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017
		<b>211</b>	Indeks Isi <i>Consolidated Set</i> of GRI Standard
		<b>218</b>	<i>Sustainability Accounting Standard Board (SASB) Standards Commercial Bank</i>
		<b>219</b>	Indeks IFRS S1 dan S2
		<b>223</b>	Tautan Standar GRI dengan TPB



#### KINERJA KEBERLANJUTAN

**133** Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan

**134** Kinerja Ekonomi

**134** Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

**137** Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan


**146** Meningkatkan Ekosistem Islam

# KONTRIBUSI KEBERLANJUTAN 2025

**BSI terus memperkuat implementasi ESG melalui 3 pilar utama yaitu *sustainable banking, sustainable operation & sustainable beyond banking*.** Pada pilar *sustainable banking*, portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp73,92 triliun, terdiri dari Rp15,66 triliun pembiayaan hijau, Rp58,26 triliun pembiayaan sosial, serta Rp396 miliar pembiayaan kendaraan listrik, dan didukung penerbitan Rp5 triliun Sukuk Berkelanjutan Tahap II. Pada pilar *sustainable operation* BSI melaksanakan kegiatan operasional melalui penggunaan sarana prasarana hijau yang mendukung keberlanjutan di antaranya pembangunan *Green Building Landmark* BSI Aceh dan BSI Tower Jakarta, pemasangan panel surya, mesin daur ulang botol plastik, stasiun pengisian kendaraan listrik, panel surya, pengoperasian 145 kendaraan listrik, dan penghitungan emisi cakupan 1 & 2 dengan mempergunakan aplikasi digital *carbon tracking*. BSI juga terus meningkatkan transformasi digital, strategi proaktif dalam perlindungan & keamanan data pribadi. Pada pilar *sustainable beyond banking*, BSI terus memperluas inklusivitas salah satunya dengan mempekerjakan 41% pegawai perempuan serta menyalurkan Rp400 miliar dana ZISWAF melalui 5 pilar yaitu:


## ESG Highlights

### BANKING




Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan 23,18% dari total pembiayaan, yang terdiri dari:

**Rp 73,92 Tn**




Portofolio Pembiayaan Hijau 21,20%

**Rp 15,66 Tn**




Portofolio Pembiayaan Sosial 78,80%

**Rp 58,26 Tn**



Portofolio Kendaraan Listrik

**Rp 396 M**











Sukuk Berkelanjutan Tahap II

**Rp 5 Tn**

**Bloomberg ESG Rating**

**1st Global Islamic Bank**


### OPERASIONAL

11




Gedung perkantoran ramah lingkungan: Landmark BSI Aceh & BSI Tower

15



Panel Surya di Outlet BSI dan Desa Binaan BSI

70




Stasiun pengisian daya kendaraan listrik di Kantor Pusat & Gerai BSI

145



Unit mesin penjual botol daur ulang di Jabodetabek & Bali

145




kendaraan listrik operasional

3 **TERBUKA** dan MELIBRASI

5 **ENERGY** QUALITY

10 **ADDRES** BERKESERJAN



Peluncuran pelacakan karbon digital:

**19.374,40** tCO<sub>2</sub>e cakupan 1\*


**70.356,55** tCO<sub>2</sub>e cakupan 2\*

Catatan: Cakupan 1 untuk bahan bakar; Cakupan 2 untuk listrik.

Artikel ESG BSI: **140.147** articles

Halaman Utama ESG BSI: <https://ir.bankbsi.co.id/esg/home.html>

Untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, BSI berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.







**41%** karyawan perempuan (2025)

### BEYOND BANKING

**Rp 400 M**

Total Nilai Penyaluran UPZ BSI, Zakat, Infak, Dana Sosial, dan Wakaf per Desember 2025

Pilar	Komposisi (%)	Pencairan (Rp Miliar)	Jumlah Orang yang Terdampak ('000)
Pilar Ekonomi	6,6%	26,4	591,1
Pilar Pendidikan	28,7%	114,8	23
Pilar Kemanusiaan	37,2%	148,8	599,1
Pilar Kesehatan	3%	11,8	27,3
Pilar Dakwah dan Advokasi	9,5%	38,2	45,9
Amil	15%	60	-

## KONTRIBUSI KEBERLANJUTAN 2025

**BSI terus memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang tercermin dari pertumbuhan stabil pembiayaan berbasis sosial dan hijau. Komposisi portofolio pembiayaan hijau menunjukkan kontribusi yang signifikan di berbagai segmen lingkungan.** Per Desember 2025, portofolio pembiayaan hijau Perseroan didominasi oleh produk ramah lingkungan (eco-efficient) sebesar 41,15%, diikuti pengelolaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan sebesar 36,90%, kegiatan lain dari kegiatan usaha berwawasan lingkungan lainnya sebesar 10,14%, transportasi ramah lingkungan sebesar 6,05%, energi terbarukan sebesar 4,54%, bangunan berstandar keberlanjutan sebesar 0,65%, serta pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan sebesar 0,58%. Komposisi ini mencerminkan komitmen BSI dalam memperkuat dampak lingkungan dan sosial melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang terdiversifikasi.

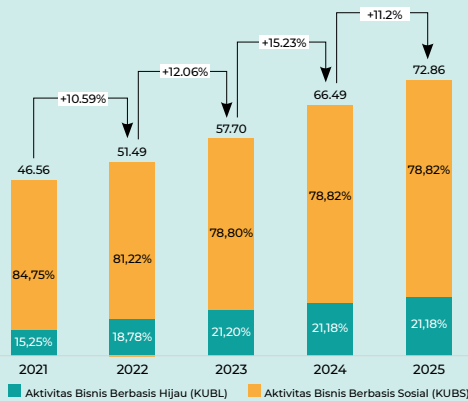
### Rincian pada Perbankan Berkelanjutan

#### Dasar Regulasi

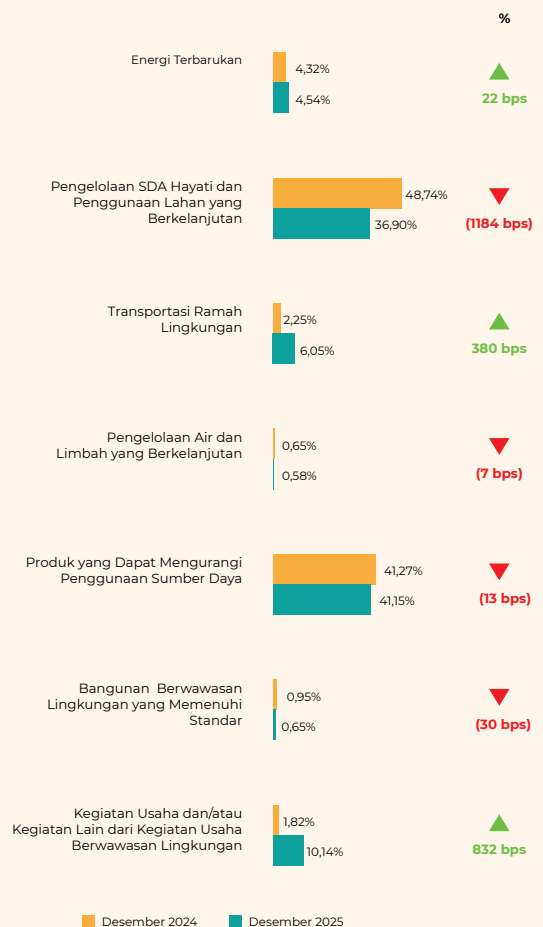


SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 51/POJK.03/2017  
TENTANG  
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN  
BAGI LEMBAGA KEUANGAN, EMITEN, DAN  
PERUSAHAAN PUBLIK

Keuangan Berkelanjutan di BSI mengikuti **POJK No. 51/POJK.03/2017** tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.



#### Komposisi Portofolio Pembiayaan Hijau menurut Segmen



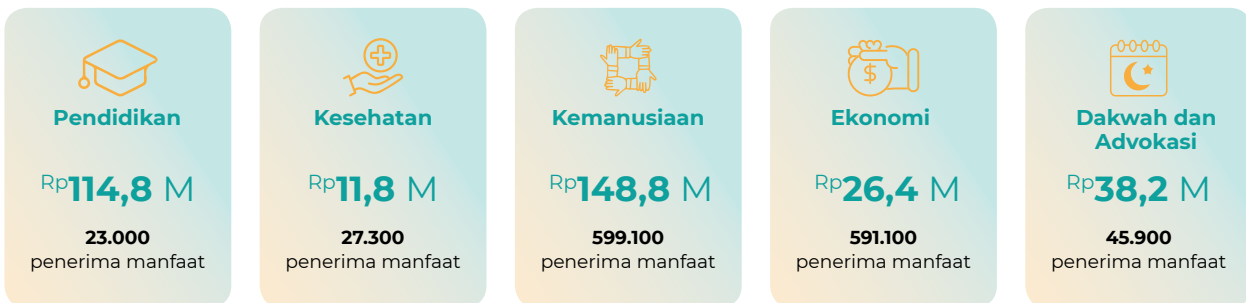
## KONTRIBUSI KEBERLANJUTAN 2025

Sebagai bagian dari komitmen sosial Bank Syariah Indonesia (BSI), Penyaluran dana zakat disalurkan ke baznas sesuai ketentuan dan dibantu oleh BSI Maslahat dalam pendistribusiannya sebagai mitra pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), sehingga memastikan kontribusi sosial Bank memberikan dampak yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sepanjang periode pelaporan, BSI Maslahat menyalurkan dana ZISWAF ke lima fokus utama, yaitu pendidikan sebesar Rp114,8 miliar, kesehatan Rp11,8 miliar, kemanusiaan Rp148,8 miliar, pemberdayaan ekonomi Rp26,4 miliar, serta program dakwah dan advokasi Rp38,2 miliar, yang secara keseluruhan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, zakat perusahaan dan karyawan BSI terus menunjukkan tren peningkatan, dari Rp268 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp289 miliar hingga Desember 2025, mencerminkan kinerja keuangan BSI yang semakin solid sekaligus memperkuat peran Bank dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan ZISWAF yang amanah dan profesional.

### Kontribusi Progresif untuk Indonesia

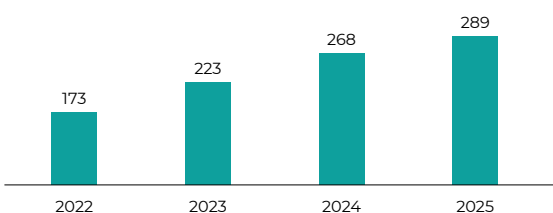
## BSI MASLAHAT

BSI Maslahat merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mitra BSI dalam penyaluran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), dengan fokus pada bidang berikut:



### Zakat Perusahaan dan Karyawan BSI

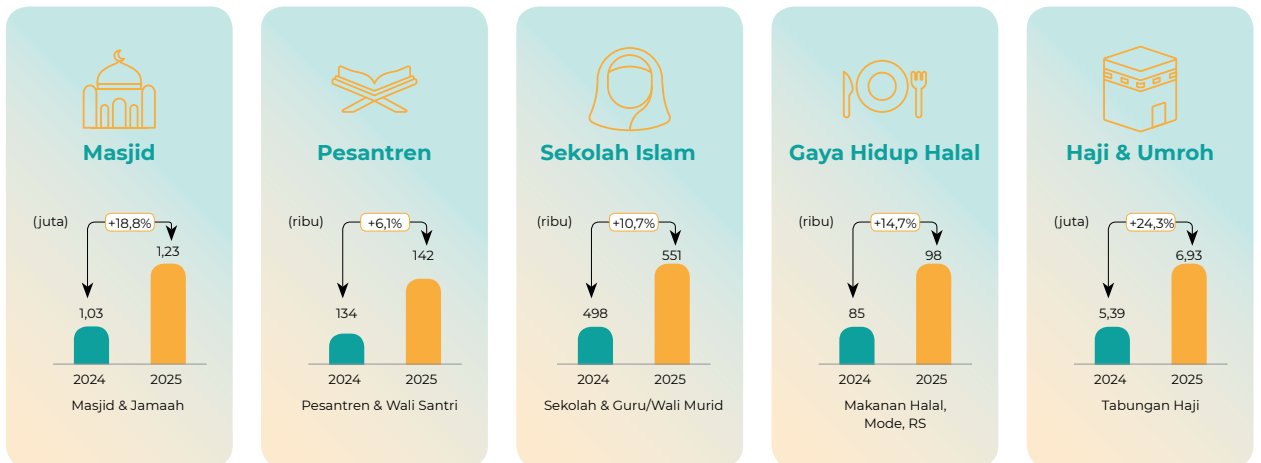
Zakat perusahaan dan karyawan BSI pada tahun 2025 meningkat sejalan dengan peningkatan profitabilitas yang dicatat.



## KONTRIBUSI KEBERLANJUTAN 2025

**Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berperan aktif dalam pengembangan *Islamic ecosystem* di Indonesia, termasuk penguatan ekosistem haji, melalui penyaluran Dana Pihak Ketiga yang terarah dan berkelanjutan.**

Sepanjang periode pelaporan, dana disalurkan ke lima segmen, yaitu Masjid dan Jamaah, Pesantren dan Wali Santri, Sekolah Islam & Guru/Wali Murid, Gaya Hidup Halal, dan Haji & Umroh, dengan total dana masing-masing mencapai Rp7,5 triliun, Rp2,1 triliun, Rp9,3 triliun, Rp1,2 triliun, dan Rp15,9 triliun. Pertumbuhan dana yang konsisten pada seluruh segmen mencerminkan kontribusi BSI dalam memperluas inklusi keuangan syariah, memperkuat institusi keagamaan dan pendidikan, serta mendukung gaya hidup halal dan perencanaan ibadah haji yang berkelanjutan.



### Total Dana Pihak Ketiga

Rp **7,5** Tn  
▲ 8,21% YoY

Rp **2,1** Tn  
▲ 42,7% YoY

Rp **9,3** Tn  
▲ 7,1% YoY

Rp **1,2** Tn  
▲ 41,5% YoY

Rp **15,9** Tn  
▲ 10,0% YoY

# PENCAPAIAN PENTING

## MILESTONE ESG BSI



## PENCAPAIAN PENTING

2025



- » Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan mencapai Rp73,92 triliun, mencakup *Green Financing* dan *Social Financing* sebagai wujud komitmen BSI dalam keuangan berkelanjutan.
- » Menjadi Pionir *1<sup>st</sup> Digital Carbon Tracking* pada Bank Syariah, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan emisi secara periodik.
- » 2 Gedung *Green Building* bersertifikasi "*Gold Certified*", mendukung operasional ramah lingkungan di Landmark BSI Aceh dan BSI Tower Jakarta.
- » Pemasangan 8 Panel Surya untuk mendukung pengurangan emisi dari operasional kantor, dan 3 Panel Surya di Desa Binaan BSI.
- » Penggunaan 145 Kendaraan Listrik, memperkuat komitmen transisi energi bersih dalam operasional.
- » Total Nilai Penyaluran UPZ BSI, Zakat, Infak, Dana Sosial, dan Wakaf mencapai 400 miliar, memperluas dampak sosial bagi masyarakat.
- » 41% Pegawai Perempuan, sebagai wujud komitmen BSI terhadap inklusivitas dan kesetaraan gender.
- » Pemasangan 70 unit *Recycle Bottle Vending Machine* di Jabodetabek & Bali, mendukung gaya hidup berkelanjutan dan edukasi lingkungan.
- » Menandatangani *Principles for Responsible Banking* (PRB) serta bergabung sebagai anggota United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).
- » Menandatangani MoU terkait Akselerasi Pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan dengan Global Green Growth Institute (GGGI).
- » Menandatangani MoU terkait Inisiasi Efisiensi Energi dengan Basel Agency for Sustainable Energy (BASE).
- » Meraih penghargaan pilar sosial dalam kategori "Empower Vulnerable Community" di ajang ESG Now Awards 2025 melalui Implementasi Green Zakat Desa BSI.
- » Meraih 4 penghargaan dari Euromoney Islamic Finance Awards 2025 dalam bidang ESG dan Wealth Management, yakni The World's Best Islamic Bank for ESG, Asia's Best Islamic Bank for ESG, dan Indonesia's Best Islamic Bank for ESG. Selain itu, BSI juga berhasil mendapatkan Indonesia's Best Islamic Bank for Wealth Management.
- » Meraih penghargaan sebagai "Best Mudharabah Sukuk in Southeast Asia 2024" di ajang 18<sup>th</sup> Annual Deal & Solution and ESG Award yang dihelat di Malaysia.
- » Mencatat peningkatan signifikan Bloomberg ESG Score dari 3,9 pada tahun sebelumnya menjadi 5,6, yang mengantarkan Perseroan meraih peringkat 1 sebagai Global Islamic Bank.
- » Pelaksanaan *Climate Risk Stress Test* terhadap 100% portofolio.
- » Peluncuran *Green Zakat Framework*.
- » Pembentukan *Working Group* ESG ASBISINDO.
- » Peluncuran *ESG Landing Page*.
- » Penerbitan *Sustainability* Sukuk Tahap II sebesar Rp5 triliun.

## PENCAPAIAN PENTING



### Keanggotaan dan Advokasi

BSI menjadi anggota UNEP FI Signatory

BSI menjadi Anggota ESG Working Group Perbanas

BSI menjadi Ketua ESG Working Group Asbisindo

ESG BSI menjadi Narasumber dalam berbagai forum

### Penghargaan

**Euromoney Islamic Finance Awards 2025**

- The World's Best Islamic Bank for ESG
- Asia's Best Islamic Bank for ESG
- Indonesia's Best Islamic Bank for ESG

#### REPUBLIKA

**ESG Now Awards 2025-Republika:**  
Category: Empower Vulnerable Community.

---

**Katadata Green Initiative Awards 2025:**  
Environmental Zakat Management – Green Zakat

---

**BAZNAS Award 2025:**

- Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik BAZNAS RI
- Supporting Partner
- Perusahaan Pembayar Zakat Badan Teladan BAZNAS RI

# PENCAPAIAN PENTING

## Sustainable Banking

- Penguatan fondasi ESG, termasuk penyempurnaan visi keberlanjutan, komitmen, serta aktivitas di seluruh pilar *Sustainable Banking*.
- Pengembangan kebijakan dan prosedur ESG, seperti ESG *Guiding Principle*, SPO Keuangan Berkelanjutan, pemutakhiran *Industry Acceptance Criteria (IAC)*, *Green Sector Classification*.
- Limitasi *brown sektor*, yaitu industri batu bara, industri migas, dan pertambangan migas.
- Pembentukan ESG *Sub-Committee* di bawah Komite Manajemen Risiko.
- ESG *Working Group* di bawah Komite Manajemen Risiko.
- Penyaluran pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp73,92 triliun, terdiri dari Rp58,26 triliun pembiayaan sosial dan Rp15,66 triliun pembiayaan hijau.
- Penerbitan *Sustainability Sukuk* dengan total Rp8 triliun (Tahap 1: Rp3T, Tahap 2: Rp5T), serta penyaluran dengan *Sustainability Sukuk Framework*.
- Penguatan sumber pendanaan berkelanjutan melalui Deposito Wakaf.
- Perluasan pembiayaan *Electric Vehicle (EV)* yang mencapai Rp396 miliar pada 2025.
- Peluncuran ESG Mutual/Maslahat Fund.
- Penguatan infrastruktur ESG internasional melalui kerja sama dengan GGI untuk pengembangan *Sustainability Sukuk Framework*, peningkatan kapasitas, dan dukungan proses menuju *Accredited Entity Green Climate Fund (GCF)*.
- Keanggotaan UNEP FI dan penandatanganan *Principles for Responsible Banking (PRB)* sebagai penguatan komitmen keberlanjutan global.

## Sustainable Operation

- Operasional Ramah Lingkungan:
  - Pengoperasian 2 gedung bersertifikasi *Green Building Gold Certified*, yaitu *Landmark Aceh* dan *BSI Tower, Jakarta*.
  - Penggunaan 8 panel surya pada fasilitas operasional Perseroan untuk mendukung pengurangan emisi dan efisiensi energi. Selain itu, 3 unit panel surya dipasang di Desa Binaan BSI sebagai bagian dari dukungan Perseroan terhadap pengembangan masyarakat dan pemanfaatan energi terbarukan.
  - Implementasi pengolahan air (*water treatment / Water Station RO*) di beberapa lokasi gedung BSI, termasuk RO Bandung & RO Surabaya.
  - Penggunaan 100% lampu LED yang hemat energi di seluruh jaringan kantor.
  - Penggunaan teknologi *inverter & refrigerant volume (VRF)* pada sistem pendingin ruangan.
  - Pemanfaatan 145 unit kendaraan listrik (EV) sebagai armada operasional ramah lingkungan.
  - Kolaborasi SPKLU BSI x PLN.
  - Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada lokasi operasional tertentu.
- Digital *Carbon Tracking*.
- Green Initiatives*
  - 1 *Home 1 Tree*, penanaman pohon untuk setiap pembiayaan rumah.
  - Water Station RO Bandung & Surabaya.
  - Kartu Syariah Ramah Lingkungan.
- Green Business Culture (GBC)*
  - Vol. 1 – Webinar *Green Business Culture*
  - Vol. 2 – ESG *Refreshment Module* (KPI seluruh pegawai)
  - Vol. 3 – *Knowledge Sharing Forum: ESG Guiding Principle*
  - Vol. 4 – *Training ISO 26000*
  - Vol. 5 - Sustainability Mastery IFRS S1 & S2
  - Podcast GBC bertema ESG & *Operational Excellence*
  - Green Ramadhan Campaign*
- Penguatan Keamanan Informasi
  - Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
  - Cyber Security Scorecard* BSI meraih predikat "A", menunjukkan ketahanan keamanan digital yang kuat.
- Penyempurnaan fitur berkelanjutan pada SuperApp BYOND by BSI.

## Sustainable Beyond Banking

- Jumlah Agen BSI meningkat sebesar 6,39% dibandingkan tahun 2024.
- Distribusi ZISWAF pada tahun 2025 memberikan manfaat bagi lebih dari 1,2 juta orang, melalui program-program di berbagai pilar:
  - Pilar Ekonomi: 591.100 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp26,4 miliar.
  - Pilar Pendidikan: 23.000 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp14,8 miliar.
  - Pilar Kemanusiaan: 599.100 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp148,8 miliar.
  - Pilar Kesehatan: 27.300 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp11,8 miliar.
  - Pilar Dakwah & Advokasi: 45.900 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp38,2 miliar.
- Pada 2025, BSI meluncurkan *Green Zakat Framework*, menjadikan BSI sebagai pionir dalam pengelolaan zakat yang selaras dengan tujuan lingkungan (*environmental impact*).



# 01

## TENTANG LAPORAN

[GRI 2-2, 2-3, 2-4] [S2.MT.II]

Laporan ini merupakan wujud amanah Perseroan dalam menghadirkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap pengungkapan mencerminkan tanggung jawab kami dalam menciptakan nilai dan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Melalui transparansi, kami menapaki perjalanan keberlanjutan dengan integritas.



## TENTANG LAPORAN

Laporan Keberlanjutan BSI tahun 2025 disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Penyusunan laporan ini juga mengikuti Consolidated GRI Standards 2021, GRI G4 Sector Disclosures Financial Services, International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan S2, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), serta Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards.

Laporan Keberlanjutan BSI tahun 2025 memuat data dan informasi yang bersumber dari kantor pusat di Jakarta serta seluruh jaringan kantor yang tersebar di Indonesia. BSI tidak memiliki entitas anak sehingga laporan ini hanya mencakup entitas BSI sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.

Laporan ini diterbitkan secara tahunan bersamaan dengan publikasi Laporan Tahunan Bank. Periode pelaporan yang dicakup adalah 1 Januari hingga 31 Desember 2025, selaras dengan periode Laporan Keuangan BSI. Tidak terdapat penyajian ulang informasi pada laporan ini. Laporan dipublikasikan pada 26 Maret 2026.

Untuk memperoleh informasi tambahan terkait laporan ini, para pemangku kepentingan dapat menghubungi kontak berikut:

### Muhammad Syukron Habiby

Senior Vice President  
Environmental Social & Governance Group



### PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

#### Kantor Pusat

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930  
Telepon : +62 21 30405999  
Fax : +62 21 30421888  
Email : [esg.group@bankbsi.co.id](mailto:esg.group@bankbsi.co.id)

# PROSES PENENTUAN TOPIK MATERIAL

[GRI 3-1, 3-2]

Berdasarkan rangkaian proses identifikasi, evaluasi, dan penelaahan yang dilakukan oleh Manajemen BSI bersama para pemangku kepentingan dan ahli independen, serta telah memperoleh persetujuan Direksi, penetapan topik material BSI terus disempurnakan untuk mencerminkan prioritas keberlanjutan yang relevan. Pada tahun 2024, topik material mencakup Kinerja Ekonomi, Portofolio Produk, dan Privasi Nasabah.

Memasuki tahun 2025, ruang lingkup topik material diperbarui menjadi Kinerja Ekonomi, Portofolio Produk dan Jasa, Dampak Ekonomi Tidak Langsung, Emisi, Penilaian Lingkungan Pemasok (termasuk nasabah), Pelatihan dan Pendidikan, Kesehatan dan Keselamatan Nasabah, serta Pemasaran dan Pelabelan. Perluasan ini mencerminkan peningkatan

komitmen BSI terhadap aspek keberlanjutan, termasuk kehadiran produk syariah unggulan seperti tabungan haji dan *bullion* bank, serta pengembangan layanan Bank Emas, mencakup BSI Emas Digital dan fasilitas jual beli, penitipan, serta pencetakan emas fisik secara aman melalui BYOND. Inisiatif strategis tersebut memperkuat kontribusi BSI terhadap inklusi keuangan, diversifikasi produk berkelanjutan, dan tata kelola transaksi emas yang transparan.

Penetapan topik material BSI tahun 2025 dilakukan melalui tahapan berikut:



Penelaahan isu keberlanjutan (ekonomi, lingkungan, sosial termasuk hak asasi manusia) terhadap aktivitas dan relasi bisnis Bank



Identifikasi dampak aktual dan potensial (ekonomi, lingkungan, sosial termasuk hak asasi manusia) terkait aktivitas dan relasi bisnis Bank







Penilaian signifikansi dampak




















Melakukan prioritas dampak signifikan yang akan dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan

## PROSES PENENTUAN TOPIK MATERIAL

Kategori	Topik Material	Isu Utama	Pemangku Kepentingan yang Terdampak	Alasan Bersifat Material	TPB
Topik Ekonomi	Kinerja Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan oleh BSI</li> <li>Implikasi finansial, risiko, dan peluang yang timbul dari perubahan iklim</li> <li>Kewajiban terkait program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham</li> <li>Pegawai</li> </ul>	Kinerja ekonomi positif BSI pada tahun 2025 merupakan wujud nyata komitmen Bank dalam mengelola aspek ekonomi secara efektif dan konsisten. Oleh karena itu, BSI perlu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.	
	Portofolio Produk dan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase portofolio berdasarkan lini bisnis, wilayah, ukuran, dan sektor</li> <li>Nilai moneter produk dan layanan yang memberikan manfaat sosial pada setiap lini bisnis</li> <li>Nilai moneter produk dan layanan yang memberikan manfaat lingkungan pada setiap lini bisnis</li> <li>Pengembangan <i>Unlocking New Business</i> melalui Bullion Bank; pertumbuhan berkelanjutan pada portofolio pembiayaan dan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham</li> <li>Pegawai</li> <li>Nasabah</li> </ul>	Portofolio produk mencerminkan komitmen BSI dalam memajukan keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2025, BSI meningkatkan dampak positif bagi pemangku kepentingan melalui penerbitan <i>Sustainability Sukuk</i> yang dialokasikan untuk kegiatan berorientasi keberlanjutan. Portofolio ini berperan strategis dalam mendukung kinerja keuangan, pertumbuhan bisnis, serta perluasan pembiayaan berkelanjutan.	
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi terhadap dampak sosial dan lingkungan melalui proyek yang dibiayai <i>Sustainability Sukuk</i></li> <li>Nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pemberdayaan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekosistem</li> <li>Dukungan terhadap ketahanan UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal</li> <li>Perluasan inklusi keuangan melalui layanan syariah yang mudah diakses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat</li> <li>Nasabah</li> </ul>	Mendukung pembangunan sosial-ekonomi serta menciptakan dampak keberlanjutan jangka panjang.	
Topik Lingkungan	Emisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran dan pengelolaan emisi Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 (<i>financed emissions</i>)</li> <li>Inisiatif pengurangan emisi pada operasional (kendaraan listrik, panel surya, <i>green building</i>, dll.)</li> <li>Perencanaan transisi iklim selaras target <i>Net Zero</i> nasional</li> <li>Identifikasi sektor beremisi tinggi dalam portofolio pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingkungan</li> <li>Masyarakat</li> </ul>	Penting untuk mengelola risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan memastikan kepatuhan pada regulasi.	

## PROSES PENENTUAN TOPIK MATERIAL

Kategori	Topik Material	Isu Utama	Pemangku Kepentingan yang Terdampak	Alasan Bersifat Material	TPB
Topik Lingkungan	Penilaian Lingkungan Pemasok (termasuk nasabah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian lingkungan terhadap pemasok dan nasabah korporasi berdampak tinggi</li> <li>Integrasi risiko ESG dan iklim dalam proses pengadaan dan pembiayaan</li> <li>Pemantauan kepatuhan terhadap standar dan regulasi lingkungan</li> <li>Penilaian risiko keberlanjutan dalam rantai nilai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitra Kerja / Pemasok</li> </ul>	Mengurangi risiko lingkungan dalam rantai nilai serta memperkuat kepatuhan terhadap aspek ESG.	 
Topik Sosial	Pelatihan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan ESG sebagai bagian dari KPI pegawai dan pengembangan kompetensi</li> <li>Penguatan kesadaran internal melalui program <i>Green Business Culture</i></li> <li>Pelatihan wajib bagi organ tata kelola terkait keuangan berkelanjutan dan risiko iklim</li> <li>Pengembangan kapabilitas untuk mendukung implementasi ESG di seluruh Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai</li> <li>Nasabah</li> </ul>	Kapabilitas ESG menjadi kunci dalam mendukung strategi keberlanjutan dan proses pengambilan keputusan.	  
	Kesehatan dan Keselamatan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan keamanan produk dan layanan melalui tata kelola produk yang bertanggung jawab</li> <li>Perlindungan data nasabah, keamanan transaksi, dan keandalan operasional</li> <li>Transparansi atas risiko dan fitur produk</li> <li>Pemantauan dan penanganan keluhan terkait keselamatan produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasabah</li> <li>Regulator</li> </ul>	Melindungi keselamatan nasabah dan meminimalkan risiko operasional.	  
	Pemasaran dan Pelabelan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan terhadap akurasi, kewajaran, dan regulasi dalam pemasaran produk</li> <li>Pencegahan klaim menyesatkan, terutama untuk produk berkelanjutan</li> <li>Pelabelan produk yang jelas terkait fitur, risiko, dan kesesuaian syariah</li> <li>Penguatan kepercayaan melalui standar komunikasi yang transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasabah</li> <li>Regulator</li> <li>Investor</li> </ul>	Pengungkapan yang akurat mencegah informasi menyesatkan dan menjaga integritas produk.	 
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan dan pengelolaan pemberdayaan Masyarakat</li> <li>Pembentukan dan Pengelolaan organisasi kelembagaan</li> <li>Pelatihan produk dan pemasaran</li> <li>Pelatihan dan pengelolaan unsur lingkungan dalam menjalankan pemberdayaan</li> <li>Pelatihan keuangan untuk masyarakat</li> <li>Penguatan spiritual melalui kegiatan keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima Manfaat</li> <li>Masyarakat</li> </ul>	Mengurangi angka kemiskinan absolut dan kesenjangan.	      	

# PENGELOLAAN TOPIK MATERIAL

[GRI 3-3]

Dalam mengelola setiap topik material, BSI mengidentifikasi dampak aktual dan potensial, baik positif maupun negatif, yang timbul dari aktivitas operasional dan hubungan bisnis, termasuk dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, sosial, serta hak asasi manusia. BSI menetapkan kebijakan dan tindakan untuk mencegah serta memitigasi dampak negatif, menangani dampak aktual melalui mekanisme remedi, serta mengoptimalkan dampak positif. Pelibatan pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan, dilakukan melalui saluran komunikasi yang aman, bermakna, dan memastikan partisipasi gender yang setara. Jika terdapat dampak pada komunitas lokal, BSI menyediakan mekanisme remedi yang mencakup konsultasi dan penanganan kehilangan aset atau penghidupan.

Efektivitas pengelolaan dipantau melalui indikator kinerja, target, dan evaluasi berkala yang disusun dalam rencana kerja tahunan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), serta diperkuat oleh umpan balik dari pemangku kepentingan. Pendekatan ini diuraikan lebih lanjut pada masing-masing topik material berikut:

## TOPIK EKONOMI

### Kinerja Ekonomi

BSI terus memperkuat pengelolaan kinerja ekonomi melalui implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun secara adaptif terhadap dinamika industri dan arah strategi jangka panjang. Penguatan ini ditopang oleh fokus BSI dalam menjaga profitabilitas, kualitas aset, serta pengembangan portofolio yang berkelanjutan. Pengelolaan kinerja ekonomi yang efektif diharapkan dapat mempertahankan tingkat kepercayaan pemegang saham serta mendukung daya saing BSI di industri perbankan syariah.

Evaluasi kinerja ekonomi dilakukan dengan memonitor realisasi indikator utama dibandingkan target RBB tahun 2025. Proses ini dikoordinasikan oleh Strategic Planning & Performance Management Group yang menjalankan fungsi

perencanaan, pemantauan, dan pengendalian kinerja secara terintegrasi.

### Portofolio Produk dan Jasa

BSI terus memperkuat penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di seluruh portofolio produk dan jasanya. Pengembangan produk berkelanjutan dilakukan melalui hadirnya BSI Deposito Wakaf, yang memberi peluang bagi nasabah untuk berinvestasi sambil menyalurkan manfaat wakaf sebagai amal *jariah*. Selain itu, pengembangan Bank Emas, yang mencakup layanan jual beli emas, penyimpanan emas digital, serta fasilitas cetak emas fisik melalui BYOND, menjadi bagian dari inovasi BSI untuk meningkatkan literasi dan akses masyarakat terhadap instrumen emas yang aman, modern, dan transparan.

Dalam mendukung inklusi dan keberlanjutan, BSI menyalurkan pembiayaan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Pada tahun 2025, pembiayaan kepada sektor UMKM mencapai Rp52,6 triliun, sementara pembiayaan pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) mencapai Rp73,92 triliun, yang secara nyata mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan aktivitas usaha berkelanjutan.

Komitmen BSI terhadap pembiayaan UMKM dan kegiatan berkelanjutan tercermin dalam RAKB, yang ditinjau setiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas jangka pendek satu tahun dan rencana jangka menengah lima tahun. Pada 2025, BSI kembali menerbitkan *Sustainability Sukuk* yang ditujukan untuk mendukung proyek-proyek berorientasi keberlanjutan. Instrumen ini kembali mendapatkan respons positif dari pasar, dengan tingkat *oversubscribe* mencapai 4,4 kali.

### Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan akses inklusi keuangan. Sepanjang 2025, BSI memperluas

## PENGELOLAAN TOPIK MATERIAL

pembiayaan sosial mencapai Rp58,26 triliun serta meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebesar Rp15,66 triliun melalui sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pembiayaan rumah terjangkau.

Ekosistem pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui Program Desa BSI, Sentra UMKM BSI, portal UMKM, dan Salam Digital yang memudahkan pelaku usaha mikro mengakses pembiayaan syariah secara digital. Di sisi distribusi layanan, perluasan BSI Agen menjangkau 176 kabupaten *blank spot* dengan jumlah agen mencapai 3.063, menyediakan akses layanan keuangan dasar bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani.

Melalui TJSL bersama BSI Maslahat, termasuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan sosial kemasyarakatan, BSI memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan ekonomi lokal.

### TOPIK LINGKUNGAN

#### Emisi

Pada 2025, BSI memperkuat kinerja pengelolaan emisi melalui penerapan penuh *Digital Carbon Tracking*, yang mencatat emisi GRK bank *wide* dari seluruh jaringan kantor.

Upaya penurunan emisi dilakukan melalui peningkatan efisiensi energi, penggunaan solar panel di lima lokasi, pemanfaatan 100% lampu LED, perluasan armada *electric vehicle*, pembangunan *green building* tersertifikasi, serta pengoperasian *water station* RO yang mengurangi sampah botol plastik dan jejak karbon. Inisiatif-inisiatif berkelanjutan ini memperkuat komitmen BSI menuju target *Net Zero Emission* dan sejalan dengan standar internasional seperti *Greenhouse Gas (GHG) Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* dan *Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)*.



tahun 2025, pembiayaan sosial mencapai

**Rp58,26** triliun

pembiayaan pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) mencapai

**Rp73,92** triliun

#### Penilaian Lingkungan terhadap Pemasok dan Nasabah

Dalam rangka memastikan bahwa rantai pasok dan pembiayaan BSI berjalan secara bertanggung jawab, BSI menerapkan *ESG screening* bagi pemasok dan nasabah berisiko tinggi. Proses pengadaan mensyaratkan pemasok memenuhi ketentuan lingkungan, tidak menggunakan tenaga kerja anak atau paksa, dan mengikuti standar K3.

Pada sisi pembiayaan, BSI memperkuat penilaian risiko lingkungan dan sosial melalui penilaian kelayakan pembiayaan, serta penerapan prinsip kehati-hatian untuk sektor berisiko tinggi. BSI juga menerapkan *exclusion list* internal serta mengikuti pedoman KUBL/KUBS OJK dalam menyalurkan pembiayaan berkelanjutan.

Sepanjang 2025, BSI tidak menemukan pemasok atau mitra pembiayaan yang menimbulkan dampak lingkungan signifikan, mencerminkan efektivitas proses seleksi dan pengawasan yang diterapkan.

## PENGELOLAAN TOPIK MATERIAL

### TOPIK SOSIAL

#### Pelatihan dan Pendidikan

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas SDM, BSI menerapkan pengembangan kompetensi berbasis *experience-engagement-education*, didukung platform digital *Learning Management System* (LMS). Sepanjang 2025, BSI melaksanakan program pengembangan kepemimpinan, pelatihan teknis IT, risiko, operasional, serta integrasi modul ESG sesuai arah RAKB 2025.

Perseroan memperkuat budaya bisnis berkelanjutan melalui program komunikasi internal bEbku (Belajar ESG Bareng Aku) yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapabilitas ESG di seluruh organisasi. Sepanjang tahun pelaporan, Perseroan menyelenggarakan berbagai sesi pembelajaran, antara lain *Green Business Culture* yang diikuti oleh 3.947 pegawai, *ESG Refreshment* dengan partisipasi 16.166 pegawai, *ESG Guiding Principle* yang diikuti oleh 882 pegawai, sosialisasi ISO 26000 dengan 33 pegawai, serta program *Sustainability Mastery with IFRS* yang diikuti oleh 19 pegawai. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam membangun pemahaman keberlanjutan yang komprehensif serta memperkuat integrasi prinsip ESG dalam aktivitas operasional dan pengambilan keputusan.

#### Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

BSI memastikan bahwa seluruh produk dan layanan, termasuk pembiayaan berkelanjutan, layanan digital BYOND, dan ESG *Mutual/Maslahat Fund*, telah melalui evaluasi keamanan, kesehatan, dan kepatuhan sebelum diluncurkan. Proses ini dilakukan melalui SPO Produk/Aktivitas Baru (PAB) dan mencakup analisis risiko operasional, teknologi, syariah, serta perlindungan konsumen.

Seluruh produk signifikan (100%) telah dievaluasi dan tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait kesehatan atau keselamatan pelanggan pada tahun 2025. Peningkatan keamanan siber juga dilakukan melalui penerapan ISO/IEC 27001:2022, pemantauan kerentanan TI, serta penguatan sistem perlindungan data pribadi sesuai UU PDP.

#### Pemasaran dan Pelabelan

BSI berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh informasi produk disampaikan secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi. Pada 2025, BSI memperkuat *marketing governance* melalui pemantauan pesan komunikasi, pengawasan materi pemasaran, serta pemastian keselarasan dengan standar periklanan dan prinsip syariah.

Informasi mengenai fitur, risiko, dan manfaat produk disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk *website*, BYOND, media sosial, brosur, BSI Agen, dan kantor cabang. Sepanjang 2025, BSI tidak mencatat insiden ketidakpatuhan terhadap pemasaran produk maupun pelabelan, mencerminkan efektivitas mekanisme kontrol dan transparansi informasi kepada nasabah.

# HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

[OJK E.4] [GRI 2-29, FS5]

Pelibatan pemangku kepentingan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan bisnis BSI. Bank memahami bahwa hubungan yang terkelola dengan baik tidak hanya mendukung kelangsungan operasional, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BSI mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh, ketergantungan, serta tanggung jawab yang dimiliki terhadap aktivitas Bank, sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional Corporate Secretary & Communication Group (CSG).

Proses pelibatan dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme yang telah ditetapkan Bank, di mana setiap kelompok pemangku kepentingan dihubungkan melalui pendekatan yang relevan

dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa masukan, harapan, dan isu-isu yang disampaikan pemangku kepentingan dapat ditangkap secara akurat dan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan program, serta penguatan tata kelola keberlanjutan.

Informasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan topik material BSI. Dengan demikian, keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga bagian integral dari proses pengambilan keputusan strategis dan penetapan prioritas keberlanjutan Bank.

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Metode Pendekatan	Topik Utama
Pemegang saham dan investor	Tanggung jawab dan pengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) satu kali dalam satu tahun</li> <li>Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB), sesuai kebutuhan</li> <li>Publikasi laporan keuangan setiap triwulan</li> <li>Laporan Tahunan, setiap tahun</li> <li>Laporan Keberlanjutan, setiap tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat Kinerja keuangan dan keberlanjutan</li> <li>Menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB</li> <li>Menyusun dan menyajikan laporan</li> <li>Pembagian deviden</li> <li>Publikasi dan keterbukaan informasi</li> <li>Pertemuan investor yang dilaksanakan oleh unit kerja hubungan investor</li> </ol>
Pegawai	Ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana komunikasi internal seperti e-mail dan memo internal</li> <li>Pelaksanaan sesuai kebutuhan</li> <li>Pengembangan diri sesuai dengan jadwal pelatihan</li> <li>Kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja</li> <li>Kegiatan pegawai seperti olahraga dan hobi secara berkala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hubungan industrial yang kondusif</li> <li>Pemenuhan hak pekerja sesuai dengan ketentuan</li> <li>Kesetaraan dalam pengembangan diri, pelatihan, karier</li> <li>Sarana kerja dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja</li> <li>Pembahasan isu keberlanjutan</li> </ol>

## HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Metode Pendekatan	Topik Utama
Pemerintah dan Regulator	Pengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kepatuhan, minimal satu kali setahun</li> <li>Menyerahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Realisasi RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</li> <li>Menyerahkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ke OJK</li> <li>Menyerahkan laporan-laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Frekuensi sesuai regulasi</li> <li>Kerja sama penyelenggaraan acara sesuai kebutuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan pada peraturan</li> <li>Menyusun dan menyampaikan RBB dan RAKB</li> <li>Menyusun dan menyerahkan laporan sesuai regulasi</li> <li>Menjalin komunikasi dengan pemerintah dan regulator</li> <li>Mematuhi hukum yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan kebijakan antikorupsi</li> </ol>
Nasabah	Ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas transaksi perbankan syariah di kantor atau jaringan Bank</li> <li><i>Contact center</i>, baik melalui telepon maupun sarana lain. Frekuensi setiap saat</li> <li>Produk dan layanan perbankan yang mudah, aman dan terpercaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan informasi produk dan layanan</li> <li>Penyediaan sarana penyelesaian kendala/keluhan (<i>contact center 24 jam</i>)</li> <li>Pengembangan jaringan, produk, dan layanan perbankan yang aman, nyaman, dan terpercaya</li> <li>Penerapan kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i></li> <li>Implementasi kebijakan keamanan data nasabah</li> <li>Melaksanakan survei kepuasan pelanggan</li> </ol>
Mitra Kerja/ Pemasok Lokal	Ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak pengadaan barang dan jasa</li> <li>Penilaian mitra kerja secara transparan</li> <li>Penandatanganan pakta integritas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme proses pengadaan yang adil dan transparan</li> <li>Tidak ada pungutan biaya dan konflik kepentingan dalam proses pengadaan</li> <li>Menjalankan sistem manajemen anti penyuapan</li> </ol>
Industri Sejenis	Pengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi perkembangan, peluang dan tantangan industri perbankan syariah</li> <li>Informasi regulasi terkait industri, khususnya perbankan syariah</li> <li>Pertemuan secara periodik dengan asosiasi industri perbankan dan perbankan syariah, serta asosiasi profesi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemudahan <i>update</i> perkembangan industri melalui keanggotaan asosiasi industri dan profesional</li> <li>Kerja sama dalam peningkatan kapabilitas dan daya saing</li> <li>Mendukung pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat</li> </ol>
Masyarakat dan Lingkungan	Pengaruh, Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai rencana</li> <li>Dukungan dalam program peningkatan kesejahteraan</li> <li>Kemudahan akses pada layanan perbankan</li> <li>Kerja sama dengan mitra penyalur ZIS dalam kegiatan TJSL setiap tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan hubungan yang harmonis dengan masyarakat</li> <li>Pengembangan dan implementasi program TJSL untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.</li> <li>Melestarikan lingkungan</li> <li>Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan Bank</li> <li>Melaksanakan program literasi keuangan</li> <li>Meningkatkan pembiayaan KKUB</li> </ol>

# 02

## STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan kami berakar pada nilai amanah dan prinsip maslahat bagi seluruh pemangku kepentingan. Setiap langkah dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Dengan landasan nilai tersebut, kami membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.



# PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

[OJK A.1, FSI] [GRI 2-22] [IFRS S1-STRATEGY, IFRS S2-STRATEGY, IFRS S1-METRIC AND TARGET, IFRS S2-METRIC AND TARGET, IFRS S1-RISK MANAGEMENT, IFRS S2-RISK MANAGEMENT]



Keberlanjutan merupakan bagian penting dari tujuan BSI. Sebagai bank syariah, BSI memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan menciptakan manfaat sosial bagi generasi mendatang, sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah yang mencakup Hifdz Ad-Din (menjaga agama), Hifdz An-Nafs (menjaga jiwa), Hifdz Al-'Aql (menjaga akal), Hifdz Al-Maal (menjaga harta), Hifdz An-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifdz Al-Bi'ah (menjaga lingkungan). Nilai dasar ini menjadi landasan BSI dalam merumuskan strategi dan praktik keberlanjutan di seluruh aktivitas usaha.

Sebagai wujud komitmen, BSI terus memperkuat struktur tata kelola keberlanjutan, termasuk pembentukan Environmental Social & Governance (ESG) Group di bawah supervisi Wakil Direktur Utama melalui Surat Keputusan Direksi No.04/239-KEP/DIR, serta penetapan ESG Working Group di bawah Risk Management Committee. Penguatan tata kelola juga diwujudkan melalui penyusunan dan penerbitan Standar Prosedur Operasional (SPO) Keuangan Berkelanjutan dan ESG *Guiding Principles* sebagai pedoman utama penerapan keberlanjutan di seluruh unit kerja.

Selaras dengan visi "*The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance*," BSI mengembangkan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar utama: *Sustainable Banking*, *Sustainable Operation*, dan *Sustainable Beyond Banking*. Dalam pilar *Sustainable Banking*, BSI berkomitmen menjadi *leader in sustainable product innovation*. Pada pilar *Sustainable Operation*, BSI menetapkan target mencapai *net zero emission in operation*. Sementara pada pilar *Sustainable Beyond Banking*, BSI berfokus untuk menjadi *leader in the ZISWAF ecosystem* guna memberikan dampak sosial yang berkontribusi pada pencapaian SDGs.

Menguatkan langkah yang telah dimulai pada 2024, pada tahun 2025 BSI mencapai tonggak penting dengan menandatangani *Principles for Responsible Banking* (PRB) serta bergabung sebagai anggota *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI). Keanggotaan dan komitmen global ini memperkuat posisi BSI dalam penerapan standar keberlanjutan internasional sebagaimana diarahkan dalam POJK No. 51/2017, sekaligus mempertegas peran BSI dalam mendukung agenda keberlanjutan global, SDGs, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif.



## PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

## The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance

## SUSTAINABLE BANKING

## Unique in Sustainable Product Innovation

1. Integrating ESG Aspect in Business Process (ESG Framework, Risk Management & Policy)
2. Develop Sustainable Product
3. Portfolio Management (Focus sector and portfolio development)



## SUSTAINABLE OPERATION

## Net Zero Emission in Operation

4. Achieving NZE in Operations (Carbon Tracking, Green Business Culture)
5. Digital Transformation
6. Proactive Strategy on Data Privacy & Security



## SUSTAINABLE BEYOND BANKING

## Leader in ZISWAF Ecosystem for Social Impact to Achieve SDGs

7. Financial Inclusion
8. Distribution of ZISWAF



## Strengthening ESG Governance, Capacity Development, Collaboration, &amp; Disclosure

*Hifdz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (memelihara akal), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta), *Hifdz An-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifdz Al-Biah* (memelihara lingkungan)

BSI telah merumuskan *Roadmap* ESG 2021–2025 sebagai panduan dalam mewujudkan Visi dan Misi Keberlanjutan, dengan tujuan memastikan implementasi yang terarah dan berkesinambungan sebagai berikut: [S2.MT.h1, S2.MT.h2, S2.MT.h3]

2021	2022	2023	2024	2025
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> minimal Rp4,36 Triliun</li> <li>2. 5% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 5% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan.</li> <li>3. Tersedianya prosedur <i>sustainable finance</i>.</li> <li>4. Terlaksananya 1 (satu) sub program <i>Eco Lifestyle</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> minimal Rp7 Triliun</li> <li>2. 60% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 10% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>3. Mengikuti <i>Sustainable Banking Assessment</i> (SUSBA)</li> <li>4. Mengikuti indeks Saham SRI KEHATI</li> <li>5. Pemasangan panel surya 2 (dua) titik jaringan kantor dan <i>Reverse Vending Machine</i> dan <i>Plasticpay Collection Point</i> di 50 titik</li> <li>6. Implementasi E-DOC BSI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> minimal Rp10,7 Triliun</li> <li>2. 70% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 20% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>3. Instalasi panel surya 1 (satu) kantor cabang, <i>plasticpay</i> untuk 27 titik, penanaman pohon dan <i>green activity</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> tumbuh sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB)</li> <li>2. Penerbitan Sukuk Subordinasi Rp5-7,5 Triliun untuk modal Tier 2</li> <li>3. 80% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 40% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>4. ESG Risk Rating</li> <li>5. Carbon Tracking</li> <li>6. Green Campaign/ Eco Lifestyle (Green Building, Charging Station, Electric Vehicle, Green Culture, Penanaman Pohon)</li> <li>7. Aktivitas TJSL/CSR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> tumbuh sesuai RBB</li> <li>2. Reporting sukuk subordinasi atau <i>sustainability</i> sukuk</li> <li>3. 90% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 60% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>4. ESG Risk Rating</li> <li>5. Carbon Tracking</li> <li>6. Green Campaign/ Eco Lifestyle</li> <li>7. Aktivitas TJSL/CSR</li> </ol>

## PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

BSI juga telah menetapkan berbagai program dalam RAKB yang mencakup rencana jangka menengah selama 5 (lima) tahun, yaitu periode 2021–2025.

## Target Jangka Panjang BSI Tahun 2021-2025

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2021	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Portofolio UMKM</li> <li>» Portofolio <i>Green Financing</i>/Portofolio Hijau Non UMKM (segmen <i>wholesale</i>)</li> </ul>	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Outstanding</i> (OS) UMKM pada Desember 2021 minimal Rp36,42 triliun</li> <li>» OS Portofolio Hijau Non UMKM pada Desember 2021 minimal Rp4,36 triliun</li> </ul>
	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>» Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</li> <li>» Penyusunan E-Modul dan <i>Digital Learning</i> Sosialisasi keuangan berkelanjutan untuk Unit Bisnis dan <i>Support</i>.</li> </ul>	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 5% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>» 5% pegawai unit bisnis dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> <li>» Tersedianya E-Modul dan <i>Digital Learning</i> Sosialisasi keuangan berkelanjutan untuk Unit Bisnis dan <i>Support</i>.</li> </ul>
	<b>C. Peningkatan Tata Kelola Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO)/Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sustainable Finance</b>	<b>C. Peningkatan Tata Kelola Tersedianya SPO/PTO Sustainable Finance</b>
	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Menciptakan " <i>Eco Lifestyle</i> " dalam lingkungan kantor	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Terlaksananya 1 (satu) sub program " <i>Eco Lifestyle</i> "
	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan di aspek <i>socio-economic</i> , <i>spiritual</i> , <i>people</i> dan <i>environment</i>	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Socio-economic</i>: program pemberdayaan masyarakat berbasis desa (<i>ex-legacy bank</i>) di 14 desa</li> <li>» <i>Spiritual</i>: <i>re-branding</i> Mobil Musholla <i>ex-BSM</i> menjadi <i>branding</i> BSI. Penambahan 1 (unit) Mobil <i>Ambulance</i></li> <li>» <i>People</i>: lanjutan program <i>Islamic Sociopreneur Development Program</i> (ISDP) &amp; pengadaan <i>Test Swab/PCR/Genose/Vaksin</i> bagi masyarakat</li> <li>» <i>Environment</i>: 3 (tiga) kali dalam setahun melakukan <i>Green Campaign</i></li> </ul>
	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Portofolio UMKM</li> <li>» Portofolio Hijau Non UMKM</li> <li>» Rasio Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan</li> </ul>	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» OS UMKM pada Desember 2022 minimal Rp44,8 triliun</li> <li>» OS Portofolio Hijau Non UMKM pada Desember 2022 minimal Rp7 triliun</li> <li>» Rasio Pembiayaan Berkelanjutan terhadap Total Pembiayaan minimal 22%</li> </ul>
<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i> untuk segenap pegawai</li> <li>» Pelatihan <i>Green Financing</i> dan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Minimal 60% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>» Minimal 10% pegawai unit bisnis mengikuti pelatihan <i>Green Financing</i> dan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	

## PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	<p><b>A. Peningkatan Tata Kelola</b> <i>Updating</i> Ketentuan PTO <i>Sustainable Finance</i></p>	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Updating</i> &amp; penyesuaian Kebijakan Pembiayaan pro Keuangan Berkelanjutan (penambahan terkait Risiko Lingkungan, Sosial, Tata Kelola/Iklim)</li> <li>» Penyempurnaan SPO &amp; PTO terkait Keuangan Berkelanjutan</li> <li>» Penyampaian kinerja keuangan berkelanjutan di <i>publicexpose</i> triwulanan</li> </ul>
	<p><b>Aktivitas Pendukung</b></p> <p><b>A. Green Campaign</b> <b>Efisiensi – Go</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pemasangan Panel Surya</li> <li>» Pemasangan <i>Reverse Vending Machine</i> dan <i>Plasticpay Collection Point</i></li> <li>» E-Doc BSI (digitalisasi korespondensi berbasis web) untuk pengurangan penggunaan kertas di Unit Kerja Kantor Pusat dan <i>Outlet</i></li> </ul>	<p><b>Aktivitas Pendukung</b></p> <p><b>A. Green Campaign</b> <b>Efisiensi – Go Green</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pemasangan Panel Surya di 2 (dua) titik lokasi Jaringan Kantor</li> <li>» Pemasangan <i>Reverse Vending Machine</i> dan <i>Plasticpay Collection Point</i> di 50 titik lokasi seluruh Indonesia</li> <li>» E-Doc BSI (digitalisasi korespondensi berbasis web) untuk pengurangan penggunaan kertas di Unit Kerja Kantor Pusat dan <i>Outlet</i> sudah <i>pilot project</i> di Q1</li> </ul>
	<p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan pada aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i></p>	<p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> <b>Socio-economic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Penambahan Desa BSI minimal 5 desa</li> </ul> <p><b>Spiritual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Penyelesaian pembangunan Masjid BSI Bakauheni</li> <li>» Lanjutan <i>Rebranding</i> dan <i>Maintenance</i> Masjid</li> <li>» Tebar Hewan Qurban pada Momen Idul Adha 1443 H</li> </ul> <p><b>People</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Lanjutan implementasi program “BSI <i>Scholarship</i>”</li> <li>» <i>Launching</i> program “BSI <i>Entrepreneurship 2022</i> (ISDP)”</li> </ul> <p><b>Environment</b> Penanaman pohon di daerah rawan bencana (Banten, Jawa Barat, &amp; Kalimantan Barat) dengan total 1000 pohon</p> <p><b>Charity</b> Pemberian donasi yang bersifat <i>socio business</i> Penyaluran dan pendistribusian TJSL direncanakan penyaluran &amp; pendistribusian TJSL tahun 2021 melalui BAZNAS dan LAZNAS BSI MASLAHAT dengan menggunakan sumber dana sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Dana Zakat: 2,5% dari laba tahun 2021 (EBT) – RKAT BAZNAS</li> <li>» Dana Sosial / TBDSP: + Rp 32 Miliar – RAKB OJK</li> </ul>
2023	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pembiayaan UMKM</li> <li>» <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>)</li> </ul> <p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>» Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	<p><b>B. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» OS UMKM pada Desember 2023 minimal Rp50,15 triliun</li> <li>» OS Portofolio Hijau Non UMKM pada Desember 22 minimal Rp10,7 triliun</li> <li>» Rasio Pembiayaan berkelanjutan terhadap Total pembiayaan 23%</li> </ul> <p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Minimal 70% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>» Minimal 20% pegawai unit bisnis &amp; rekanan (<i>developer/ nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>

## PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Penyempurnaan Sistem informasi debitur yang pro <i>Sustainable Finance</i></p>	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Penyusunan Ketentuan Internal sebagai antisipasi terbitnya POJK tentang Taksonomi Hijau Indonesia di tahun 2023</li> <li>» Menyelenggarakan FGD/workshop terkait kebijakan sektoral berdasarkan pemetaan risiko tinggi <i>environmental</i> dan <i>social</i> di tingkat portofolio. Secara lengkap (referensi: SUSBA Sector)</li> <li>» Menyampaikan permohonan <i>assessment Sustainable Banking Assessment</i> (SUSBA) untuk 8 (delapan) bank di setiap negara.</li> <li>» Penyampaian kinerja keuangan berkelanjutan di <i>publicexpose</i> Triwulanan.</li> </ul>
	<p><b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Menciptakan “<i>Eco Lifestyle</i>” dalam lingkungan kantor</p>	<p><b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Instalasi panel surya di 1 kantor Jaringan (Kantor Cabang Mataram) carry over dari 2022.</li> <li>» Penambahan mesin RVM minimal 27 titik di seluruh Indonesia</li> <li>» Penyampaian inisiasi Program “penanaman pohon untuk nasabah griya dan pegawai BSI”, total 5.000 pohon</li> <li>» Penyampaian inisiasi menu green activity dalam BSI Mobile</li> <li>» Lanjutan Implementasi E-Doc di kantor pusat &amp; Outlet</li> </ul>
	<p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan di aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i></p>	<p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> <b>Socio-economic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Penambahan Desa BSI minimal 5 (lima) lokasi</li> </ul> <p><b>Spiritual</b> Maintenance dan Optimalisasi Masjid BSI Tebar Hewan Qurban pada Momen Idul Adha 1443 H</p> <p><b>People</b> Lanjutan implementasi program “BSI Scholarship” (1.000 peserta)</p> <p><b>Environment</b> Pengadaan 1 <i>Electric Vehicle Charging</i> di Masjid BSI</p> <p><b>Charity</b> Pemberian donasi <i>Socio Business</i> Rp6 miliar.</p>
2024	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pembiayaan UMKM</li> <li>» <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>)</li> <li>» Pendanaan dengan Sukuk Berkelanjutan</li> </ul>	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pembiayaan UMKM pada Desember 2024, minimal mencapai Rp54,19 Triliun</li> <li>» <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>), pada Desember 2024 minimal mencapai Rp13 Triliun</li> <li>» Rasio Pembiayaan berkelanjutan terhadap Total pembiayaan 24%</li> <li>» Penerbitan <i>Sustainability</i> Sukuk.</li> </ul>
	<p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>» Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	<p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Minimal 80% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>» Minimal 30% pegawai unit bisnis &amp; rekanan (<i>developer/ nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>

## PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Review Tata Kelola terkait <i>Sustainable Finance</i></p>	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Terlaksananya <i>Review Tata Kelola Sustainable Finance</i> » Update PTOTBDSP » Carbon tracking » ESG Rating</p>
2024	<p><b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Menciptakan "<i>Eco Lifestyle</i>" dalam lingkungan kantor</p> <p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan di aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i></p>	<p><b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Terlaksananya 4 (empat) subprogram "<i>Eco Lifestyle</i>" » <i>Electric Vehicle</i> » Penyediaan <i>charging station</i> » <i>Green Building</i> » Penanaman bibit pohon</p> <p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> » <i>Socio-economic</i>: Optimalisasi Desa BSI dan penambahan minimal 3 (tiga) Desa BSI » <i>Spiritual: maintenance</i> dan pembangunan 1 masjid, pengadaan mobil mushola » <i>People</i>: lanjutan BSI Scholarship » <i>Environment</i>: Optimalisasi program <i>charity</i> dan <i>environment</i>.</p>
2025	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> » Pembiayaan UMKM » <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>) » Menerbitkan Sukuk Subordinasi » <i>Sustainable financing ratio</i></p> <p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> - Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i> - Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</p> <p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Review Tata Kelola terkait <i>Sustainable Finance</i></p> <p><b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Menciptakan "<i>Eco Lifestyle</i>" dalam lingkungan kantor</p> <p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan pada aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i>.</p>	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> » Pembiayaan UMKM tumbuh sesuai target RBB 2025 » <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>) tumbuh sesuai target RBB » Menerbitkan sukuk subordinasi Rp 5-7,5 triliun untuk modal tier 2 » <i>Sustainable financing ratio</i> &gt;25%</p> <p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> » Minimal 90% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i> » Minimal 50% pegawai unit bisnis &amp; rekanan (<i>developer/ nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</p> <p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Review Tata Kelola terkait <i>Sustainable Finance</i> » Mengikuti Sri Kehati Index</p> <p><b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Terlaksananya 4 (empat) subprogram "<i>Eco Lifestyle</i>" » <i>Electric Vehicle</i> » Penyediaan <i>charging station</i> » <i>Green Building</i> » Penanaman 10.000 bibit pohon.</p> <p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> » <i>Socio-economic</i>: Optimalisasi Desa BSI dan penambahan minimal 3 (tiga) Desa BSI » <i>Spiritual: maintenance</i> dan pembangunan 1 (satu) masjid, pengadaan mobil mushola » <i>People</i>: lanjutan BSI Scholarship » <i>Environment</i>: Optimalisasi program <i>charity</i> dan <i>environment</i>.</p>

## PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan rencana jangka panjang BSI, dengan fokus pada sejumlah prioritas keberlanjutan. Prioritas pertama mencakup pengembangan produk dan/atau jasa sesuai KKUB, melalui pembiayaan UMKM, penyaluran *green financing* pada segmen *wholesale*, penerbitan Sukuk Subordinasi, serta peningkatan rasio pembiayaan berkelanjutan.

Prioritas kedua berfokus pada peningkatan kapasitas internal, melalui pelatihan *Sustainable Finance Awareness* serta pelatihan mitigasi risiko lingkungan bagi pegawai dan mitra seperti developer dan nasabah. Selain itu, BSI juga melanjutkan penguatan tata kelola melalui

*Governance Review* terkait implementasi *Sustainable Finance*.

Pada kegiatan pendukung, BSI menjalankan *Green Campaign* untuk membangun budaya "*Eco Lifestyle*" di lingkungan kantor serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program BSI *Integrated Social Action* yang mencakup aspek sosial-ekonomi, spiritual, masyarakat, dan lingkungan.

Pencapaian target keberlanjutan pada tahun 2025 yang tertuang di dalam RAKB adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian Tahun 2025
A. Pengembangan Produk dan/ atau Jasa yang Memenuhi Kriteria KKUB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan hijau tumbuh 10,6%.</li> <li>Portofolio sosial tumbuh 11,1%.</li> <li>Jumlah pembiayaan berkelanjutan tumbuh 11,2%.</li> <li>Penerbitan <i>Sustainability</i> Sukuk sebesar Rp5 triliun untuk penguatan modal <i>Tier 2</i>.</li> <li>Pengembangan produk ESG <i>Mutual Fund</i>.</li> </ul>
B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% pegawai menerima pelatihan <i>Sustainable Finance Awareness</i>.</li> <li>100% Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, telah mengikuti pelatihan <i>Sustainable Finance Awareness</i>.</li> </ul>
C. Peningkatan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran <i>Industry Acceptance Criteria</i> (IAC).</li> <li>Melakukan <i>climate risk stress testing</i> pada 100% portofolio BSI.</li> <li>ESG <i>Risk Rating</i> – Medium Risk.</li> <li>Menerbitkan <i>Impact Report</i> ESG Sukuk.</li> </ul>
Kegiatan Pendukung – A. <i>Green Campaign</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan 12 kali kampanye <i>Signature Campaign - BSI Sustainable Movement</i>.</li> <li>Menyediakan dan mengimplementasikan <i>Digital Carbon Tracking</i>.</li> <li>Menyelesaikan penyusunan <i>Roadmap Net Zero Emission</i> (NZE) sesuai arahan Direksi.</li> <li>Menambah 1 Unit <i>Green Building Gold Certified</i>, yaitu BSI Tower Jakarta.</li> <li>Menambah 24 unit kendaraan listrik (<i>electric vehicle</i>).</li> <li>Menambah 7 unit <i>charging station</i> di BSI Tower dan Area Saharjo-Hasanuddin.</li> <li>Menambah panel surya di 8 Outlet BSI dan 3 Desa Binaan BSI.</li> <li>Menanam 15.000 pohon melalui program 1 <i>Home</i> 1 <i>Tree</i> (BSI Griya).</li> <li>Mengimplementasikan Kartu Syariah Ramah Lingkungan.</li> <li>Menyalurkan beasiswa <i>Sustainability on Campus</i> kepada 8 mahasiswa dari 7 universitas.</li> <li>Menyelenggarakan <i>Green Business Culture</i> sebanyak 19 kali.</li> </ul>
Kegiatan Pendukung – B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menuntaskan asesmen ISO 26000 dan perhitungan SROI pada 3 titik UMKM mustahik dan 3 titik desa binaan BSI.</li> <li>Mengembangkan 3 Desa BSI tambahan, yaitu Desa di Makassar, Labuan Bajo, dan Sabang, Aceh.</li> <li>Meluncurkan Program BSI <i>Scholarship 2025</i>.</li> <li>Melaksanakan optimalisasi distribusi zakat di 10 Kantor Wilayah BSI.</li> <li>Mengimplementasikan <i>Pilot Project Green Zakat</i> di Pulau Sanane, Makassar.</li> </ul>

## PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Desember 2025

Jumlah dan Kualitas Pembiayaan berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Nominal (Dalam Jutaan Rupiah)
a. Energi terbarukan	710
b. Efisiensi Energi	-
c. Pencegahan dan pengendalian Polusi	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	5.777
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	948
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	91
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-
i. Produk yang dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-Efficient</i> )	6.442
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	101
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	1.588
l. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial	58.265

### STRATEGI DALAM PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG TERKAIT KEBERLANJUTAN

[IFRS S1-STRATEGY, IFRS S2-STRATEGY, IFRS S1-METRIC AND TARGET, IFRS S2-METRIC AND TARGET, IFRS S1-RISK MANAGEMENT, IFRS S2-RISK MANAGEMENT] [GRI 201-2]

Dalam menetapkan arah strategisnya, BSI turut memperhitungkan berbagai risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim. Pengelolaan risiko iklim diintegrasikan ke dalam sistem manajemen risiko Bank, dimulai dari proses identifikasi risiko dan peluang iklim, dilanjutkan dengan pengukuran menggunakan metrik untuk risiko fisik maupun transisi. BSI kemudian menilai potensi dampaknya terhadap kondisi finansial, serta melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mengelola konsekuensi dari risiko iklim tersebut. Risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk aspek perubahan iklim serta pengaruhnya terhadap model bisnis, rantai nilai, strategi, dan posisi keuangan pada tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada bagian Memperkuat Tata Kelola BSI pada Risiko dan Peluang Terkait Iklim.

Selain menghadapi berbagai risiko, BSI juga melihat peluang yang lahir dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, seperti meningkatnya kebutuhan pembiayaan hijau, proyek energi terbarukan, pengembangan gedung ramah

lingkungan, serta instrumen pasar modal berkelanjutan seperti *sustainability* sukuk. Peluang ini dapat mendorong pertumbuhan pendapatan pembiayaan dan *fee based income*, sekaligus memperkuat daya saing jangka panjang Bank. Sejalan dengan itu, BSI terus mengembangkan metodologi dan sistem untuk menilai dampak finansial dari risiko dan peluang iklim secara lebih kuantitatif, selaras dengan ketentuan regulator dan standar internasional.

Strategi yang tercantum dalam ESG *Roadmap* dan RAKB disusun berdasarkan identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan tersebut. Untuk mendukung proses ini, BSI telah membentuk ESG *Working Group* pada tahun 2024 di bawah koordinasi Risk Management Committee (RMC). ESG *Working Group* berperan memberikan dukungan analitis dan rekomendasi kepada RMC dalam merumuskan berbagai usulan kebijakan yang kemudian dibahas dan diputuskan dalam rapat komite.

Sejak penyusunan RAKB dimulai, BSI telah menyesuaikan model bisnis dengan memperkuat pembiayaan UMKM, meningkatkan porsi pembiayaan berkelanjutan, serta menerbitkan *Sustainability* Sukuk. Pengembangan kapasitas internal juga menjadi bagian dari penyesuaian tersebut agar seluruh proses dan SDM selaras dengan arah keberlanjutan Bank.

## POLICY COMMITMENT

[GRI 2-23, GRI 2-24, FS9]

Dalam menjalankan operasionalnya, BSI selalu memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah regulasi nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha BSI antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen berikut segala perubahannya.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
13. Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku berikut segala perubahannya.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
19. *Bye Laws* 2023 tentang Penanganan Penundaan Transaksi Transfer Dana Antar Bank.
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Selain berpedoman pada regulasi nasional, Perseroan juga mengikuti berbagai ketentuan internasional, termasuk *United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights*, *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, serta *International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* yang telah diratifikasi ke dalam peraturan nasional. Perseroan juga merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

## POLICY COMMITMENT

Di samping itu, BSI memastikan bahwa kegiatan operasionalnya sejalan dengan standar internasional, yang tercermin dari perolehan berbagai sertifikasi ISO berikut:

Sertifikasi	Masa Berlaku	
	Sejak	Sampai
ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	24 Maret 2024	23 Maret 2027
ISO 22301:2019 tentang <i>Business Continuity Management System</i>	5 Juni 2023	4 Juni 2026
ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu	4 Februari 2023	3 Februari 2027

Sebagai wujud kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, BSI telah menetapkan sejumlah kebijakan internal yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kebijakan ini memastikan bahwa operasional BSI tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila risiko tersebut muncul.

Kebijakan tersebut dilengkapi dengan pelaksanaan uji tuntas dan penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini juga tercermin dalam Kebijakan Manajemen Risiko BSI, yang menegaskan bahwa setiap transaksi dan aktivitas operasional diawasi serta dikendalikan secara ketat.

Kebijakan internal dan proses uji tuntas yang diterapkan BSI adalah sebagai berikut:

Kebijakan	Uji Tuntas	Penanggung Jawab	Tanggal Terbit Terakhir
Kebijakan Tata Kelola	ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan tersertifikasi pada ruang lingkup <i>Anti Money Laundering &amp; Countering Financing of Terrorism</i>	1. Policy & Procedure Group 2. Compliance Group	7 Juli 2025
Kebijakan Manajemen Risiko	Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko	Enterprise Risk Management Group	9 Desember 2024
Kebijakan Sistem Pengendalian Intern (KSPI)	Pelaksanaan audit	Satuan Unit Kerja Audit	19 September 2025
Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>	Laporan <i>Anti-Fraud</i> yang disampaikan ke OJK pada setiap semester, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ( <i>Anti-Bribery Management System/ ABMS</i> )	IT Fraud & Risk Group	7 Agustus 2025
Kebijakan Dana dan Jasa	Survei kepuasan nasabah	1. Retail Deposit Solution Group 2. Wealth Management Group 3. Institutional Banking Group	23 September 2025
Kebijakan Teknologi Informasi	ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	IT Strategic Planning Group	22 Juli 2024

POLICY COMMITMENT

Kebijakan	Uji Tuntas	Penanggung Jawab	Tanggal Terbit Terakhir
Kebijakan <i>Treasury</i>	Evaluasi berkala	1. Treasury & Global Market Group, 2. International & Financial Institution Group	4 Juli 2025
Kebijakan Hukum, Kepatuhan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM)	ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ( <i>Anti-Bribery Management System/ ABMS</i> )	1. Compliance Group, 2. Legal Group, 3. Anti Money Laundering – Countering Financing of Terrorism (AML - CFT) Group	9 Mei 2025
Kebijakan Pembiayaan	Evaluasi berkala	1. Consumer Business 1 Group 2. Consumer Business 2 Group 3. Card Business Group 4. Gold & Pawning Business Group 5. Small Medium Enterprise (SME) Business Group 6. Micro Business Group 7. Transaction Banking Wholesale 8. Corporate Business 1 Group 9. Corporate Business 2 Group 10. Corporate Business 3 Group 11. Corporate Finance & Accounting Group 12. Commercial Business 1 Group 13. Commercial Business 2 Group 14. Bullion Business Group	5 November 2025
Kebijakan Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak	Evaluasi berkala	Corporate Development Group	23 Mei 2025
Kebijakan <i>Human Capital</i>	<i>Improvement survei Human Capital Policy</i>	Human Capital Strategy & Policy Group	12 Desember 2025
Kebijakan Akuntansi	Pelaksanaan audit	Corporate Finance & Accounting Group	28 Juli 2025
Kebijakan Internal Audit	Pelaksanaan audit internal	Wholesale & Corporate Center Audit Group	29 Agustus 2025
Kebijakan Operasional yang di dalamnya mencakup pengaturan mengenai: a. Prinsip Kehati-hatian b. Pengadaan dan pengelolaan aset c. Layanan dan Kerja sama dengan pihak ketiga d. Pengelolaan Anggaran e. Tata Kelola Kesekretariatan f. Pelindungan Data Pribadi g. Pemenuhan Prinsip Syariah h. Pelindungan dan Pengaduan Nasabah.	Evaluasi berkala	1. Procurement & Fixed Asset Group 2. Customer Care Group 3. Strategic Planning & Performance Management Group 4. Corporate Secretary Group 5. Data Protection Group 6. Enterprise Risk Management Group	28 Agustus 2025

## POLICY COMMITMENT

Dalam hal pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, BSI telah menerapkan PTO terkait Pedoman Saling Menghargai Sesama Pegawai di Lingkungan Kerja (RWP). Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh insan BSI untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan, serta membangun budaya kerja yang inklusif, menghargai keberagaman dan kesetaraan, termasuk bagi pegawai berkebutuhan khusus, sebagai bagian dari komitmen BSI dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran HAM dalam seluruh aktivitas operasional BSI.

Seluruh kebijakan telah disahkan oleh Direksi dan diberlakukan sesuai lingkungannya. Kebijakan tertentu seperti Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Anti-Fraud disosialisasikan secara terbuka melalui situs resmi Bank [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id). Sementara itu, kebijakan yang bersifat internal disampaikan melalui *New Policy System* (NPS) yang dapat diakses oleh seluruh jaringan internal BSI. Untuk kebijakan yang ditujukan kepada mitra bisnis namun tidak dipublikasikan di situs resmi, sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dan dituangkan dalam dokumen kontrak kerja.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Standar Prosedur Operasional serta Petunjuk Teknis Operasional sebagai panduan kerja bagi seluruh pegawai. Untuk memastikan implementasi yang optimal, BSI juga menyelenggarakan pelatihan yang diperlukan agar seluruh kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Sepanjang tahun 2025, Bank memastikan seluruh komitmen kebijakan dipublikasikan dan diperbarui secara berkala sesuai dengan SPP Pembuatan Kebijakan dan Prosedur, yang mewajibkan peninjauan kebijakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau setiap saat apabila diperlukan. Fungsi Policy & Procedure Group (PPG) sebagai pengelola kebijakan melakukan sosialisasi atas setiap perubahan ketentuan Bank kepada seluruh unit terkait melalui mekanisme resmi, antara lain email blast dalam bentuk infografis dan Executive Summary serta pelaksanaan Knowledge Sharing Forum (KSF), Refreshment dan Quiz guna memastikan kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam operasional harian.

Sebagai bagian dari penguatan implementasi, Bank juga menyelenggarakan kegiatan refreshment dan kuis untuk mengukur tingkat pemahaman Pegawai terhadap ketentuan internal serta meningkatkan awareness atas kebijakan yang berlaku. Terkait aspek keberlanjutan, PPG berkoordinasi dengan unit bisnis dan fungsi ESG menyelenggarakan KSF bertema “BebKu – Belajar ESG Bareng Aku” yang diikuti oleh seluruh Pegawai Kantor Pusat dan Jaringan.

Pada tahun 2025, Bank melakukan pembaruan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang berlaku efektif 7 Juli 2025, yang mencakup penguatan prinsip dan penerapan keuangan berkelanjutan serta tata kelola ESG, termasuk pengaturan Sustainability of Sharia Banking Principles yang terdiri atas tujuh aspek, yaitu Syariah, Nasabah, Strategi Bisnis, Operasional Perbankan, Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Masyarakat. Selain itu, Bank juga mengatur ketentuan Keuangan Berkelanjutan pada Standar Prosedur Operasional (SPO) Keuangan Berkelanjutan yang berlaku efektif 31 Juli 2025.

Dalam rangka memperkuat integrasi keberlanjutan ke dalam manajemen risiko, selama tahun 2025 Bank melakukan pemutakhiran ketentuan yang memuat aspek keberlanjutan, antara lain melalui SPB Portfolio Guideline, yang mencakup peninjauan limit portofolio pembiayaan sektor brown dengan mempertimbangkan realisasi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), reklasifikasi sektor industri internal dengan mengacu pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan khususnya Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, serta penetapan parameter Portfolio Green Financing yang selaras dengan kebijakan OJK, prinsip *Do No Significant Harm* (DNSH), dan *Exclusion List Bank*.

Selain itu, Bank memperkuat penerapan Industry Acceptance Criteria dengan menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu critical factor dalam proses seleksi calon nasabah. Pada kebijakan pembiayaan masing-masing segmen, penilaian risiko pembiayaan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, termasuk asesmen risiko lingkungan dan sosial melalui kepemilikan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPKL, analisis dampak lingkungan, serta keamanan lokasi usaha atau proyek.

# PROSES UNTUK MEMULIHKAN DAMPAK NEGATIF

[GRI 2-25, 418-1]

Salah satu potensi dampak negatif dari aktivitas operasional BSI adalah kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam pemrosesan Data Pribadi nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BSI telah menetapkan Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur ketentuan mengenai perolehan, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pembaruan, penyajian, pengumuman, transfer, distribusi, pengungkapan, hingga penghapusan Data Pribadi nasabah, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

Kebijakan Privasi tersebut disusun sebagai upaya melindungi seluruh informasi nasabah, termasuk Data Pribadi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung maupun tidak langsung. Di dalamnya juga diatur hak nasabah, termasuk hak untuk mengajukan ganti rugi secara materiil maupun non-materiil apabila terjadi pelanggaran akibat kesalahan atau kelalaian BSI dalam memproses Data Pribadi.

Pemulihan atas dampak negatif dilakukan melalui berbagai saluran pengaduan seperti BSI Call 14040, BSI Mobile dan BYOND by BSI, email [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id), serta kantor cabang dan kantor pusat. Penanganan pengaduan mengacu pada SPO Pelindungan dan Pengaduan Nasabah, sehingga pengaduan pada tahun 2025 dapat 100% diselesaikan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan regulator. Pemantauan menunjukkan bahwa sistem pengaduan BSI mampu menyelesaikan kasus secara tepat waktu, yang tercermin dari pemenuhan SLA secara menyeluruh serta peningkatan tingkat kepuasan pelapor. Setiap pengaduan diproses melalui mekanisme tiket bernomor untuk memastikan pemantauan yang transparan hingga penyelesaiannya.

Dalam meningkatkan efektivitas mekanisme pemulihan dampak negatif, BSI melibatkan para pemangku kepentingan terkait penanganan pengaduan melalui survei kepuasan, umpan balik pelapor, dan evaluasi tren pengaduan untuk meninjau dan menyempurnakan desain serta mekanisme operasional penanganan pengaduan. Efektivitas mekanisme tersebut dipantau melalui indikator seperti ketepatan waktu penyelesaian, tingkat kepatuhan terhadap SLA, kualitas tindak lanjut, dan tingkat penyelesaian kasus.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pengaduan maupun insiden baru yang berkaitan dengan kehilangan Data Pribadi nasabah atau pelanggaran privasi nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan demikian, tidak terdapat tindakan kompensasi atau perbaikan yang perlu dilakukan terkait perlindungan data dan privasi nasabah pada periode pelaporan.

# IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

[OJK B]



Ikhtisar ini merefleksikan perjalanan Perseroan dalam mewujudkan komitmen keberlanjutan sepanjang tahun. Setiap capaian merupakan hasil dari ikhtiar berkelanjutan untuk memberikan dampak yang bernilai bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui proses ini, pertumbuhan tidak hanya diukur dari kinerja, tetapi juga dari kebermanfaatannya.

# KINERJA ASPEK EKONOMI [OJK B.1]

Uraian	Satuan	2023	2024	2025	Pertumbuhan 2025 (YoY)
Total Pembiayaan	Dalam Miliar Rupiah	240.316	278.481	318.844	14,49%
- Pembiayaan pada Retail Banking	Dalam Miliar Rupiah	42.258	49.380	52.258	5,83%
- Pembiayaan pada Wholesale Banking	Dalam Miliar Rupiah	67.511	77.218	90.800	17,59%
- Consumer, Gold Business & Card	Dalam Miliar Rupiah	130.547	151.883	175.787	15,74%
Dana Pihak Ketiga	Dalam Miliar Rupiah	293.776	327.454	380.488	16,20%
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	Dalam Miliar Rupiah	22.252	25.298	28.265	11,73%
Pendapatan Usaha Lainnya	Dalam Miliar Rupiah	4.204	5.556	6.937	24,84%
Laba Bersih	Dalam Miliar Rupiah	5.704	7.006	7.568	8,02%
Total Penerima Manfaat Implementasi Program Sosial Perusahaan	Individu	333.000	1.544.913	1.286.519	(20%)
	Lembaga	1.019	2.255	1.799	(31%)
Penyaluran Implementasi Program Sosial Perusahaan	Dalam Miliar Rupiah	286,62	385,37	400	30,9%
Penyaluran Zakat Perusahaan dan Pegawai BSI kepada BAZNAS RI	Dalam Miliar Rupiah	223	268,6	289,4	16%
<b>Pembiayaan sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)*</b>					
Portofolio Pembiayaan Hijau	Dalam Miliar Rupiah	12.235	14.084	15.657	11,2%
Portofolio Pembiayaan Sosial	Dalam Miliar Rupiah	45.469	52.415	58.265	11,16%
Total Pemasok dalam Negeri	Dalam Pemasok/ Vendor	701	413	337	(18,40%)
	%	99,43	99,04	98,81%	0,23%

Keterangan: \* Pembiayaan KKUB merupakan Produk Ramah Lingkungan Bank

## Sustainability Sukuk Dalam Rupiah



Sustainability Sukuk Tahap 1

2025 Rp **3.000.000.000.000**



Sustainability Sukuk Tahap 2

2025 Rp **5.000.000.000.000**

**Total Rp 8.000.000.000.000**

## KINERJA ASPEK EKONOMI

## Pembiayaan Sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)

Dalam Miliar Rupiah

## Pembiayaan Hijau (KUBL)



Energi Terbarukan

2025 Rp**710**  
▲ **16,67%**

Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan

2025 Rp**5.777**  
▼ **15,85%**

Transportasi Ramah Lingkungan

2025 Rp**948**  
▲ **199,27%**

Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan

2025 Rp**91**  
**0,25%**

Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-Efficient)

2025 Rp**6.442**  
▲ **10,83%**

Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional

2025 Rp**101**  
▼ **24,37%**

Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya

2025 Rp**1.588**  
▲ **520,09%**

Total Green Financing (KUBL)

2025 Rp**15.657**  
▲ **11,17%**

## Pembiayaan Sosial (KUBS) Dalam Miliar Rupiah



Pembiayaan UMKM

2025 Rp**52.578**  
▲ **0,31%**

Total Pembiayaan Sosial (KUBS)

2025 Rp**58.265**  
▲ **11,16%**

ESG Financing/Pembiayaan Berkelanjutan (KKUB)

2025 Rp**73.922**  
▲ **11,16%**

## BSI Agen



Jumlah Agen (agen)

2023	2024	2025
86.200	119.295	126.428



Jumlah Transaksi (Juta kali)

2023	2024	2025
19,6	26,9	33,2



Nilai Transaksi (triliun rupiah)

2023	2024	2025
43,80	59,02	81,60

# KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP [OJK B.2]

## Pembiayaan Sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)

Penggunaan Listrik (kWh)			Penggunaan Air (m <sup>3</sup> )			Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Pohon)		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
2.117.285**	80.779.932*	86.473.880*	1.824**	48.401*	109.488	39.329	50.000	65.000

Penggunaan BBM (Liter)			Penggunaan lampu LED (%)		
2023	2024	2025	2023	2024	2025
281.983**	7.112.582*	7.791.836*	100	100	100

Keterangan:  
\* Data Penggunaan BBM, Listrik dan Air di tahun 2024 mencakup seluruh wilayah operasional BSI. Sampai dengan tahun 2024, BSI belum melakukan perhitungan atas limbah yang dihasilkan.  
\*\* Data tahun 2023 hanya mencakup wilayah Kantor Pusat The Tower. Sampai dengan tahun 2024, BSI belum melakukan perhitungan atas limbah yang dihasilkan.

## Reverse Vending Machine (RVM) & Infrastruktur Hijau

- 70** unit di **90** titik lokasi
- 27.198** kg Reduksi Sampah Plastik
- 143,99** ton Co<sub>2</sub>eq Reduksi Jejak Karbon
- 2** Green Building Gold Certified, Landmark BSI Aceh dan BSI Tower Jakarta
- 8** Solar Panel di Outlet BSI
- 3** Solar Panel di Desa Binaan BSI
- Kendaraan Listrik**
- 145** Kendaraan Listrik (115 motor dan 30 mobil)

## Water Station Bank Syariah Indonesia (BSI)

- 10** Fasilitas Air Minum Gratis
- 330.194** Air Minum dalam Liter
- Berkontribusi mengurangi sampah air minum kemasan sebanyak **550.323** botol plastik

## KINERJA ASPEK SOSIAL [OJK B.3]

### Dampak Positif



#### Turnover Pegawai (Persentase)

<b>2023</b>	3,77
<b>2024</b>	3,21
<b>2025</b>	<b>5,09</b>



#### Jam Pelatihan (Jam)

<b>2023</b>	1.392.792
<b>2024</b>	258.103
<b>2025</b>	<b>1.182.406</b>



#### Biaya Pelatihan (miliar rupiah)

<b>2023</b>	90,64
<b>2024</b>	141,59
<b>2025</b>	<b>141,77</b>



#### Komposisi Pegawai Penyandang Disabilitas (Orang)

<b>2023</b>	7
<b>2024</b>	7
<b>2025</b>	<b>1</b>



#### Survei Kepuasan Nasabah (%)

<b>2023</b>	60,60 ( <i>Rationally Royal</i> )
<b>2024</b>	64,91 ( <i>Engaged</i> )
<b>2025</b>	<b>66,5 (<i>Engaged</i>)</b>



#### UMKM Binaan (UMKM)

<b>2023</b>	3.009
<b>2024</b>	4.478
<b>2025</b>	<b>5.251</b>

## KINERJA ASPEK SOSIAL

**Dampak Negatif**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pemulihan Dampak Negatif dalam laporan ini, kegiatan operasional BSI dapat menimbulkan risiko kesalahan atau kelalaian dalam pemrosesan Data Pribadi nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BSI telah menetapkan Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur ketentuan mengenai perolehan, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pembaruan, penyajian, pengumuman, transfer, distribusi, pengungkapan, hingga penghapusan atau pemusnahan data nasabah, termasuk Data Pribadi, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

Selain itu, potensi keluhan juga dapat muncul ketika nasabah belum sepenuhnya memahami produk atau layanan yang ditawarkan Bank. Untuk memastikan perlindungan nasabah, BSI menerapkan Kebijakan Pelindungan dan Pengaduan Nasabah yang mengatur bahwa hak-hak nasabah harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pemasaran dan penyediaan layanan. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank.
2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.
3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.
4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.

# 04

## PROFIL PERUSAHAAN

[OJK C]

Bab ini menggambarkan identitas Perseroan, arah usaha, serta peran kami dalam memberikan nilai bagi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, kami menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab. Fondasi inilah yang membentuk perjalanan dan komitmen keberlanjutan kami.



# VISI, MISI, DAN NILAI KEBERLANJUTAN

[OJK C.1]

## VISI BSI

Menjadi Top 5 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

## VISI KEBERLANJUTAN

*The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance.*

## MISI BSI

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

## MISI KEBERLANJUTAN

BSI juga telah mengembangkan misi implementasi keuangan berkelanjutan yang selaras dengan misi BSI yaitu:

1. Memberikan akses keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
2. Menjadi bank yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham melalui kontribusi terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Menjadi perusahaan yang memberdayakan seluruh pegawai agar memiliki kesadaran dan perhatian dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan pada operasional perbankan.

## VISI, MISI, DAN NILAI KEBERLANJUTAN

# NILAI KEBERLANJUTAN

Kebertahanan telah menjadi salah satu fokus utama bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Sebagai perbankan berbasis syariah, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menjaga lingkungan dan memberikan manfaat sosial demi masa depan. Hal ini sejalan dengan *Maqashid* Syariah yang terdiri dari *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al'Aql* (memelihara akal), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz Al-Bi'ah* (memelihara lingkungan). Dalam implementasinya,

BSI senantiasa berkomitmen dalam menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Internalisasi Nilai Keberlanjutan BSI terwujud dalam 3 (tiga) Pilar Keberlanjutan, yakni:

### 1. **Pilar Sustainable Banking:**

#### ***Unique in Sustainable Product Innovation***

Pada pilar pertama, BSI fokus dalam menjalankan aktivitas bisnis Bank yang berkelanjutan dengan komitmen "*Unique in Sustainable Product Innovation*". Hal ini diwujudkan melalui integrasi aspek ESG pada seluruh aktivitas bisnis BSI yang mencakup pengelolaan aspek risiko dan aspek bisnis melalui pengembangan produk/layanan keuangan dan pengelolaan portofolio yang berkelanjutan termasuk membantu nasabah dapat berperan dalam ekonomi rendah karbon dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan.

### 2. **Pilar Sustainable Operation:**

#### ***Net Zero Emission in Operation***

Pilar ini merupakan bentuk dukungan BSI untuk menyelaraskan target *Net Zero Emission* Pemerintah Indonesia pada tahun 2060. Pada pilar kedua, dalam rangka mendukung pencapaian salah satu target keberlanjutan yaitu *Net Zero Emission* pada operasional, BSI memastikan integrasi prinsip-prinsip ESG di seluruh kegiatan bisnis yang mencakup aspek kesadaran (*awareness*), operasional ramah lingkungan, penerapan teknologi untuk menjaga perlindungan data pribadi nasabah, mitigasi risiko atas perubahan iklim, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang memperluas keberagaman,

kesetaraan, dan inklusivitas (*diversity, equality, inclusivity/DEI*) di lingkungan kerja. Pencapaian target *Net Zero Emission* juga didukung program digital *transformation* yang sejalan dengan strategi BSI. Digital *transformation* mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional, strategi, dan budaya organisasi untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. BSI telah menerapkan Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang mengacu pada Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pelindungan Data Pribadi dan jasa keuangan, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Komitmen BSI dalam pengelolaan data nasabah juga tercermin dari telah dimilikinya ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

### 3. **Pilar Sustainable Beyond Banking:**

#### ***Leader In Ziswaf Ecosystem For Social Impact To Achieve SDGs***

Pada pilar ketiga, BSI memperluas komitmen terhadap keberlanjutan dengan melakukan penajaman kegiatan di luar bisnis inti perbankan dan operasional dalam aspek sosial untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat serta komunitas dalam rangka mencapai sinergi antara pertumbuhan bisnis dan kemaslahatan. Salah satu bentuk program tersebut adalah dengan menyediakan titik akses melalui BSI Agen. BSI Agen merupakan agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Terdapat 119 Kabupaten daerah blankspot yang sudah dilayani oleh BSI Agen. Jumlah BSI Agen yang tersebar di seluruh daerah Indonesia pada tahun 2025 meningkat 5,98% dibandingkan dengan tahun 2024 yang jumlahnya sebanyak 119.295 agen.



# IDENTITAS PERUSAHAAN

[OJK C.2] [GRI 2-1, 2-6]



**NAMA PERUSAHAAN [GRI 2-1]**  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk





**KEPEMILIKAN [GRI 2-1]**

**Saham Seri A Dwiwarna:**  
Negara Republik Indonesia 1 Lembar

**Saham Seri B Dwiwarna:**


- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: **51,47%**
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: **23,24%**
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: **15,38%**
- Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik): **9,91%**



**PENYESUAIAN NAMA PERUSAHAAN**  
PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk




**NAMA SINGKAT**  
BSI




**DASAR HUKUM PENDIRIAN**


- Berita Negara RI No.43 – 28 Mei 1971-Tambahan No. 242.
- Berita Negara RI No. 85 - 23 Oktober 2009 - Tambahan No. 26142.
- Berita Negara RI No. 96 - 1 Desember 2009 Tambahan No. 27908.
- Akta No. 8 - 8 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Fathia Helmi S.H.
- Akta No. 38 - 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn.




**BIDANG USAHA [GRI 2-6]**  
Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah



**TANGGAL PENDIRIAN**  
1 Februari 2021



**BENTUK PERUSAHAAN**  
Perseroan Terbatas (PT) Terbuka



**MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH**  
Rp23.064.630.069.000



**MODAL DASAR**  
Rp40.000.000.000.000



**KODE SAHAM**  
BRIS

## IDENTITAS PERUSAHAAN



## IZIN USAHA [GRI 2-1]

- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008.
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021.



## DATA JARINGAN KANTOR

- 10 Kantor Wilayah
- 153 Kantor Cabang (KC)
- 1 Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)
- 896 Kantor Cabang Pembantu (KCP)
- 60 KCP Mobile (dhi: MKK)
- 81 Kantor Fungsional (KF)
- 28 Konter Layanan Priority
- 756 Konter Layanan Gadai
- 6.000 Anjungan Tunai Mandiri (ATM)



## PENCATATAN DI BURSA EFEK INDONESIA

9 Mei 2018



## JUMLAH PEGAWAI [OJK C.3]

**16.581** orang  
per 31 Desember 2025

## AKSES INFORMASI [GRI 2-1]



## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Wisnu Sunandar  
Email: [corporate.secretary@bankbsi.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbsi.co.id)



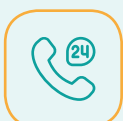
## KANTOR PUSAT

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia  
Telepon : 021-30405999  
Faks : (021) 30421888  
Website : [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)  
Email : [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)



## INVESTOR RELATION

Rizky Budinanda  
Email: [investor-relations@bankbsi.co.id](mailto:investor-relations@bankbsi.co.id)



## CALL CENTER

**14040**  
**1500789** (khusus melayani nasabah perusahaan dan institusi)

## MEDIA SOSIAL

- @banksyariahindonesia, @lifewithbsi, @BSIMobile
- @bankbsi\_id, @bsihelp
- Bank Syariah Indonesia
- Bank Syariah Indonesia

Catatan:  
Informasi alamat kantor cabang dan kantor perwakilan telah disajikan secara lengkap pada Laporan Tahunan bagian Profil Perusahaan.

## SKALA PERUSAHAAN

[OJK C.3]

Bagian ini menyajikan gambaran mengenai skala perusahaan BSI sebagai dasar pemahaman atas ukuran, kapasitas, dan ruang lingkup operasional Perseroan. Informasi lengkap mengenai skala Perseroan ditampilkan pada tabel berikut:

Uraian	Satuan	2023	2024	2025
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai <i>Mudharib</i>	Dalam Miliar Rupiah	22.252	25.298	28.265
Laba Bersih	Dalam Miliar Rupiah	5.704	7.006	7.568
Total Aset	Dalam Miliar Rupiah	353.624	408.613	456.193
Total Liabilitas	Dalam Miliar Rupiah	85.595	102.281	104.929
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	Dalam Miliar Rupiah	229.290	261.291	299.311
Total Ekuitas	Dalam Miliar Rupiah	38.739	45.041	51.953
Nama Pemegang Saham dan Persentase		<b>Saham Seri A</b> <b>Dwiwarna:</b> Negara Republik Indonesia 1 Lembar  <b>Saham Seri B</b> <b>Dwiwarna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%</li> <li>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%</li> <li>Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik) 9,91%</li> </ul>	<b>Saham Seri A</b> <b>Dwiwarna:</b> Negara Republik Indonesia 1 Lembar  <b>Saham Seri B</b> <b>Dwiwarna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%</li> <li>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%</li> <li>Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik) 9,91%</li> </ul>	<b>Saham Seri A</b> <b>Dwiwarna:</b> Negara Republik Indonesia 1 Lembar  <b>Saham Seri B</b> <b>Dwiwarna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%</li> <li>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%</li> <li>Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik) 9,91%</li> </ul>
Jumlah Pegawai	Dalam Orang	17.909	17.234	16.581
Jaringan ATM	Dalam Unit	2.571	5.425	6.000

### INFORMASI MENGENAI PEGAWAI

[OJK C.3] [GRI 2-7, 2-8]

Hingga 31 Desember 2025, BSI memiliki total 16.581 pegawai, yang terdiri dari 16.274 pegawai tetap dan 307 pegawai tidak tetap/kontrak. Laporan ini menyajikan profil ketenagakerjaan BSI secara menyeluruh untuk periode 2022–2025, mencerminkan penyebaran pegawai di seluruh jaringan operasional nasional.

Data ketenagakerjaan disusun menggunakan pendekatan *head count* pada akhir periode pelaporan. Seluruh pegawai BSI merupakan pekerja penuh waktu, dan Bank tidak mempekerjakan pegawai dengan skema non-

*guaranteed hours*. Sepanjang 2025 hingga tiga tahun terakhir, struktur tenaga kerja BSI tetap stabil tanpa perubahan yang signifikan.

Pada tahun yang sama, BSI juga didukung oleh 8.584 tenaga alih daya yang ditempatkan pada fungsi *Business* dan *Support*. Selain itu, BSI membuka kesempatan *magang* bagi 178 mahasiswa tingkat akhir di Kantor Pusat, terutama pada unit *Business*, *Risk*, dan *Support*, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengembangan talenta masa depan.

Komposisi tenaga kerja BSI ditampilkan sebagai berikut:

## SKALA PERUSAHAAN

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

	Pria		Wanita		Jumlah	
	<b>2023</b>	10.542	<b>2023</b>	7.367	<b>2023</b>	17.909
	<b>2024</b>	10.168	<b>2024</b>	7.066	<b>2024</b>	17.234
	<b>2025</b>	9.798	<b>2025</b>	6.783	<b>2025</b>	16.581

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Kewarganegaraan	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Indonesia	17.245	664	17.909	10.168	7.066	17.234	9.798	6.783	16.581
Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.245</b>	<b>664</b>	<b>17.909</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>9.798</b>	<b>6.783</b>	<b>16.581</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Senior Manager	75	21	96	69	26	95	67	25	92
Middle Manager	352	103	455	371	112	483	412	132	544
Manager	1.702	538	2.240	1.785	578	2.363	1.851	632	2.483
Officer	3.679	2.148	5.827	3.587	2.189	5.776	3.510	2.170	5.680
Staff	4.734	4.557	9.291	4.356	4.161	8.517	3.958	3.824	7.782
<b>Jumlah</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>9.798</b>	<b>6.783</b>	<b>16.581</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Usia	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
< 25 tahun	76	158	234	92	142	234	138	134	272
25-30 tahun	1.393	2.040	3.433	1.028	1.557	2.585	700	1.077	1.777
30-35 tahun	2.419	2.056	4.475	2.149	1.912	4.061	1.957	1.873	3.830
35-40 tahun	3.294	1.967	5.261	3.263	2.135	5.398	2.999	2.174	5.173
40-45 tahun	1.959	698	2.657	2.113	806	2.919	2.293	922	3.215
45-50 tahun	1.004	334	1.338	1.035	364	1.399	1.208	446	1.654
> 50 tahun	397	114	511	488	150	638	503	157	660
<b>Jumlah</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>9.798</b>	<b>6.783</b>	<b>16.581</b>

## SKALA PERUSAHAAN

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Doktoral	7	3	10	11	3	14	11	4	15
Magister	652	291	943	693	323	1.016	710	345	1.055
Sarjana	8.943	6.257	15.200	8.610	5.993	14.603	8.307	5.753	14.060
Diploma	910	810	1.720	829	743	1.572	747	675	1.422
SMA	30	6	36	25	4	29	23	6	29
<b>Jumlah</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>9.798</b>	<b>6.783</b>	<b>16.581</b>

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Tetap (PKWTT)	10.220	7.025	17.245	9.860	6.831	16.691	9.625	6.649	16.274
Tidak Tetap (PKWT – Kontrak)	322	342	664	308	235	543	173	134	307
<b>Jumlah</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>9.798</b>	<b>6.783</b>	<b>16.581</b>

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Wilayah	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Kantor Pusat	3.278	1.495	4.773	3.308	1.485	4.793	3.644	1.779	5.423
Region I - Aceh	1.223	801	2.024	1.155	776	1.931	998	677	1.675
Region II - Medan	598	454	1.052	570	427	997	484	358	842
Region III - Palembang	830	594	1.424	787	571	1.358	694	498	1.192
Region IV - Jakarta I	640	707	1.347	600	671	1.271	563	614	1.177
Region V - Jakarta II	516	555	1.071	500	541	1.041	464	504	968
Region VI - Bandung	609	464	1.073	558	445	1.003	507	423	930
Region VII - Semarang	714	562	1.276	686	525	1.211	622	473	1.095
Region VIII - Surabaya	1.137	874	2.011	1.062	825	1.887	969	740	1.709
Region IX - Kalimantan	425	399	824	400	368	768	365	336	701
Region X - Makassar	572	462	1.034	542	432	974	488	381	869
<b>Jumlah</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>9.798</b>	<b>6.783</b>	<b>16.581</b>

## SKALA PERUSAHAAN

**Komposisi Pegawai Tetap Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin**

(dalam satuan orang)

Wilayah	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Kantor Pusat	3.154	1.384	4.538	1.429	3.161	4.590	3.525	1.729	5.254
Region I - Aceh	1.084	647	1.731	648	1.030	1.678	949	606	1.555
Region II - Medan	594	453	1.047	426	565	991	484	357	841
Region III - Palembang	822	590	1.412	569	782	1.351	694	498	1.192
Region IV - Jakarta I	638	703	1.341	666	599	1.265	563	614	1.177
Region V - Jakarta II	512	553	1.065	533	497	1.030	464	501	965
Region VI - Bandung	607	461	1.068	443	556	999	505	423	928
Region VII - Semarang	713	554	1.267	524	686	1.210	622	472	1.094
Region VIII - Surabaya	1.115	834	1.949	804	1.048	1.852	969	740	1.709
Region IX - Kalimantan	413	389	802	358	396	754	362	330	692
Region X - Makassar	568	457	1.025	431	540	971	488	379	867
<b>Jumlah</b>	<b>10.220</b>	<b>7.025</b>	<b>17.245</b>	<b>6.831</b>	<b>9.860</b>	<b>16.691</b>	<b>9.625</b>	<b>6.649</b>	<b>16.274</b>

**Komposisi Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin**

(dalam satuan orang)

Wilayah	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Kantor Pusat	124	111	236	147	56	203	119	50	169
Region I - Aceh	139	154	293	125	128	253	49	71	120
Region II - Medan	4	1	5	5	1	6	-	1	1
Region III - Palembang	8	4	12	5	2	7	-	-	-
Region IV - Jakarta I	2	4	6	1	5	6	-	-	-
Region V - Jakarta II	4	2	236	3	8	11	-	3	3
Region VI - Bandung	2	3	6	2	2	4	2	-	2
Region VII - Semarang	1	8	5	-	1	1	-	1	1
Region VIII - Surabaya	22	40	9	14	21	35	-	-	-
Region IX - Kalimantan	12	10	22	4	10	14	3	6	9
Region X - Makassar	4	5	9	2	1	3	-	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>322</b>	<b>342</b>	<b>664</b>	<b>308</b>	<b>235</b>	<b>543</b>	<b>173</b>	<b>134</b>	<b>307</b>

## SKALA PERUSAHAAN

**Komposisi Pekerja yang Bukan Pegawai (Tenaga Alih Daya) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Penempatan [GRI 2-8]**

(dalam satuan orang)

Wilayah	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Region I - Aceh	913	272	1.185	953	293	1.246	1.061	398	1.459
Region II - Medan	540	75	615	490	49	539	675	98	773
Region III - Palembang	458	101	559	461	109	570	588	104	692
Region IV - Jakarta I	525	91	616	492	52	544	646	97	743
Region V - Jakarta II	709	113	822	694	129	823	866	168	1.034
Region VI - Bandung	537	101	638	534	99	633	680	142	822
Region VII - Semarang	427	49	476	412	40	452	540	54	594
Region VIII - Surabaya	482	61	543	449	29	478	550	68	618
Region IX - Kalimantan	689	82	771	638	29	667	763	91	854
Region X - Makassar	293	73	366	300	76	376	358	111	469
Region X - Banjarmasin	303	72	375	326	89	415	384	142	526
<b>Jumlah</b>	<b>5.876</b>	<b>1.090</b>	<b>6.966</b>	<b>5.749</b>	<b>994</b>	<b>6.743</b>	<b>7.111</b>	<b>1.473</b>	<b>8.584</b>

**WILAYAH OPERASIONAL [OJK C.3] [GRI 2-1]**

BSI menjalankan operasionalnya di berbagai wilayah di Indonesia serta memiliki kehadiran internasional di Dubai, Uni Emirat Arab. Hingga Desember 2025, jaringan layanan BSI mencakup 1 Kantor Pusat, 10 Kantor Wilayah, 153 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), 896 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 60 KCP Mobile (MKK), 81 Kantor Fungsional (KF), 28 Konter Layanan Priority, 756 Konter Layanan Gadaai, serta 6.000 Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Rincian tabel jaringan kantor BSI dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Kantor	2021	2022	2023	2024	2025
Kantor Wilayah	10	10	10	10	10
Kantor Cabang (KC)	272	153	153	153	153
Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)	-	-	1	1	1
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	985	959	886	886	896
KCP Mobile (dhi: MKK)	-	60	60	60	60
Kantor Fungsional (KF)	34	96	91	91	81
Kantor Kas (KK)	74	-	-	-	-
Payment Point (PP)	179	-	-	-	-
Konter Layanan Priority	11	16	20	23	28
Layanan Gadaai	530	734	765	754	756
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	2.618	2.548	2.571	5.425	6.000

Keterangan:

- PP tahun 2022 Reformat menjadi KFO (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)
- KK tahun 2022 Reformat menjadi KCP (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)

SKALA PERUSAHAAN

Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2025

Wilayah	Jenis Kantor						
	KC	KCLN	KCP	KCP Mobile	KF	Konter Layanan Priority	Layanan Gadai
Kantor Wilayah 1	16	-	122	1	7	2	77
Kantor Wilayah 2	15	-	78	7	5	2	59
Kantor Wilayah 3	16	-	85	8	2	2	74
Kantor Wilayah 4	15	-	120	10	9	8	86
Kantor Wilayah 5	15	-	89	2	8	6	64
Kantor Wilayah 6	12	-	71	6	0	3	65
Kantor Wilayah 7	13	-	94	7	12	3	70
Kantor Wilayah 8	20	-	127	10	23	2	129
Kantor Wilayah 9	16	-	52	5	0	1	55
Kantor Wilayah 10	15	-	58	4	15	2	77
<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>-</b>	<b>896</b>	<b>60</b>	<b>81</b>	<b>31</b>	<b>756</b>



# PRODUK, LAYANAN DAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

[OJK C.4] [GRI 2-6]

Mengacu pada perubahan Anggaran Dasar Nomor 37 tanggal 17 Mei 2024, tujuan pendirian BSI adalah menyelenggarakan kegiatan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BSI menjalankan kegiatan usaha utama yang didukung oleh berbagai kegiatan penunjang. Uraian lengkap mengenai kegiatan usaha utama dan penunjangnya telah disampaikan secara terperinci dalam Laporan Tahunan pada bagian Profil Perusahaan. Seluruh aktivitas usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Sampai dengan akhir tahun 2025, BSI menawarkan beragam produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta profil masing-masing nasabah. Seluruh produk dan layanan tersebut dikelompokkan dalam empat kategori utama, yaitu individu, perusahaan, digital *banking*, dan kartu. Uraian setiap kategori disajikan sebagai berikut:

Kategori	Jenis Produk dan Layanan
Individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisnis</li> <li>Emas</li> <li>Haji dan Umroh</li> <li>Investasi</li> <li>Pembiayaan</li> <li>Prioritas</li> <li>Tabungan</li> <li>Transaksi</li> </ul>
Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Cash Management</i></li> <li><i>Treasury</i></li> <li>Service</li> <li>Pembiayaan</li> <li>Simpanan</li> </ul>
Digital <i>Banking</i>	SuperApps BYOND
Kartu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kartu Pembiayaan</li> <li>Kartu Debit</li> </ul>

Penjelasan menyeluruh mengenai berbagai produk dan layanan BSI dapat ditemukan pada Laporan Tahunan dalam bagian Profil Perusahaan, yang tersedia melalui tautan berikut: <https://ir.bankbsi.co.id/>.

BSI melayani beragam segmen pasar, antara lain *wholesale banking*, hubungan kelembagaan, ritel, serta segmen *treasury banking* dan kantor pusat.

Segmen Usaha	Pasar Dilayani
<i>Wholesale Banking</i>	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya, lembaga negara, <i>multinational company</i> , serta bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura <i>non linkage</i> ).
Hubungan Kelembagaan	Pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah Kementerian Negara/Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Rumah Sakit dan Swasta Bonafide.
Ritel	<i>Small Medium Enterprise</i> (SME), Mikro dan Konsumer.
<i>Treasury Banking</i> dan Kantor Pusat	Melayani produk-produk di luar pembiayaan, produk simpanan dan non simpanan.

## RANTAI PASOK

[GRI 2-6]

Untuk memastikan operasional Bank berjalan optimal, BSI bekerja sama dengan jaringan pemasok yang menyediakan berbagai kebutuhan penting, mulai dari perlengkapan kantor, penyedia tenaga kerja, layanan transportasi, hingga konsultan dan kontraktor yang terlibat dalam pembangunan serta pengawasan infrastruktur. Dukungan pemasok ini menjadi bagian penting dalam rantai nilai BSI. Sampai dengan Desember 2025, BSI telah menyelesaikan 1.153 kegiatan pengadaan dan bermitra dengan 337 pemasok.

Uraian	2023	2024	2025
Pengadaan Barang dan Jasa IT	449	314	400
Pengadaan Barang dan Jasa Non-IT	438	364	463
Pengadaan Renovasi/Relokasi	86	195	290
<b>Jumlah Pengadaan</b>	<b>973</b>	<b>873</b>	<b>1.153</b>

### Jumlah Pemasok Barang dan Jasa

Keterangan	Jumlah Pemasok					
	2023		2024		2025	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pemasok Dalam Negeri	701	99,43	413	99,04	333	98,81
Pemasok Luar Negeri	4	0,57	4	0,96	4	1,19
<b>Jumlah</b>	<b>705</b>	<b>100</b>	<b>417</b>	<b>100</b>	<b>337</b>	<b>100</b>

## ENTITAS HILIR DAN RELASI BISNIS LAINNYA

[GRI 2-6]

Hingga 31 Desember 2025, BSI tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, maupun hubungan usaha dalam bentuk ventura bersama.

## KEANGGOTAAN ASOSIASI

[OJK C.5] [GRI 2-28]

Sebagai upaya memahami dinamika terbaru dalam industri perbankan syariah, perubahan regulasi, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan nasabah, BSI terus berperan aktif dalam berbagai asosiasi dan organisasi profesi. Sampai dengan akhir tahun 2025, BSI tercatat sebagai anggota di sejumlah asosiasi nasional maupun internasional berikut:

No.	Asosiasi	Posisi	Skala
1.	Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas)	Anggota	Nasional
2.	Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Ketua Umum	Nasional
3.	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota	Internasional
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota	Nasional
5.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota	Nasional
6.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota	Nasional
7.	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota	Nasional
8.	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota	Nasional
9.	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Anggota	Nasional
10.	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota	Nasional
11.	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)	Anggota	Nasional
12.	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Anggota	Nasional
13.	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK IJK)	Anggota	Nasional
14.	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Anggota	Nasional
15.	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota	Nasional
16.	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)	Anggota	Nasional
17.	Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)	Anggota	Nasional
18.	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)	Anggota	Nasional
19.	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Anggota	Nasional
20.	United Nations Environment Programme Finance Initiative	Anggota	Internasional

Selain berpartisipasi sebagai anggota, BSI juga memiliki peran signifikan dalam beberapa asosiasi industri, terutama melalui posisi Ketua Umum pada Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO). Peran ini memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan kebijakan perbankan syariah nasional, advokasi regulasi, serta sinergi antar pelaku industri. Dalam asosiasi lainnya, BSI aktif dalam forum diskusi, kelompok kerja, dan program pengembangan industri, yang mendukung penguatan praktik perbankan syariah dan peningkatan tata kelola sektor jasa keuangan.

## PERUBAHAN YANG BERSIFAT SIGNIFIKAN PADA ORGANISASI

[OJK C.6] [GRI 2-6]

Pada periode pelaporan 2025, tidak terdapat perubahan signifikan terkait sektor usaha, rantai nilai, pemasok utama, entitas hilir, maupun hubungan bisnis lainnya dibandingkan periode pelaporan sebelumnya. Seluruh aktivitas inti, lini produk dan layanan, proses pengadaan, serta kemitraan bisnis strategis berjalan konsisten dengan tahun sebelumnya.

# GrowthHub

by BSI Corporate University



# LAPORAN DIREKSI

[OJK D.1] [GRI 2-22]

Direksi merefleksikan perjalanan Perseroan dalam menghadapi dinamika, tantangan, dan peluang sepanjang tahun. Setiap keputusan diambil dengan menjunjung amanah dan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab, Perseroan terus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.



## LAPORAN DIREKSI



Dalam menjalankan tanggung jawab tata kelola dan kepemimpinan strategis, Direksi berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam bisnis dan operasional Bank, serta menghadirkan kemaslahatan bagi lingkungan, sosial & tata kelola. Direksi meyakini bahwa keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), melainkan sebuah manifestasi nyata dari nilai-nilai *Maqashid* Syariah yang menjadi fondasi dalam mencapai Visi Keberlanjutan BSI untuk menjadi *The Best Global Islamic Bank Based on Sustainable Finance*, dan juga mendukung Asta Cita Pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi syariah dan ekonomi hijau. Tahun ini ditandai dengan langkah strategis BSI dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui pengembangan produk emas sebagai pilar bisnis baru untuk memberikan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memiliki aset yang aman, stabil, dan berkelanjutan. BSI terus mentransformasi bisnis dan operasional Bank agar semakin efisien dan ramah lingkungan. Seluruh inisiatif ini bermuara pada satu tujuan besar, memastikan keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi denyut nadi keuangan syariah yang menciptakan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi umat dan negeri. **[GRI 2-22]**

## LAPORAN DIREKSI

## PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga BSI mampu menjaga kinerja solid dan ketahanan usaha sepanjang 2025. Direksi menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan atas amanah dan dukungan yang menguatkan langkah keberlanjutan kami bagi umat dan bangsa.

Pada 2025, total aset sebesar Rp456 triliun (tumbuh sebesar 11,64% yoy), DPK meningkat menjadi Rp380 triliun dengan rasio CASA sekitar 61,62%, pembiayaan tumbuh hingga Rp318 triliun, didukung ekosistem emas pasca izin *Bullion Bank* dan transformasi digital *BYOND* yang mendorong peningkatan *fee-based income* dua digit. Dengan kualitas aset terjaga dan disiplin biaya, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp7.56 triliun.

Momentum strategis 2025, meliputi izin *Bullion Bank*, penguatan ekosistem syariah digital, dan perluasan inklusi keuangan, menjadi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan. BSI meneguhkan komitmen untuk mewujudkan visi keberlanjutan sebagai *The Best Global Islamic Bank Based on Sustainable Finance* melalui inisiatif strategis keberlanjutan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 berlandaskan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 meliputi pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, peningkatan kapasitas internal bank, penguatan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan yang mendorong inovasi produk dan portofolio yang berkelanjutan.

Pengembangan produk keuangan berkelanjutan seperti penerbitan sustainability sukuk tahap II, penguatan tata kelola berupa pemutakhiran *Industrial Acceptance Criteria* dan peningkatan tata kelola risiko iklim. BSI juga berkomitmen untuk menerapkan *Principle Responsible Banking* (PRB) dan menjadi bagian dari *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI). Sebagai kelanjutan dari *initial phase bottom up Climate Risk Stress Test* (CRST) yang memenuhi 51,63% portofolio pembiayaan di tahun 2024, pada tahun 2025, CRST BSI dilakukan dengan memenuhi 100% portofolio. Inisiatif strategis lain adalah dilakukannya asesmen ISO 26000 & SROI pada program sosial BSI.

Upaya BSI dalam memperkuat kapasitas internal pegawai terkait ESG, pada tahun 2025 BSI memasukkan modul ESG sebagai modul pembelajaran wajib yang termasuk dalam KPI pegawai serta unit kerja.

BSI juga meluncurkan Kartu Syariah Ramah Lingkungan, pelaksanaan program "1 Home 1 Tree", kolaborasi SPKLU di masjid, dan penandatanganan MoU "Efisiensi Energi" bersama *Basel Agency for Sustainable Energy* (BASE). Hal ini merupakan upaya dan komitmen bank dalam melakukan operasional ramah lingkungan.

Sebagai bagian dari *Islamic Banking* dalam tatanan global, eksistensi BSI diperkuat dengan kehadiran BSI sebagai perwakilan Indonesia pada *Side Event of 2025 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Forum on Financing for Development* (FFD) yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika



**ANGGORO**

EKO CAHYO  
Direktur Utama

## LAPORAN DIREKSI

Serikat, dengan mempresentasikan konsep keuangan syariah untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* berkolaborasi bersama BAPPENAS.

Untuk menegaskan komitmen industri perbankan syariah dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, BSI dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) melakukan langkah proaktif melalui pembentukan Working Group ESG ASBISINDO. Dengan adanya pembentukan Working Group ESG ASBISINDO, diharapkan dapat memperluas sinergi & dampak positif penerapan ESG bagi negeri.

### “PERJALANAN BSI MENUJU BANK SYARIAH GLOBAL TERBAIK MELALUI KEUANGAN BERKELANJUTAN”

Keberkelanjutan menjadi agenda strategis global yang menuntut tata kelola kuat, transparansi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Sepanjang 2025, BSI memperkuat fondasi keberlanjutan selaras Asta Cita Pemerintah, memastikan kontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi dan kesejahteraan umat. Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI menegaskan amanah untuk menjaga keselarasan nilai ekonomi–sosial–lingkungan sesuai *Maqashid Syariah*.

Sejalan dengan visi menjadi *The Best Global Islamic Bank Based on Sustainable Finance*, Direksi mengawasi integrasi prinsip ESG dalam strategi, kebijakan pembiayaan, dan budaya organisasi. Penguatan tata kelola dilakukan dengan penyempurnaan struktur, peningkatan fungsi ESG di bawah supervisi Wakil Direktur Utama, serta penetapan ESG sebagai *Fundamental Enabler* dalam RBB 2025–2030.

Kerangka kerja ESG BSI dijalankan melalui tiga pilar, yaitu *Sustainable Banking*, *Sustainable Operation*, dan *Sustainable Beyond Banking*, yang menjadi landasan penguatan bisnis secara holistik.

- Pilar *Sustainable Banking* menegaskan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, penguatan tata

kelola dan manajemen risiko serta kebijakan yang mendorong inovasi produk dan portofolio yang berkelanjutan.

- Pilar *Sustainable Operation* memastikan bahwa operasional Bank menuju arah yang lebih efisien dan rendah karbon melalui peningkatan kapasitas internal Bank dengan *Green Business Culture*, pengembangan transformasi digital untuk pemantauan emisi Bank serta strategi proaktif perlindungan dan keamanan data pribadi.
- Pilar *Sustainable Beyond Banking* memperluas manfaat sosial melalui inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

### MEWUJUDKAN KEUANGAN BERKELANJUTAN SELARAS NILAI MAQASHID SYARIAH

#### *Sustainable Banking*

Pilar *Sustainable Banking* menegaskan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan yang mendorong inovasi produk dan portofolio yang berkelanjutan.

Dari sisi pembiayaan, portofolio pembiayaan berkelanjutan tahun 2025 sebesar Rp73,92 triliun (tumbuh 11,2% dari tahun 2024). BSI melakukan penguatan tata kelola dalam kebijakan dan manajemen risiko Bank meliputi penetapan *Green Sector*, penambahan aspek lingkungan dalam analisis penyaluran pembiayaan di seluruh sektor, penurunan limit pembiayaan *brown sector* serta melaksanakan analisis *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS) pada 100% portofolio pembiayaan bank sebagai wujud mitigasi risiko iklim, yaitu risiko fisik dan risiko transisi. Dengan tata kelola yang baik, pembiayaan berkelanjutan BSI akan terus tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi pendanaan, penerbitan *Sustainability Sukuk* sebesar Rp5 triliun pada 2025 mendapatkan animo positif dari masyarakat dan *oversubscribed* hingga 4,4 kali. *Sustainability Sukuk* tahun 2025

merupakan kelanjutan *Sustainability* Sukuk tahun lalu sebesar Rp3 triliun yang juga mendapatkan animo yang baik.

Keberhasilan penerbitan *Sustainability* Sukuk mencerminkan bahwa dari sisi *yield*, instrumen ini mendukung efisiensi pendanaan dengan imbal hasil yang kompetitif dan memberikan manfaat jangka panjang. Dana yang dihimpun melalui instrumen ini dimanfaatkan untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan (pembiayaan hijau dan pembiayaan sosial). Bagi investor, *Sustainability* Sukuk tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga nilai tambah melalui kontribusi terhadap sosial dan lingkungan.

Dari sisi inovasi produk, pada tahun 2025, BSI menjadi Bank pertama di Indonesia yang mendapatkan izin *Bullion* Bank. BSI memanfaatkan momentum *Bullion* Bank ini melalui inovasi produk digital Tabungan Emas di *BYOND* by BSI dan menjadi sumber pendapatan baru yang inklusif.

Untuk menjaga integritas ekosistem emas secara *end-to-end* dan berkelanjutan, BSI menjalin kemitraan dengan rantai pasok domestik yang telah menerapkan standar internasional, yaitu *London Bullion Market Association* (LBMA) *Responsible Gold Guidance dan Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) *Due Dilligence Guidance for Responsible Supply Chain of Minerals*. Kedua standar ini memastikan bahwa emas yang diproduksi dan diperdagangkan berasal dari sumber yang bertanggung jawab, bebas dari konflik, pelanggaran HAM, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan dampak lingkungan atau sosial yang merugikan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor bahwa emas dalam ekosistem BSI dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, ekosistem emas digital mencatat 531.329 nasabah dengan total emas sebanyak 1.8 ton, serta pembiayaan cicil emas mencapai 12.89 triliun dan gadai 10.02 triliun, mendorong *fee-based income* tumbuh sebesar 25%. Pencapaian ini memperluas inklusi keuangan syariah serta pertumbuhan berkelanjutan Bank.

### **Sustainable Operation**

Pilar *Sustainable Operation* memastikan bahwa operasional Bank menuju arah yang lebih efisien dan rendah karbon melalui peningkatan kapasitas internal Bank dengan *Green Business Culture*, pengembangan transformasi digital untuk pemantauan emisi Bank serta strategi proaktif perlindungan dan keamanan data pribadi.

BSI menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang menerapkan *Digital Carbon Tracking* di 1.190 *outlet*, meningkatkan akurasi pemantauan emisi *Scope 1 & 2* dari 83.404 ton CO<sub>2</sub>-eq pada 2024 menjadi 89.730 ton CO<sub>2</sub>-eq pada 2025. Data ini menjadi dasar mitigasi karbon yang lebih terukur dan mendukung efisiensi biaya operasional jangka panjang. Nilai keberlanjutan operasional juga diperkuat melalui ekspansi kendaraan listrik yang mencapai 145 unit, penggunaan 8 unit panel surya pada fasilitas operasional Perseroan, penggunaan 3 unit panel surya pada Desa Binaan BSI, pengoperasian 2 gedung *Green Building* bersertifikasi *Gold*, serta penyediaan SPKLU bekerja sama dengan PLN. Inisiatif ini mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan efisiensi energi yang berkelanjutan.

Kontribusi sosial lingkungan diwujudkan melalui konservasi air, pembangunan *Water Station*, serta penanaman 15.000 pohon tambahan, bagian dari total 50.000 pohon sejak 2022, dengan estimasi penyerapan lebih dari 4.129 ton CO<sub>2</sub>-eq, sebagai wujud komitmen menjaga keberlanjutan alam sebagai titipan (amanah) bagi generasi mendatang.

BSI juga melakukan penguatan & internalisasi *Green Business Culture* dengan memasukkan Modul ESG sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) Pegawai & Unit Kerja. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 16.166 pegawai (97.2% dari total pegawai) telah menyelesaikan Modul ESG dengan nilai rata-rata 86,44.

Dalam penguatan tata kelola operasional keamanan data, dan untuk memastikan integritas dalam menjalankan operasional Bank, BSI telah menerapkan langkah-langkah antara lain menunjuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi, melakukan penerbitan serta pemutakhiran

## LAPORAN DIREKSI

ketentuan berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi, Mempertahankan ISO/IEC 27001: Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (*Information Security Management System / ISMS*), dan menerapkan ISO/IEC 27701: (Sistem Manajemen Informasi Privasi (*Privacy Information Management System/PIMS*) yang merupakan pemenuhan terhadap regulasi privasi secara global.

### **Sustainable Beyond Banking**

Pilar *Sustainable Beyond Banking* memperluas manfaat sosial melalui inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

Sebagai bagian dari komitmen *Beyond Banking*, pada tahun 2025, BSI menyalurkan Dana Zakat Perusahaan dan Zakat Pegawai sebesar Rp290 miliar melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bangun Sejahtera Indonesia (BSI) Maslahat. Penyaluran dana zakat dilakukan berdasarkan lima pilar program, yaitu Pilar Ekonomi, Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, serta Dakwah dan Advokasi. Melalui seluruh pilar tersebut, penyaluran dana zakat telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1.2 juta orang.

Dalam peningkatan pendayagunaan Dana Zakat, BSI berkolaborasi bersama *United Nations Development Program* (UNDP) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan peluncuran *Green Zakat Framework* dihadiri oleh Menteri Agama RI sebagai pendekatan inovatif dalam mengarahkan Dana Zakat untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dalam pemberdayaan ekonomi, BSI mendukung 5.251 pelaku UMKM dan 7.370 penerima manfaat desa binaan melalui Sentra UMKM dan Desa BSI di 20 desa, termasuk desa baru di Makassar, Labuan Bajo, dan Sabang. Pemberdayaan ini juga menyentuh UMKM perempuan (510), UMKM disabilitas (259), dan UMKM pesantren (35), dengan total pembiayaan dan bantuan lebih dari Rp26,4 miliar. Upaya ini memperkuat kemandirian usaha, memperluas akses pembiayaan syariah, serta membuka potensi basis nasabah baru.

Pada bidang pendidikan, BSI melalui *Education Pillar* menyalurkan Rp114.8 miliar kepada 23.000 penerima manfaat di 107 universitas dan 256 sekolah. Dukungan ini meningkatkan akses pendidikan berkualitas, mendorong mobilitas sosial, dan juga memperkuat literasi keuangan syariah dan kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagai bagian dari ekosistem perbankan syariah.

Pada aspek kemanusiaan, nilai bantuan lebih dari Rp148.8 miliar menjangkau 599.100 penerima manfaat melalui distribusi logistik, layanan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pada bulan Desember 2025, BSI dan BSI Maslahat menyalurkan bantuan tambahan senilai Rp12 miliar atau 78,7 ton logistik untuk korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, terutama di Aceh, meningkatkan total distribusi menjadi 125 ton. Bantuan tersebut mencakup dapur umum, posko kesehatan, penyediaan air bersih, dan pengiriman relawan termasuk trauma *healing* bagi anak-anak sebagai dukungan pemulihan sosial-ekonomi. Untuk menjaga stabilitas layanan keuangan pada masa tanggap darurat, 136 dari 145 kantor BSI di Aceh kembali beroperasi didukung ATM, kas keliling, dan konektivitas satelit. Respons ini memastikan akses layanan tetap tersedia sebagai bagian dari tanggung jawab bank menjaga kepercayaan publik.

Pada dimensi spiritual, BSI menyalurkan Rp38,2 miliar melalui Dakwah dan *Advocacy* untuk 45.900 penerima manfaat melalui dukungan fasilitas ibadah dan pembinaan masyarakat. Upaya ini memperkuat keberkahan aktivitas ekonomi syariah dan memastikan manfaat tidak hanya finansial tetapi juga spiritual.

Dalam peningkatan pendayagunaan Dana Zakat, BSI berkolaborasi bersama *United Nations Development Program* (UNDP) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan peluncuran *Green Zakat Framework* dihadiri oleh Menteri Agama RI sebagai pendekatan inovatif dalam mengarahkan Dana Zakat untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal ini memperkuat peran BSI sebagai Sahabat Finansial, Sosial dan Spiritual bagi umat dan negeri.

## AWARD & RATING

Atas pencapaian BSI sepanjang tahun 2025, BSI berhasil mendapatkan 3 penghargaan terkait ESG dalam ajang *Euromoney Islamic Finance Awards 2025* pada level *Global, Asia & Indonesia*.

BSI juga berhasil meningkatkan score ESG Rating di Bloomberg dari 3,9 menjadi 5,6 dan berhasil meraih posisi pertama *Global Islamic Bank ESG Rating* di Bloomberg.

## PENUTUP DAN APRESIASI

Pencapaian BSI dapat terwujud melalui dukungan dan kepercayaan para pemegang saham, regulator, mitra kerja, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan. Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang telah memperkuat peran BSI

dalam inovasi keuangan syariah berkelanjutan dan penciptaan nilai bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

Perjalanan menuju keberlanjutan merupakan proses yang terus berkembang dan membutuhkan ketangguhan serta tata kelola yang baik. Dengan fondasi transformasi yang semakin kuat pada 2025, meliputi penguatan ESG, digitalisasi, pembiayaan hijau dan sosial, serta transformasi *Bullion Bank*, BSI siap meningkatkan kontribusi bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kami berkomitmen menjaga integritas, memperluas kolaborasi, dan membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar langkah keberlanjutan BSI semakin memberikan manfaat nyata bagi umat dan negeri, serta masa depan yang lebih baik.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Jakarta, 26 Maret 2026

**Anggoro Eko Cahyo**  
Direktur Utama

# TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN BUKU 2025

[GRI 2-14]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2025 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh informasi dalam Laporan ini telah dimuat secara lengkap sesuai regulasi tersebut dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Perseroan.

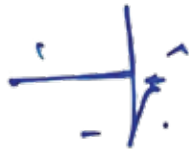
## DEWAN KOMISARIS



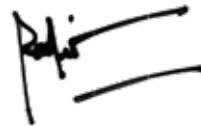
**Muhadjir Effendy**  
Komisaris Utama



**Felicitas Tallulembang**  
Komisaris Independen



**Kamaruddin Amin**  
Komisaris



**Mochamad Agus Rofiudin**  
Komisaris



**Nizar Ahmad Saputra**  
Komisaris Independen



**Aedin Jauharudin**  
Komisaris Independen



**Muhammad Syafii Antonio\***  
Komisaris Independen



**Meidy Ferdiansyah\***  
Komisaris

\* Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

# TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN BUKU 2025

## DIREKSI




**Anggoro Eko Cahyo**  
Direktur Utama



**Bob Tyasika Ananta**  
Wakil Direktur Utama



**Anton Sukarna**  
Direktur Sales & Distribution



**Ade Cahyo Nugroho**  
Direktur Finance & Strategy



**Zaidan Novari**  
Direktur Wholesale Transaction  
Banking



**Grandhis Helmi Harumansyah**  
Direktur Risk Management



**Kemas Erwan Husainy**  
Direktur Retail Banking



**Muharto Hadi Suprpto**  
Direktur Information Technology



**Firman Nugraha**  
Direktur Treasury & International  
Banking



**Arief Adhi Sanjaya**  
Direktur Compliance &  
Human Capital

# 006

## TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Tata kelola yang baik menjadi landasan dalam menjaga kepercayaan dan memastikan praktik bisnis yang beretika. Prinsip integritas, kepatuhan, dan transparansi menjadi pijakan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan tata kelola yang kuat, keberlanjutan dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.



# STRUKTUR DAN KOMPOSISI TATA KELOLA

[GRI 2-9, 2-11]

Sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia, BSI menerapkan struktur tata kelola yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Tata Kelola Syariah untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Struktur ini mencakup organ utama dan organ pendukung yang memastikan praktik tata kelola berjalan efektif dan selaras dengan prinsip syariah.

Organ utama Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris, dan 4 (empat) Komisaris Independen. Direksi beranggotakan 10 (sepuluh) orang, meliputi 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, dan 8 (delapan) Direktur. Dalam struktur tersebut, Komisaris Utama dan Ketua Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pimpinan badan tata kelola tertinggi.

Komposisi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi mencerminkan keberagaman serta keahlian yang relevan untuk mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan pihak non eksekutif, termasuk 4 (empat) Komisaris Independen sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan secara objektif. Dengan tidak memegang jabatan manajerial, Komisaris Utama tetap bebas dari potensi benturan kepentingan dalam proses pengawasan.

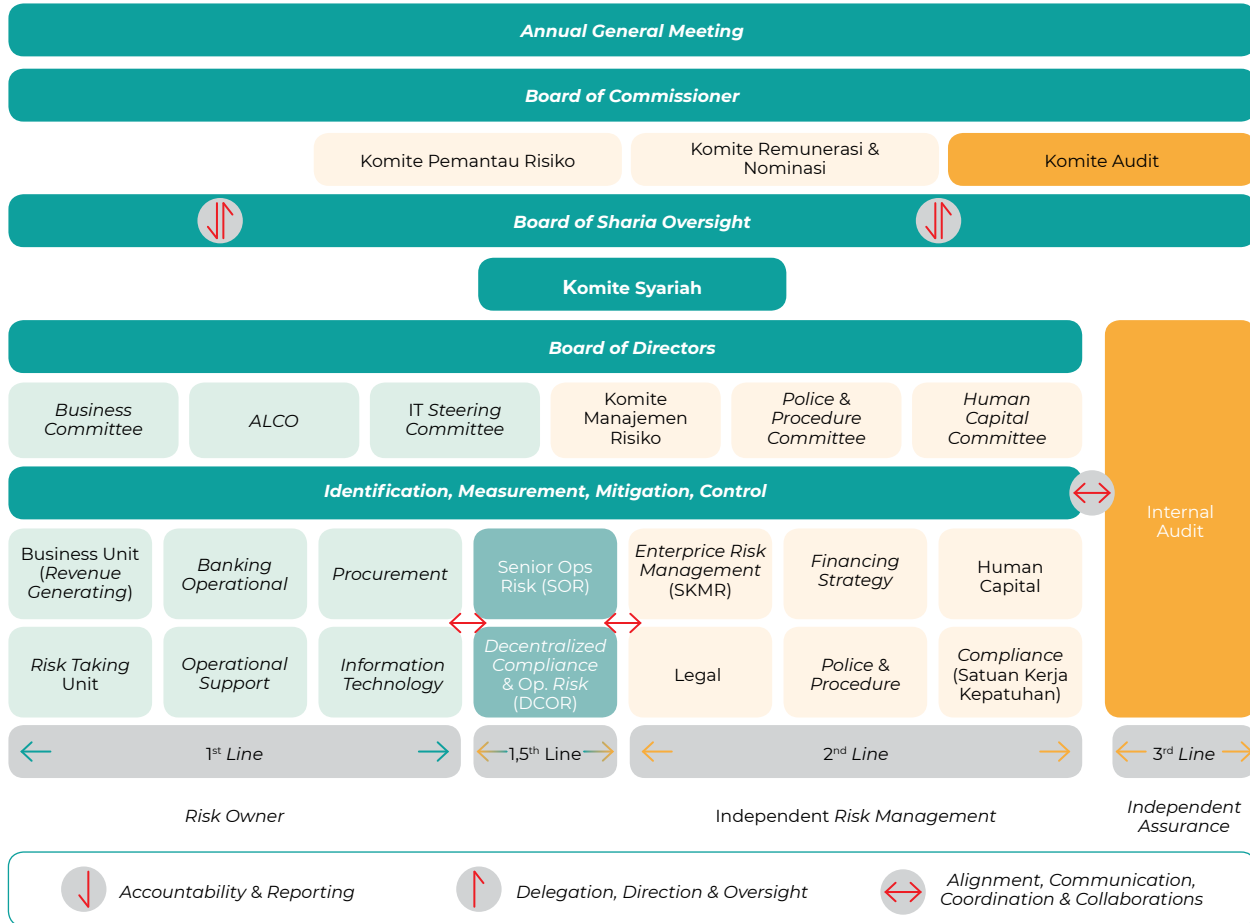
Direksi berperan sebagai organ eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian. Dalam proses nominasi dan penunjukan organ tata kelola, BSI mengedepankan prinsip independensi, keberagaman, kompetensi profesional, serta pemahaman terhadap aspek keberlanjutan.

Sebagai pelengkap organ utama, Perseroan membentuk organ pendukung melalui berbagai komite di bawah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi untuk memastikan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan. Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Intern, Enterprise Risk Management (SKMR), dan komite-komite seperti Business Committee, Asset and Liability Committee, IT Steering Committee, Risk Management Committee, Policy & Procedure Committee, dan Human Capital Committee.

Informasi mengenai masa jabatan, rangkap jabatan, keterwakilan gender, pengalaman profesional, serta profil lengkap seluruh anggota organ tata kelola, termasuk uraian tugas setiap komite, tersaji dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses melalui tautan berikut: [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id). Laporan tersebut diterbitkan secara terpisah namun menjadi bagian integral dari Laporan Keberlanjutan ini. Susunan tata kelola BSI ditampilkan sebagai berikut:

# STRUKTUR DAN KOMPOSISI TATA KELOLA

## Struktur Good Corporate Governance



# CONFLICT OF INTEREST

[GRI 2-15]

Sebagai bagian dari penguatan budaya integritas di seluruh lini organisasi, BSI menetapkan ketentuan pencegahan Benturan Kepentingan melalui Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran Bank. Benturan Kepentingan dipahami sebagai kondisi ketika seorang pegawai atau pejabat Bank, dalam menjalankan tugas kedinasannya, memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Aturan ini berlaku menyeluruh bagi semua insan BSI tanpa pengecualian.

Untuk memastikan perilaku yang beretika, setiap Jajaran Bank diwajibkan untuk:

- a. Menghindari tindakan atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Menjaga sikap profesional, bertanggung jawab, serta bebas dari pengaruh yang dapat mengurangi objektivitas atau merugikan reputasi dan bisnis Bank.
- c. Tidak menyalahgunakan identitas atau atribut korporasi untuk kepentingan pribadi, dan penggunaannya hanya diperbolehkan dengan persetujuan Bank.

Selain itu, BSI juga memiliki kebijakan pengelolaan Benturan Kepentingan yang mengatur:

- a. Proses identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan benturan kepentingan, termasuk yang berkaitan dengan transaksi afiliasi dan transaksi intragroup.
- b. Larangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi potensi keuntungan.
- c. Kewajiban untuk mengungkapkan adanya benturan kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, BSI menerapkan ketentuan khusus, antara lain:

- Jika terjadi situasi di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah satu anggota Direksi, maka kewenangan perwakilan Bank dialihkan kepada anggota Direksi lain yang tidak memiliki konflik. Apabila seluruh Direksi memiliki konflik kepentingan, Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk.
- Jika tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang dapat mewakili, RUPS berwenang menunjuk satu atau lebih pihak untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang:

- Menggunakan aset atau kedudukan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.
- Menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas resmi yang ditetapkan RUPS.
- Merangkap jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga akhir periode pelaporan, seluruh anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga, atau hubungan kepengurusan dengan anggota lainnya maupun pemegang saham pengendali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka juga tidak memiliki kepemilikan saham pada pemasok atau entitas lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Kepemilikan saham mayoritas BSI berada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,47%, sehingga tidak terdapat pemegang saham pengendali tidak langsung.

Pada tahun 2025, terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan. Berdasarkan POJK 4 Tahun 2024 dan POJK 2 Tahun 2024, DPS juga wajib melaporkan kepemilikan saham 5% atau lebih-baik pada BSI maupun pada bank atau perusahaan lain di dalam atau luar negeri.

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dipastikan tidak memiliki saham atau hubungan kepentingan pada perusahaan lain yang dapat menimbulkan konflik. Tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan sepanjang tahun pelaporan. Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan, sementara informasi mengenai transaksi berpotensi konflik mengacu pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen.

BSI berkomitmen mengelola setiap potensi benturan kepentingan secara transparan melalui kebijakan yang mencakup identifikasi, pencegahan, mitigasi, dan pengungkapan kepada pemangku kepentingan. Informasi mengenai kepemilikan saham, hubungan dengan pemegang saham pengendali, rangkap jabatan, dan transaksi pihak berelasi disampaikan secara terbuka untuk menjaga independensi dan akuntabilitas seluruh organ tata kelola.

# NOMINASI DAN SELEKSI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI

[GRI 2-10]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang transparan, proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui usulan Dewan Komisaris kepada RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Penetapan pengangkatan maupun pemberhentian dilakukan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar, dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.

Dalam proses nominasi dan seleksi, BSI menetapkan kriteria yang mengutamakan profesionalisme, integritas, independensi, kompetensi, serta keberagaman. Selain mempertimbangkan rekam jejak dan keahlian, BSI memasukkan pandangan pemangku kepentingan, terutama pemegang saham melalui RUPS, serta memenuhi ketentuan regulator melalui pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Selain itu, nominasi Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan mematuhi ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan hukum yang berlaku pada saat penetapan.

Informasi selengkapnya mengenai mekanisme nominasi dan seleksi, termasuk komposisi keberagaman Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, disajikan secara rinci dalam Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id).

# PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI

[GRI 2-18]

Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola yang akuntabel, evaluasi kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan melalui RUPS Tahunan. Dalam forum tersebut, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sementara Dewan Komisaris menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi pengawasan sepanjang tahun berjalan. Penilaian terhadap Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui *self-assessment* yang dilaksanakan setiap semester dan hasilnya disampaikan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara berkala kepada Departemen Perbankan Syariah OJK serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Aspek ESG, termasuk implementasi Keuangan Berkelanjutan, merupakan salah satu indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) Direksi yang memperoleh pengawasan langsung dari Dewan Komisaris. Setiap tahun, BSI juga menyerahkan RAKB kepada OJK yang ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu dengan mencantumkan alasan yang sah, apabila anggota Dewan tersebut:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
3. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

# KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

[GRI 2-19, 2-20, 2-21]

BSI telah menetapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan ini mencakup remunerasi tetap berupa gaji dan tunjangan, serta remunerasi tidak tetap seperti insentif kinerja tahunan. BSI tidak memberikan *sign-on* bonus. Ketentuan pembayaran terminasi mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk penerapan *clawback* apabila terdapat pelanggaran, serta penyediaan manfaat pensiun sesuai program Bank.

Kebijakan remunerasi ini mengatur struktur kompensasi dan fasilitas lain yang disetujui melalui RUPS, mencakup:

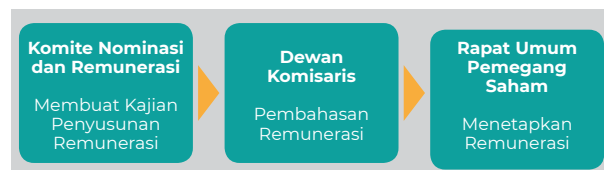
1. **Remunerasi (keuangan)** seperti gaji, tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus, serta bentuk remunerasi lainnya.
2. **Fasilitas non keuangan (natura) untuk Dewan Komisaris dan Direksi**, antara lain:
  - a. Tunjangan Hari Raya
  - b. Tunjangan Purna Jabatan
  - c. Tunjangan Perumahan dan Utilitas
  - d. Fasilitas Kendaraan dan Tunjangan Transportasi
  - e. Fasilitas Kesehatan
  - f. Club Membership dan keanggotaan asosiasi profesi
  - g. Fasilitas Komunikasi
  - h. Fasilitas Kantor Non inventaris
  - i. Fasilitas Perjalanan Dinas
  - j. Fasilitas Bantuan Hukum
  - k. Hak Cuti
3. **Fasilitas non keuangan untuk Dewan Pengawas Syariah**, meliputi:
  - a. Tunjangan Hari Raya
  - b. Tunjangan Purna Jabatan
  - c. Fasilitas Kesehatan
  - d. Fasilitas Perjalanan Dinas

Dalam menentukan besaran remunerasi, BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan antara lain kinerja keuangan, kecukupan pembentukan pencadangan kerugian penurunan nilai, kewajaran dibandingkan peer group, serta keselarasan dengan tujuan dan strategi jangka panjang Bank. Kinerja keberlanjutan juga menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk capaian KPI ESG dan implementasi RAKB.

Penetapan remunerasi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi yang berlaku.
2. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi, berupa gaji/honorarium dan tantiem, kepada Pemegang Saham Pengendali untuk kemudian diputuskan dalam RUPS.

Seluruh proses penentuan remunerasi dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang bersifat independen di bawah Dewan Komisaris. Komite mengevaluasi struktur remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan ke RUPS. Dalam proses ini, Bank tidak menggunakan jasa konsultan remunerasi eksternal. Keputusan pemegang saham melalui RUPS merupakan dasar persetujuan akhir, dan seluruh usulan remunerasi disahkan melalui mekanisme pemungutan suara sesuai ketentuan tata kelola yang berlaku.



## KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai bagian dari proses persetujuan remunerasi yang transparan, keputusan mengenai tantiem dan gaji/honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Mata Acara Rapat Keempat RUPS Tahunan pada 16 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemungutan suara, sebanyak 43.103.881.375 suara atau 98,5742401% menyatakan setuju, 171.150.059 suara atau 0,3914030% menyatakan abstain, dan 452.296.659 suara atau 1,0343570% menyatakan tidak setuju dari total saham dengan hak suara yang hadir.

Sebagai komitmen atas keterbukaan struktur remunerasi, BSI menyajikan rasio total kompensasi tahunan rata-rata Direksi dibandingkan dengan median total gaji tahunan pegawai. Total kompensasi pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan, serta remunerasi variabel yang diterima selama tahun pelaporan.

Perhitungan rasio dilakukan dengan membandingkan kompensasi tahunan rata-rata Direksi dengan median kompensasi tahunan seluruh pegawai. BSI juga mengungkapkan rasio persentase peningkatan kompensasi tahunan rata-rata Direksi terhadap persentase peningkatan median gaji tahunan pegawai. Informasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat kesenjangan kompensasi dan pertumbuhan remunerasi di dalam organisasi.

Rasio untuk tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Rasio
Rasio total kompensasi tahunan rata-rata Direksi terhadap median total gaji tahunan untuk semua pegawai.	23,47 : 1
Rasio persentase kenaikan total kompensasi tahunan rata-rata Direksi terhadap rasio peningkatan persentase median total gaji untuk semua pegawai.	(1,18) : 1

# KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

[GRI 2-27] [FN-CB-510A.1]

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menjadikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas operasional dan kepercayaan publik. Seluruh aktivitas bisnis dijalankan sesuai ketentuan regulator, prinsip syariah, serta standar tata kelola terbaik untuk memastikan bahwa setiap proses, keputusan, dan interaksi berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik yang melanggar hukum. Melalui penerapan kebijakan etika, mekanisme pengaduan, serta sistem pengendalian internal yang konsisten, BSI berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas tinggi dan mendorong perilaku bisnis yang berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan.

## Pengelolaan Kepatuhan dan Evaluasi Sanksi Regulasi Tahun 2025

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BSI senantiasa berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BSI mendefinisikan ketidakpatuhan signifikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak material terhadap operasional Bank, kondisi

keuangan, reputasi, atau hubungan dengan regulator dan pemangku kepentingan utama.

Ketidakpatuhan juga dikategorikan signifikan apabila mengakibatkan gangguan layanan yang luas, temuan berisiko tinggi dari regulator, atau potensi kerugian finansial yang material. Berdasarkan definisi tersebut, sanksi moneter dan administratif yang diterima selama tahun 2025 tidak termasuk dalam kategori ketidakpatuhan signifikan.

Sepanjang tahun 2025, BSI mendapatkan 3 (tiga) pengenaan sanksi moneter yang dikenakan oleh Regulator kepada BSI yang diakibatkan oleh kesalahan pelaporan serta 2 (dua) pengenaan sanksi moneter yang dikenakan oleh Regulator kepada BSI yang diakibatkan oleh keterlambatan penyampaian pelaporan.

BSI telah melakukan tindak lanjut dengan membayar kepada Regulator sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, sanksi moneter maupun administrasi yang dikenakan kepada BSI bukan merupakan kasus ketidakpatuhan yang signifikan. Rincian sanksi di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

## Sanksi Moneter Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sanksi	Instansi	Jumlah Denda
1.	Kesalahan dalam Data SLIK	Otoritas Jasa Keuangan	61.050.000
2.	Laporan Realisasi Inklusi Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	100.000
3.	Keterlambatan Laporan Transaksi Keuangan Tunai	Otoritas Jasa Keuangan	40.000.000
4.	Kesalahan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	Bank Indonesia	9.300.000
5.	Keterlambatan Laporan Koreksi LBUT	Bank Indonesia	7.900.000
<b>Jumlah</b>			<b>118.350.000</b>

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

**KODE ETIK**

Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan integritas, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menerapkan Kode Etik sebagai landasan perilaku seluruh insan Bank dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kode Etik ini menjadi panduan untuk memastikan setiap tindakan sesuai prinsip syariah, profesionalisme, serta nilai-nilai perusahaan, termasuk *The Seven Fundamentals of BSI* yang menjadi dasar dalam membangun budaya kerja yang amanah, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan.

Kode Etik BSI mengatur berbagai aspek penting dalam menjaga kualitas tata kelola, mulai dari pencegahan benturan kepentingan, larangan gratifikasi (*risywah*), hingga kewajiban menjaga kerahasiaan data serta akurasi informasi yang disampaikan. Setiap insan Bank diwajibkan menghindari seluruh bentuk penyalahgunaan kewenangan, penggunaan identitas korporasi yang tidak sesuai ketentuan, maupun pemanfaatan informasi internal untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Kode Etik juga menekankan pentingnya menjaga integritas sistem perbankan, menghindari tindakan melanggar hukum, serta memastikan rekening pegawai dikelola secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai prinsip syariah maupun ketentuan regulator.

Untuk memperkuat penerapan Kode Etik, BSI mewajibkan seluruh jajaran Bank melakukan annual disclosure sebagai bentuk komitmen terhadap integritas pribadi dan profesional. Pengawasan atas implementasi Kode Etik dilakukan oleh unit yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan, yang berwenang mengusulkan pembaruan jika terjadi perubahan internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi relevansi Kode Etik. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku sehingga memastikan disiplin dan akuntabilitas tetap terjaga di seluruh tingkat organisasi.

**WHISTLEBLOWING SYSTEM**

[GRI 2-16, 2-26] [FN-CB-510a.2]

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga budaya integritas dan tata kelola yang sehat, BSI mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) sebagai saluran aman bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemasok, nasabah, dan pihak ketiga lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran. WBS dirancang untuk memastikan setiap laporan mengenai indikasi kecurangan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika, maupun ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat ditindaklanjuti secara objektif dan bertanggung jawab. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas yang diatur dalam kebijakan tata kelola perusahaan dan PTO WBS BSI Tahun 2025.

BSI menjamin perlindungan penuh terhadap pelapor, termasuk kerahasiaan identitas serta isi laporan, dan memastikan bahwa seluruh informasi ditangani secara aman. Setiap pengaduan diproses secara rahasia dan diselidiki dengan kehati-hatian sambil tetap menghormati hak-hak pihak yang terlibat. Pelapor diharapkan memberikan informasi berbasis fakta dan beritikad baik sesuai unsur pelaporan "5W + 1H" (*what, who, where, when, why, how*), serta menyertakan bukti pendukung yang relevan, seperti dokumen pembiayaan, surat, rekaman, atau bukti elektronik lainnya, sepanjang diperoleh tanpa melanggar ketentuan hukum.

Ruang lingkup pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS sangat luas, mencakup kecurangan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, pelanggaran kode etik perusahaan, benturan kepentingan, suap atau gratifikasi, tindakan tidak etis, hingga ketidakpatuhan syariah. Seluruh kategori tersebut menjadi perhatian penting bagi BSI dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan standar tata kelola yang tinggi.

Selain sebagai sarana pelaporan, WBS juga menjadi kanal bagi pegawai dan pemangku

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

kepentingan untuk meminta saran mengenai penerapan etika bisnis, kepatuhan, serta tata kelola keberlanjutan. Permintaan konsultasi dapat disampaikan melalui Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, atau Unit ESG, termasuk melalui email internal, NPS, dan sesi sosialisasi kebijakan yang dilakukan secara berkala.

Untuk memudahkan pelaporan, BSI menyediakan berbagai kanal WBS yang dapat diakses kapan saja, yaitu:

- Website: <https://whistleblowing.tips/wbs/@E-WBS>
- Email: [e-wbsi@rsm.id](mailto:e-wbsi@rsm.id)
- Telepon/WA/SMS: 08117-851-851

Pada tahun 2025, BSI mencatat total 118 laporan WBS, yang terdiri dari 11 laporan yang telah ditindaklanjuti, 11 laporan yang masih dalam proses investigasi, 46 laporan yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria atau tidak layak ditindaklanjuti, serta 50 laporan yang ditutup karena kurangnya bukti atau tidak terbukti. Seluruh laporan tersebut telah ditangani sesuai prosedur PTO WBS, termasuk proses analisis awal, klarifikasi, investigasi lanjutan, serta dokumentasi hasil temuan. BSI memastikan bahwa setiap laporan memperoleh respons yang memadai dan secara konsisten dipantau oleh Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk memastikan efektivitas penanganan pengaduan dan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi.

### Penyampaian Isu Kritis kepada Organ Tata Kelola Tertinggi [GRI 2-16]

BSI memiliki mekanisme penyampaian isu kritis kepada organ tata kelola tertinggi melalui jalur pelaporan berjenjang yang melibatkan Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Internal. Isu yang dikategorikan sebagai isu kritis meliputi kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak material terhadap aspek keuangan, operasional, kepatuhan, reputasi, atau keberlanjutan Bank. Apabila suatu isu diklasifikasikan sebagai isu kritis dan memerlukan penanganan segera, laporan khusus akan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui rapat koordinasi pengawasan atau melalui mekanisme eskalasi yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat isu kritis yang dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris. Mayoritas potensi isu signifikan berhasil ditangani

pada tingkat manajemen melalui sistem pengendalian internal dan pemantauan risiko. Apabila di periode berikutnya terdapat isu kritis yang memerlukan perhatian organ tata kelola tertinggi, jumlah dan sifat isu tersebut akan diungkapkan secara transparan dalam Laporan Keberlanjutan.

## ANTI KORUPSI, ANTI-FRAUD, DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

### Operasi-operasi yang Dinilai Memiliki Risiko

#### [GRI 205-1]

BSI memahami bahwa risiko terjadinya tindakan korupsi melekat pada seluruh unit kerja, seiring dengan kewenangan pengelolaan anggaran yang dijalankan secara mandiri oleh masing-masing unit. Sepanjang tahun 2025, manajemen telah mengidentifikasi bahwa pengelolaan anggaran tersebut merupakan risiko utama yang memerlukan pengendalian dan pengawasan yang memadai.

Untuk meminimalkan potensi tersebut, BSI menerapkan berbagai program dan prosedur pencegahan korupsi yang sejalan dengan ketentuan hukum berlaku. Mengacu pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2002, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Salah satu bentuk yang dapat memicu praktik korupsi adalah gratifikasi. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ini, BSI telah menetapkan PTO Pengendalian Gratifikasi, yang secara rutin disosialisasikan kepada seluruh pegawai agar dipahami dan diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Melalui penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi tersebut, BSI mendorong seluruh pegawai untuk:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Compliance.

Selain pengendalian gratifikasi, BSI juga melaksanakan sejumlah prosedur pencegahan untuk menghadapi risiko korupsi, suap, *kickback*, dan *fraud* lainnya, yang mencakup:

1. Pengendalian gratifikasi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Jajaran Bank
2. Setiap jajaran Bank wajib menghindari dan menolak pemberian gratifikasi dengan sopan yang dapat dianggap sebagai pemberian suap (baik itu pemberian dari pihak eksternal ataupun internal/sesama Jajaran Bank) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Pejabat Bank.
3. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (Anti *Bribery-Compliance* & AML-CFT Group) disertai dengan bukti autentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Jajaran Bank yang melakukan penolakan/penerimaan Gratifikasi, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan hal tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi melalui email. [antibribery@bankbsi.co.id](mailto:antibribery@bankbsi.co.id) dan/atau melalui *Whatsapp* dengan nomor 08118 451 451 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
5. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan *review* atas pelaporan penerimaan gratifikasi dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima lengkap berserta dokumen pendukungnya.
6. Jajaran Bank wajib mengedukasi pemberi atau pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan cara yang baik dan sopan mengenai larangan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan/atau gratifikasi lainnya yang dilarang.
7. Apabila Jajaran Bank mengetahui adanya penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dilaporkan oleh penerima, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melalui sarana WBS.

#### Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Memasuki tahun 2025, BSI terus mempertahankan penerapan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah dimiliki sejak 2021 dan diperbarui melalui resertifikasi pada 2024. Penerapan standar ini tetap menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis BSI berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, dan tata kelola yang bebas dari penyuapan. Sepanjang 2025, BSI melanjutkan penguatan pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan untuk memastikan efektivitas penerapan ISO 37001:2016. Manfaat dari keberlanjutan penerapan ISO SMAP ini mencakup:

1. Mencegah Praktik Penyuapan
2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Regulasi
3. Meningkatkan Reputasi Perusahaan
4. Meminimalkan Risiko Hukum
5. Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Etis
6. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas
7. Menambah Nilai Kompetitif
8. Memberikan Kepercayaan Kepada Investor dan Pemangku Kepentingan

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

### Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakan dan Prosedur [GRI 205-2]

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman seluruh insan Bank mengenai mekanisme pengendalian serta menanamkan budaya *Awareness Anti-Fraud* sesuai PTO Pengendalian Gratifikasi. Sepanjang 2025, kegiatan sosialisasi ini terus diperluas dan diberikan kepada seluruh pegawai BSI, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai bagian dari upaya penguatan integritas di seluruh unit kerja.

Selain kepada internal, BSI juga memberikan edukasi *anti-fraud* kepada mitra bisnis melalui proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan *vendor gathering*, penandatanganan pakta integritas, dan penerapan etika pengadaan di seluruh wilayah operasional. Upaya ini diperkuat dengan penyediaan dan pembaruan informasi kebijakan *anti-fraud* melalui situs resmi BSI, memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki akses yang jelas terhadap standar etika dan tata kelola yang diterapkan Bank.

Pada tahun 2025, program yang dijalankan meliputi:

1. Pelaksanaan *Risk Awareness* dan *Anti-Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui berbagai media, baik *online* maupun *offline*, termasuk email *blast*, *desktop notification*, poster, infografis, video, media sosial, dan *monitoring onsite*. Kegiatan ini mencakup penyebaran konten dan poster anti-gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary & Communication Group melalui email *blast*, *WhatsApp blast*, media sosial, dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Perihal	Media
1.	30 Januari 2025	Videografis Compliance Awareness "Gratifikasi dari Pandangan Islam"	Email <i>blast</i>
2.	28 Februari 2025	Poster Himbuan Pengendalian Gratifikasi di Bulan Suci Ramadhan 1446 H	Email <i>blast</i>
3.	2 & 3 Maret 2025	Poster Larangan Gratifikasi Ramadhan 1446 H	Website dan media Sosial BSI
4.	6 Maret 2025	Imbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri 1446 H	Surat
5.	6 Maret 2025	Imbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri 1446 H	Nota
6.	24 Maret 2025	Poster Sambut Idul Fitri tanpa Gratifikasi	Email <i>blast</i>
7.	30 Maret 2025	Poster Indahya idul Fitri tanpa Gratifikasi	Media sosial BSI
8.	17 April 2025	Hari Kartini tema "Hentikan Gratifikasi Bangun Integritas"	Email <i>blast</i>
9.	19 Mei 2025	Hari Kebangkitan Nasional tema "Bangkit Bersama, Tolak Gratifikasi untuk Indonesia Berintegritas"	Email <i>blast</i>
10.	6 Juni 2025	Komitmen Anti Gratifikasi Insan BSI terkait Hari Raya Idul Adha	Media sosial dan website BSI
11.	10 Juni 2025	Hari Raya Idul Adha mengenai larangan menerima gratifikasi hari Raya idul Adha`	Email <i>blast</i>
12.	10 – 11 Juni 2025	Media Pelaporan Gratifikasi di BSI	Desktop PC BSI
13.	8 – 9 Juli 2025	7 Langkah Mengidentifikasi Gratifikasi (PROVE IT) di BSI	Desktop PC BSI
14.	15 Agustus 2025	Hari Kemerdekaan RI Ke 80 tema " Merdeka dari Gratifikasi dan Suap"	Email <i>blast</i>
15.	10 November 2025	Hari Pahlawan	Email <i>blast</i>
16.	9 Desember 2025	Hari Antikorupsi Sedunia	Email <i>blast</i>
17.	23 Desember 2025	Menyambut Tahun Baru 2026	Email <i>blast</i>

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

2. Sosialisasi Anti Gratifikasi (*Laa Risywah*) kepada seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran pegawai terhadap pentingnya pencegahan gratifikasi serta memastikan pemahaman yang selaras di seluruh unit kerja.
- a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dilakukan melalui sesi tatap muka yang diselenggarakan secara daring maupun luring, sehingga dapat menjangkau seluruh pegawai tanpa batasan lokasi.:

Sasaran Sosialisasi	Peserta Sosialisasi	
<b>PIHAK INTERNAL</b> (Pegawai Organik dan Non Organik BSI)	7 Februari 2025	1. Seluruh sekretaris Direksi, Komisaris, 2. Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh Group secara online (Teams)
	24 - 25 April 2025	RO II Medan
	3 Juni 2025	HCS
	11 Juni 2025	1. RCBM Banjarmasin, 2. RCBM Balikpapan, 3. ASBM Banjarmasin, dan 4. ASBM Balikpapan
	14 Juni 2025	FOG Kantor Pusat
	6 Agustus 2025	1. KCP Serang A Yani 1, 2. KCP JKT Gading Boulevard Raya, 3. KC Bekasi A Yani, 4. KCP JKT Rawamangun, 5. Area Consumer Business Manager, 6. Fancing Channel Manager
	4 Oktober 2025	FCG Kantor Pusat
	11 November 2025	RSC All Region
<b>PIHAK EKSTERNAL</b> (Rekanan, Vendor, Mitra kerja dan Pihak ketiga lainnya)	13 Oktober 2025	PT Mandiri Utama Finance (Mitra Kerja)

- b. Selain penyampaian materi, BSI juga melakukan kunjungan langsung ke unit kerja sebagai bagian dari pengawasan atas pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
1.	24 - 25 April 2025	KC Lubuk Pakam	II
2.	24 - 25 April 2025	KC Medan Juanda	II
3.	20 Mei 2025	KC Semarang Padanaran	VII
4.	21 Mei 2025	KCP Pemuda Klaten	VII
5.	22 Mei 2025	KC Yogyakarta Kota Gede	VII
6.	3-4 Juni 2025	KCP Bandung Rancaekek	VI
7.	10-11 Juni 2025	KC Cirebon dr Cipto	VI
8.	18 Juli 2025	KC Bandung Metro	VI
9.	23 Juli 2025	KC Bandung Citarum	VI
10.	11 Agustus 2025	KCP Bandung Surapati	VI
11.	12 Agustus 2025	KC Bandung Antapani	VI
12.	13 Agustus 2025	Area Pontianak	IX
13.	14 Agustus 2025	RO IX Kalimantan	IX

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
14.	20 Agustus 2025	KC Bandung Pajajaran	VI
15.	21 Agustus 2025	KCP Bandung Buah Batu 2	VI
16.	4 September 2025	KCP Bandung Dago	VI
17.	8 September 2025	KCP Bandung RE Martadinata	VI
18.	9 September 2025	KCP JKT Telkom Gatot Subroto	IV
19.	9 September 2025	KCP Bandung Setrasari	VI
20.	10 September 2025	KCP JKT Cikini	IV
21.	10 September 2025	RFO & FC RO Bandung	VI
22.	10 September 2025	KCP Bandung Kopo	VI
23.	11 September 2025	KCP JKT Wahid Hasyim	IV
24.	15 September 2025	KCP Cimahi Baros	VI
25.	16 September 2025	KCP JKT Bendungan Hilir	IV
26.	17 September 2025	KCP Cimahi	VI
27.	8 Oktober 2025	KCP Cimahi Amir Macmud	VI
28.	10 Oktober 2025	KCP Bandung Astana Anyar	VI

Pada tahun 2025, BSI telah melaksanakan sosialisasi kebijakan anti-korupsi dan penandatanganan pakta integritas kepada seluruh kelompok pemangku kepentingan internal dan eksternal. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (100%) telah mengikuti sosialisasi serta menandatangani pakta integritas. Dari total pegawai, seluruh pegawai (100%) juga telah menerima sosialisasi kebijakan anti-korupsi dan anti-gratifikasi serta melakukan penandatanganan pakta integritas. Selain itu, seluruh mitra bisnis (100%) telah memperoleh sosialisasi melalui proses pengadaan, vendor *gathering*, serta penandatanganan pakta integritas. Penyampaian data kuantitatif ini memastikan bahwa cakupan program anti-korupsi BSI dapat dievaluasi secara terukur dan transparan.

#### Insiden yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil [GRI 205-3]

Pada tahun 2025, BSI tidak mencatat adanya insiden korupsi yang terbukti. Komitmen terhadap penerapan prinsip anti-korupsi dan penguatan pengendalian internal memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana korupsi sepanjang periode pelaporan.

Pada tahun 2025, BSI mencatat sejumlah insiden korupsi yang melibatkan 3 (tiga) pegawai tetap. Atas insiden tersebut, 3 (tiga) pegawai tetap dikenakan pemutusan hubungan kerja. Tidak terdapat pemutusan kontrak terhadap mitra maupun pengajuan laporan kasus fraud yang berasal dari publik.

Dalam rangka mencegah terulangnya kejadian serupa serta mendukung pencapaian zero corruption, BSI memperkuat pengendalian internal, meningkatkan pemantauan berbasis risiko, serta memperluas pelaksanaan program edukasi anti-korupsi di seluruh unit kerja.

Keterangan	Jumlah (Orang)	Status
Pegawai tetap	3	3 karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja
Pegawai tidak tetap	0	-

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

### PERDAGANGAN ORANG DALAM

Sebagai bank publik, BSI memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh aktivitasnya sejalan dengan ketentuan pasar modal serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Untuk itu, BSI menerapkan kebijakan larangan *insider trading* yang mengatur bahwa seluruh pegawai, manajemen, dan pihak yang memiliki akses terhadap informasi material non-publik dilarang memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain.

Pengawasan terhadap kepatuhan pasar modal dilakukan oleh Corporate Secretary bersama unit-unit terkait yang memastikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan informasi material dilakukan sesuai ketentuan dan dicatat secara transparan. BSI secara berkala memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan kepemilikan saham, batasan transaksi, dan ketentuan penggunaan informasi material. Setiap potensi pelanggaran ditangani melalui proses verifikasi menyeluruh serta dilaporkan kepada otoritas sesuai ketentuan.

Sepanjang 2025, BSI tidak mencatat adanya insiden *insider trading*. Hal ini menunjukkan efektivitas pengendalian internal serta kesadaran tinggi seluruh pegawai dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal.

### PELINDUNGAN DATA PRIBADI

#### Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan dan pelindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan/atau prosesor data pribadi, mekanisme transfer data pribadi, serta sanksi atas pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Regulasi tersebut menempatkan privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menuntut organisasi untuk bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Mengenal UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia

Ringkasan pilar utama Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai hak asasi manusia di era digital.



##### Apa itu UU PDP?

UU No. 27/2022 yang mengaku data pribadi sebagai hak dasar manusia.



##### Prinsip Utama:

##### Sah, Adil, Transparan

Pemrosesan data pribadi wajib berdasarkan persetujuan sah dari pemilik data.



##### Hak Subjek Data:

##### Kendali di Tangan Anda

Individu berhak mengetahui, mengakses, dan memperbaiki data pribadinya.



##### Kewajiban Pengendali Data: Lindungi & Laporkan

Wajib melindungi data dan memberi tahu jika terjadi kebocoran (*data breach*).



##### Sanksi Tegas:

##### Administratif & Pidana

Diterapkan untuk memastikan pengelolaan data yang bertanggung jawab dan adil.



##### Tujuan Utama:

##### Menjaga Martabat Warga Negara

Melindungi hak, keamanan, dan reputasi individu di dunia digital.

#### Siklus Pelindungan Data Pribadi

Bank telah mengatur tahapan proses dalam pelindungan data pribadi sebagai berikut:

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

**Confidentiality Integrity Availability****01. Perolehan dan Pengumpulan**

- » Tujuan Pemrosesan
- » Dasar Pemrosesan
- » Pembatasan Penggunaan dan Pengumpulan Data

**02. Pengolahan dan Penganalisaan**

- » *Record of Processing Activities (ROPA)*
- » *Data Protection Impact Assessment (DPIA)*

**03. Penyimpanan**

- » Pengamanan Data
- » Retensi Data

**04. Perbaikan dan Pembaharuan**

- » Verifikasi Data
- » Memfasilitasi Subjek Data, melengkapi, Membaharui Data

**05. Penampilan, Pengumuman, Transfer, Penyebarluasan atau Pengungkapan**

- » Pemberian Notifikasi ke Subjek Data
- » Mematuhi Kriteria Transfer Data ke Luar Wilayah NKRI
- » Pengendalian Keamanan Data Pribadi

**06. Penghapusan atau Pemusnahan**

- » Pemusnahan Sesuai JRD
- » Penetapan Mekanisme Penghapusan dan Pemusnahan

**Maqashid Syariah dan Pelindungan Data Pribadi**

Bank dalam menerapkan pelindungan data pribadi dalam konteks modern dapat dikaitkan langsung dengan Maqashid Syariah, sebagai berikut:

**Amanah di Era Digital: Menjaga Privasi dalam Bingkai Syariah**

**Krisis Data Global 2024: Lebih dari 5,5 Miliar Akun Bocor**  
Peningkatan hampir 8 kali lipat dari tahun sebelumnya, menunjukkan urgensi pelindungan data.

**Apa itu Maqashid Syariah?**

Tujuan utama hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.



**Menjaga Harga (Hifz al-Mal)**  
Melindungi data perbankan dan aset ekonomi dari penipuan dan pencurian identitas.

**Menjaga Jiwa dan Kehormatan (Hifz al-Nafs & Hifz al-'Ird)**

Mencegah penyalahgunaan data yang mengancam keselamatan dan merusak nama baik individu.



**Menjaga Akal (Hifz al-'Aql)**  
Mencegah manipulasi data dan informasi yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

**Perlindungan Data adalah Amanah**

Bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab moral dan religius di era digital

## a. Hifz al-nafs (pelindungan jiwa)

Data pribadi yang bocor dapat membahayakan keselamatan seseorang, seperti alamat rumah dan data kesehatan. Menjaga kerahasiaan data berarti menjaga keamanan jiwa.

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

- b. Hifz al-'aql (pelindungan akal)  
Informasi pribadi yang disalahgunakan, seperti manipulasi psikologis dan hoaks berbasis data, dapat merusak akal sehat. Pelindungan data mencegah eksploitasi yang merusak rasionalitas.
- c. Hifz al-nasl (pelindungan keturunan/martabat)  
Privasi keluarga, rekam jejak digital, dan data anak-anak perlu dijaga agar tidak menimbulkan aib atau merusak kehormatan.
- d. Hifz al-mal (pelindungan harta)  
Data finansial, termasuk rekening, kartu kredit, dan transaksi, merupakan bagian dari harta. Kebocoran data dapat menyebabkan pencurian atau penipuan.
- e. Hifz al-din (pelindungan agama)  
Data yang berkaitan dengan keyakinan atau praktik ibadah termasuk data sensitif. Menjaga kerahasiaannya berarti melindungi kebebasan beragama dari diskriminasi atau penyalahgunaan.

Pelindungan data pribadi merupakan manifestasi kontemporer dari Maqashid Syariah karena keduanya berorientasi pada penjagaan kemaslahatan, martabat, dan keamanan manusia. Regulasi modern seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia maupun GDPR di Eropa sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam menjaga hak-hak dasar manusia.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, Bank telah menerapkan pengaturan pelindungan data pribadi yang dituangkan dalam beberapa inisiatif berikut:

1. Implementasi Pelindungan Data Pribadi melalui Tools Pelindungan Data Pribadi (Securiti.AI)  
Bank menggunakan sistem berbasis teknologi berupa aplikasi Securiti.AI sebagai platform terintegrasi untuk mendukung pembaruan, pengelolaan, dan pengendalian kebijakan privasi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik pelindungan data pribadi. Aplikasi Securiti.AI telah terintegrasi dengan ekosistem digital BSI, meliputi:
  - BSI Web Corporate;
  - BSI Investor Relations; dan
  - BSI Web Dubai.

Integrasi tersebut memastikan kebijakan privasi yang ditampilkan kepada publik dan pemangku kepentingan selalu mutakhir, konsisten, dan selaras di seluruh kanal digital resmi BSI, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemrosesan data pribadi.

Securiti.AI juga menyediakan modul fungsional untuk memperkuat implementasi pelindungan data pribadi secara menyeluruh, meliputi:

- *Record of Processing Activities (RoPA)*, untuk mendokumentasikan dan memetakan seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi secara terstruktur, sehingga BSI memiliki visibilitas atas seluruh jenis data, tujuan pemrosesan, serta pihak-pihak yang terlibat.
- *Data Protection Impact Assessment (DPIA)*, yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko PDP pada pemrosesan data pribadi yang terdapat di dalam seluruh produk dan layanan serta kegiatan operasional BSI, khususnya yang berisiko tinggi terhadap hak dan kebebasan subjek data.
- *Data Breach Management*, sebagai sarana pengelolaan insiden kebocoran data secara sistematis, mulai dari pencatatan, penilaian dampak, hingga tindak lanjut dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- *Data Subject Request (DSR)*, untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak subjek data, seperti hak akses, perbaikan, penghapusan, dan keberatan atas pemrosesan data pribadi, secara terkelola dan terdokumentasi.
- *Sensitive Data Intelligence*, yang memungkinkan BSI untuk mengidentifikasi dan mengelola data pribadi yang bersifat sensitif secara lebih akurat, guna memastikan penerapan kontrol pelindungan yang memadai.
- *Universal Consent Management*, untuk mengelola persetujuan (*consent*) subjek data secara terpusat, transparan, dan dapat ditelusuri, sesuai dengan prinsip *lawful basis for processing*.

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

- *Cookie Consent Management*, yang memastikan pengelolaan persetujuan penggunaan cookie pada kanal digital BSI dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan PDP.
2. Penerapan Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi melalui Penguatan Kebijakan dan Prosedur Bank
- Bank memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur yang mendukung aktivitas bisnis dan operasional terkait pelindungan data pribadi. Sepanjang tahun 2025, Bank telah:
- menerbitkan 4 ketentuan baru, dan
  - melakukan 206 pemutakhiran ketentuan.

Ketentuan tersebut mencakup kebijakan, standar prosedur pengendalian, dan petunjuk teknis operasional yang mengatur seluruh siklus pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan hingga penghapusan data. Seluruh ketentuan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta praktik terbaik di industri perbankan dan teknologi informasi, serta didukung oleh mekanisme pengawasan internal, pengelolaan risiko, dan peningkatan kesadaran pegawai melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.

3. Penerapan ISO/IEC 27701 – Privacy Information Management System (PIMS)
- Untuk mendukung visi BSI sebagai bank syariah bertaraf global, Bank telah mengimplementasikan standar internasional ISO/IEC 27701 – *Privacy Information Management System* (PIMS). Penerapan standar ini memperkuat kerangka kerja keamanan informasi dengan memastikan pengelolaan data pribadi dilakukan secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi dengan baik, baik dalam peran Bank sebagai pengendali data maupun sebagai pemroses data.

Pada 19 Desember 2025, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menegaskan komitmennya terhadap tata kelola etika digital di tengah percepatan transformasi teknologi dengan menjadi first mover Bank Himbara pertama yang mengimplementasikan sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 untuk pelindungan data pribadi nasabah.

Penyerahan sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 Sistem Manajemen Informasi Privasi (SMIP) diserahkan oleh Regional Director Lembaga Sertifikasi CBQA Global Anwar Siregar kepada Direktur Compliance & Human Capital BSI Arief Adhi Sanjaya dan Direktur Information Technology BSI Muharto Hadi Suprpto pada tanggal 26 Februari 2026 dan telah dipublikasikan di beberapa media.

### PENERAPAN STANDAR DAN PEDOMAN KEBERLANJUTAN INTERNASIONAL ISO 26000:2010 – GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola keberlanjutan dan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, BSI secara berkelanjutan mengacu pada standar dan pedoman internasional yang relevan. Salah satu pedoman utama yang digunakan adalah ISO 26000:2010 – *Guidance on Social Responsibility*, yang memberikan kerangka komprehensif mengenai prinsip, praktik, dan isu inti tanggung jawab sosial organisasi.

Pada tahun 2025, BSI telah melaksanakan Gap Analysis terhadap implementasi ISO 26000:2010 untuk menilai tingkat kesesuaian kebijakan, proses, dan praktik operasional Bank terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Gap Analysis ini dilakukan melalui penelaahan dokumen, wawancara dengan unit kerja terkait, serta evaluasi atas praktik yang telah berjalan, guna memastikan bahwa prinsip tanggung jawab sosial telah terintegrasi secara memadai dalam tata kelola dan aktivitas bisnis BSI.

Berdasarkan hasil Gap Analysis, BSI mencatat tingkat kesesuaian (*compliance*) sebesar 91,7% terhadap persyaratan ISO 26000:2010. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas prinsip dan subjek inti tanggung jawab sosial telah diimplementasikan secara efektif dan konsisten dalam operasional Bank. Sementara itu, sebanyak 8,3% diidentifikasi sebagai *Opportunity for Improvement* (OFI), yang mencerminkan area penguatan berkelanjutan dan bukan merupakan ketidaksesuaian yang bersifat material.

Evaluasi kepatuhan tersebut mencakup seluruh prinsip utama ISO 26000, yaitu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan

## KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

terhadap kepentingan pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap norma perilaku internasional, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap tujuh subjek inti tanggung jawab sosial, meliputi:

- Tata Kelola Organisasi,
- Hak Asasi Manusia,
- Praktik Ketenagakerjaan,
- Lingkungan Hidup,
- Praktik Operasional yang Adil,
- Isu Konsumen, dan
- Pelibatan serta Pengembangan Masyarakat.

Hasil *Gap Analysis* menegaskan bahwa pendekatan keberlanjutan BSI bersifat holistik dan terintegrasi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta selaras dengan karakteristik BSI sebagai bank syariah yang mengedepankan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan.

Area OFI yang teridentifikasi menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak lanjut (*action plan*) dalam rangka penguatan kebijakan, prosedur,

dan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *continual improvement* dan komitmen BSI untuk meningkatkan kualitas tata kelola keberlanjutan dari waktu ke waktu.

Hasil *Gap Analysis* ISO 26000:2010 dimanfaatkan sebagai referensi strategis dalam:

- penguatan tata kelola keberlanjutan,
- penyempurnaan kebijakan dan pedoman internal,
- peningkatan koordinasi lintas fungsi, serta
- penajaman proses identifikasi dan pengelolaan isu keberlanjutan yang material.

Dengan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap ISO 26000:2010 dan komitmen untuk menindaklanjuti area penguatan yang teridentifikasi, BSI menegaskan perannya sebagai institusi perbankan syariah yang bertanggung jawab, beretika, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

### ISO 26000:2010 – Kesesuaian Tanggung Jawab Sosial

Tingkat Kepatuhan 91,7%

Pada tahun 2025, BSI telah melaksanakan *Gap Analysis* secara komprehensif terhadap ISO 26000:2010, yang mengonfirmasi tingkat kesesuaian yang tinggi (91,7%) terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial internasional, mencakup aspek tata kelola, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, praktik operasional yang adil, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Sisa 8,3% diidentifikasi sebagai *Opportunity for Improvement* (OFI), yang menjadi dasar bagi peningkatan berkelanjutan atas tata kelola keberlanjutan, kebijakan, serta integrasi lintas fungsi, tanpa adanya ketidaksesuaian yang bersifat material.

Hasil penilaian ini memperkuat komitmen BSI dalam menerapkan praktik keberlanjutan yang beretika, akuntabel, dan berlandaskan nilai, sejalan dengan peran BSI sebagai bank syariah terdepan yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang dan penguatan kepercayaan pemangku kepentingan.

## AKTIVITAS LOBI DAN KONTRIBUSI POLITIK

BSI memastikan bahwa seluruh aktivitasnya selaras dengan ketentuan perundang-undangan tanpa melakukan upaya untuk memengaruhi kebijakan publik atau keputusan pemerintah. Sepanjang tahun 2025, BSI tidak melakukan kegiatan lobi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan penyusunan regulasi atau kebijakan pemerintah.

Selain itu, BSI tidak memberikan kontribusi politik, baik berupa dana, fasilitas, maupun bentuk dukungan lainnya kepada partai politik, kandidat, atau kegiatan politik. Kebijakan ini ditegakkan untuk menjaga independensi dan integritas BSI.

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam ekosistem perbankan nasional dan global, BSI memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga integritas seluruh transaksi keuangan serta memastikan produk dan layanan digunakan secara sah dan aman. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan wujud penerapan nilai-nilai syariah dalam melindungi kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, BSI mendukung upaya penegakan hukum melalui pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Implementasi program APU, PPT, dan PPPSPM di BSI telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan serta *international best practices*. Program ini mencakup lima pilar utama, yaitu pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, sistem informasi manajemen, serta pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan. Penjelasan lebih lengkap mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan pada bagian Tata Kelola Perusahaan yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://ir.bankbsi.co.id>.

# PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

[OJK E]

## PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

[OJK E.1] [GRI 2-9, 2-12, 2-13, 2-14] [IFRS S1-GOVERNANCE, IFRS S2- GOVERNANCE]

Sebagai institusi yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan, BSI menerapkan tata kelola ESG melalui keterlibatan aktif organ pengawas dan pengelola. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah berperan memastikan bahwa proses dan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berjalan konsisten, sesuai regulasi, dan mengikuti prinsip syariah. Keterlibatan ini mencakup pemberian arahan strategis, pengawasan implementasi RAKB, penyusunan Laporan Keberlanjutan, serta penetapan prioritas keberlanjutan Bank.

Dewan Komisaris memperoleh pembaruan rutin dari Direksi dan Komite Manajemen Risiko terkait identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait mitigasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain mekanisme internal, Dewan Komisaris juga berperan dalam proses uji tuntas (*due diligence*) melalui RUPS serta dialog dengan pemegang saham dan regulator sebagai bagian dari *engagement* pemangku kepentingan.

Untuk menjaga efektivitas pengelolaan dampak, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi minimal setiap triwulan mencakup perkembangan implementasi RAKB, indikator kinerja keberlanjutan, hasil rapat Komite Pemantau Risiko, serta temuan terkait risiko ESG. Evaluasi berkala ini memastikan bahwa langkah mitigasi dan strategi keberlanjutan dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pelaporan keberlanjutan dilakukan melalui mekanisme berjenjang. Pejabat eksekutif senior yang membawahi fungsi keberlanjutan menyampaikan perkembangan RAKB dan kinerja ESG kepada Direksi setiap bulan. Direksi kemudian melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan triwulanan. Struktur ini memastikan bahwa organ pengawas menerima informasi yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab meninjau dan menyetujui Laporan Keberlanjutan, termasuk penetapan topik material serta memastikan relevansi dan akurasi pengungkapan. Peninjauan dilakukan setidaknya sekali setiap tahun sebelum laporan diterbitkan.



Untuk memperkuat koordinasi keberlanjutan, BSI telah membentuk unit kerja khusus ESG melalui Keputusan Direksi No. 04/219-KEP/DIR tanggal 6 Juni 2024. Unit ini berada di bawah supervisi langsung Wakil Direktur Utama dan terdiri dari dua fungsi utama: *ESG Strategy & Portfolio Management* serta *ESG Operations & Communication*. Kedua fungsi ini memastikan integrasi aspek keberlanjutan ke dalam proses bisnis, manajemen portofolio, pemantauan RAKB, pelaporan keberlanjutan, serta komunikasi ESG internal dan eksternal.

Pelaksanaan ESG juga melibatkan unit kontributor yang tersebar di seluruh organisasi, termasuk unit bisnis, *support*, *enabler*, dan kantor wilayah. Setiap unit berperan sesuai mandatnya untuk mendukung kerangka, visi, dan komitmen ESG Bank.

Dalam mekanisme tata kelola, hasil pelaksanaan RAKB dilaporkan kepada Direksi, lalu diteruskan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan. ESG Working Group melakukan pemantauan dan evaluasi triwulanan atas prioritas RAKB dan melaporkannya kepada RMC, yang kemudian meneruskan hasilnya kepada Direktur

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Supervisi ESG Group dan Komite Audit. Selain itu, pembahasan RAKB menjadi agenda tetap dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) untuk memastikan penyelarasan strategi. Kinerja keberlanjutan Bank juga dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS, di mana seluruh pemegang saham dapat menyampaikan pandangan terkait isu ESG atau LST.

Sebagai lembaga jasa keuangan, implementasi ESG tercermin dalam RAKB tahunan. Pembagian tugas dan tanggung jawab Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berperan menyetujui RAKB serta memastikan implementasinya berjalan efektif melalui fungsi pengawasan, termasuk memastikan keselarasan dengan prinsip syariah dan tata kelola yang terintegrasi.
- Dewan Direksi menetapkan arah keberlanjutan BSI, mencakup komitmen, strategi, dan peta jalan, sekaligus mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan RAKB serta memastikan komunikasi keberlanjutan kepada regulator dan pemangku kepentingan berjalan optimal.
- Komite Manajemen Risiko merumuskan kebijakan pengelolaan risiko Bank, termasuk risiko keberlanjutan dan risiko iklim, agar selaras dengan kerangka manajemen risiko secara menyeluruh.
- Sub Komite ESG bertugas menetapkan strategi ESG dan memastikan integrasi aspek keberlanjutan dalam manajemen risiko, proses bisnis, serta keputusan operasional di seluruh lini.
- ESG Group menjalankan fungsi koordinasi keberlanjutan, mulai dari penyusunan RAKB,

integrasi keberlanjutan ke dalam proses bisnis, hingga pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program keberlanjutan secara berkala.

- Seluruh SDM terkait: melaksanakan program RAKB sesuai fungsi masing-masing.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyelarasan aspek ESG dalam Arsitektur Kebijakan pembiayaan, meliputi:

- *Negative List* dalam Kebijakan Pembiayaan,
- *Portfolio Guideline*,
- *Exclusion List* dalam SOP Pembiayaan, dan
- *Industry Acceptance Criteria*.

Lebih lanjut, penguatan peran penanggung jawab Keuangan Berkelanjutan juga didukung oleh penerbitan sejumlah kebijakan yang menjadi landasan implementasi keberlanjutan di seluruh unit kerja. Kebijakan tersebut meliputi *ESG Guiding Principle*, *SOP on Sustainable Finance*, serta *Piloting Indonesian Sustainable Finance Taxonomy* untuk sektor hijau. Selain itu, BSI juga menetapkan *Exclusion List* dan melakukan *portfolio realignment* pada *brown sector* untuk memastikan portofolio pembiayaan bergerak secara progresif menuju aktivitas rendah karbon dan berkelanjutan.

Dengan kerangka kebijakan tersebut, penanggung jawab implementasi Keuangan Berkelanjutan pada tingkat unit kerja menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan eksekusi program untuk menjamin penerapan ESG berlangsung efektif dan terukur.

Penanggung jawab implementasi Keuangan Berkelanjutan pada tingkat unit kerja disajikan sebagai berikut:

Unit Kerja	Fungsi
<i>Environmental Social &amp; Governance Group (ESG)</i>	Menyusun kerangka kerja, strategi, <i>roadmap</i> , komitmen dan target terkait implementasi keuangan berkelanjutan BSI. Selain itu, ESG berfungsi dalam mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan RAKB serta mengomunikasikan strategi dan implementasi program ESG kepada <i>stakeholder</i> Bank melalui berbagai kegiatan dan publikasi.
Strategy Planning & Performance Management Group (SPM)	Membuat strategi dan Rencana Bisnis Bank yang akan dijalankan setiap tahunnya.  Pelaksana program: 1. <i>Green Financing</i> 2. <i>Portofolio UMKM/Social Financing</i> 3. <i>Rasio Sustainable Financing</i>

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Unit Kerja	Fungsi
<p><i>Corporate Business:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Corporate Business 1 Group</i></li> <li><i>Corporate Business 2 Group</i></li> <li><i>Corporate Business 3 Group</i></li> </ol>	<p>Melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan (<i>Green Financing</i>) serta mengembangkan produk perbankan yang mendukung prinsip keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Green Financing</i></li> <li><i>Rasio Sustainable Financing</i></li> </ol>
<p><i>Commercial Business:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Commercial Business 1 Group</i></li> <li><i>Commercial Business 2 Group</i></li> </ol>	<p>Melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan (<i>Green Financing</i>) serta mengembangkan produk perbankan yang mendukung prinsip keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Green Financing</i></li> <li><i>Rasio Sustainable Financing</i></li> </ol>
<i>Small Medium Enterprise</i>	<p>Melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan (<i>Social Financing</i>) serta mengembangkan produk perbankan yang mendukung prinsip keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Portofolio UMKM/Social Financing</i></li> <li><i>Rasio Sustainable Financing</i></li> </ol>
<i>Micro Business Group (MBG)</i>	<p>Melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan (<i>Social Financing</i>) serta mengembangkan produk perbankan yang mendukung prinsip keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Portofolio UMKM/ Social Financing</i></li> <li><i>Rasio Sustainable Financing</i></li> </ol>
<i>Islamic Ecosystem Solution Group (ISE)</i>	<p>Pelaksana program: Pengembangan produk</p>
<i>International &amp; Financial Institution Group (FIG)</i>	<p>Pelaksana program: Pengembangan produk</p>
<i>Treasury &amp; Global Market Group (TGM)</i>	<p>Pelaksana program: Pengembangan produk</p>
<i>Operational-Portfolio &amp; Market Risk Group (ERM)</i>	<p>Pelaksana program: Pilar Tata Kelola &amp; Kebijakan</p>
<i>AI &amp; Data Strategy Group</i>	<p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Green Financing</i></li> <li><i>Portofolio UMKM/Social Financing</i></li> </ol>
<i>Compliance &amp; Anti Money Laundering (AML) – Countering – Countering Financing of Terrorism (CFT) Group (CAC)</i>	<p>Pelaksana program: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kepatuhan</p>
<i>Policy &amp; Procedure Group (PPG)</i>	<p>Pembuatan ketentuan internal untuk mendukung program keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelaksana program: Pilar Tata kelola dan Kebijakan</p>
<i>Distribution Strategy Group (DSG)</i>	<p>Mendukung terlaksananya implementasi program keuangan berkelanjutan di seluruh outlet BSI dan optimalisasi penyaluran pembiayaan ekosistem bisnis retail pada titik tumbuh cabang yang telah ditetapkan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Digital Carbon Trading</i></li> <li><i>Penyaluran pembiayaan berkelanjutan</i></li> </ol>

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Unit Kerja	Fungsi
Corporate Secretary & Communication Group (CSG)	<p>Menyusun dan menjalankan fungsi pendayagunaan ZISWAF, menjaga kepatuhan dan tata kelola (governance), menjalankan komunikasi dan management reputasi perusahaan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Signature campaign – BSI Sustainable Movement</i></li> <li>2. <i>1 home 1tree</i></li> <li>3. <i>Sustainability on Campus Collabs with BSI Rock</i></li> <li>4. <i>Green Business Culture Internal Campaign</i></li> <li>5. ISO 26000 dan Perhitungan SROI</li> <li>6. Desa Binaan BSI dengan Perhitungan dampak ESG</li> <li>7. <i>BSI Scholarship</i></li> <li>8. Optimalisasi Distribusi Zakat</li> <li>9. <i>Waste Management Pilot Project (Circular Economy)</i></li> <li>10. <i>Pilot Project Green Zakat</i></li> <li>11. Bantuan tanggap bencana Sumatera</li> </ol>
Bank Syariah Indonesia Corporate University	<p>Menyelenggarakan pelatihan/program untuk meningkatkan kapabilitas pegawai dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sustainable finance awareness</i></li> <li>2. Kewajiban pelatihan SF pengawasan dan pengurus BSI</li> <li>3. Kewajiban pelatihan ESG</li> <li>4. <i>Green Business Culture Internal Campaign</i></li> </ol>
Marketing & Communication Group (MCG)	<p>Mendukung komunikasi pemasaran produk berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <p><i>Signature campaign – BSI Sustainable Movement</i></p>
Card Business Group (CBG)	<p>Pelaksana program:</p> <p>Kartu Syariah Ramah Lingkungan</p>
Human Capital Strategy & Policy Group (HCP)	<p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sustainable finance awareness</i></li> <li>2. Kewajiban pelatihan ESG</li> </ol>
Procurement & Fixed Asset Group (PFA)	<p>Melakukan pengadaan infrastruktur yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Green Building</i></li> <li>2. <i>Electrical Vehicle</i></li> <li>3. <i>Charging Station</i></li> <li>4. Panel Surya</li> </ol>
Corporate Finance & Accounting Group (CFA)	<p>Konsolidasi laporan keuangan terkait dengan portofolio keuangan berkelanjutan dan penghimpunan dana zakat perusahaan.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Distribusi Zakat</li> <li>2. <i>Green Financing</i></li> <li>3. Portofolio UMKM/ <i>Social Financing</i></li> <li>4. Rasio <i>Sustainable Financing</i></li> </ol>
Data Protection Group (DPR)	<p>Memastikan perlindungan data dan tata kelola yang baik sebagai bagian dari pilar <i>Governance</i> dalam ESG.</p> <p>Pelaksana Program:</p> <p>Pilar Tata Kelola &amp; Kebijakan</p>

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Unit Kerja	Fungsi
BSI Maslahat	<p>Mitra Lembaga sosial BSI yang berperan dalam melakukan penyaluran program-program pendayagunaan zakat.</p> <p>Pelaksana program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panel Surya</li> <li>2. ISO 26000 dan perhitungan SROI</li> <li>3. Desa binaan BSI dengan perhitungan dampak ESG</li> <li>4. BSI <i>Scholarship</i></li> <li>5. Optimalisasi Distribusi Zakat</li> <li>6. <i>Waste Management Pilot Project (Circular Economy)</i></li> <li>7. <i>Pilot Project Green Zakat</i></li> </ol>

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN

[OJK E.2] [GRI 2-17, FS4] [IFRS-S1-GOV, IFRS-S2-GOV]

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat implementasi ESG dan Keuangan Berkelanjutan, BSI memastikan bahwa seluruh organ tata kelola dan pegawai memiliki kompetensi yang memadai terkait keberlanjutan. BSI memahami bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang keberlanjutan perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan seiring berkembangnya standar dan regulasi global.

Untuk meningkatkan kapasitas pengawasan pada tingkat tertinggi, BSI secara rutin menyelenggarakan pelatihan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup topik keuangan berkelanjutan, manajemen risiko ESG, perkembangan regulasi, serta tren global terkait ekonomi hijau. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa organ tata kelola tertinggi memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi strategi, dan pengambilan keputusan yang berdampak pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pelatihan ini juga menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab *fiduciary* sebagaimana diatur dalam standar internasional terkait tata kelola keberlanjutan.

Di tingkat operasional, BSI melaksanakan berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui Bank Syariah Indonesia Corporate University. Program ini memberikan pemahaman mengenai kebijakan, praktik, dan isu terkini di bidang keberlanjutan, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Sepanjang tahun 2025, sebanyak 16.166 pegawai telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*), termasuk materi terkait ESG. Rincian jenis pelatihan, topik, dan penyelenggara disajikan pada tabel di bawah ini:

#### Pengembangan Kompetensi yang Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Muhadjir Effendy	Komisaris Utama	Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris	Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka; Digitalisasi Perbankan; Tata Kelola & GCC; ESG & <i>Climate Risk Management</i>	30 Juni 2025	IBI
Felicitas Talullembang	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris	Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka; Digitalisasi Perbankan; Tata Kelola & GCC; ESG & <i>Climate Risk Management</i>	30 Juni 2025	IBI

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Addin Jauharuddin	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris	Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka; Digitalisasi Perbankan; Tata Kelola & GCG; ESG & <i>Climate Risk Management</i>	30 Juni 2025	IBI
Nizar A. Saputra	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris	Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka; Digitalisasi Perbankan; Tata Kelola & GCG; ESG & <i>Climate Risk Management</i>	30 Juni 2025	IBI
Meidy Firmansyah	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris	Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka; Digitalisasi Perbankan; Tata Kelola & GCG; ESG & <i>Climate Risk Management</i>	30 Juni 2025	IBI
Moch. Agus Rofiudin	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris	Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka; Digitalisasi Perbankan; Tata Kelola & GCG; ESG & <i>Climate Risk Management</i>	30 Juni 2025	IBI
Kamaruddin Amin	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris	Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka; Digitalisasi Perbankan; Tata Kelola & GCG; ESG & <i>Climate Risk Management</i>	30 Juni 2025	IBI

## Pengembangan Kompetensi yang Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Direksi

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama	Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Sebagai Dukungan atas Tata Kelola dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	5 Juni 2025	LSPKS
Arif Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital	Sertifikasi Kualifikasi 7 Tanpa Berjenjang Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Sebagai Dukungan atas Tata Kelola dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	18 Juni 2025	LSPKS
Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking	Pelatihan Manajemen Risiko Jenjang 7	Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Sebagai Dukungan atas Tata Kelola dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	2 Juli 2025	BSU
Muharto	Direktur Information Technology (IT)	Pelatihan Manajemen Risiko Jenjang 7	Penguatan Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Sebagai Dukungan atas Tata Kelola dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	18 dan 20 Juni 2025	LPPI
Grandhis H H	Direktur Risk Management	Seminar Internasional Manajemen Risiko Bank Indonesia 2025	<i>Embedding Governance, Financial, and Operational Risk Management into Digital Transformation</i>	13 November 2025	Bank Indonesia

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

**Pengembangan Kompetensi yang Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Senior Executive Vice President (SEVP)**

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Kemas Erwan Husainy	SEVP Branding & Communication / Direktur Retail Banking	Investor <i>Gathering</i>	Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025	5 Mei 2025	BSI
Ana Nurul K	SEVP Operations	<i>Mid-Year Outlook 2025</i>	<i>Managing Risk &amp; Sustainability in Economic Uncertainty &amp; Cyberheist</i>	24 Juni 2025	Infobank
M Misbahul Munir	SEVP Digital Banking	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Penguatan kompetensi manajemen risiko perbankan sebagai dukungan atas tata kelola dan penerapan keuangan berkelanjutan	24 Juni 2025	LSPKS
Ida Triana W	SEVP Funding & Transaction	Pembekalan Skema Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Penguatan kompetensi manajemen risiko perbankan sebagai dukungan atas tata kelola dan penerapan keuangan berkelanjutan	25 Agustus 2025	ASBISINDO
Ali	SEVP Wholesale Risk	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tahun 2025	Penguatan kompetensi manajemen risiko perbankan sebagai dukungan atas tata kelola dan penerapan keuangan berkelanjutan	19 Desember 2025	LSPKS

**MANAJEMEN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN**  
[OJK E.3, FS2, IFRS S1-RISK MANAGEMENT, IFRS S2-RISK MANAGEMENT, FN-CB-550a.1, FN-CB-550a.2]

Dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, BSI menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko Bank. Seluruh proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko telah memasukkan pertimbangan aspek ESG. Risiko yang muncul dari implementasi keuangan berkelanjutan dikelola secara komprehensif melalui empat pilar utama, yaitu: (1) pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (3) efektivitas proses manajemen risiko; serta (4) penerapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasan atas risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk risiko perubahan iklim. Pengawasan dilakukan melalui penelaahan RAKB, laporan keberlanjutan, serta evaluasi berkala terhadap strategi keberlanjutan Bank. Hal ini memastikan bahwa organ tata kelola tertinggi memahami profil risiko ESG yang dihadapi Bank dan memiliki kapasitas untuk mengarahkan respons strategis.

Bank juga memiliki fungsi khusus yang memantau dan menilai risiko ESG secara berkesinambungan. Pengelolaan portofolio pembiayaan mempertimbangkan faktor ESG, termasuk penetapan batasan penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor berintensitas karbon tinggi. Pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai pedoman seperti *Portfolio Guideline*, Petunjuk Teknis Operasional *Industry Acceptance Criteria*, serta Standar Prosedur Bisnis pada setiap segmen pembiayaan.

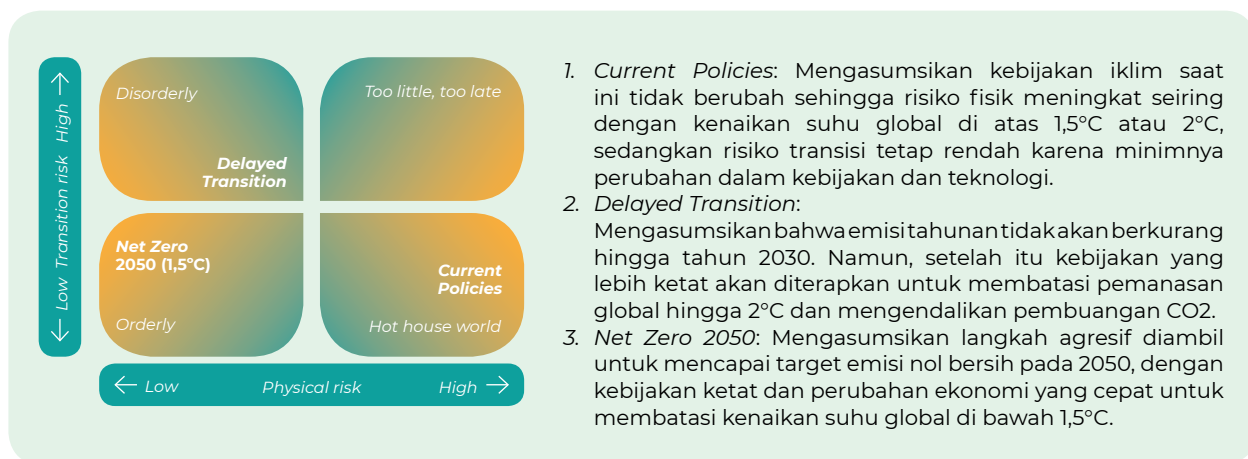
## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Risiko iklim dikelola melalui pengawasan atas dua kategori utama: risiko fisik dan risiko transisi. Risiko fisik berasal dari kejadian alam ekstrem yang dipengaruhi perubahan iklim, sedangkan risiko transisi timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah, arah strategi pemangku kepentingan, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Perubahan tersebut menuntut BSI untuk menyesuaikan arah kebijakan dan strategi agar dapat memitigasi dampaknya terhadap bisnis, reputasi, maupun nilai aset Bank.

### Climate Risk Stress Testing

Risiko yang timbul akibat perubahan iklim menjadi tantangan baru bagi industri perbankan, sehingga Bank perlu secara proaktif mengukur potensi dampaknya terhadap kinerja keuangan dan ketahanan portofolio. Untuk itu BSI terus mengembangkan dan menerapkan CRST guna menilai ketahanan portofolio Bank terhadap berbagai skenario perubahan iklim dalam horizon waktu yang berbeda. Sejalan dengan panduan CRMS yang diterbitkan OJK, BSI juga berpartisipasi dalam *2<sup>nd</sup> Round Pilot Project Climate Risk Stress Test (CRST)* tahun 2025 yang diinisiasi oleh OJK. Melalui partisipasi ini, BSI melakukan pengujian terhadap seluruh portofolio pembiayaan untuk menilai potensi dampak perubahan iklim terhadap kinerja keuangan, strategi, tata kelola, serta kerangka manajemen risiko Bank. Langkah ini mencerminkan komitmen BSI dalam memperkuat ketahanan portofolio pembiayaan sekaligus mengintegrasikan risiko iklim ke dalam pengambilan keputusan bisnis secara terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil CRST digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian strategi portofolio, termasuk pengelolaan eksposur pada sektor beremisi tinggi serta peningkatan alokasi pada sektor hijau prioritas. Temuan ini juga mendukung kontribusi BSI terhadap pencapaian target nasional *Net Zero Emission* serta memperkuat kesiapan Bank dalam menghadapi dinamika transisi menuju ekonomi rendah karbon.



Pada tahun 2025, BSI telah menganalisis dampak risiko iklim dengan cakupan 100% dari total portofolio pembiayaan, yang terdiri atas sektor prioritas dan sektor non-prioritas. Dalam melakukan uji ketahanan iklim, BSI menggunakan framework dan skenario analisis yang ditetapkan oleh OJK dalam Buku Panduan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* Perbankan (CRMS). Pengujian dilakukan dengan menggunakan skenario yang dirancang untuk menilai dampak risiko fisik dan risiko transisi terhadap kinerja keuangan serta eksposur Bank secara keseluruhan.

Untuk menilai dampak risiko fisik, digunakan skenario kejadian iklim ekstrem seperti banjir dan kebakaran hutan. Sementara itu, untuk menilai dampak risiko transisi, digunakan skenario transisi yang dikembangkan oleh *Network for Greening the Financial System (NGFS)* yaitu *Current Policies*, *Delayed Transition*, dan *Net Zero 2050*.

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

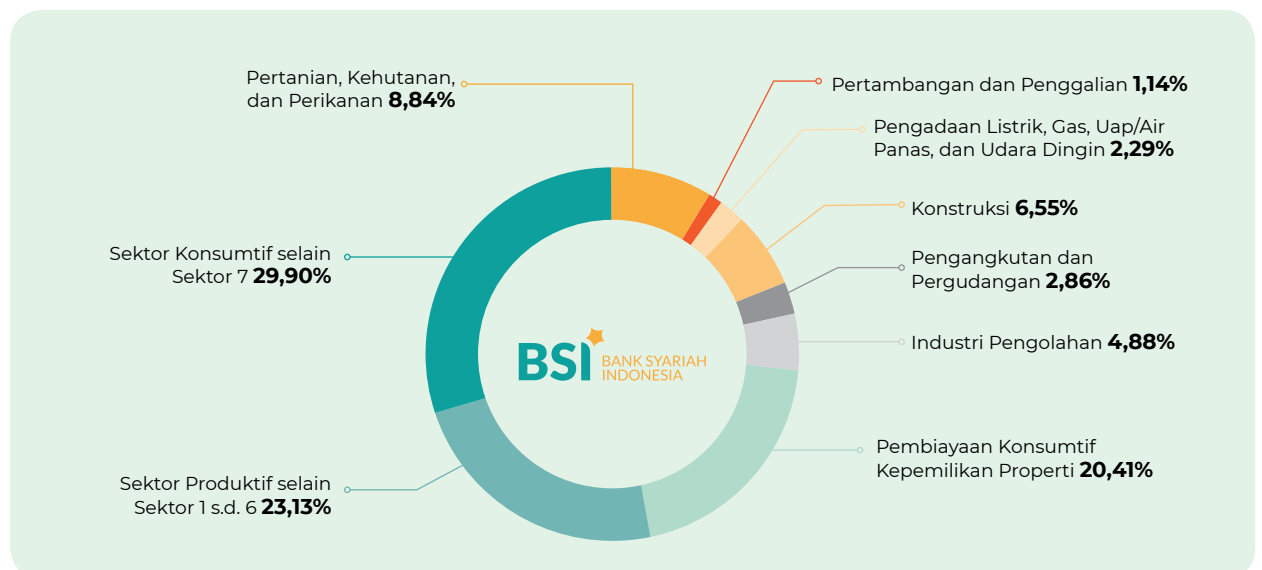
Analisis skenario iklim pada sektor prioritas mencakup 46,97% dari total eksposur pembiayaan BSI. Sektor-sektor tersebut meliputi:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
4. Konstruksi
5. Pengangkutan dan Pergudangan
6. Industri Pengolahan
7. Pembiayaan konsumtif kepemilikan properti

Rincian pangsa portofolio pada masing-masing sektor disajikan pada tabel berikut:

## Portofolio CRST

No.	Klasifikasi	Sektor	Jumlah (dalam Juta Rupiah)	%
1.		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.622.168	8,84%
2.		Pertambangan dan Penggalian	3.180.104	1,14%
3.		Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	6.389.043	2,29%
4.	Sektor Prioritas	Konstruksi	18.241.498	6,55%
5.		Pengangkutan dan Pergudangan	7.956.673	2,86%
6.		Industri Pengolahan	13.590.881	4,88%
7.		Pembiayaan Konsumtif Kepemilikan Properti	56.834.046	20,41%
<b>Jumlah Sektor Prioritas</b>			<b>130.814.413</b>	<b>46,97%</b>
8.	Sektor Non-Prioritas	Sektor Produktif selain Sektor 1 s.d. 6	64.408,71	23,13%
9.		Sektor Konsumtif selain Sektor 7	83.258.141	29,9%
<b>Jumlah</b>			<b>278.481.267</b>	<b>100,00%</b>



Hasil CRST menunjukkan bahwa dampak risiko iklim belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang pada seluruh skenario. Hasil analisis ini mencerminkan bahwa portofolio Bank saat ini relative tahan terhadap skenario iklim yang diuji.

## PENERAPAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN

Pada risiko kredit, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian tercatat sebagai 2 sektor penyumbang *financed emission* terbesar. Hal ini disebabkan besarnya portofolio pada sektor dimaksud. Dalam jangka panjang, sektor Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin menjadi satu-satunya sektor yang menunjukkan potensi dampak material akibat risiko iklim. Namun secara sektoral, risiko iklim belum secara signifikan mempengaruhi portofolio Bank.

Untuk risiko pasar, terjadi peningkatan capital charge sejalan dengan skenario perubahan suku bunga acuan dan penurunan Produk Domestik Bruto (GDP). Pada risiko likuiditas, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) Bank tetap berada di atas ketentuan minimum 100%, baik dalam skenario fisik maupun transisi. Hal ini menandakan bahwa Bank memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi potensi tekanan arus kas akibat perubahan iklim.

Sementara itu, pada risiko operasional, terdapat potensi penurunan nilai aset/kantor, namun dampaknya tidak cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kantor cabang Bank merupakan aset sewa sehingga kerugian akibat penurunan nilai menjadi risiko pemilik atau Perusahaan asuransi.

Secara keseluruhan, permodalan Bank tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal yang berada di atas hurdle rate pada seluruh skenario yang diuji. Hasil analisa ini mengindikasikan bahwa strategi Bank saat ini memiliki ketahanan terhadap risiko iklim, namun tetap diperlukan langkah proaktif untuk memperkuat kebijakan sektor, mengembangkan rencana transisi, dan meningkatkan integrasi risiko iklim ke dalam manajemen risiko.

Untuk penguatan jangka panjang, BSI terus meningkatkan kapabilitas internal dalam melakukan analisis, pemanfaatan, dan integrasi hasil *Climate Risk Stress Test* (CRST) ke dalam proses manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan data, penguatan kapasitas pemodelan, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dalam Bank. Hasil CRST diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai bagian dari proses manajemen risiko yang telah berjalan.

Selain itu, BSI terus meningkatkan kemampuan internal dalam menilai dan menginterpretasikan hasil CRST, termasuk melalui peningkatan kualitas data, kapasitas pemodelan, serta koordinasi lintas fungsi. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil CRST dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari proses manajemen risiko yang sudah ada

### PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.5]

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BSI masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan integrasi aspek ESG secara menyeluruh di seluruh proses bisnis dan operasional. Tantangan tersebut mencakup kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai, ketersediaan dan konsistensi data ESG, serta harmonisasi proses internal agar tetap sejalan dengan ketentuan regulator seperti POJK 51, CRMS OJK, dan Taksonomi Hijau Indonesia, serta standar global yang terus berkembang.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, BSI telah membentuk Unit Kerja Koordinator ESG untuk memimpin penyusunan kerangka kerja, visi, komitmen, strategi, dan inisiatif ESG, termasuk integrasi Keuangan Berkelanjutan ke dalam proses bisnis. Selain itu, Unit Kerja Kontributor ESG, yang berada di unit bisnis, *support*, *enabler*, dan kantor wilayah, berperan aktif menerapkan strategi ESG sesuai lingkup masing-masing, sehingga penerapan ESG dapat berlangsung secara lebih konsisten dan terstruktur.

Sejalan dengan itu, BSI terus menyempurnakan mekanisme internal dan memperkuat koordinasi lintas unit sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas integrasi ESG, tanpa memberikan komitmen yang melampaui ketentuan regulator. Penguatan budaya ESG juga menjadi fokus penting, di mana pemahaman pegawai terkait isu-isu keberlanjutan terus ditingkatkan agar tata kelola dan implementasi ESG dapat berjalan lebih efektif.



# MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

[IFRS S1, IFRS S2]

## TATA KELOLA



### STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN [S1.G.a, S2.G.b1]

Maqashid Syariah secara prinsip telah mencakup aspek pembangunan berkelanjutan. Sebagai bank Syariah, BSI memahami bahwa tanggung jawab tidak hanya sebatas pada aspek ekonomi dan profitabilitas, melainkan kemaslahatan manusia dan alam secara holistik. Adapun prinsip Maqashid Syariah yang selaras dengan risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim adalah Hifdz Al-Bi'ah (menjaga lingkungan). Hifdz Al-Bi'ah memberikan landasan normatif dan strategis bagi BSI dalam mengelola dampak perubahan iklim. Bagi BSI, prinsip ini tidak hanya bermakna etis, tetapi menjadi fundamental *corporate value* yang memengaruhi tata kelola dan produk yang berorientasi pada keberlanjutan.

Kebertahanan di BSI tidak hanya sebagai tanggung jawab bisnis, melainkan wujud nyata pengamalan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kelestarian bumi. Dalam mewujudkan komitmen tersebut untuk mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim, BSI membentuk *ESG Governance Structure* yang telah tercantum pada *ESG Guiding Principle*. Dengan demikian, BSI tidak hanya memperkuat resiliensi bisnis, tetapi juga menciptakan nilai berkelanjutan bagi nasabah, pemegang saham, dan masyarakat.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM



### PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS & DEWAN PENGAWAS SYARIAH [S1.G.a, S1.G.b, S1.G.c, S1.G.d, S2.G.a1, S2.G.a2, S2.G.a3, S2.G.a4]

Dalam mengimplementasikan komitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan, BSI melibatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mencakup sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

1. Menetapkan persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BSI termasuk inisiatif terkait iklim.
2. Mengawasi implementasi Keuangan Berkelanjutan, pemenuhan target, dan inisiatif keberlanjutan berjalan dengan baik dan tercapai.
3. Menjalankan Tata Kelola Terintegrasi Mandiri Group dalam hal Implementasi Keuangan Berkelanjutan BSI.

#### Dewan Pengawas Syariah

1. Menetapkan persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BSI termasuk inisiatif terkait iklim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Mengawasi implementasi Keuangan Berkelanjutan, pemenuhan target, dan inisiatif keberlanjutan berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menjalankan Tata Kelola Terintegrasi Mandiri Group dalam hal Implementasi Keuangan Berkelanjutan BSI sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR) [S1.G.d, S2.G.a4]

BSI terus tumbuh dan merelevansikan proses bisnisnya dengan perkembangan dan perubahan tuntutan keberlanjutan, termasuk integrasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim. BSI telah melaporkan progres RAKB 2025 dan pengajuan inisiatif RAKB 2026 pada Komite Pemantau Risiko (KPR).

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 tentang pedoman dan tata tertib kerja (piagam) komite pemantau risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024. Pada Piagam tersebut, tercantum tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit atas:
  - a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
  - d. Kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan paling sedikit atas:
  - a. Laporan Profil Risiko
  - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko
  - c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi
  - d. Kebijakan Pembiayaan Bank dan kebijakan lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit atas:
  - a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank
  - b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan

tersebut untuk memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

- c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

### RAPAT GABUNGAN [S1.G.c, S2.G.a3]

Untuk merealisasikan pertumbuhan dan merelevansikan proses bisnisnya, pengintegrasian risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim. BSI telah melakukan persetujuan pada inisiatif-inisiatif RAKB 2026 pada Rapat Gabungan. Rapat Gabungan merupakan rapat yang berisikan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Berdasarkan hasil Rapat Gabungan pada inisiatif-inisiatif RAKB 2026, telah disetujui sebanyak 15 usulan RAKB 2026 untuk terus merelevansikan proses bisnisnya pada pengintegrasian risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim.

### PENGAWASAN DIREKSI [S1.G.e, S2.G.a5]

Dalam pelaksanaan komitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan termasuk iklim, BSI melibatkan Direksi. Pelaksanaan pada praktik tersebut dilakukan oleh Direksi mencakup pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan arah Keberlanjutan BSI (Komitmen, Kerangka Kerja, Strategi, dan Peta Jalan)
2. Melakukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) termasuk inisiatif terkait iklim.
3. Mengkomunikasikan Keuangan Berkelanjutan kepada regulator dan *shareholders*.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### PERAN MANAJEMEN [S1.G.f, S2.G.b1, S2.G.b2, S2.G.b3]

Sebagai wujud nyata komitmen BSI pada praktik bisnis yang berkelanjutan, manajemen secara strategis telah menerapkan pendekatan proaktif terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim yang tercermin pada inisiatif berikut.

- 2021:
  - » Pembentukan Departemen Sustainable Finance di Corporate Secretary & Communication Group (CSG) pada saat merger.
- 2024:
  - » Perubahan Departemen Sustainable Finance menjadi Sustainability & Social di CSG melalui Surat Keputusan Direksi No.04/151-KEP/DIR tanggal 16 Mei 2024.
  - » Pengembangan Departemen Sustainability & Social di CSG menjadi Environmental, Social, and Governance Group (ESG) melalui Surat Keputusan Direksi No.04/239-KEP/DIR tanggal 11 Juni 2024.
  - » ESG menjadi salah satu anggota Working Group Risk Management Committee melalui Surat Keputusan Direksi No. 04/503A-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024.

### RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) [S1.G.f, S2.G.b1]

Sejalan dengan peningkatan kompleksitas usaha, BSI perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang efektif dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) agar aktivitas usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan atau mengganggu kelangsungan usaha BSI. Oleh sebab itu, pada tanggal 14 Oktober 2024 melalui Surat Keputusan Direksi No. 04/503A-KEP/DIR, BSI menyempurnakan struktur organisasi Risk Management Committee (RMC) Bank.

RMC adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui pembahasan *risk appetite*, metodologi, dan penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Dalam hal pengusulan

pada rapat Komite, RMC dibantu oleh Working Group Risk Management Committee dengan beranggotakan Group Head/setara yang telah dibentuk oleh Direksi.

Group Head Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi salah satu Permanent Voting Member dalam Working Group (WG) RMC terkait pembahasan Keuangan Berkelanjutan. Dalam hal ini mencakup Risiko dan Peluang terkait Keberlanjutan termasuk Iklim.

Pada tahun 2025, telah dilakukan WG dan RMC yang membahas mengenai Risiko dan Peluang terkait Keberlanjutan termasuk Iklim sebanyak tiga kali WG dan satu kali RMC. Pembahasan yang diusulkan pada saat WG mengenai Sosialisasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), Progres RAKB, dan Hasil *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS). Kemudian, pembahasan yang diangkat pada RMC mengenai Penetapan Industri *Class* Baru (termasuk sektor KUBL) dan Penetapan Kriteria *Green Financing*.

BSI menghadapi Risiko dan Peluang terkait Keberlanjutan termasuk Iklim dengan cara berkolaborasi antara ESG Group dengan Unit Bisnis, Unit *Support*, Unit *Enabler*, dan Kantor Wilayah/Jaringan. ESG Group berfungsi sebagai *control tower* implementasi keuangan berkelanjutan seperti melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama unit kerja terkait pelaksanaan program keuangan berkelanjutan, melakukan penyusunan Dokumen RAKB BSI, dan menyampaikannya kepada regulator. Adapun fungsi pada Unit Bisnis, Unit *Support*, Unit *Enabler*, dan Kantor Wilayah/Jaringan untuk implementasi keuangan berkelanjutan seperti yang tercantum pada Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### PENGENDALIAN DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN [S1.G.f, S2.G.b2, S2.G.b3]

Dalam melakukan pengendalian terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim, manajemen menerbitkan pedoman integrasi aspek-aspek ESG di BSI pada Standar Prosedur Operasional (SPO) Keuangan Berkelanjutan dan *ESG Guiding Principle*.

### SPO KEUANGAN BERKELANJUTAN

[S1.G.f, S2.G.b2]

SPO Keuangan Berkelanjutan merupakan salah satu bentuk komitmen BSI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPO Keuangan Berkelanjutan diterbitkan sebagai tindak lanjut tata kelola Perusahaan yang menjadi standar prosedur aktivitas ESG untuk tercapainya keuangan berkelanjutan. Adapun tujuan dari SPO Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Menciptakan standarisasi dalam pelaksanaan fungsi dan/atau aktivitas Keuangan Berkelanjutan di seluruh unit kerja BSI
2. Membangun dan memelihara citra BSI yang positif dengan tetap mengedepankan *shared values* BSI
3. Mendukung pelaksanaan visi, misi, dan nilai-nilai budaya BSI
4. Mendukung aktivitas BSI dalam pelaksanaan aktivitas tata kelola Keuangan Berkelanjutan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan secara konsisten
5. Membantu pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6. Mengimplementasikan dan menjaga prinsip dan nilai dari Keuangan Berkelanjutan
7. Memastikan komunikasi yang efektif antara BSI dengan pemegang saham atau investor, dan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*)
8. Memastikan tersedianya sarana informasi bagi para Pemegang Saham atau Investor, dan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*), untuk mendukung pencapaian visi dan misi BSI.

Adapun cakupan pada SPO tersebut mencakup (1) Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, (2) *Sustainable Banking*, (3) *Sustainable Operation*, (4) *Sustainable Beyond Banking*, (5) Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

### ESG GUIDING PRINCIPLE

Selain SPO Keuangan Berkelanjutan, BSI menerbitkan *ESG Guiding Principle* sebagai pedoman bagi seluruh insan BSI. *ESG Guiding Principle* merupakan suatu pedoman untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komponen BSI dalam rangka mengintegrasikan aspek ESG secara menyeluruh pada aktivitas bisnis dan operasional. Adapun tujuan dari *ESG Guiding Principle* sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman integrasi aspek-aspek ESG di BSI yang mencakup aktivitas bisnis dan operasional BSI.
2. Memberikan penjelasan atas komitmen dan strategi BSI berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan dan pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE).
3. Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas aspek bisnis dan operasional BSI terkait aspek ESG secara merata kepada seluruh pegawai BSI.
4. Meningkatkan peningkatan kesadaran integrasi ESG dalam praktik keuangan syariah secara lebih luas.
5. Menjadi acuan penyusunan strategi keberlanjutan termasuk penyusunan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan dan implementasi ESG.

Cakupan pada *ESG Guiding Principle* mencakup (1) Tata Kelola dan Organisasi, (2) Pengertian Umum, dan (3) BSI *Sustainability Framework*.

# MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

## STRATEGI



### RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM, SERTA DAMPAK FINANSIAL [S1.S.a, S1.S.b, S1.S.e, S2.S.a1, S2.S.a2, S2.S.a3, S2.S.d1, S2.S.d2]

BSI memahami dalam melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan, dalam pelaksanaannya terdapat risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim. Saat ini, BSI telah mempertimbangkan salah satu risiko dan peluang terkait keberlanjutan yaitu iklim.

Pertimbangan ini sebagai upaya mitigasi dan adaptasi BSI terhadap perubahan iklim. Risiko dan peluang terkait iklim menggunakan *framework* dari *Task Force on Climate-Related Financial* (TCFD) seperti gambar berikut:



## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### Risiko Terkait Iklim [S1.S.a, S2.S.a1, S2.S.a2]

Risiko iklim merupakan potensi dampak negatif dari perubahan iklim terhadap BSI meliputi risiko transisi dan fisik. Proses manajemen risiko iklim dikelola secara terintegrasi ke dalam sistem manajemen risiko Bank. Proses ini diawali dengan identifikasi risiko dan peluang iklim; pengukuran risiko iklim dengan menetapkan beberapa metrik terkait risiko fisik dan risiko transisi; selanjutnya menilai dampak risiko iklim terhadap finansial Bank; kemudian mengevaluasi dampak risiko iklim dan menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengelola dampak dari risiko iklim tersebut.

Risiko transisi merupakan risiko yang muncul akibat perubahan arah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial seiring dengan bergesernya tujuan perekonomian dunia ke arah ekonomi karbon. Risiko fisik merupakan risiko yang disebabkan oleh bencana alam yang parah (risiko fisik akut) dan risiko yang secara bertahap terdampak oleh perubahan pola iklim dalam jangka panjang seperti kenaikan temperatur dan permukaan air laut (risiko fisik kronis). Kedua faktor risiko iklim ini akan berdampak terhadap model bisnis dan rantai nilai, strategi, dan kondisi keuangan. Dalam hal ini risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas BSI.

Faktor Risiko Iklim	Jenis Risiko	Key Driver	Potensi Dampak Finansial
Transisi	Kredit	1. <i>Lower-carbon economy</i> 2. <i>Carbon Pricing</i> 3. <i>Carbon Tax</i>	Perubahan kebijakan regulasi yang lebih ketat ke arah <i>lower-carbon economy</i> dapat mempengaruhi kinerja keuangan nasabah dan kemampuan bayar nasabah kepada Bank terutama nasabah dengan bisnis yang sensitif atas peristiwa iklim ekstrem.
		Perubahan Preferensi Nasabah	Penurunan pendanaan dan portofolio Bank akibat perubahan preferensi Nasabah.
	Pasar	Perubahan makroekonomi akibat penyesuaian skenario iklim	Peningkatan suku bunga yang disebabkan perubahan kebijakan iklim berpotensi mengakibatkan peningkatan <i>yield</i> surat berharga pemerintah dan koperasi, serta penurunan harga pasar surat berharga yang berpengaruh pada pendapatan Bank.
		Perubahan Preferensi Nasabah	Perubahan <i>customer behavior</i> ke produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, berpotensi mengakibatkan penurunan permintaan surat berharga non-berkelanjutan yang berdampak pada penurunan nilai surat berharga.
	Operasional	<i>Lower-carbon technology &amp; infrastructure</i>	Peningkatan biaya investasi akibat pergeseran teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan.
		Gap ESG Knowledge	Peningkatan biaya pelatihan/pelatihan/sertifikasi pegawai BSI dan biaya <i>hire expertise</i> .
	Likuiditas	Regulasi terkait prinsip kehati-hatian yang membatasi sumber pendanaan dari pasar uang	1. Penurunan HQLA sesuai perubahan nilai pasar berdasarkan penilaian risiko pasar. 2. Penarikan dana oleh debitur korporasi untuk biaya karbon / investasi <i>capital expenditure</i> . 3. Penurunan arus kas masuk sesuai proyeksi peningkatan NPF risiko kredit.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

Faktor Risiko Iklim	Jenis Risiko	Key Driver	Potensi Dampak Finansial
Fisik	Kredit	Risiko Fisik Akut 1. Badai 2. Banjir 3. Kebakaran Hutan	1. Kerusakan fisik agunan/properti nasabah mengakibatkan peningkatan <i>Loss Given Default</i> (LGD) dan penurunan nilai aset nasabah. 2. Penurunan Produktivitas lahan terutama pada sektor pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan penurunan kemampuan membayar nasabah.
		Operasional	1. <i>Infrastructure Damage</i> pada kantor cabang, ATM, pusat data, dan <i>equipment</i> Bank 2. <i>Operational Disruptions</i> 3. <i>Leading to Productivity Loss</i>
	Likuiditas		Peningkatan penarikan dana setelah kejadian bencana oleh nasabah individual, UMKM dan korporasi.

### Peluang Terkait Iklim [S1.S.a, S2.S.a1]

BSI sebagai lembaga keuangan yang memiliki proposisi unik syariah dalam keuangan berkelanjutan, BSI melihat perubahan iklim tidak hanya sebagai risiko, melainkan peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang. Peluang tersebut selaras dengan upaya BSI dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berlandaskan Maqashid Syariah dalam menciptakan nilai jangka panjang. Adapun peluang iklim dilihat oleh BSI meliputi efisiensi sumber daya, sumber energi, produk/layanan, pasar, dan ketahanan.

Tipe Peluang	Peluang Terkait Iklim	Potensi Dampak Finansial
Efisiensi Sumber Daya	1. Penurunan penggunaan air dan energi melalui 2 unit <i>Green Building</i> serta <i>Green Business Culture</i> 2. Penurunan penggunaan kertas melalui E-Doc dan penggunaan kertas bekas	Menurunkan biaya operasional melalui efisiensi sumber daya
Sumber Energi	Menggunakan 145 kendaraan listrik dalam menunjang aktivitas operasional	Mengurangi dampak dari kenaikan harga bahan bakar fosil di masa depan
Produk dan Layanan	<i>Sustainability Sukuk</i> dan <i>ESG Mutual Fund</i>	Meningkatkan pendapatan melalui produk dan layanan yang rendah emisi
Pasar	Akses pada pasar baru melalui produk dan layanan yang rendah emisi	Meningkatkan pendapatan melalui akses pasar baru
Ketahanan	Penggunaan 8 unit panel surya pada fasilitas operasional Perseroan dan penggunaan 3 unit panel surya pada Desa Binaan BSI untuk menghasilkan energi listrik.	Menurunkan biaya penggunaan listrik

### Implikasi Investasi, Pendanaan, dan Sumber Daya [S2.S.d3]

Dalam merespons risiko dan peluang iklim, BSI mengalokasikan sumber daya keuangan dan non-keuangan secara bertahap, antara lain melalui:

- penerbitan dan pengembangan instrumen pendanaan berkelanjutan, termasuk sukuk berkelanjutan;
- investasi pada infrastruktur ramah lingkungan dan teknologi pendukung operasional rendah karbon;
- peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ESG dan risiko iklim.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### MANAJEMEN RISIKO IKLIM & ANALISIS SKENARIO

#### Mitigasi Dampak Risiko Iklim BSI melalui *Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS)*

[S1.S.f, S2.S.e1, S2.S.e2, S2.S.e3]

BSI telah berpartisipasi kembali pada *Pilot Project Climate Risk Management dan Scenario Analysis (CRMS)* pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, BSI menggunakan 51,63% dari total Portofolio, sedangkan pada tahun 2025, BSI menggunakan 100% dari total portofolio pada *Pilot Project* tersebut. Partisipasi ini didasari oleh SEOJK No. S-37/D.03/2024 tanggal 04 November 2024 perihal Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pelaporan CRMS oleh Seluruh Bank Umum di Tahun 2025 dan SEOJK No. S-79/PB.01/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Pembaruan Data Makroekonomi Buku 4 CRMS dan Pengunduran Tenggat Waktu Pelaporan CRMS 2025.

Implementasi CRMS mengacu pada panduan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kepatuhan atas regulasi eksternal. Pada penerapan CRMS, BSI melakukan *Climate Risk Stress Testing (CRST)* yang merupakan proses komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana risiko yang terkait dengan perubahan iklim dapat mempengaruhi kinerja keuangan, strategi, tata kelola, serta kerangka manajemen risiko Bank.

#### Cakupan Analisis Skenario [S2.S.e3, S2.S.e4, S2.S.e5]

Analisis yang dilakukan BSI mencakup evaluasi dampak perubahan iklim pada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional dalam jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun) dan jangka panjang (sampai dengan tahun 2050) sebagai berikut:

	Eksposur	Kondisi	Proyeksi	Jangka Waktu	Risiko Kredit	Risiko Pasar	Risiko Operasional	Risiko Likuiditas
Risiko Transisi	Indonesia	Short Term	Baseline	3 Tahun (2025-2027)	Pembiayaan Produktif (Termasuk UMKM)	Surat Utang	Analisis Kualitatif	Analisis Kualitatif
			Stress					
		Long Term	Net Zero 2050	30 Tahun (2030, 2040, 2050)	Pembiayaan Produktif (Termasuk UMKM)		Surat Utang	-
			Delayed Transition					
Current Policies								
Risiko Fisik	Indonesia	Kebakaran Hutan	Baseline	1 Tahun (2025)	Pembiayaan Produktif (Termasuk UMKM)	-		
			Stress					
		Banjir	Baseline	1 Tahun (2025)	Pembiayaan Pemilikan Properti		-	-
			Stress					

Berdasarkan hasil implementasi CRMS, BSI telah menyusun analisis skenario iklim yang mempertimbangkan dua kategori risiko utama yaitu Risiko Transisi dan Risiko Fisik, dalam konteks operasi di Indonesia.

Untuk Risiko Transisi, BSI melakukan analisis dalam jangka waktu pendek dan menengah (2025 – 2027) serta panjang (2030, 2040, dan 2050). Pada Risiko Transisi memengaruhi risiko bank lainnya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan likuiditas. Risiko kredit berpotensi meningkat karena naiknya *Probability of Default (PD)* pada portofolio pembiayaan produktif, termasuk UMKM. Hal ini dapat

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

menaikkan CKPN sebagai langkah antisipasi penurunan kualitas kredit dan potensi kenaikan NPL ketika nasabah gagal beradaptasi dengan transisi ekonomi hijau.

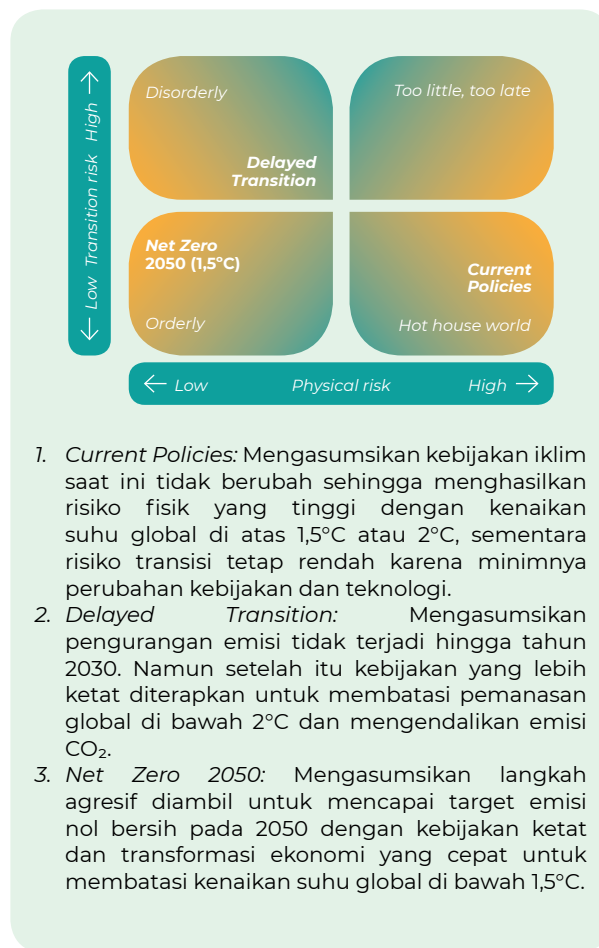
Risiko pasar berpotensi meningkat dikarenakan pergeseran suku bunga yang berdampak terhadap penurunan *bucket* kualitas aset atau peringkat kredit akibat perubahan makroekonomi. Risiko operasional berpotensi meningkat dikarenakan meningkatnya *Operation Expenditure* (OpEx) dan biaya operasional akibat biaya energi dan utilitas yang lebih tinggi selama transisi menuju ekonomi rendah karbon. Risiko likuiditas meningkat dikarenakan penurunan *High Quality Liquid Assets* (HQLA) akibat penurunan nilai surat berharga korporasi dan pemerintah yang memiliki eksposur tinggi karbon.

Untuk Risiko Fisik, BSI hanya melakukan pada jangka waktu pendek, yakni 2050 saja sesuai dengan CRMS. Tidak hanya Risiko Transisi saja yang memengaruhi risiko bank, melainkan Risiko Fisik juga yang berdampak terhadap risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Risiko kredit berpotensi meningkat dikarenakan mempertimbangkan dampak kejadian bencana dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi dan menyebabkan kerusakan pada aset fisik debitur. Selain itu, bencana tersebut dapat menurunkan produktivitas usaha debitur. Risiko operasional berpotensi meningkat dikarenakan kejadian bencana dapat berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap aset bank maupun kegiatan operasional sehingga menimbulkan biaya tambahan yang arus dikeluarkan oleh bank. Risiko likuiditas berpotensi meningkat dikarenakan perubahan iklim dapat memengaruhi nasabah dalam penarikan simpanan dan permintaan kredit saat terjadinya bencana alam.

### Desain dan Analisis Skenario

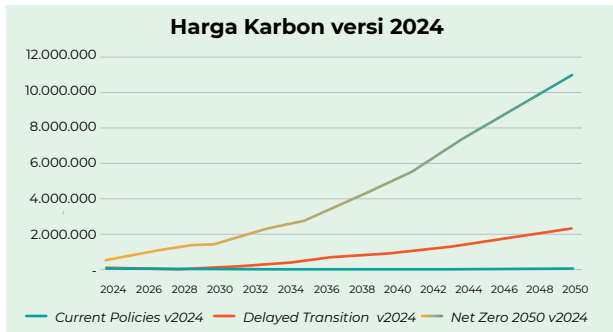
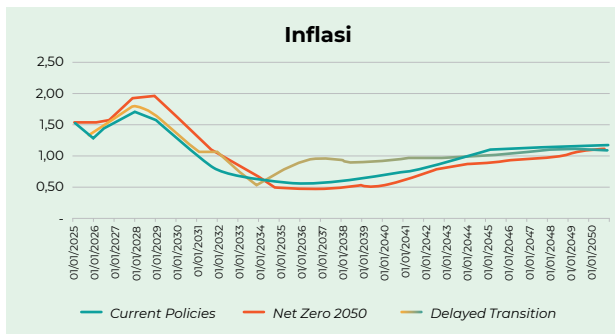
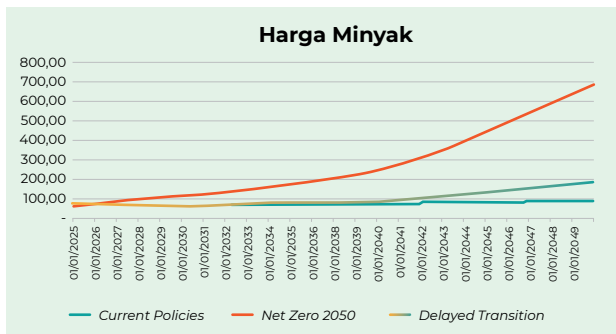
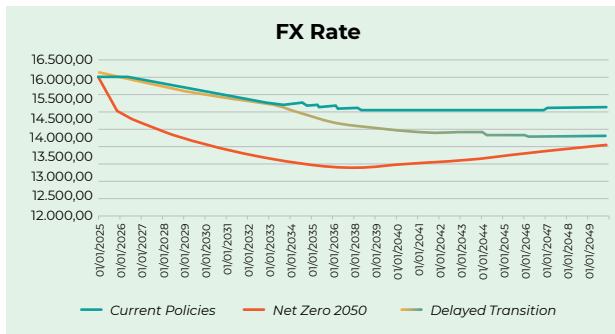
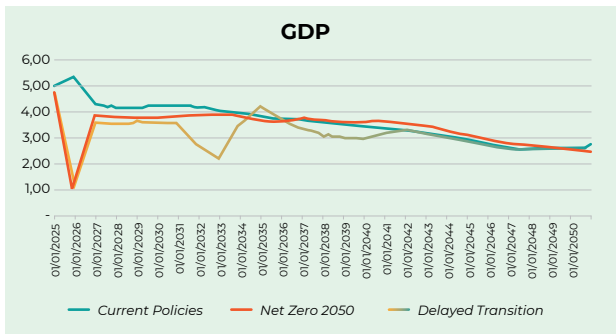
CRST dilakukan untuk menilai ketahanan Bank terhadap perubahan iklim yang terdiri atas risiko transisi risiko fisik. Risiko iklim berpotensi memberikan dampak langsung pada risiko keuangan di antaranya yaitu risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas BSI. Skenario yang digunakan oleh BSI sesuai dengan panduan

yang disampaikan oleh OJK pada Buku CRMS, yakni *Network for Greening the Financial System* (NGFS) *Phase 4* dengan spesifikasi transisi seperti *Net Zero 2050* (jalur transisi *orderly*), *Delayed Transition* (jalur transisi *disorderly*), dan *Current Policies* (jalur transisi *hot house*). Pemilihan tiga skenario tersebut disesuaikan dengan *common practice* di negara lain serta arah kebijakan transisi dan target penurunan emisi Indonesia.



Dalam perhitungan CRST yang telah dilakukan, BSI menggunakan data serta proyeksi makroekonomi yang telah dirilis oleh OJK pada bulan Juni 2025. Data serta proyeksi ini digunakan sebagai acuan dasar dalam perhitungan. Indikator makroekonomi yang digunakan oleh BSI, di antaranya Gross Domestic Product (GDP), Foreign Exchange Rate (FX Rate), Oil Price, Inflation, dan Carbon Price.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM



### Pendekatan Perhitungan Skenario yang telah Dilakukan oleh BSI [s2.s.b2]

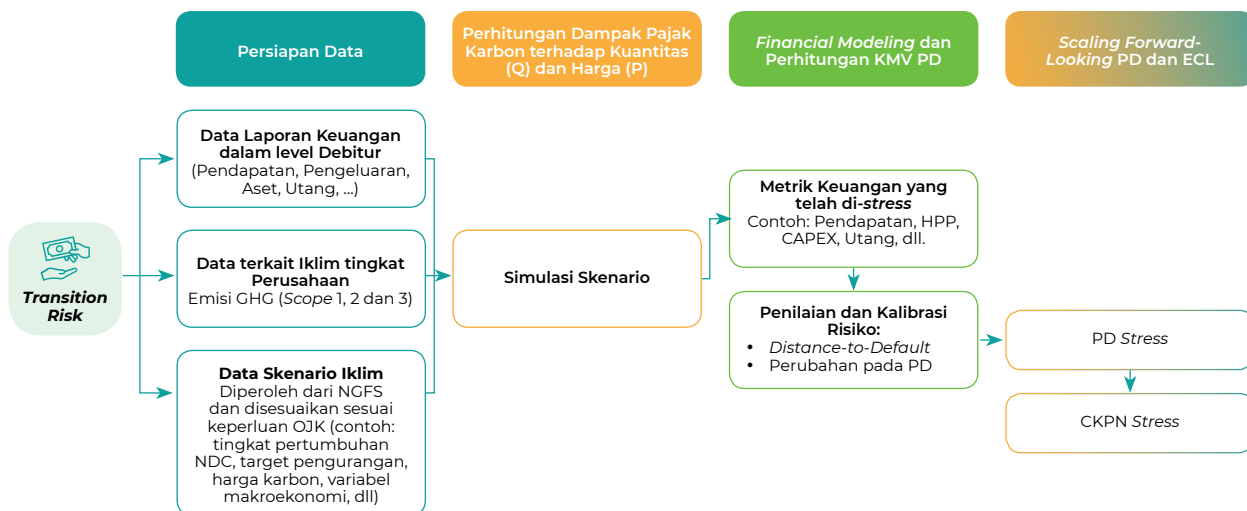
Pendekatan perhitungan yang telah dilakukan oleh BSI mengacu pada skenario OJK dalam mengestimasi pengaruh perubahan iklim dan lingkungan terhadap risiko keuangan bank. Berikut merupakan pendekatan perhitungan skenario yang telah dilakukan oleh BSI dengan mengacu skenario OJK.

Jenis Risiko	Skenario OJK	Pendekatan Perhitungan
Kredit	Membagi risiko iklim menjadi 2 faktor risiko, yaitu risiko transisi dan risiko fisik. Selain itu, OJK memberikan beberapa referensi skenario yang dapat dipertimbangkan dari NGFS Tahap 4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Risiko transisi, perhitungan CKPN didasarkan pada pergeseran <i>Profitability of Default</i> (PD) sesuai dengan skenario yang ditetapkan yang dibagi menjadi skenario jangka pendek (proyeksi 3 tahun), dan skenario jangka panjang (proyeksi 30 tahun)</li> <li>Risiko fisik, perhitungan CKPN didasarkan pada pergeseran <i>Loss Given Default</i> (LGD) dengan memperhitungkan risiko kebakaran dan banjir untuk proyeksi 1 tahun</li> </ol>

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

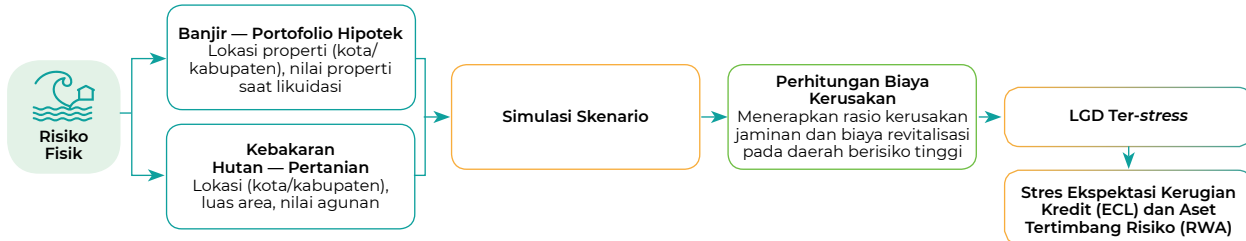
Jenis Risiko	Skenario OJK	Pendekatan Perhitungan
Pasar	Pergeseran suku bunga sebagai akibat dari risiko transisi dan asumsi <i>stress</i> , yaitu penurunan <i>bucket</i> kualitas aset/peringkat kredit. Penilaian dilakukan terhadap kecukupan modal (FRTB) dengan cakupan obligasi pemerintah dan korporasi dalam mata uang rupiah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan kurva imbal hasil didasarkan pada pergeseran suku bunga acuan sesuai dengan referensi skenario NGFS dari OJK yang kemudian akan dipertimbangkan dalam perhitungan FRTB. Pergeseran ini dapat berdampak pada nilai Sensitivitas Risiko Suku Bunga Umum (GIIR) dan Sensitivitas CSR (Non-Sekuritisasi).</li> <li>Peningkatan bobot risiko akibat penurunan <i>bucket/rating</i> yang dapat berdampak pada nilai Sensitivitas CSR (Non-Sekuritisasi), <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA) dan <i>Default Risk Capital</i> (DRC).</li> </ol>
Operasional	Memberikan beberapa referensi skenario yang dapat dipertimbangkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya banjir dan kebakaran yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung terhadap nilai aset Bank dan kegiatan operasional Bank sehingga dapat menimbulkan biaya tambahan</li> <li>Perhitungan risiko operasional berdasarkan biaya yang dikeluarkan pada aset operasional Bank (kantor cabang dan mesin) jika terjadi bencana.</li> <li>Memproyeksikan kemungkinan timbulnya biaya berdasarkan data historis</li> </ol>
Likuiditas	Memberikan beberapa skenario referensi yang dapat dipertimbangkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan arus kas keluar akibat penarikan uang debitur akibat bencana alam (risiko fisik)</li> <li>Perubahan <i>yield curve</i> makroekonomi, peningkatan NPL pada risiko kredit, penarikan deposito korporasi (risiko transisi)</li> </ol>

Sesuai dengan skenario yang telah diadopsi oleh OJK, BSI melakukan penilaian risiko transisi pada PD dan menganalisis dampaknya terhadap ECL. Selain itu, BSI melakukan penilaian risiko fisik pada LGD dan menganalisis dampaknya terhadap ECL. Berikut merupakan *framework* yang digunakan oleh BSI untuk perhitungan skenario iklim tersebut.



Pengukuran dampak risiko transisi dilakukan dengan menghitung simulasi pengaruh variabel risiko transisi seperti *carbon emission* dan *carbon price* pada kondisi keuangan nasabah. Perubahan variabel seperti *carbon emission* dan *carbon price* akan berdampak pada penurunan kemampuan bayar nasabah dan mempengaruhi PD nasabah pada tiap skenario. Pengaruh variabel risiko transisi akan berbeda-beda pada tiap sektor usaha nasabah.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

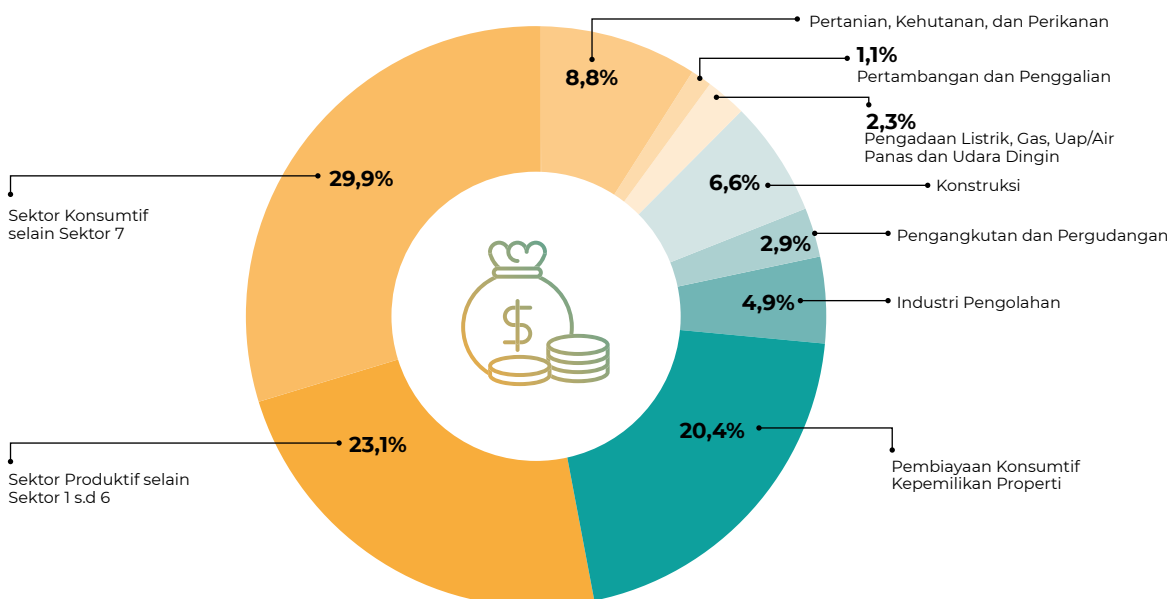


Pengukuran dampak risiko fisik dilakukan mengacu pada panduan OJK, yaitu menganalisis dampak bencana banjir yang diasumsikan terjadi pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) dan dampak kebakaran yang diasumsikan terjadi pada pembiayaan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dampak risiko fisik diasumsikan akan meningkatkan *Loss Given Default* (LGD) nasabah yang terdampak. Saat melakukan CRMS, BSI menggunakan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk mengidentifikasi wilayah berisiko.

### Hasil Analisis Skenario Iklim [S1.S.c, S2.S.b1, S2.S.f1, S2.MT.d1]

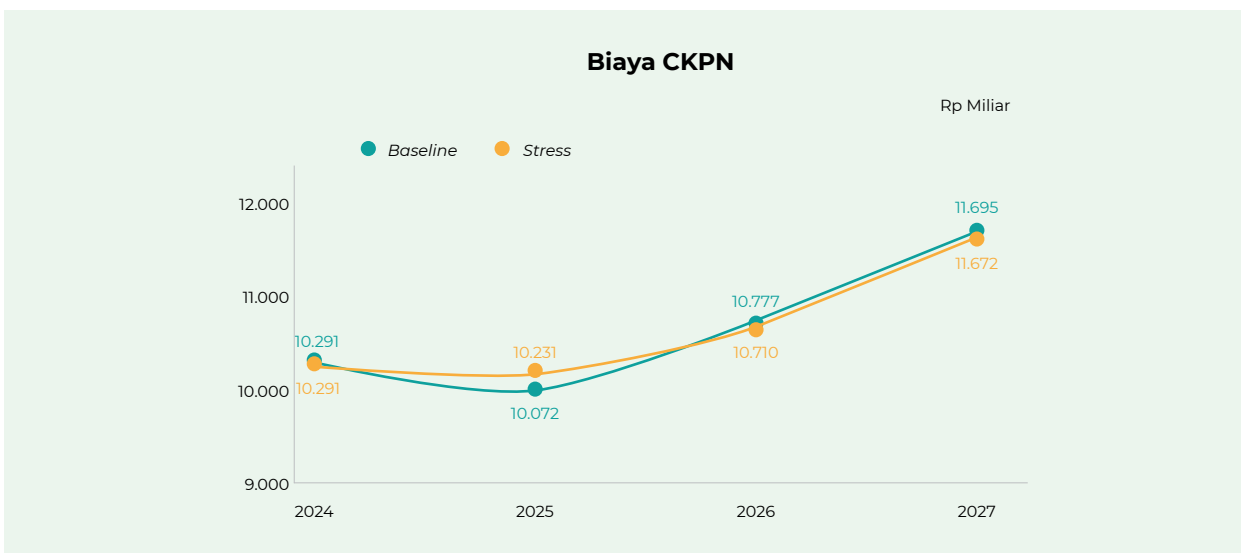
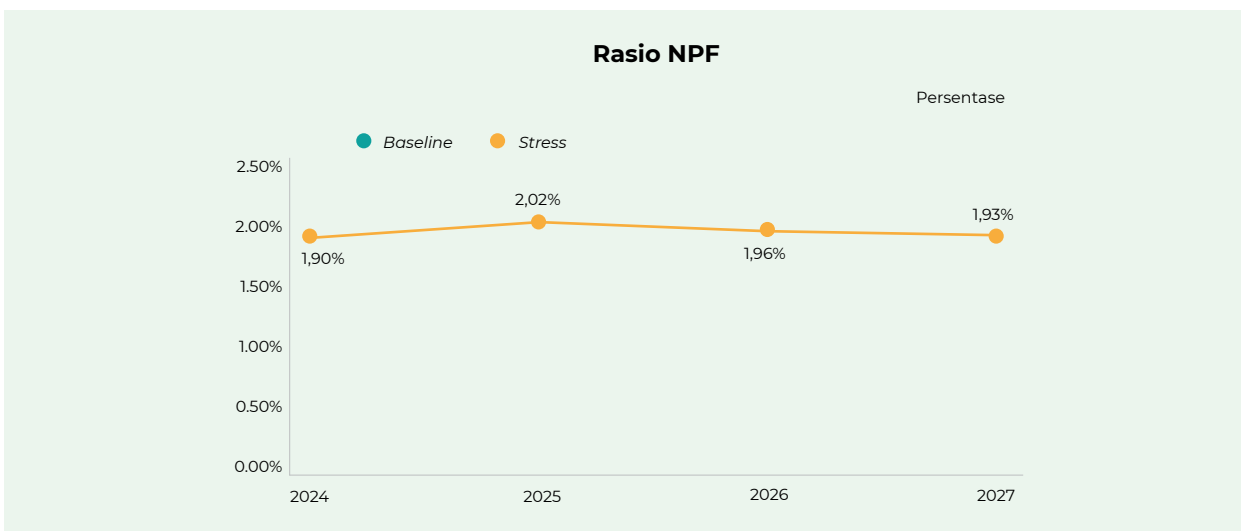
BSI telah melakukan analisis skenario iklim yang mencakup sektor prioritas dan non-prioritas dengan total pembiayaan sebanyak 100%. Sektor prioritas merupakan sektor yang berkontribusi untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon pada *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia. Pemerintah Indonesia mengidentifikasi lima sektor utama pengurangan emisi GRK sesuai dengan target NDC, yaitu Energi, Pembuangan Limbah, *Industrial Processes and Product Use* (IPPU), Pertanian, dan Kehutanan.

Selaras dengan sektor-sektor tersebut, terdapat sektor prioritas yang diidentifikasi sebagai sektor yang merupakan sektor dengan intensitas emisi GRK tertinggi. Sektor-sektor tersebut termasuk dalam cakupan analisis portofolio pada CRST 2025, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; 4) Konstruksi; 5) Pengangkutan dan Pergudangan; 6) Industri Pengolahan; dan 7) Pembiayaan Konsumtif Kepemilikan Properti. Selain itu, BSI melakukan analisis skenario non-prioritas yaitu Sektor Produktif selain Sektor 1 - 6 dan Sektor Konsumtif selain Sektor 7. Berikut merupakan persentase pada setiap sektor yang digunakan untuk analisis skenario:



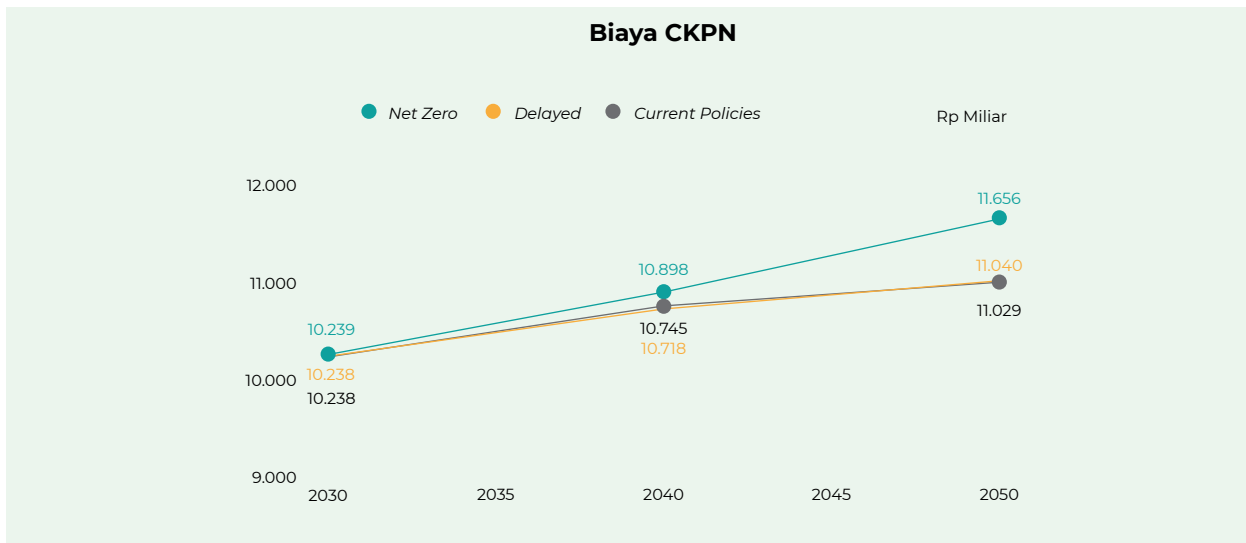
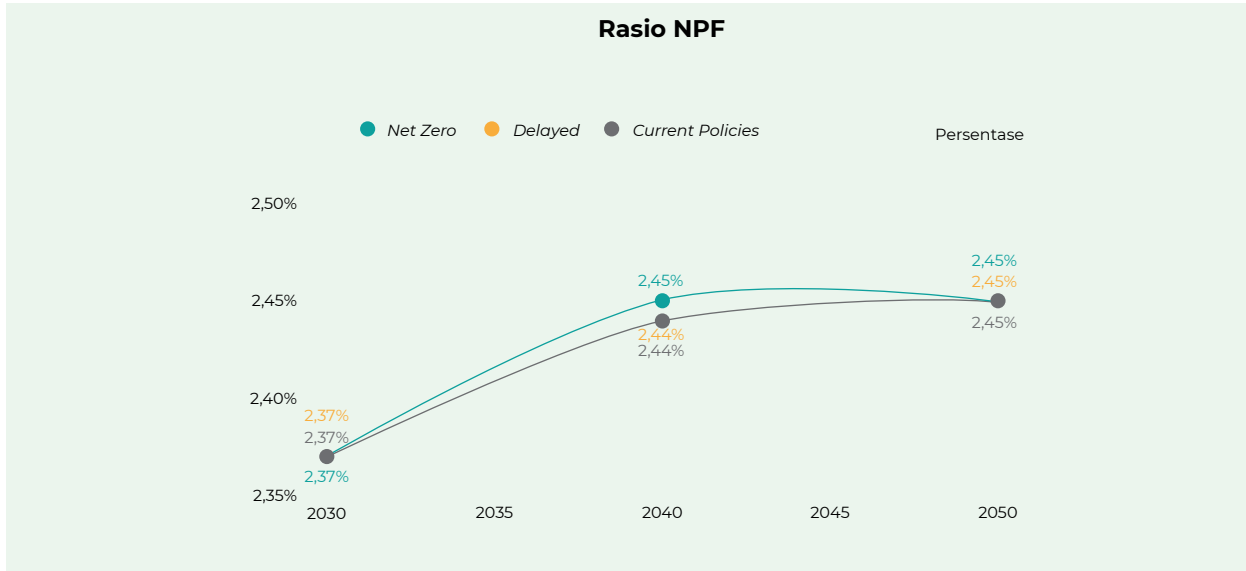
## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

Berdasarkan hasil analisis skenario iklim pada risiko transisi, dampak risiko iklim terhadap portofolio BSI belum cukup terlihat dalam jangka pendek dan menengah, baik pada kondisi *baseline* dan *stress*. Dari sisi pencadangan, terdapat peningkatan biaya CKPN yang perlu dicadangkan BSI untuk mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit seiring dengan pertumbuhan pembiayaan. Berikut merupakan proyeksi Rasio NPF dan CKPN dalam jangka Pendek dan Menengah.



Berdasarkan hasil analisis skenario iklim, terdapat pengaruh dampak risiko iklim pada portofolio BSI dalam jangka panjang di seluruh skenario, meskipun belum secara signifikan terlihat. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi yang diproyeksikan cukup baik pada hampir seluruh skenario. Disisi lain terdapat beberapa nasabah BSI yang memiliki struktur keuangan yang tidak cukup kuat, sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kemampuan membayar kewajiban kepada Bank. Berikut merupakan proyeksi Rasio NPF dan CKPN dalam jangka panjang.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM



NPF tertinggi BSI diproyeksikan terjadi pada tahun 2040 dan 2050 sebesar 2,45%. Selain karena dampak risiko iklim, kondisi ini terutama disebabkan oleh pergerakan faktor ekonomi dan kondisi nasabah-nasabah pembiayaan yang secara struktural pada kondisi aktual per Desember 2024, sudah berada pada kondisi yang memerlukan perhatian khusus.

Selain dampak dari faktor risiko iklim transisi, BSI telah melakukan skenario iklim berdasarkan faktor risiko iklim fisik. Dampak dari faktor risiko ini dapat memengaruhi penurunan nilai aset

bank dan peningkatan biaya operasional bank. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada CRST, dampak risiko fisik tidak terlalu signifikan terhadap penurunan nilai aset/Kantor Bank. Hal ini disebabkan sebagian besar kantor cabang bank merupakan aset sewa sehingga kerugian akibat penurunan nilai menjadi risiko pemilik atau perusahaan asuransi.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### STRATEGI BSI DALAM MENGHADAPI RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM [S1.S.d, S2.S.c1, S2.S.c2, S2.S.c3, S2.S.c4, S2.MT.e1]

Dalam mengelola risiko dan peluang terkait iklim, BSI membuat *Strategic Planning Risk Management* sebagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi ini dibuat untuk mengantisipasi dampak terhadap model bisnis dan rantai nilai; strategi pengambilan keputusan; dan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. *Strategic Planning Risk Management* ini, BSI melihat akan berdampak kepada *financial impact* seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Operation Expenditure (OpEx)*, *Capital Expenditure (CapEx)*, *Assets*, dan *Liabilities*.

#### Strategic Planning Risk Management

[S1.S.d, S2.S.c1, S2.S.c2]

1. Penetapan *framework* Manajemen Risiko yang mempertimbangkan aspek ESG
2. Penyusunan kebijakan yang mendukung penyaluran pembiayaan yang berkelanjutan
3. Penetapan strategi manajemen portofolio pembiayaan secara bertahap antara lain:
  - a. Pemberlakuan limit *brown sector*
  - b. Peningkatan pembiayaan pada segmen rendah karbon yang sejalan dengan strategi Bank
4. Pengukuran dan analisis risiko iklim melalui CRMS secara berkala
5. Investasi pada surat berharga Pemerintah dan Korporasi yang fokus pada sektor ramah lingkungan
6. Peningkatan *green fund* antara lain melalui penerbitan sukuk berkelanjutan
7. Investasi pada teknologi dan infrastruktur yang berkelanjutan
8. Transfer risk dengan asuransi untuk kerugian akibat *physical risk* (banjir dan kebakaran)
9. Relokasi kantor cabang/ATM yang terdapat pada lokasi rawan banjir

#### Financial Impact

1. - **CAR:** Peningkatan beban pencadangan (CKPN) akibat nasabah gagal bayar pinjaman pada Bank dan penurunan rating surat berharga
2. + **OpEx:** Peningkatan biaya akibat *investment on human capital & green equipment*
3. + **CapEx:** Peningkatan biaya akibat investasi pada *green technology & green infrastructure*
4. + **Assets:** Peningkatan *value* Bank akan berdampak pada peningkatan *asset*
5. - **Assets:** *Stranded Assets*
6. - **Liabilities:** Perubahan kebijakan iklim yang tidak respon oleh Bank dan perubahan *customer behaviour* akan berdampak pada penurunan portofolio pendanaan

Penentuan *Strategic Planning Risk Management* dipertimbangkan dari risiko dan peluang terkait iklim. Selain itu, BSI telah menyusun *action plan* untuk memperkuat ketahanan bisnis dalam menghadapi tantangan iklim berdasarkan hasil CRMS yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. *Action plan* ini tidak hanya dirancang sebagai bentuk mitigasi risiko, namun sebagai langkah untuk menangkap peluang dalam transisi ekonomi rendah karbon.

*Action plan* pertama adalah menetapkan strategi pengelolaan portofolio pembiayaan sejalan dengan hasil *sensitivity analysis*. Rencana strategi ini dilaksanakan melalui pengelolaan portofolio pembiayaan terhadap sektor-sektor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap risiko iklim menuju sektor-sektor hijau dan rendah karbon. Saat ini, BSI telah menetapkan limit pada sektor-sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi (*brown sector*) seperti Batubara, Industri Migas, dan Pertambangan Minyak dan Gas.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

*Action plan* kedua adalah melakukan investasi pada surat berharga pemerintah atau surat berharga korporasi pada sektor ramah lingkungan. Rencana strategi ini bertujuan untuk memperkuat kualitas aset dan membangun ketahanan portofolio secara keseluruhan. *Action plan* ketiga adalah memastikan kecukupan likuiditas dengan melakukan penempatan pada aset likuid berkualitas tinggi dan meningkatkan penghimpunan dana dengan *run off rate* rendah sesuai komponen LCR dan penerbitan sukuk berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil CRMS menunjukkan permodalan bank masih di atas limit yang ditetapkan regulator sehingga tidak diperlukan *action plan* khusus terkait permodalan.

### PENGEMBANGAN DATA KUANTITATIF RISIKO DAN PELUANG IKLIM [S2.S.D4]

Dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan analisis risiko serta peluang terkait iklim, Perseroan telah menggunakan data kuantitatif yang tersedia serta berbagai asumsi dan parameter yang relevan sebagai dasar analisis. Namun demikian, mengingat dinamika perubahan iklim, perkembangan metodologi pengukuran risiko

iklim secara global, serta peningkatan kebutuhan data pada tingkat portofolio dan sektor industri, Perseroan terus melakukan penyempurnaan kualitas, cakupan, dan konsistensi data yang digunakan.

Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan infrastruktur data, metodologi pengukuran, serta proses pengumpulan dan validasi informasi guna menghasilkan pengungkapan yang semakin komprehensif dan andal. Upaya peningkatan tersebut mencakup penguatan ketersediaan data historis, pengembangan parameter analisis skenario, serta penyempurnaan model pengukuran dampak finansial yang selaras dengan perkembangan praktik dan standar internasional.



## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### MANAJEMEN RISIKO



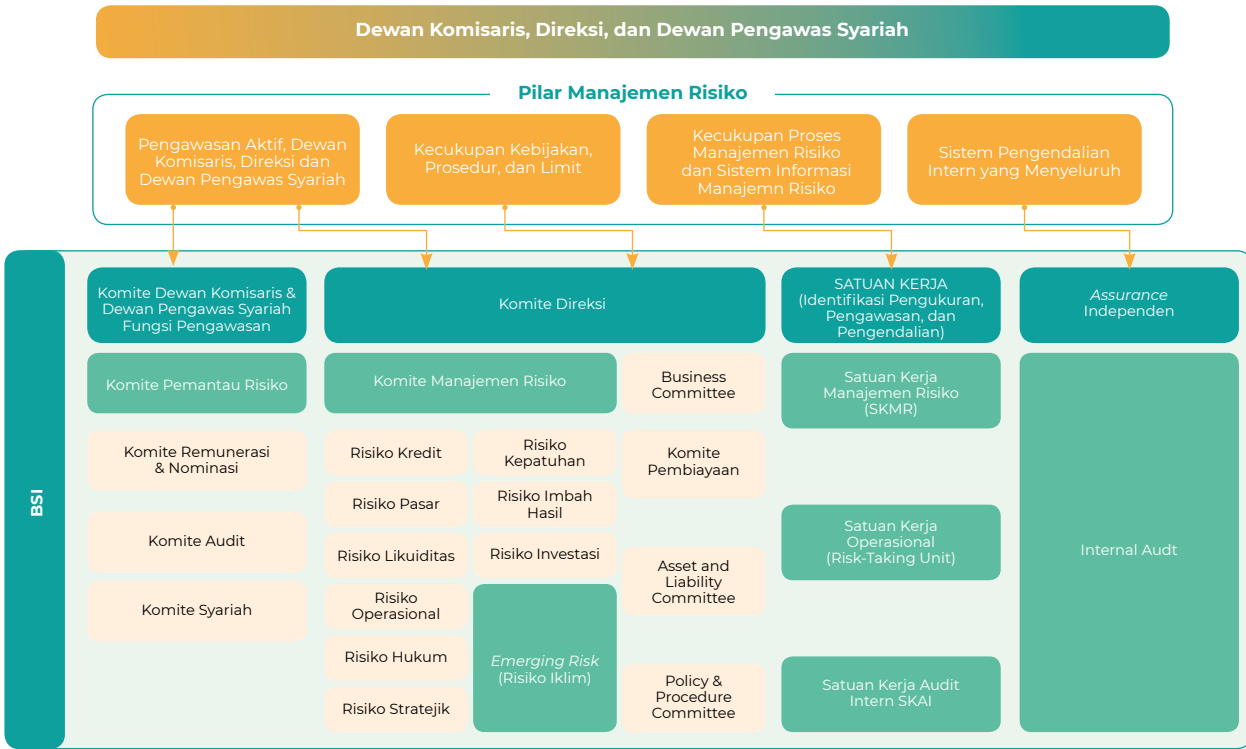
#### KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO [S1.RM.d, S2.RM.c1]

BSI senantiasa memperkuat fondasi tata kelola dan pengelolaan risiko sebagai pilar keberlanjutan bisnis dalam menjalankan peran sebagai institusi keuangan yang resilien terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan kerangka kerja manajemen risiko yang adaptif, terukur, dan selaras dengan dinamika industri perbankan. Penguatan kapasitas pengendalian risiko dilakukan secara terintegrasi pada seluruh lini organisasi, sehingga aktivitas usaha bank tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dalam merespons perubahan makro ekonomi berupa risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk iklim.

BSI telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan. BSI telah menerapkan prinsip tata kelola yang mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Selain itu, BSI mengikuti perkembangan dinamika industri dalam rangka penerapan tata kelola yang baik agar tetap relevan.

Dalam menerapkan manajemen risiko, BSI mengoptimalkan seluruh fungsi organ yang saling melengkapi sehingga saling melengkapi dalam menciptakan pengendalian yang efektif. Selain itu, optimalisasi seluruh fungsi ini dapat mendukung terciptanya integrasi informasi yang digunakan untuk pelaporan maupun pengambilan keputusan. BSI menerapkan manajemen risiko yang efektif dengan cara pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit risiko; Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Berikut merupakan struktur organisasi manajemen risiko yang terdapat pada BSI.

# MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

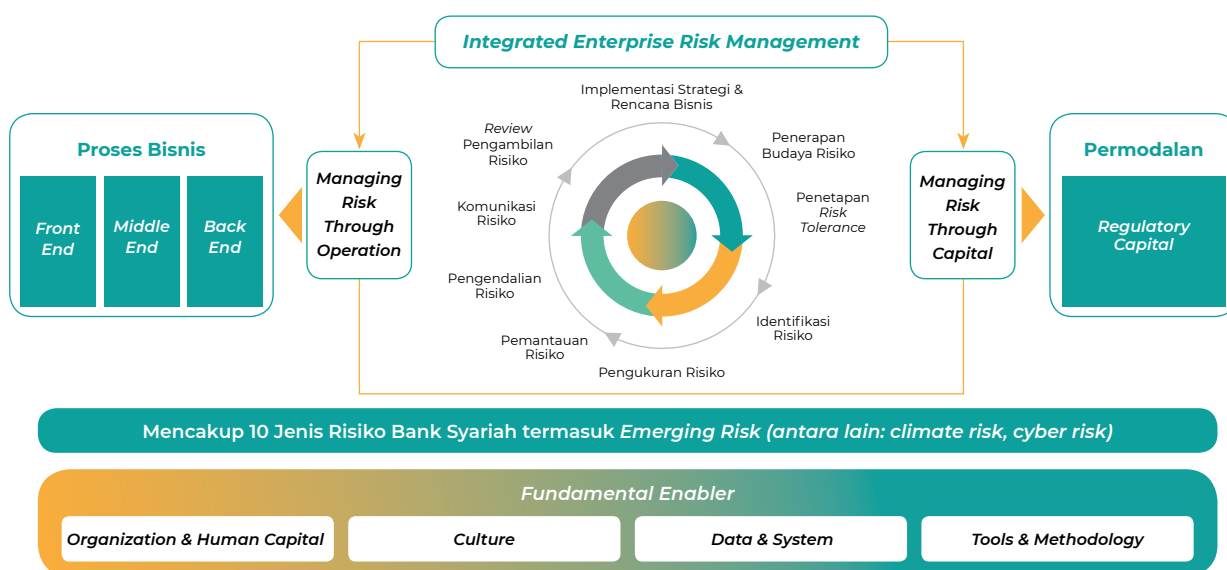


## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### RISIKO IKLIM PADA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO [S1.RM.a, S2.RM.a3, S2.RM.a4]

Di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan isu iklim global, BSI terus merelevansikan langkahnya lewat penguatan ekonomi syariah yang berorientasi masa depan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh BSI adalah menerapkan manajemen risiko atas *emerging risk* pada Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

*Emerging risk* merupakan risiko baru yang sedang berkembang dengan data historis yang terbatas serta berpotensi berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank. Salah satu dari *emerging risk* yang sudah BSI lihat adalah risiko *Environmental, Social, dan Governance*. Salah satu dari risiko tersebut adalah risiko fisik dan risiko transisi yang terdapat pada risiko iklim. Melalui hal tersebut, BSI mengelola risiko iklim yang berpengaruh terhadap permodalan Bank yang memuat prinsip identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, komunikasi risiko, *review* pengambilan risiko, implementasi stratejik & rencana bisnis, penerapan *risk culture*, dan penerapan *risk tolerance*. Berikut merupakan pengintegrasian *Enterprise Risk Management* di mana di dalamnya terdapat *emerging risk* berupa *climate risk*.



### IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO [S1.RM.a, S1.RM.b, S1.RM.c, S2.RM.a1, S2.RM.a3, S2.RM.a5]

Lingkungan internal dan eksternal perbankan terus mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini membuat risiko kegiatan usaha BSI semakin kompleks sehingga diperlukan kebutuhan penerapan manajemen risiko yang memadai. BSI terus mengembangkan usahanya secara organik dan non-organik demi mewujudkan visi BSI. Pertumbuhan organik dan non-organik menimbulkan risiko bagi konglomerasi Bank, maka diperlukan manajemen risiko terintegrasi yang efektif. Kebijakan Manajemen Risiko yang efektif dan memadai dapat mendukung pertumbuhan bisnis BSI secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip prudenialitas. BSI perlu mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal Bank. Salah satu dari perkembangan lingkungan eksternal Bank adalah perubahan iklim.

Saat ini, BSI telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko termasuk *emerging risk*. Salah satu dari *emerging risk* tersebut adalah risiko iklim. Berikut merupakan yang dilakukan oleh BSI dalam melakukan penerapan manajemen risiko tersebut.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### Identifikasi Risiko

- Bank mengidentifikasi karakteristik risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank termasuk *emerging risk* (termasuk risiko iklim)
- Bank mengidentifikasi risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
- Bank mengidentifikasi Risiko terhadap seluruh Risiko secara berkala serta termasuk *sharia risk*;
- Membuat metode atau sistem untuk melakukan proses identifikasi Risiko pada seluruh produk dan kegiatan usaha.
- Bank mengidentifikasi Risiko dengan memastikan bahwa Risiko dari produk dan kegiatan usaha baru telah melalui penerapan Manajemen Risiko yang layak sebelum produk atau kegiatan usaha diterbitkan

### Pengukuran Risiko

- Bank mengevaluasi kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan paling sedikit secara triwulanan atau sewaktu-waktu yang disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Bank secara langsung;
- Bank melakukan pengukuran risiko secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- Bank menyesuaikan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
- Bank melakukan pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan menggunakan model/metode yang ditetapkan regulator dan atau yang dikembangkan oleh Bank.
- Bank mengaplikasikan model/metode pengukuran risiko disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank perlu melakukan validasi dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model/metode pengukuran risiko. Validasi tersebut dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi internal audit dan/atau satuan kerja lainnya yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model/metode pengukuran risiko.

- Bank melakukan evaluasi terhadap sistem pengukuran Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
- Bank melakukan *stress testing* dan kaji ulang hasil *stress testing* secara berkala untuk mengambil langkah yang tepat dalam hal perkiraan kondisi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil *stress testing* dan kaji ulang menjadi masukan dalam menetapkan atau mengubah kebijakan dan limit Risiko Bank. Selain itu, Bank telah melakukan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) untuk melihat kesiapan BSI dalam menghadapi risiko iklim.

### Pemantauan Risiko

- Bank mengevaluasi eksposur Risiko melalui pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau berdampak terhadap kondisi permodalan Bank; dan
- Bank menyesuaikan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.
- Bank membuat sistem dan prosedur pemantauan Risiko yang antara lain berupa pemantauan terhadap besar eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit Risiko internal, dan hasil *stress testing*, serta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Bank menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*backup*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.
- Bank memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Setiap unit kerja mempunyai tanggung jawab untuk memantau eksposur risiko di unit kerjanya.

### Pengendalian Risiko

- Bank membuat sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

- Bank melakukan Proses pengendalian Risiko disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, serta Prinsip Syariah.

### Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang mencakup laporan atau informasi antara lain.

- Eksposur risiko baik eksposur kuantitatif maupun kualitatif, secara keseluruhan (komposit), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional;
- Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit;
- Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

### PENGUNAAN INPUT, PARAMETER, DAN ANALISIS SKENARIO IKLIM [S2.RM.a2]

Dalam proses identifikasi dan penilaian risiko terkait iklim, Perseroan menggunakan berbagai *input*, parameter, dan sumber data yang relevan untuk mendukung analisis risiko secara komprehensif. Data yang digunakan mencakup informasi internal Perseroan, data portofolio pembiayaan, karakteristik sektor industri nasabah, serta referensi eksternal yang relevan, termasuk publikasi ilmiah, skenario perubahan iklim global, dan perkembangan praktik internasional.

Perseroan secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan kualitas dan cakupan data, termasuk peningkatan granularitas data operasional dan sektor industri, guna mendukung akurasi pengukuran risiko dan efektivitas pengambilan keputusan. Proses validasi dan pengendalian kualitas data juga dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan kerangka manajemen risiko Perseroan.

### INTEGRASI RISIKO IKLIM TERHADAP RISIKO BANK [S1.RM.d, S2.RM.a4, S2.RM.c1]

Risiko iklim merupakan salah satu dari *emerging risk* yang BSI miliki. CRMS yang telah dilakukan pada tahun 2025 mengetahui bahwa risiko iklim berpengaruh terhadap risiko bank lainnya seperti risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas. Proses manajemen risiko iklim dikelola secara terintegrasi ke dalam sistem manajemen risiko bank. Proses ini diawali dengan identifikasi risiko iklim; pengukuran risiko iklim dengan menetapkan beberapa metrik terkait risiko fisik dan risiko transisi; selanjutnya menilai dampak risiko iklim terhadap finansial Bank; kemudian mengevaluasi dampak risiko iklim dan menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengelola dampak dari risiko iklim tersebut. Berikut merupakan integrasi risiko iklim terhadap bank lainnya yang meliputi jenis risiko iklim, dampak, dan pengelolaan risiko.

Faktor Risiko Iklim	Dampak	Pengelolaan Risiko
<p><b>Risiko Transisi</b> Risiko yang muncul akibat perubahan arah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial seiring dengan bergesernya tujuan perekonomian dunia ke arah ekonomi rendah karbon.</p>	<p>Risiko transisi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap risiko perbankan, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Kredit                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan kebijakan regulasi oleh pemerintah/ otoritas yang lebih ketat seperti pengaturan <i>carbon emission</i>, <i>carbon tax</i>, dan peralihan teknologi dapat mempengaruhi kinerja keuangan nasabah dan kemampuan bayar nasabah kepada bank, terutama nasabah dengan bisnis yang sensitif atas peristiwa iklim ekstrem atau perubahan kebijakan iklim.</li> <li>• Perubahan preferensi konsumen yang mengedepankan aspek ESG, berdampak terhadap penurunan pendapatan nasabah dan berujung meningkatkan risiko gagal bayar bagi nasabah yang tidak dapat menyesuaikan rencana bisnis dengan kebijakan transisi dan perubahan teknologi ke arah <i>green</i>.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan <i>framework</i> manajemen risiko yang mempertimbangkan aspek LST/ESG.</li> <li>2. Penetapan strategi manajemen portofolio pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek LST melalui <i>portfolio guideline</i>.</li> <li>3. Secara bertahap, melakukan penurunan limit penyaluran pembiayaan pada nasabah dengan sektor usaha yang menghasilkan emisi karbon tinggi.</li> <li>4. Penyusunan kebijakan yang mendukung penyaluran pembiayaan ke arah <i>green financing</i>.</li> </ol>

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

Faktor Risiko Iklim	Dampak	Pengelolaan Risiko
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Risiko Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan kebijakan iklim sehingga berpengaruh pada Posisi Devisa Neto (PDN) Bank.</li> <li>• Perubahan <i>customer behavior</i> yang beralih ke produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, berpotensi mengakibatkan penurunan permintaan surat berharga non berkelanjutan yang berdampak pada penurunan nilai surat berharga.</li> <li>• Peningkatan suku bunga atau perubahan asumsi makro ekonomi lainnya berdasarkan scenario NGFS mengakibatkan peningkatan <i>yield</i> surat berharga pemerintah dan korporasi, serta penurunan harga pasar surat berharga saat melakukan <i>mark-to-market</i>.</li> </ul> </li> <li>3. Risiko Likuiditas Risiko transisi berdampak pada penurunan valuasi aset likuid berkualitas tinggi (HQLA), <i>cash outflow</i>, dan <i>cash inflow</i> Bank. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor penurunan valuasi surat berharga, peningkatan <i>run off rate</i>, dan <i>inflow rate</i>.</li> <li>4. Risiko Operasional Risiko transisi berdampak pada potensi tambahan biaya/<i>cost</i> yang harus dikeluarkan Bank untuk melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• investasi pada teknologi atau infrastruktur baru yang berkelanjutan.</li> <li>• pelatihan pegawai terkait risiko iklim dan/atau ESG.</li> <li>• rekrutmen pegawai baru untuk mengelola risiko iklim akan direkrut bank.</li> <li>• implementasi pembiayaan atau pendanaan yang berkelanjutan.</li> <li>• Inisiatif lain seperti jasa kerja sama dengan pihak ketiga pada pengelolaan risiko iklim.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengukuran dan analisis risiko iklim melalui <i>Climate Risk Stress Test</i> (CRST).</li> <li>6. Investasi pada surat berharga pemerintah dan surat berharga korporasi pada sektor ramah lingkungan.</li> <li>7. Peningkatan pendanaan melalui penghimpunan dana pihak ketiga dengan <i>run off rate</i> rendah sesuai komponen LCR dan penerbitan sukuk berkelanjutan.</li> <li>8. Investasi pada teknologi atau infrastruktur baru yang berkelanjutan.</li> <li>9. Peningkatan kompetensi pegawai terkait ESG dan risiko iklim.</li> </ol>
<p><b>Risiko Fisik</b> Risiko akibat dampak langsung dari bencana alam yang parah (risiko fisik akut) dan risiko yang secara bertahap terdampak oleh perubahan iklim dalam jangka panjang, misalnya kenaikan temperatur permukaan air laut (risiko fisik kronis), dan perubahan pola curah hujan.</p>	<p>Risiko fisik berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap risiko perbankan, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Kredit Banjir dan kebakaran lahan berdampak pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan fisik agunan/properti nasabah yang mengakibatkan penurunan harga agunan/properti yang berdampak pada peningkatan <i>Loss Given Default</i> (LGD).</li> <li>• Penurunan produktivitas lahan terutama pada sektor pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan penurunan kemampuan bayar nasabah.</li> </ul> </li> <li>2. Risiko Likuiditas Kebakaran hutan atau banjir berpotensi mengakibatkan penarikan dana yang tak terduga, menghasilkan aliran keluar yang lebih besar dari yang diperkirakan.</li> <li>3. Risiko Operasional Banjir dan kebakaran berpotensi merusak aset bank seperti kantor cabang, ATM, pusat data atau menghambat operasional bank secara keseluruhan. Hal tersebut akan meningkatkan potensi kerugian akibat penurunan pendapatan yang dihasilkan karena bencana alam.</li> </ol>	

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### Perubahan Proses Manajemen Risiko dari Periode Sebelumnya [S2.RM.a6]

Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan penyempurnaan proses manajemen risiko terkait iklim sejalan dengan perkembangan metodologi pengukuran risiko, dinamika perubahan iklim global, serta peningkatan ekspektasi regulator dan pemangku kepentingan. Penyempurnaan tersebut mencakup penguatan integrasi risiko iklim dalam kerangka manajemen risiko perusahaan, peningkatan proses pemantauan risiko, serta pengembangan pendekatan analisis risiko yang lebih komprehensif.

Perseroan juga melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang diterapkan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan praktik terbaik internasional dan standar pelaporan yang berlaku.

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN YANG Mendukung pertumbuhan usaha Nasabah secara Berkelanjutan

[S1.RM.a, S2.RM.b1]

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis nasabah berjalan secara sehat dan berdaya tahan, BSI memandang penerapan kebijakan pembiayaan tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha nasabah dalam jangka panjang. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian, BSI melihat dapat memberikan dukungan pembiayaan yang mampu mendorong produktivitas, memperkuat daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah dan perekonomian. Kebijakan ini menjadi landasan dalam memastikan setiap keputusan pembiayaan dikelola secara bertanggung jawab.

Dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP), nasabah dianalisis pada aspek tata kelola dan ekonomi. NAP merupakan media untuk mengusulkan dan menganalisis pembiayaan dari calon/nasabah untuk memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan Bank. Berikut merupakan aspek tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dianalisis pada calon/nasabah BSI.

### Aspek Tata Kelola dan Ekonomi

Aspek tata kelola dan ekonomi yang dianalisis meliputi aspek manajemen, teknis, keuangan, pemasaran, dan legal.

- Aspek manajemen merupakan kriteria yang berhubungan dengan organisasi/manajemen perusahaan antara lain kemampuan dan pengalaman pengurus perusahaan dalam bidang usaha bersangkutan.
- Aspek teknis merupakan kriteria yang berhubungan dengan aspek-aspek produksi antara lain fasilitas produksi, kapasitas produksi, lokasi usaha, tenaga kerja, dan bahan baku.
- Aspek keuangan merupakan kriteria yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan antara lain berupa profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.
- Aspek pemasaran merupakan kriteria yang berhubungan dengan aspek pemasaran antara lain berupa jenis produk yang dijual, sarana pemasaran, dan saluran distribusi.
- Aspek legal merupakan kriteria yang berhubungan dengan aspek legalitas calon/nasabah yang terdiri atas legalitas diri, legalitas perizinan usaha nasabah, dan legalitas agunan.

### Aspek Sosial

Aspek sosial merupakan kriteria yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial pada usaha nasabah. Adapun yang termasuk ke dalam aspek sosial adalah kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa atau eksploitasi pada anak di bawah umur atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (seperti: Prostitusi, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja)

### Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan kriteria yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungan pada usaha nasabah yang terdiri atas namun tidak terbatas pada izin usaha dan legalitas lingkungan. Berikut merupakan beberapa contoh aspek lingkungan yang perlu dipenuhi calon/nasabah pada sektor industri Kelapa Sawit, *Oil & Gas*, Batu Bara, dan Industri Pengolahan pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Industry Acceptance Criteria* (IAC).

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

Sektor	Kriteria yang Perlu Dipenuhi
Kelapa Sawit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan Perkebunan tidak berada dalam area hutan lindung</li> <li>2. Memiliki persetujuan AMDAL</li> <li>3. Memiliki sertifikat ISPO / RSPO atau minimal memiliki kontrak kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi ISPO</li> <li>4. Minimal Peringkat PROPER Biru</li> </ol>
Minyak dan Gas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki persetujuan lingkungan AMDAL</li> <li>2. Memiliki <i>Plan of Development</i> (POD) yang disetujui oleh SKK Migas</li> </ol>
Kebijakan Pembiayaan Batu Bara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya tahapan produksi (bukan eksplorasi)</li> <li>2. Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)</li> <li>3. Memiliki CNC (<i>Clean and Clear</i>) dari Instansi terkait</li> <li>4. Memiliki persetujuan AMDAL</li> </ol>
Kebijakan Pembiayaan Industri Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki persetujuan lingkungan AMDAL</li> <li>2. Memiliki sarana pengolahan limbah</li> </ol>

### DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERMASUK DALAM DAFTAR PENGECUALIAN [S1.RM.a, S2.RM.b1]

BSI sebagai Bank Syariah memiliki komitmen untuk menghindari dan melarang pembiayaan yang melanggar prinsip-prinsip syariah dan pokok-pokok syariah seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), Kemaslahatan (masalah), Universalisme (alamiyah), dan mengandung objek haram, riba, maysir, gharar, risywah, bathil dan bersifat dzalim. Selain itu, BSI juga melarang pada pembiayaan yang tidak sah dan tidak lengkap akadnya, bertentangan dengan fatwa DSN MUI dan Opini DPS, bersifat spekulasi, bertujuan jual beli perdagangan saham, dan usaha yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah. Berikut merupakan kegiatan usaha yang dihindari dan dilarang untuk dibiayai.

1. Kegiatan *illegal logging* (pembalakan liar), produksi dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari.
2. Kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa atau eksploitasi pada anak di bawah umur atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (seperti: Prostitusi, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja).
3. Kegiatan produksi, perdagangan, pengiriman dan impor senjata di luar badan usaha/institusi resmi yang mendapat izin khusus/legalitas khusus dari pemerintah.
4. Kegiatan produksi, perdagangan narkoba, zat psikotropika dan zat adiktif di luar badan usaha/ institusi resmi yang mendapat izin/legalitas dari pemerintah.

5. Kegiatan produksi, pengiriman, perdagangan, penyembelihan hewan babi atau hewan lainnya yang diharamkan secara syariah.
6. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol.
7. Kegiatan yang berdampak negatif pada Situs Warisan Dunia UNESCO (*UNESCO World Heritage Sites*) atau kawasan lindung nasional dan/atau internasional.
8. Kegiatan perdagangan satwa liar atau produk satwa liar (seperti gading, tanduk, sirip hiu).
9. Kegiatan penjaringan ikan di laut dengan menggunakan jaring dengan panjang lebih dari 2.5 km.
10. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif (kec. peralatan medis dan peralatan lain yang dianggap aman oleh IFC).

### ALUR PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN [S1.RM.a, S2.RM.a1, S2.RM.a3]

Salah satu bentuk penerapan manajemen risiko antara lain adalah kecukupan prosedur untuk mendukung aktivitas operasional bisnis BSI. Sehubungan dengan hal tersebut, BSI telah menyusun Standar Prosedur Bisnis (SPB) Pembiayaan sesuai karakteristik bisnis. Dimana, aspek Tata Kelola dan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan menjadi aspek yang perlu dipenuhi untuk penyaluran pembiayaan kepada calon/nasabah. Berikut merupakan alur proses pembiayaan yang dilakukan oleh BSI.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM



Proses penyaluran pembiayaan dimulai ketika Business Unit menentukan target calon/nasabah dan menawarkan fasilitas pembiayaan. Penentuan target ini diidentifikasi berdasarkan sektor industri yang potensial yang diatur melalui SPB *Portfolio Guideline*. Sektor industri yang potensial merupakan sektor yang memiliki prospek yang baik dan BSI memiliki pengalaman dalam mengelola sektor industri tersebut. Ketika calon/nasabah tertarik, Business Unit mengumpulkan data dan informasi calon/nasabah.

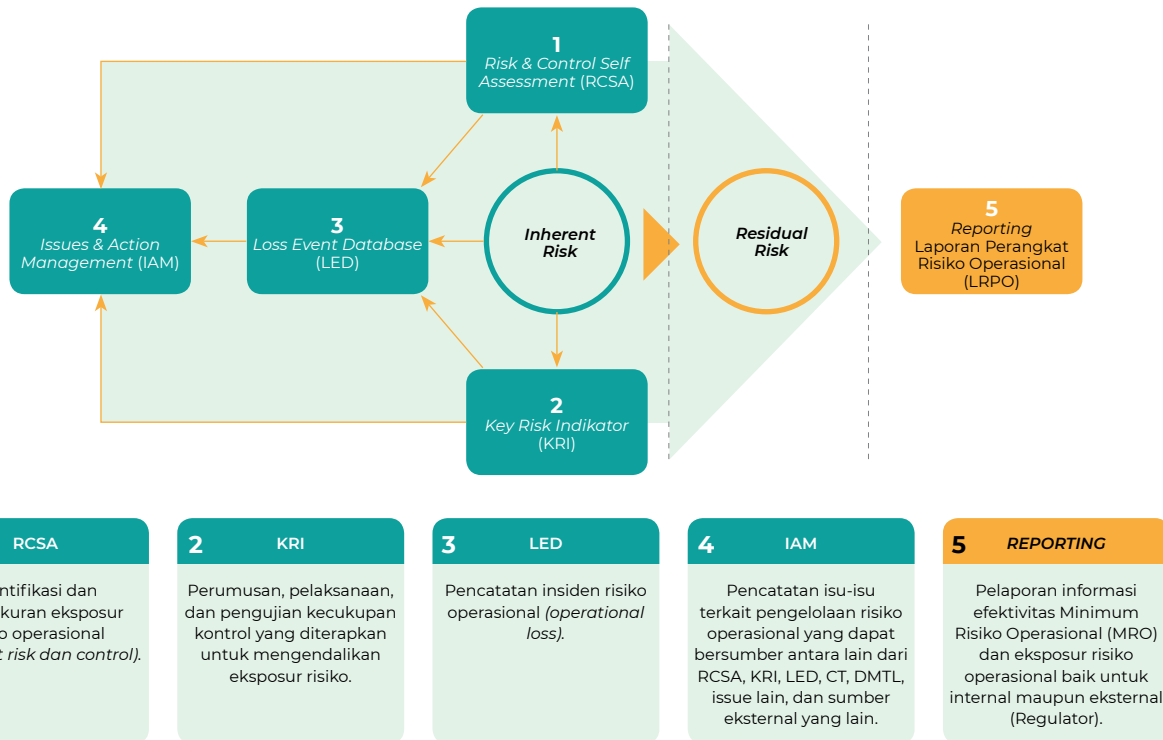
Sebelum diajukan kepada Komite Pembiayaan, dilakukan pembahasan dalam Rapat Teknis mengenai aspek teknis yang berkaitan dengan aspek legal, aspek syariah, dan kepatuhan terhadap internal dan eksternal. Selanjutnya, dilakukan komite pembiayaan yang dilengkapi dengan sekretaris komite untuk dilakukan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan kepada calon/nasabah. Apabila pengajuan pembiayaan calon/nasabah disetujui, selanjutnya Financing Operation Unit mempersiapkan akad, pengikatan agunan dan asuransi, dan pencairan pembiayaan.

BSI sebagai bank syariah yang selalu mengoptimalkan pertumbuhannya, BSI terus menjaga portofolio pembiayaannya melalui tindakan pemantauan/pengamatan. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat terhadap menurunnya kualitas pembiayaan, sehingga BSI dapat segera menyusun *action* program untuk memperbaiki kualitas pembiayaan tersebut melalui Financing Recovery Unit.

### KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA RISIKO IKLIM [S1.RM.a, S1.RM.b, S2.RM.a1, S2.RM.a5]

BSI telah mengimplementasikan kerangka kerja Manajemen risiko operasional yang komprehensif dan terstruktur untuk mengelola risiko yang melekat dalam aktivitas operasionalnya. Salah satu dari insiden risiko operasional yang telah ditentukan oleh BSI adalah bencana alam seperti kebakaran, banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Dimana diketahui, insiden risiko operasional ini termasuk ke dalam faktor risiko fisik dari risiko iklim. BSI melakukan pengelolaan risiko operasional terkait iklim melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang didukung oleh *Operational Risk Management Tools* (ORM tools) meliputi Risk & Control Self Assessment (RCSA), *Key Risk Indicator* (KRI), *Loss Event Database* (LED), *Issue & Action Management* (IAM), dan *Control Testing* (CT). Berikut merupakan kerangka kerja manajemen risiko operasional dengan ORM Tools yang tercantum pada Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Manajemen Risiko Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Operational Risk Management Tools*.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM



Kerangka ini dimulai dengan pendekatan proaktif melalui RCSA. RCSA bersifat *forward-looking*, di mana unit kerja mengidentifikasi potensi risiko operasional di masa depan berdasarkan proses bisnis utamanya. Dalam RCSA, unit kerja melakukan pemetaan proses, mengidentifikasi risiko kunci dan pengendaliannya, serta melakukan penilaian dengan menghitung *Inherent Risk* (IHRR) yang merupakan perkalian antara *likelihood* (kemungkinan) dan *impact* (dampak). Selanjutnya, efektivitas pengendalian yang dinilai (*Control Score*). Hasil akhirnya adalah (*Composite Risk Score*), yaitu tingkat residual setelah pengendalian diterapkan. Hasil penilaian RCSA ini kemudian di review dan dapat disesuaikan oleh Senior Operational Risk (SOR) untuk memastikan keakuratannya.

Berdasarkan hasil RCSA, khususnya untuk risiko dengan peringkat *Inherent Risk Medium to High* dan *High*, unit kerja kemudian menetapkan *Key Risk Indicator* (KRI). KRI berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk memantau indikator-indikator yang dapat memicu atau memperburuk eksposur risiko. Untuk setiap KRI, ditetapkan ambang batas (*threshold*) tiga tingkat, yakni Hijau

(kondisi aman), Kuning (perlu pemantauan ketat), dan Merah (di atas batas toleransi). Pemantauan KRI dilakukan secara bulanan dan hasilnya juga di *review* oleh SOR. Status KRI menjadi bahan evaluasi yang krusial untuk mengantisipasi potensi masalah.

Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan dan pemantauan, insiden risiko operasional tetap dapat terjadi. Untuk itu, *Loss Event Database* (LED) berfungsi sebagai alat untuk mencatat setiap insiden secara *reactive*. Setiap kejadian kerugian operasional wajib dicatat oleh unit kerja. Pembebanan Insiden Risiko Operasional (PIRO) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Insiden-insiden ini diklasifikasikan ke dalam 7 tipe dasar kejadian kerugian, dimana salah satu dari kejadian kerugian adalah kerusakan aset fisik yang termasuk dari risiko terkait iklim. Kerusakan aset fisik adalah kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan pada aset fisik yang disebabkan oleh bencana alam atau kejadian lainnya.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

Temuan-temuan yang bersumber dari RCSA, *Control Testing*, KRI, laporan LED, DMTL hasil audit Internal/eksternal, kemudian ditindaklanjuti melalui *Issue & Action Management* (IAM). IAM adalah alat untuk memantau dan mengelola seluruh *issue* yang memerlukan tingkat lanjut. Unit kerja wajib memperbarui status realisasi dari rencana tindak perbaikan ini secara berkala.

Keempat pilar utama (RCSA, KRI, LED, dan IAM) ini kemudian diintegrasikan dan dilaporkan secara menyeluruh dalam LPRO. LPRO ini menjadi dokumen sentral yang memberikan gambaran utuh tentang profil risiko operasional suatu unit kerja, yang kemudian disampaikan kepada Struktur Komite Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi *Operational Risk*. Dengan demikian, BSI tidak hanya memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mencatat risiko, tetapi juga sistem yang memastikan bahwa semua masalah ditindaklanjuti hingga tuntas, menciptakan siklus manajemen risiko yang berkelanjutan dan berkesinambungan termasuk risiko iklim.

### ADAPTASI DAMPAK RISIKO IKLIM [S1.RM.b, S2.RM.a5]

BSI secara berkelanjutan terus memperkuat kapasitas dan ketangguhan dalam merespons dinamika perubahan iklim, termasuk keragaman dan kejadian ekstrem. Melalui penguatan proses, kebijakan, dan manajemen risiko, BSI terus berupaya meminimalkan dampak dan kerugian yang timbul, sehingga operasional dan layanan kepada nasabah tetap terjaga secara optimal di tengah tantangan iklim yang terus berkembang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Kebijakan Manajemen Risiko, BSI telah menambahkan *emerging risk* terkait risiko ESG termasuk iklim. Selain itu, BSI telah membuat unit kerja khusus untuk terus merelevansikan BSI dengan perkembangan risiko ESG termasuk iklim, yakni ESG Group yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.04/239-KEP/DIR tanggal 11 Juni 2024.

Saat ini, untuk terus beradaptasi dengan dinamika perubahan iklim, BSI telah menetapkan *Industry Class* Baru (termasuk sektor KUBL) dan menetapkan Kriteria *Green Financing*. Selain itu, pembiayaan yang telah disalurkan oleh BSI telah dilakukan pengelompokan berdasarkan sektor TKBI. Untuk risiko operasional, BSI telah memasukkan bencana alam pada Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Manajemen Risiko Operasional. Melalui kiat-kiat dalam adaptasi iklim ini, menunjukkan bahwa BSI mendukung sepenuhnya komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yang telah diratifikasi pada UU No. 16 Tahun 2016 dengan mempraktikkan bisnis yang berkelanjutan.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

### METRIKS DAN TARGET



#### MANAJEMEN DAN KINERJA EMISI OPERASIONAL [S2.MT.b1, S2.MT.b2, S2.MT.c1, S2.MT.c5, S2.MT.h1, S2.MT.h5, S2.MT.i3]

BSI secara proaktif melakukan pengukuran dan pemantauan emisi operasional sebagai dasar dalam mencapai komitmennya pada pilar *Sustainable Operation dalam Sustainability Framework*, “*Net Zero Emission in Operation*”. Komitmen ini merupakan dukungan BSI untuk Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. BSI sebagai, “*The First Sharia Bank in Indonesia Implemented Digital Carbon Tracking*”, telah melakukan perhitungan dan pemantauan emisi operasionalnya menggunakan *Digital Carbon Tracking*. *Digital Carbon Tracking* merupakan sistem aplikasi/platform pencatatan yang telah dikembangkan untuk perhitungan dan pemantauan emisi karbon BSI secara *bankwide* dalam satuan tCO<sub>2</sub>e. Perhitungan dan pemantauan emisi operasional menunjukkan usaha BSI dalam mengelola risiko dan peluang terkait iklim.

Saat ini, *Digital Carbon Tracking* hanya dapat menghitung emisi *scope 1* dan 2. Emisi *scope 1* adalah emisi GRK langsung yang terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas. Jika di BSI, emisi *Scope 1* berasal dari penggunaan bahan bakar minyak di seluruh wilayah operasional BSI. Emisi *Scope 2* adalah emisi GRK tidak langsung dari pembangkitan listrik, uap, pemanas atau pendingin yang dibeli atau diperoleh yang dikonsumsi oleh entitas. Jika di BSI, emisi *Scope 2* berasal dari penggunaan listrik di seluruh wilayah operasional BSI. Untuk lebih mengetahui *Digital Carbon Tracking*, dapat diakses pada *ESG Landing Page* BSI, [https://ir.bankbsi.co.id/esg/green\\_initiatives.html](https://ir.bankbsi.co.id/esg/green_initiatives.html).

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada tahun 2025, emisi operasional yang dihasilkan oleh BSI sebesar 89.730,95 tCO<sub>2</sub>e. Perhitungan emisi operasional yang dihasilkan tersebut berasal dari perhitungan pada seluruh *outlet* yang BSI miliki, yakni sebanyak 1.190 *outlet*. Berikut merupakan emisi operasional yang dihasilkan oleh BSI setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, emisi operasional BSI mengalami peningkatan sebesar 7,5%. Peningkatan emisi operasional ini disebabkan pengoperasian BSI Tower dan ekspansi bisnis seperti penambahan outlet dan ATM. Namun, jika dilihat berdasarkan intensitas emisi per revenue, intensitas emisi operasional BSI mengalami penurunan, intensitas emisi pada tahun 2024 sebesar 2,70 tCO<sub>2</sub>e/Rp Miliar dan tahun 2025 sebesar 2,55 tCO<sub>2</sub>e/Rp Miliar. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis terus diiringi dengan efisiensi dalam sumber daya.

Sejak BSI didirikan pada tahun 2021 hingga tahun 2025, Perseroan terus memperkuat inisiatif tersebut. Secara kumulatif, BSI telah memiliki 2 unit *Green Building*, 145 unit kendaraan listrik, 15 unit stasiun pengisian daya yang tersebar di kantor pusat dan gerai BSI, 8 solar panel di Outlet BSI dan 3 solar panel di Desa Binaan BSI, 70 unit mesin penjual botol daur ulang yang beroperasi di 133 *collection point* di wilayah Jabodetabek dan Bali, serta penanaman dan penyaluran sebanyak 65.000 pohon.

### METODOLOGI PENGUKURAN EMISI OPERASIONAL [S1.MT.c, S2.MT.c2, S2.MT.c3]

Dalam melakukan perhitungan emisi operasional pada *Digital Carbon Tracking*, BSI mengacu pada metodologi dari *Greenhouse Gas (GHG) Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* untuk inventarisasi emisi gas rumah kaca. Selain itu, BSI menerapkan metodologi dari ISO 14064-1:2018 – *Greenhouse Gas Bagian 1: Spesifikasi dengan panduan di tingkat organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca*. Metodologi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti *Relevance, Completeness, Consistency, Transparency, dan Accuracy*. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan emisi GRK operasional BSI.

$$\text{Emisi GRK} = \text{Operational Activity} \times \text{Emission Factor} \times \text{GWP}$$

#### Keterangan:

*Operational Activity*: Jumlah energi atau konsumsi bahan bakar dari sumber emisi

*Emission Factor*: Koefisien yang menunjukkan emisi per unit aktivitas, spesifik untuk negara tertentu

*GWP*: *Global Warming Potential*, faktor yang digunakan untuk mengonversi berbagai jenis (GRK) CO<sub>2</sub>e

### MANAJEMEN DAN KINERJA EMISI PEMBIAYAAN [S1.MT.b, S2.MT.a2, S2.MT.c6, S2.MT.k2]

BSI secara bertahap melakukan pengukuran dan pengelolaan emisi pembiayaan sebagai bagian dari komitmennya pada pilar *Sustainable Banking* dalam *Sustainability Framework*, “*Unique in Sustainable Product Innovation*”. Komitmen ini merupakan dukungan BSI dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Emisi pembiayaan termasuk ke dalam emisi GRK cakupan 3. Emisi GRK cakupan 3 merupakan emisi GRK tidak langsung (tidak termasuk dalam emisi GRK cakupan 2) yang terjadi dalam rantai nilai entitas. Emisi pembiayaan merepresentasikan emisi tidak langsung yang timbul dari aktivitas usaha nasabah yang dibiayai oleh BSI. Pada tahun 2025, BSI telah melakukan pengukuran emisi pembiayaan dengan menggunakan portofolio pembiayaan tahun 2024. Berikut merupakan emisi pembiayaan pada sektor prioritas dan non-prioritas berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada CRMS.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

Sektor Industri	Outstanding (dalam triliun Rupiah)	Financed Emission (dalam tCO <sub>2</sub> -eq)	Intensitas Emisi (tCO <sub>2</sub> -eq/triliun Rupiah)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,12	5.890.141	962.441,34
2. Pertambangan dan Penggalian	2,04	4.394.519	2.154.175,98
3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	6,18	3.840.453	621.432,52
4. Konstruksi	16,92	13.316	787,00
5. Pengangkutan dan Pergudangan	6,58	189.502	28.799,70
6. Industri Pengolahan	7,26	1.207.045	166.259,64
7. Kredit Konsumtif Kepemilikan Properti	0,03	3.962	132.066,67
8. Sektor Produktif selain Sektor 1 s.d 6	17,01	613.398	36.061,02
9. Sektor Konsumtif selain Sektor 7	0,03	9.980	332.666,67
<b>Grand Total</b>	<b>62,17</b>	<b>16.162.316</b>	<b>259.969,70</b>

Dalam rangka mengelola emisi tersebut, BSI mengembangkan kerangka dalam mengintegrasikan pertimbangan risiko dan peluang terkait iklim ke dalam kebijakan, proses, dan portofolio pembiayaan. Upaya pengelolaan ini, mencerminkan peran BSI dalam mendukung transisi nasional menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam mengelola portofolio, BSI telah menetapkan limit pada sektor-sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi (*brown sector*) seperti Batubara, Industri Migas, dan Pertambangan Minyak dan Gas. Selain itu, BSI telah menerapkan manajemen risiko atas *emerging risk* (risiko iklim) pada Kebijakan Manajemen Risiko Bank. BSI juga telah memasukkan aspek tata kelola, sosial, dan lingkungan pada pembiayaan yang diajukan oleh calon/nasabah.

### METODOLOGI PENGUKURAN EMISI PEMBIAYAAN [S1.MT.b, S1.MT.c, S2.MT.a2, S2.MT.c2, S2.MT.c3, S2.MT.c4]

Dalam melakukan pengukuran emisi pembiayaan, BSI mengacu pada praktik dan metodologi yang diakui secara internasional, yakni metodologi yang dikembangkan oleh *Partnership for Carbon Accounting Financials* (PCAF) guna memastikan konsistensi, transparansi, dan relevansi data emisi yang dihasilkan. Perhitungan yang telah dilakukan oleh BSI berdasarkan kualitas data *tier 4*, yakni melakukan *proxy* nilai emisi beberapa perusahaan yang telah memiliki data emisi untuk perusahaan dengan karakteristik yang sama dan belum memiliki publikasi atau perhitungan data emisi. Walaupun menggunakan kualitas data *tier 4*, namun perhitungan yang dilakukan mencakup cakupan 1, cakupan 2, dan cakupan 3 *upstream* serta *downstream* pada nasabah yang telah dibiayai. Jika berdasarkan kelas aset yang dikategorikan oleh PCAF, BSI telah melakukan pengukuran pada kelas aset obligasi korporasi dan investasi ekuitas. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan emisi GRK pembiayaan BSI.

## MEMPERKUAT TATA KELOLA BSI PADA RISIKO DAN PELUANG TERKAIT IKLIM

$$\text{Financed Emissions} = \sum_c \frac{\text{Outstanding Amount}_c}{\text{EVIC or Total Equity} + \text{Debt}_c} \times \text{Company Emissions}$$

**Keterangan:**

*OS Amount:* Pembiayaan yang diberikan kepada calon/nasabah

*EVIC:* Nilai perusahaan termasuk uang tunai

*Total Equity:* Total ekuitas calon/nasabah

*Debt:* Total hutang calon/nasabah

*Company Emissions:* Emisi yang dihasilkan oleh calon/nasabah

### Penetapan Harga Karbon Internal [S2.MT.f1-f2]

Perseroan mempertimbangkan perkembangan penerapan mekanisme harga karbon dalam proses pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan bisnis. Evaluasi terhadap potensi penerapan harga karbon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi, kondisi pasar, serta kesiapan internal Perseroan.

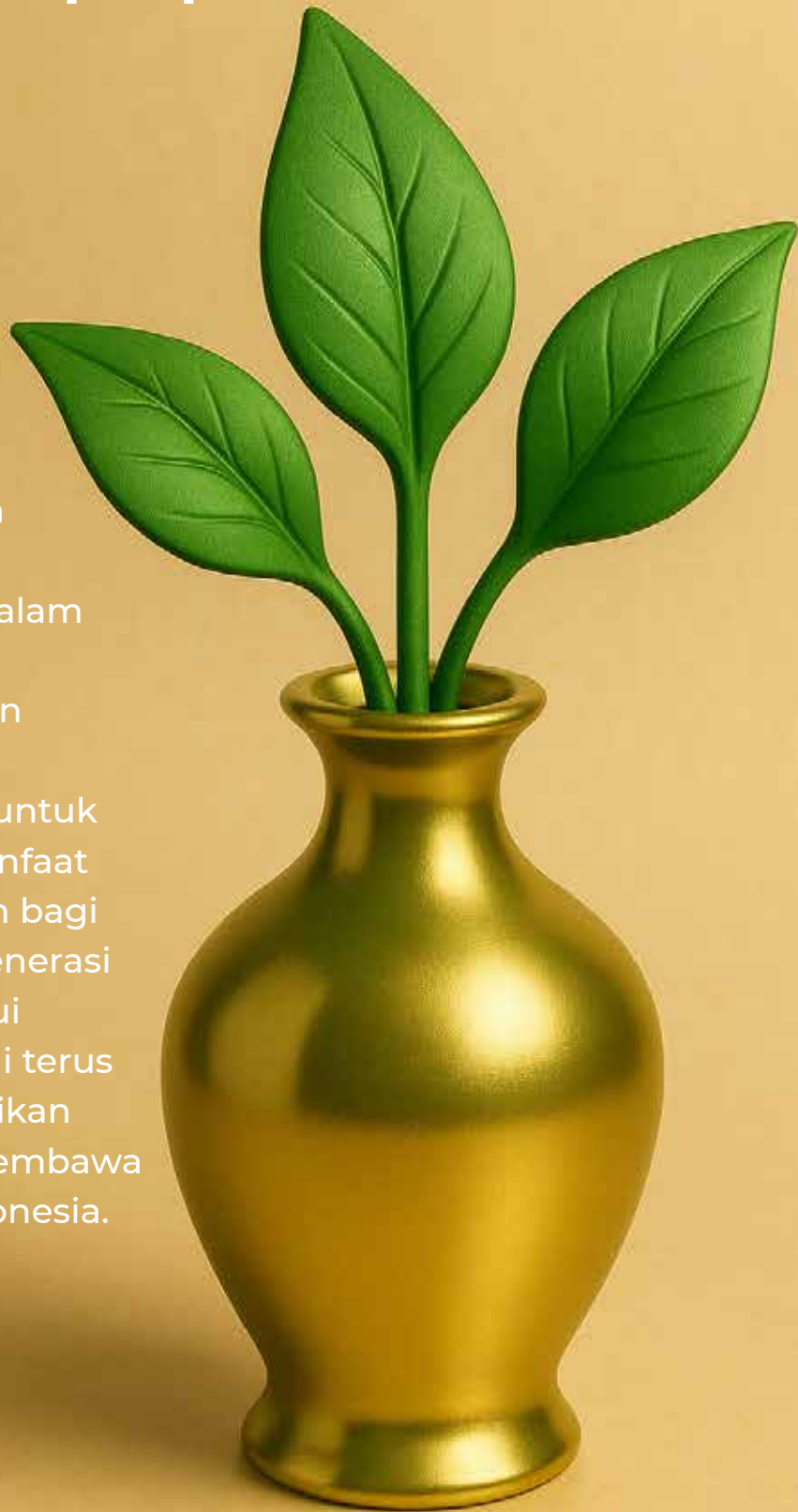
### Carbon Credits / Offset [S2.MT.k1-k7]

Perseroan memantau perkembangan mekanisme kredit karbon dan skema *offset* sebagai bagian dari upaya mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Penggunaan mekanisme tersebut, jika relevan, mempertimbangkan kredibilitas, integritas lingkungan, serta keselarasan dengan standar dan regulasi yang berlaku. Saat ini BSI, menunggu fatwa DSN-MUI terkait transaksi bursa karbon untuk merelevansikan pertumbuhan bisnis BSI dengan risiko dan peluang terkait keberlanjutan khususnya risiko iklim.

# KINERJA KEBERLANJUTAN

[OJK F]

Bab ini menyajikan dampak nyata dari upaya Perseroan dalam menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap inisiatif diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang. Melalui perjalanan ini, kami terus berupaya memberikan kontribusi yang membawa maslahat bagi Indonesia.








# KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [OJK F.1]

Dalam upaya memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan, BSI membangun budaya keberlanjutan yang melibatkan seluruh pegawai dan nasabah. Beragam inisiatif kampanye hijau secara konsisten dilakukan di kantor pusat maupun jaringan kantor di seluruh Indonesia. Kampanye ini bertujuan mendorong pengurangan penggunaan energi dan sumber daya, menekan konsumsi plastik sekali pakai, serta mengedukasi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Program-program utama dalam *Green Campaign* BSI meliputi:

### GREEN BUSINESS CULTURE MELALUI

 <p><b>Hemat Listrik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan listrik seperlunya, seperti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak menyalakan lampu pada ruangan yang tidak digunakan</li> <li>Mencabut kabel perangkat elektronik ketika tidak digunakan</li> </ul> </li> <li>Membuka tirai jendela untuk memaksimalkan pencahayaan ruangan pada siang hari</li> </ol>	 <p><b>Hemat Bahan Bakar Minyak (BBM)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan <i>public transportation</i> bila memungkinkan</li> <li>Menggunakan <i>electric vehicle</i> bila memungkinkan</li> <li>Menggunakan kendaraan secara efektif</li> </ol>	 <p><b>Hemat Air</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengontrol debit air (aliran air)</li> <li>Menghemat penggunaan air saat wudhu</li> <li>Menggunakan sistem daur ulang <i>greywater</i> untuk menyiram toilet</li> </ol>	 <p><b>Hemat Kertas</b></p> <p>Maksimalkan komunikasi dengan <i>softfile</i> melalui <i>media teams</i> sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional <i>File Sharing and Collaboration</i> dan PTO Aplikasi Digital Korespondensi Internal E-Doc BSI PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tanggal 27 September 2023</p>	 <p><b>Hemat Sampah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membawa dan menggunakan <i>tumbler</i> dalam beraktivitas</li> <li>Penyelenggara rapat diharapkan memberikan himbauan kepada tamu undangan untuk membawa <i>tumbler</i></li> <li>Menyediakan gelas &amp; <i>pitcher</i> di ruang <i>meeting</i></li> <li>Menyediakan tong sampah pilah 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>)</li> <li>Menghindari <i>food waste</i>/makanan berlebih</li> </ol>
---	--	--	--	--

BSI juga menerapkan kebijakan penghematan kertas sebagai bagian dari kebijakan keberlanjutan. Sumber terbesar sampah kertas berasal dari laporan dan korespondensi perbankan. Langkah efisiensinya meliputi:

- Penggunaan *double-sided printing* dan kertas bekas yang masih layak.
- Digitalisasi permintaan percetakan melalui aplikasi online dan *Procurement Management System*.
- Implementasi E-DOC BSI untuk digitalisasi korespondensi berbasis web.

BSI juga mendorong seluruh pegawai untuk menggunakan alat makan dan minum non-sekali pakai sebagai upaya mengurangi sampah plastik dari *pantry* pegawai.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya keberlanjutan di lingkungan internal, BSI tidak hanya menjalankan berbagai program edukasi melalui *Green Business Culture* (GBC), seperti *webinar*, modul pembelajaran ESG, forum berbagi pengetahuan, hingga kampanye tematik, tetapi juga memastikan bahwa semangat keberlanjutan diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Upaya ini mencerminkan komitmen BSI untuk menjadikan perilaku ramah lingkungan sebagai bagian dari standar operasional dan budaya kerja seluruh pegawai.

## KINERJA EKONOMI



### PERBANDINGAN TARGET DAN KINERJA PRODUKSI, PORTOFOLIO, TARGET PEMBIAYAAN, ATAU INVESTASI, PENDAPATAN DAN LABA RUGI [OJK F.2, IFRS SI-METRIC AND TARGET]

BSI berhasil mencatat kinerja keuangan yang lebih baik pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Realisasi pembiayaan, investasi, pendapatan margin dan bagi hasil, serta laba setelah pajak menunjukkan peningkatan yang konsisten. Peningkatan tersebut juga tercermin pada pertumbuhan pembiayaan di segmen *Retail Banking & Consumer*, *Wholesale Banking*, serta Dana Pihak Ketiga (DPK), yang seluruhnya mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2025.

## KINERJA EKONOMI

**Realisasi Produksi, Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi**

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	2023 Realisasi	2024 Realisasi	2025 Realisasi	Pertumbuhan 2025 (YoY)
Dana Pihak Ketiga	293.776	327.454	380.488	16,20%
Pembiayaan	240.316	278.481	318.844	14,49 %
Penempatan pada BI & SB	86.906	100.780	83.695	-16,95 %
Pendapatan Margin dan Bagi Hasil	22.252	25.298	28.265	11,74 %
Laba Setelah Pajak	5.704	7.006	7.568	8,02 %
Penyaluran UMKM	45.374	52.415	52.578	0,31 %

Rincian kinerja pembiayaan pada segmen *Retail Banking & Consumer* disajikan pada tabel berikut, yang menggambarkan perkembangan portofolio secara lebih detail berdasarkan jenis produk dan pertumbuhan dari tahun ke tahun:

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	2023 Realisasi	2024 Realisasi	2025 Realisasi	Pertumbuhan 2025 (YoY)
<i>Retail Banking &amp; Consumer</i>	172.805	201.263	228.045	13,31%
SME	19.346	21.635	24.591	13,67%
Mikro	22.912	27.745	27.667	-0,28%
Bisnis Emas	7.198	12.825	22.907	78,60%
Griya	52.517	56.834	60.259	6,03%
Oto	4.186	5.387	6.410	18,99%
Mitraguna	51.336	59.984	68.433	14,09%
Pensiun	14.626	16.051	16.921	5,42%
Card	684	802	857	6,83%

Rincian pembiayaan pada segmen *Wholesale Banking*, yang mencakup pembiayaan *Corporate* dan *Commercial* serta perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun, disajikan pada tabel berikut:

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	2023 Realisasi	2024 Realisasi	2025 Realisasi	Pertumbuhan 2025 (YoY)
<i>Corporate</i>	52.714	58.720	70.843	11,87%
<i>Commercial</i>	14.797	18.498	19.957	13,25%
<b>Total</b>	<b>67.511</b>	<b>77.218</b>	<b>90.800</b>	<b>17,59%</b>

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai perkembangan DPK, berikut ditampilkan rincian per jenis dana, giro, tabungan, dan deposito, beserta realisasi tahunan dan pertumbuhan tahun 2025:

## KINERJA EKONOMI

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	2023 Realisasi	2024 Realisasi	2025 Realisasi	Pertumbuhan 2025 (YoY)
Giro	53.201	56.336	71.828	27,50%
Tabungan	124.726	140.534	162.628	15,72%
Tabungan Wadiah	47.026	55.280	63.311	14,53%
Tabungan Non Wadiah	77.700	85.254	99.317	16,49%
Deposito	115.848	130.584	146.033	11,83%

Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penyebaran portofolio pembiayaan BSI, tabel berikut menyajikan rincian pembiayaan per sektor ekonomi beserta proporsi masing-masing sektor dan perkembangannya selama periode pelaporan:

(Dalam Miliar Rupiah)

Sektor	2023	%	2024	%	2025	%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	17.124	7,13	23.550	8,46	22.819	7,16%
Perikanan	765	0,32	720	0,26	606	0,19%
Pertambangan dan Penggalian	2.393	1,00	2.976	1,07	3.034	0,95%
Industri Pengolahan	11.806	4,91	12.765	4,58	12.943	4,06%
Listrik, Gas, dan Air	4.768	1,98	6.756	2,43	6.842	2,15%
Konstruksi	19.833	8,25	18.843	6,77	17.220	5,40%
Perdagangan Besar dan Eceran	17.484	7,28	19.747	7,09	30.649	9,61%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.758	1,15	3.204	1,15	3.683	1,16%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8.346	3,47	8.647	3,11	12.280	3,85%
Perantara Keuangan	5.870	2,44	5.807	2,09	6.265	1,96%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.868	1,61	5.299	1,90	6.270	1,97%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	0,00	-	0,00	254	0,08%
Jasa Pendidikan	4.499	1,87	4.929	1,77	5.238	1,64%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.818	2,84	9.402	3,38	11.049	3,47%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.315	1,38	3.732	1,34	3.681	1,15%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	160	0,07	168	0,06	148	0,05%
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	4.499	1,87	-	0,00	-	0,00%
Rumah Tangga	130.481	54,30	151.918	54,55	175.849	55,15%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	30	0,01	19	0,01	13	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>240.316</b>	<b>100</b>	<b>278.481</b>	<b>100</b>	<b>318.844</b>	<b>100,00%</b>

## KINERJA EKONOMI

## PERBANDINGAN TARGET DAN KINERJA PORTOFOLIO, TARGET PEMBIAYAAN, ATAU INVESTASI PADA INSTRUMEN KEUANGAN ATAU PROYEK YANG SEJALAN DENGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.3] [GRI FS3, FS6, FS7, FS8, FS10] [FN-CB-000.A, FN-CB-000.B, FN-CB-410A.2] [S2.MT.d3, S2.MT.e1]

### Keuangan Keberlanjutan

Sebagai bagian dari penerapan POJK 51/2017 dan SEOJK 16/2021, BSI terus memperkuat integrasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi serta aktivitas pembiayaannya. Melalui RAKB, BSI meningkatkan portofolio pembiayaan dan investasi yang mendukung pembangunan inklusif dan bernilai tambah bagi masyarakat.

Fokus utama Keuangan Berkelanjutan BSI pada tahun 2025 mencakup:

#### 1. Pembiayaan Sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)

Pada tahun 2025, BSI semakin memperkuat implementasi pembiayaan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan strategi bisnis utama, termasuk penguatan portofolio berbasis real asset serta penerapan kebijakan ESG yang diperbarui. Pengembangan portofolio yang sejalan dengan KKUB menjadi salah satu prioritas RAKB BSI, selaras dengan perluasan instrumen pembiayaan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Penerapan KKUB BSI merujuk pada Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 serta diperkuat oleh kebijakan baru yang diterbitkan sepanjang 2024–2025, seperti *ESG Guiding Principle*, *SOP Sustainable Finance*, *Exclusion List*, serta partisipasi BSI dalam *Piloting Indonesian Sustainable Finance Taxonomy* untuk sektor hijau. Dengan kerangka ini, proses penilaian pembiayaan kini terintegrasi dengan evaluasi risiko keberlanjutan, klasifikasi hijau, dan kesesuaian kegiatan usaha calon debitur dengan prinsip syariah dan ESG.

Selain itu, perluasan portofolio keberlanjutan juga didukung oleh pertumbuhan pembiayaan pada sektor-sektor yang relevan, termasuk energi, pertanian berkelanjutan, layanan publik, dan industri yang mendukung transisi ekonomi. Integrasi layanan emas melalui Bank Emas/*Bullion Bank* yang berbasis *real asset* juga memberikan fondasi tambahan bagi portofolio keberlanjutan, terutama pada pembiayaan emas yang memiliki karakteristik konservatif dan mendukung inklusi keuangan.

Dalam menilai kelayakan pembiayaan, BSI menerapkan kriteria keuangan hijau, di mana setiap calon debitur wajib memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan berikut:



Tidak ada pencemaran dalam proses produksi.



Tidak adanya polusi dan adanya pengolahan limbah sesuai ketentuan.



Tidak adanya pengaduan dari penghuni di lingkungan tempat usaha.



Pemenuhan semua peraturan pemerintah yang berlaku, seperti kepemilikan izin usaha.

## KINERJA EKONOMI

Setelah calon debitur memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria keberlanjutan yang telah ditetapkan, BSI melanjutkan proses melalui rangkaian pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Tahapan tersebut mencakup:

1. Melakukan evaluasi dan pengawasan perkembangan usaha nasabah yang dilakukan setiap tiga bulan.
2. Pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui beberapa media komunikasi antara lain video *conference*, *on the spot visit*, pendampingan konsultan, *watchlist quarterly review*, dan *annual review*.
3. Jika hasilnya memiliki potensi risiko ESG yang tinggi, Bank dapat melakukan peninjauan ulang atas pembiayaan yang diberikan.
4. Jika terdapat nasabah yang berada dalam pengawasan karena terindikasi masalah lingkungan atau sosial, Bank akan memberikan pendampingan, *watchlist review* per kuartal dan tahunan.
5. Bank juga melakukan pengembangan kapasitas internal dengan memberikan pelatihan mengenai *sustainable finance awareness*, penyusunan e-Modul, serta pembelajaran digital sosialisasi keuangan berkelanjutan untuk Unit Bisnis dan *Support*.
6. Ke depan, Bank berencana untuk memberikan program edukasi atau pelatihan terkait ESG kepada debitur.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BSI juga terus memperluas portofolio usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Tabel berikut menyajikan perkembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, termasuk pembiayaan hijau serta pembiayaan sosial yang menjadi bagian dari strategi keberlanjutan BSI:

### Portofolio pada Proyek Berwawasan Lingkungan

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
<b>Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan</b>	57.704	66.499	73.922
Portofolio Pembiayaan Hijau	12.235	14.084	15.657
Portofolio Pembiayaan Sosial	45.469	52.415	58.260

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai alokasi pembiayaan berkelanjutan BSI, tabel berikut menyajikan rincian portofolio Pembiayaan Hijau dan Pembiayaan Sosial:

### Pembiayaan Pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

(Dalam miliar rupiah)



Uraian	2023	2024	2025
<b>Pembiayaan Hijau (KUBL)</b>			
a. Energi terbarukan	1.072	609	710
b. Efisiensi Energi	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	4.806	6.865	5.777
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	47	317	948
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	94	91	91
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-Efficient</i> )	5.807	5.813	6.442

## KINERJA EKONOMI

Uraian	2023	2024	2025
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	163	134	101
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	245	256	1.588
<b>Jumlah Pembiayaan Hijau (KUBL)</b>	<b>12.235</b>	<b>14.084</b>	<b>15.657</b>
<b>Pembiayaan Sosial (KUBS)</b>			
<b>Jumlah Pembiayaan Sosial (KUBS)</b>	<b>45.469</b>	<b>52.415</b>	<b>58.265</b>
<b>ESG Financing/Pembiayaan Berkelanjutan (KKUB)</b>	<b>57.704</b>	<b>66.499</b>	<b>73.922</b>
<b>Rasio ESG Financing (KKUB) Pembiayaan Berkelanjutan terhadap Total Pembiayaan</b>	<b>24,07%</b>	<b>23,88%</b>	<b>23,18%</b>

**Pembiayaan Kendaraan Listrik (EV)**

Sebagai bagian dari portofolio yang mendukung penerapan keuangan berkelanjutan, BSI menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kendaraan listrik. Pembiayaan EV tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	2023		2024		2025	
	Dalam Jutaan Rupiah	NoA	Dalam Jutaan Rupiah	NoA	Dalam Jutaan Rupiah	NoA
 Mobil Listrik	41.406	131	171.862	635	395.342	1.748
 Motor Listrik	0	0	63	6	22	7
<b>Jumlah</b>	<b>41.406</b>	<b>131</b>	<b>171.925</b>	<b>641</b>	<b>395.364</b>	<b>1.755</b>

**2. Investasi Surat Berharga**

Sebagai bagian dari komitmen BSI untuk menerapkan prinsip investasi yang bertanggung jawab, Perseroan turut mengalokasikan dana pada berbagai instrumen Surat Berharga Syariah. Rincian investasi pada instrumen tersebut disajikan pada tabel berikut:

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.372,91	1.572,91	2.445,37
Surat Perbendaharaan Negara <i>Syariah</i> (SPNS)	895	2.006,62	2.908,90
Sukuk Bank Indonesia	448,43	201,51	689,02
Reksa Dana	1.600,00*	2.500,00*	2.846,71
Efek Beragun Aset Syariah - <i>Sharia Asset Backed Securities</i> - Surat Partisipasi (EBAS - SP)	27,3	27,3	27,3

\*) dinyatakan kembali

## KINERJA EKONOMI







**3. Sustainability Sukuk**

BSI terus memperkuat implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi nyata Perseroan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih bertanggung jawab dan bernilai jangka panjang. Penerbitan *Sustainability Sukuk* BSI telah diselaraskan dengan ketentuan POJK No. 18 Tahun 2023 mengenai penerbitan efek utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, sehingga memastikan kesesuaian instrumen dengan standar regulasi dan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Komitmen ini diwujudkan melalui langkah strategis BSI sebagai pionir penerbitan Sukuk *Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024*, senilai Rp3 triliun yang diterbitkan pada Juni 2024. Instrumen ini dirancang untuk memperluas kapasitas pendanaan atas pembiayaan yang mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia.

Memasuki tahun 2025, komitmen BSI terhadap pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan semakin diperkuat melalui keberhasilan penerbitan Sukuk *Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025* dengan nilai sebesar Rp5 triliun. Pada saat yang sama, BSI juga telah menyelesaikan pelunasan *Sustainability Sukuk 2024 Seri A* senilai Rp1,7 triliun pada 24 Juni 2025, menunjukkan tata kelola pendanaan yang disiplin dan kredibel. Kombinasi penerbitan Tahap II 2025 dan pelunasan Tahap I 2024 semakin menegaskan posisi BSI sebagai pemimpin pasar dalam instrumen keuangan berkelanjutan berbasis syariah di Indonesia.

Penyaluran dana diatur berdasarkan klasifikasi kegiatan berkelanjutan sesuai ketentuan OJK per Desember 2025. Diagram berikut menampilkan ringkasan kategori KUBL dan KUBS yang menjadi acuan utama dalam pengalokasian dana hasil penerbitan Sukuk:

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan	
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)	Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 Energi Terbarukan	 Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau Baik dari Segi Akses Maupun Harga
 Efisiensi Energi	 Akses terhadap Layanan Esensial
 Pencegahan dan Pengendalian Polusi	 Perumahan yang Terjangkau
 Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	 Penciptaan Lapangan Kerja
 Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	 Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan
 Transportasi Ramah Lingkungan	 Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi
 Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	
 Adaptasi Perubahan Iklim	
 Produk yang Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi	
 Bangunan Berwawasan Lingkungan	

## KINERJA EKONOMI

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	Per Desember 2025
<b>Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)</b>	
Akses Terhadap Layanan Esensial	4.019
Penciptaan Lapangan Kerja dan Program yang Dirancang untuk Mencegah dan/ atau Mengurangi Pengangguran, termasuk Pembiayaan Usaha Kecil, Menengah dan Pembiayaan Mikro	739
Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan	205
Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi	78
<b>Total KUBS</b>	<b>5.043</b>

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	Per Desember 2025
<b>Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)</b>	
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	1.143
Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco- Efficient</i> )	1.124
Energi Terbarukan	650
Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	38
<b>Total KUBL</b>	<b>2.956</b>

#### 4. BSI Deposito Wakaf

BSI Deposito Wakaf merupakan salah satu inovasi produk syariah yang mengintegrasikan instrumen investasi komersial dengan prinsip keuangan sosial Islam. Produk ini berbentuk deposito dengan skema di mana nilai pokok yang ditempatkan oleh nasabah diperlakukan sebagai Wakaf Uang Sementara, sementara hasil atau imbalannya disalurkan kepada Nazir untuk dikelola dalam berbagai program sosial yang telah ditetapkan.

Melalui BSI Deposito Wakaf, nasabah diajak untuk berpartisipasi dalam investasi bernilai ibadah yang bersifat sementara namun memberikan manfaat jangka panjang. Pokok dana tetap terjaga, sementara pahalanya, melalui pemanfaatan hasil deposito untuk kemaslahatan umat, diupayakan terus mengalir seperti konsep amal *jariyah* dalam ajaran Islam. Produk ini hadir untuk memfasilitasi keinginan nasabah dalam berwakaf sambil memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan nilai syariah yang menekankan keberlanjutan dan manfaat bersama. BSI Deposito Wakaf merupakan salah satu inovasi produk BSI yang memiliki uniqueness value dan bukti peran perbankan syariah dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

#### BSI Deposito Wakaf Seri Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB)

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i salah satu universitas negeri yang kurang mampu



**Rp20.168 JT**

Total BSI Deposito Wakaf



**254**

Wakif

## KINERJA EKONOMI

**BSI Deposito Wakaf Seri Insan BSI**

Bantuan biaya pendidikan bagi putra/i pegawai BSI yang kurang mampu

**Rp10.568 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**3.338**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Pekerja Informal Masyarakat Ekonomi Syariah (MEST)**

Bantuan biaya perlindungan Sosial JAMSOSTEK untuk Pekerja Informal

**Rp429 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**16**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB)**

Bantuan Pembangunan Masjid Cirebon

**Rp76 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**18**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Alumni UIN Ar Raniry Banda Aceh**

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i salah satu universitas negeri yang kurang mampu

**Rp248 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**40**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Alumni Universitas Sumatera Utara (USU)**

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i salah satu universitas negeri yang kurang mampu

**Rp948 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**44**

Wakif

## KINERJA EKONOMI

**BSI Deposito Wakaf Seri Alumni Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI)**

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i salah satu universitas negeri yang kurang mampu

**Rp1.081 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**39**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Alumni Universitas Insan Cita Indonesia (UICI)**

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i salah satu universitas negeri yang kurang mampu

**Rp3.717 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**8**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Insan BSI Jilid 2**

Bantuan biaya pendidikan bagi putra/i pegawai BSI yang kurang mampu

**Rp3.749 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**654**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Alumni IPB Jilid 2**

Bantuan biaya pendidikan bagi putra/i pegawai BSI yang kurang mampu

**Rp14.313 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**46**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Inisiatif Wakaf (Iwakaf)**

Pemberdayaan Lahan Pesantren Rumah Tahfidz

**Rp114 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**14**

Wakif

## KINERJA EKONOMI

**BSI Deposito Wakaf Seri Yayasan Amanah Utama Tazkia**

Bantuan Program Sosial Tazkia

**Rp210 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**5**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Alumni Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA)**

Pembangunan Rumah Singgah KAGAMA

**Rp61 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**31**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Maqashid Syariah**

Program Literasi Ekonomi Syariah melalui Al Quran Maqashid Syariah &amp; Ibrah

**Rp 3.878 JT**Total Deposito  
Wakaf**381**

Wakif

**BSI Deposito Wakaf Seri Yayasan Kota Wisata Darussalam**

Bantuan Program Sosial Yayasan Kota Wisata Darussalam

**Rp 3 JT**Total BSI Deposito  
Wakaf**2**

Wakif

**5. ESG Mutual/Maslahat Fund**

Sebagai bagian dari penguatan Keuangan Keberlanjutan, BSI menghadirkan ESG *Mutual/Maslahat Fund*, yaitu Reksa Dana Pasar Uang Syariah yang mengintegrasikan prinsip ESG dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil investasinya. Melalui skema ini, sebagian hasil pengembangan (*yield*) disalurkan untuk program sosial berwawasan lingkungan yang dikelola oleh BSI Maslahat, sehingga investasi nasabah tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang terukur.

## KINERJA EKONOMI

Produk Maslahat *Fund* beroperasi melalui kolaborasi dengan manajer investasi, seperti Mandiri Manajemen Investasi dan *Succor Asset Management*. Investor, baik retail, institusi, maupun BSI sebagai *anchor investor*, melakukan *subscription* ke Maslahat *Money Market Mutual Fund* yang terdiri atas tiga kelas (A, B, dan C). Setiap kelas memiliki struktur biaya dan persyaratan investasi yang berbeda, termasuk Maslahat *Portion* sebesar 0,10% dari manajemen *fee* yang dialokasikan untuk kegiatan sosial. Proses ini berjalan seiring dengan pengelolaan instrumen dasar seperti *Sharia Time Deposit* dan *Sharia Government Bond* dengan tenor kurang dari satu tahun dan estimasi imbal hasil 4,5–5%.

Dana Maslahat yang terkumpul kemudian disalurkan ke program sosial berorientasi ESG sesuai prioritas BSI Maslahat. Salah satu program yang direncanakan adalah Pembangunan Sanitasi Air Bersih, yang bertujuan menyediakan akses air bersih dan sanitasi berkelanjutan di berbagai wilayah. Program ini sejalan dengan sejumlah SDGs, khususnya tujuan 3 (*Good Health and Well-being*), 6 (*Clean Water and Sanitation*), dan 11 (*Sustainable Cities and Communities*).

Implementasi program juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui peningkatan citra positif, eksposur publik dari berbagai kanal media, serta pelaporan pertanggungjawaban yang transparan.

Selain memberikan kontribusi sosial, Maslahat *Fund* tetap memenuhi tata kelola keuangan yang *prudent* melalui mekanisme *financing line* dan *clean basis* yang diatur berdasarkan Standar Prosedur Bisnis (SPB) untuk institusi keuangan. Mekanisme ini memastikan bahwa aliran dana dari investor sampai pada eksekusi program sosial dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan syariah. Dengan pendekatan terintegrasi ini, ESG *Mutual/Maslahat Fund* menjadi instrumen pembiayaan berkelanjutan yang memperkuat strategi BSI dalam mengembangkan investasi syariah yang berdampak.

BSI akan mulai melaporkan capaian ESG *Mutual/Maslahat Fund* secara lebih terstruktur dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2026. Pelaporan ini akan mencakup perkembangan, akumulasi dana maslahat, dampak sosial-lingkungan dari program yang didanai, serta capaian kinerja ESG yang relevan.



## BYOND – Membawa Investasi Emas Lebih Dekat bagi Semua



**Kepemilikan emas mulai dari**  
**Rp 50.000**



**Cetak emas mulai dari**  
**2 gram**



**Tersedia Pembelian & Penjualan**  
*Real-time*  
**24/7**



**Tanpa Hambatan Transaksi**  
**Rp-Grams**

**TERJANGKAU, LIKUID, DAN AMAN**



**Harga Kompetitif**



**Terpercaya, Asli, Aman & Terjamin**



**Didukung oleh Emas Fisik**



**Tanpa Ribet**

## KINERJA EKONOMI

### Bank Emas BSI

Pada tahun 2025, layanan Bank Emas menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan portofolio pembiayaan BSI sekaligus mendukung strategi diversifikasi instrumen keuangan berkelanjutan. Sejak diresmikan pada 26 Februari 2025, bisnis emas menunjukkan akselerasi signifikan, selaras dengan peningkatan preferensi masyarakat terhadap instrumen investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah. Melalui penyediaan layanan jual beli, penitipan, cicil emas, gadai emas, serta integrasi penuh ke dalam ekosistem digital BYOND by BSI, Bank Emas memperkuat akses masyarakat untuk berinvestasi secara bertahap, inklusif, dan efisien.

Sepanjang 2025, total portofolio bisnis emas BSI mencapai Rp22,9 triliun, tumbuh 78,60% YoY, terdiri dari Cicil Emas Rp12,89 triliun dan Gadai Emas Rp10,02 triliun. Selain itu, saldo Tabungan Emas meningkat menjadi 1,843 ton dengan volume penjualan 2,184 ton, serta jumlah rekening emas mencapai 531.329 CIF, di mana sekitar 76,5% merupakan Gen Z dan milenial.

Kontribusi Bank Emas turut memperkuat pendapatan berbasis *fee* (FBI), di mana bisnis emas menyumbang Rp270,14 miliar dari total FBI BSI pada tahun 2025. Pertumbuhan ini selaras dengan

strategi Bank untuk mengarahkan portofolio ke produk berisiko rendah dan mendukung ketahanan pendapatan. Di sisi pendanaan, bank emas berperan dalam memacu peningkatan pembukaan rekening dan mendorong penguatan CASA melalui penggabungan produk emas dengan tabungan haji (*product bundling*).

Selain itu, pengembangan Bank Emas mendukung tujuan pemerintah dalam hilirisasi emas nasional dan pembentukan ekosistem *bullion* yang lebih transparan dan efisien. BSI menjadi satu-satunya bank yang memiliki izin resmi OJK untuk kegiatan Penitipan Emas dan Perdagangan Emas, serta terus memperluas kapabilitas digital dan infrastruktur untuk memastikan ketersediaan pasokan fisik, keamanan penyimpanan, serta minimum pembelian yang terjangkau mulai dari Rp50.000 atau 0,05 gram.

Secara keseluruhan, pencapaian bisnis emas pada 2025 menunjukkan bahwa layanan *bullion* bank telah menjadi salah satu portofolio strategis BSI yang mendukung pencapaian target pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan inklusi keuangan syariah, serta kontribusi terhadap penguatan ekosistem halal nasional.

### Highlight Kinerja Bank Emas BSI 2025

	CICIL EMAS	GADAI EMAS	E-MAS
Pelanggan Baru	358.400	21.263	531.329
Pencairan/Saldo Emas	Rp14.413 Miliar Δ 92,38% YoY	Rp32.478 Miliar Δ 52,87% YoY	1,843 ton Δ 315,44% Ytd

## MENINGKATKAN EKOSISTEM ISLAM

Penguatan ekosistem Islam menjadi salah satu fokus utama BSI dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan aspirasi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan bisnis syariah di tingkat global. Berbagai inisiatif terus dilakukan BSI untuk memperluas dan memperkuat ekosistem Islam, antara lain:

- Digitalisasi layanan haji dan umrah, termasuk perluasan fitur dan integrasi ekosistem perjalanan ibadah.
- Pengembangan produk-produk syariah yang inovatif dan memiliki nilai keberlanjutan seperti deposito wakaf.
- Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik regulator maupun lembaga edukasi, dalam mendorong kebijakan yang mendukung serta peningkatan literasi keuangan syariah.
- Penyediaan fasilitasi sertifikasi halal gratis (*self-declare*) bagi pelaku UMKM untuk membantu mereka memenuhi standar usaha berbasis syariah.

## KINERJA EKONOMI

Secara keseluruhan, capaian BSI dalam memperkuat ekosistem Islam pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, yang dirangkum sebagai berikut:

## Pencapaian Ekosistem Islam BSI

Uraian	Satuan	Pencapaian		
		2023	2024	2025
Zakat Perusahaan	Dalam Miliar Rupiah	190	232	250
Zakat Pegawai	Dalam Miliar Rupiah	33	36	39
Ziswaf	Dalam Miliar Rupiah	1.523	1.709	2.065
Ziswaf Pemerintah & Non Pemerintah	Nasabah	31.630	57.195	61.267
Ekosistem Haji	Dalam Miliar Rupiah	14.638	17.656	19.614
Jumlah <i>Outstanding</i> Ekosistem Haji dan Umroh	Nasabah	4.495.944	4.855.450	5.782.427
Ekosistem Sekolah Islam	Dalam Miliar Rupiah	5.588	8.730	9.349
Jumlah <i>Outstanding</i> Ekosistem Sekolah Islam	Nasabah	331.305	498.182	551.597
Ekosistem Masjid	Dalam Miliar Rupiah	4.674	6.977	7.550
Jumlah <i>Outstanding</i> Ekosistem Masjid	Nasabah	550.303	1.034.276	1.229.121
Ekosistem Pesantren	Dalam Miliar Rupiah	1.122	1.437	2.051
Jumlah <i>Outstanding</i> Ekosistem Pesantren	Nasabah	66.354	134.076	142.249
Industri Halal	Dalam Miliar Rupiah	984	1.565	1.216
Jumlah <i>Outstanding</i> Industri Halal	Nasabah	61.269	97.393	98.014

## NILAI EKONOMI LANGSUNG YANG DIHASILKAN DAN DIDISTRIBUSIKAN

[GRI 201-1]

Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan menggambarkan manfaat ekonomi yang diperoleh secara nyata melalui aktivitas operasional dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan. Sementara itu, nilai ekonomi yang didistribusikan merujuk pada manfaat ekonomi yang dialokasikan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam suatu sistem ekonomi. Bagi BSI, nilai ekonomi yang dihasilkan terutama berasal dari pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* serta pendapatan usaha lainnya. Nilai ekonomi yang didistribusikan mencakup beban umum dan administrasi, biaya gaji dan tunjangan, pembayaran dividen, serta alokasi dana investasi sosial termasuk program CSR.

Selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan nilai ekonomi yang didistribusikan menjadi nilai ekonomi yang ditahan, yakni manfaat ekonomi yang belum dibagikan kembali dan tetap berada dalam Bank. Pada tahun 2025, nilai ekonomi yang ditahan meningkat sebesar 12,03% menjadi Rp17.949.913 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp16.022.279 miliar. Seluruh perhitungan Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan (EVG&D) disusun berdasarkan laporan keuangan BSI yang telah diaudit untuk tahun buku 2025, sehingga menjamin konsistensi, akurasi, dan keandalan informasi.

## Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dan Didistribusikan

(Dalam miliar rupiah)

Uraian	2023*	2024	2025
<b>Nilai Ekonomi yang Dihasilkan</b>			
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai <i>Mudharib</i>	22.251.743	25.298.203	28.265.491
Pendapatan Usaha Lainnya	4.204.466	5.556.479	6.936.596
<b>Jumlah Nilai Ekonomi Dihasilkan</b>	<b>26.456.209</b>	<b>30.854.682</b>	<b>35.202.087</b>

## KINERJA EKONOMI

Uraian	2023*	2024	2025
<b>Nilai Ekonomi yang Didistribusikan</b>			
Beban Usaha Umum dan Administrasi	5.169.938	6.342.626	8.109.463
Beban Usaha Gaji dan tunjangan	5.035.215	5.284.136	5.496.617
Dividen	426.018	855.561	1.050.883
Beban Pajak	1.695.729	2.044.507	2.193.890
Investasi Masyarakat (TJSL)*	255.100	305.573	400.035
<b>Jumlah Nilai Ekonomi Didistribusikan</b>	<b>12.582.000</b>	<b>14.832.403</b>	<b>17.252.174</b>
<b>Nilai Ekonomi yang Ditahan</b>	<b>13.874.209</b>	<b>16.022.279</b>	<b>17.949.913</b>

Keterangan:

\*Dana investasi masyarakat adalah penyaluran dana *Ziswaf* dan dana kebijakan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

### BANTUAN FINANSIAL DARI PEMERINTAH [GRI 201-4]

Selama tahun pelaporan 2025, BSI tidak memperoleh bentuk dukungan finansial apa pun dari Pemerintah. Hal ini mencakup tidak diterimanya fasilitas seperti insentif atau keringanan pajak, kredit pajak, subsidi, maupun bentuk bantuan finansial lainnya.

Kondisi tersebut berlaku untuk seluruh yurisdiksi tempat BSI menjalankan operasionalnya, baik di Indonesia maupun pada kantor cabang di luar negeri. Dengan demikian, seluruh aktivitas usaha BSI pada tahun 2025 berlangsung tanpa ketergantungan pada dukungan finansial pemerintah.

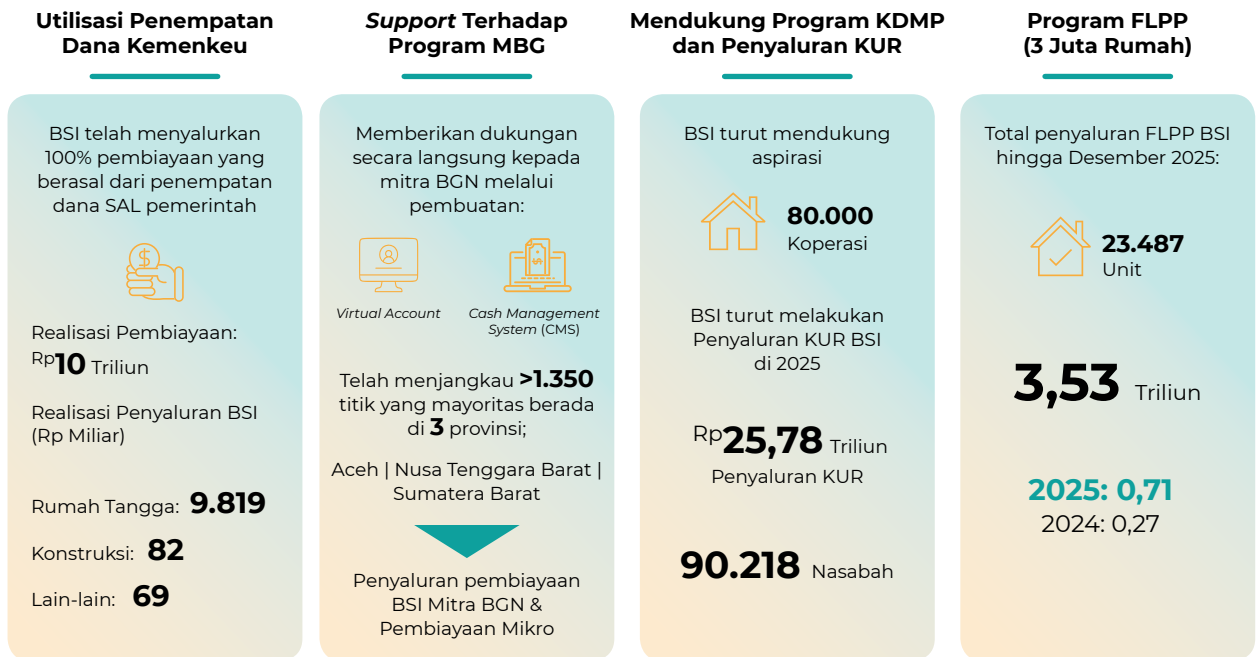
### PENGUATAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG [GRI 203-1, 203-2]

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi serta mendorong dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan bagi masyarakat. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia.

Dukungan BSI terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi tercermin melalui optimalisasi penempatan dana pemerintah yang disalurkan kembali ke sektor riil, dukungan terhadap sistem pengelolaan keuangan mitra pemerintah, dan pembiayaan perumahan rakyat melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta membiayai proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Inisiatif tersebut berkontribusi pada penyediaan hunian layak, penguatan ekosistem keuangan, serta peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Sejalan dengan itu, kegiatan pembiayaan dan layanan BSI juga menghasilkan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan terhadap koperasi dan UMKM, serta pembiayaan mikro yang mendorong pertumbuhan usaha produktif. Dampak yang dihasilkan mencakup peningkatan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok lokal, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, BSI berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

## KINERJA EKONOMI



### PRAKTIK PENGADAAN BARANG DAN JASA [GRI 204-1, 414-1]

Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, BSI terus memperkuat keterlibatan pemasok dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam laporan ini, pemasok lokal merujuk pada mitra usaha yang beroperasi dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, lokasi operasional signifikan mengacu pada seluruh Kantor Wilayah BSI yang menjadi pusat kegiatan bisnis utama di Indonesia.

Peningkatan penggunaan pemasok lokal tidak hanya mendukung perputaran ekonomi domestik, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta mengurangi ketergantungan terhadap barang dan jasa impor. Nilai kontrak yang diberikan kepada pemasok selama tahun 2025 disajikan berikut:

Keterangan	2025	
	Nilai Kontrak Pekerjaan (dalam Jutaan Rupiah)	Persentase (%)
Pemasok Dalam Negeri	Rp1.003.953.245.489.480	0,0012%
Pemasok Luar Negeri	Rp12.271.166.695	99,9988%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.003.965.516.656.170</b>	<b>100%</b>

Untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara etis, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, BSI menerapkan mekanisme *procurement* yang transparan dan selaras dengan prinsip syariah. Pengelolaan pengadaan dilakukan oleh Unit Kerja *Procurement & Fixed Asset Group* sesuai Standar Prosedur Operasional *Procurement* Tahun 2024 dan Petunjuk Teknis Operasional Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pelaksanaannya, BSI menerapkan sembilan prinsip utama yaitu:

1. *Syariah (Sharia Principle)*: Pemenuhan Prinsip Syariah menjadi fokus dalam kegiatan *procurement*.
2. *Efektif*: *Procurement* harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat optimal bagi Bank.

## KINERJA EKONOMI

3. Efisien: Proses *procurement* dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, dalam waktu yang telah disepakati, dan dengan tingkat harga yang terbaik.
4. Kompetitif/Terbuka dan Bersaing: Pelaksanaan *procurement* terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan, dengan persaingan yang sehat dan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang transparan.
5. Transparan: Semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan *procurement*, termasuk syarat teknis dan administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, bersifat terbuka.
6. Adil dan Wajar: Memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon Penyedia Barang dan Jasa tanpa kecenderungan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
7. Akuntabel: Proses, hasil, dan pembayaran *procurement* dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bertanggung Jawab: Proses *procurement* dilaksanakan dengan hati-hati dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
9. Independen: Keputusan *procurement* diambil secara objektif dan bebas dari tekanan pihak mana pun.

BSI juga memastikan pemasok mematuhi seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang relevan. Penilaian pemasok dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan pemasok tidak terkait praktik negatif seperti pelanggaran K3, diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, atau upah di bawah standar minimum. Selain itu, untuk pembangunan Gedung *Landmark* BSI Aceh dan BSI Tower Jakarta, BSI menerapkan kriteria tambahan berupa penggunaan material ramah lingkungan sebagai dukungan terhadap prinsip keberlanjutan.

**Survei Kepuasan Pemasok**

Pada tahun 2025, BSI kembali melaksanakan survei kepuasan pemasok untuk menilai efektivitas proses pengadaan dan memastikan kualitas layanan kepada mitra tetap terjaga. Survei dilakukan menggunakan skala *Likert* sebagai metode penilaian, dengan kategori sebagai berikut:

Nilai Skala <i>Likert</i>	Kategori
< 1,00	Tidak Memuaskan
1,01 - 2,00	Kurang Memuaskan
2,01 - 3,00	Cukup Memuaskan
3,01 - 4,00	Memuaskan
4,01 - > 5	Sangat Memuaskan

Hasil survei kepuasan pemasok pada tahun 2025 menunjukkan skor sebagai berikut:

Indikator Penilaian	Skor	Kategori
Mekanisme Seleksi Rekanan	4,33	Sangat Memuaskan
Pelaksanaan Tahapan Proses Pengadaan	4,45	Sangat Memuaskan
Proses penyelesaian pembayaran pekerjaan	4,27	Sangat Memuaskan
Lain-lain:		
1. Procurement & Fixed Asset Group (PFA) telah bertindak secara <i>fair</i> (tidak memihak salah satu <i>vendor</i> ) pada proses pengadaan barang dan jasa.		
2. Pelayanan PFA dalam menyediakan fasilitas fisik kantor secara keseluruhan (penyediaan ruang tunggu, ruang rapat, <i>counter</i> informasi, kebersihan, <i>mushola</i> , toilet, dan lainnya).	4,63	Sangat Memuaskan
3. Keamanan dan pelayanan secara umum di lingkungan PFA.		

# KINERJA LINGKUNGAN HIDUP



## ASPEK UMUM

### Biaya Lingkungan Hidup [OJK F.4] [GRI 201-2]

BSI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan. Walaupun kegiatan operasional Bank tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan fisik, BSI tetap mengambil peran melalui berbagai inisiatif ramah lingkungan. Salah satunya adalah program penanaman pohon produktif di Desa Semoyo, Yogyakarta, sebagai upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Selain itu, BSI juga mulai beralih ke energi bersih melalui penggunaan kendaraan listrik sebagai langkah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, serta menyediakan fasilitas *charging station* untuk mendukung operasional kendaraan listrik tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk berbagai kegiatan lingkungan tersebut disajikan sebagai berikut:

Keterangan	Biaya
<i>Green Initiatives - Pembangunan Green Building</i>	
Landmark BSI Aceh	324.600.000.000
BSI Tower Jakarta	693.000.000.000
Biaya Sewa Kendaraan Listrik	1.813.400.000
Biaya Pemasangan <i>Wall Charging</i>	45.010.500
<b>Jumlah</b>	<b>1.019.458.410.500</b>

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

### ASPEK MATERIAL

#### Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan

[OJK F.5]

Sebagai bagian dari komitmen BSI dalam mendorong operasional yang lebih berkelanjutan, Bank terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi ketergantungan pada material konvensional, khususnya penggunaan kertas. Transisi dari dokumen fisik ke dokumen elektronik menjadi langkah penting dalam menekan jejak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi proses kerja. Di samping digitalisasi, BSI juga menggunakan beragam material ramah lingkungan dalam mendukung aktivitas bisnisnya, antara lain:

- Menggunakan *recycled plastic* pada *top table* meja kantor di BSI Tower.
- Papan MDF pada *furniture custom*.
- Kaca yang dapat mereduksi panas di Gedung *Landmark Aceh*.
- Menggunakan *refrigerant* dengan ODP 0 seperti R134A dan APAR berbahan CO<sub>2</sub> di BSI Tower.
- Menggunakan material yang merupakan hasil daur ulang seperti besi baja tulangan.
- Menggunakan material modular atau prefab yang bertujuan untuk mengurangi sampah pada masa konstruksi, seperti material kaca *facade* dengan *system unitize*.
- Menggunakan material *sintered stone*, yang merupakan campuran bahan mineral alam yang dipadatkan dan dibakar pada suhu tinggi yang digunakan untuk lantai maupun dinding.
- Penggunaan *marmoleum* untuk material lantai BSI Tower, *marmoleum* merupakan lantai alami yang terbuat dari bahan-bahan yang alami.

### ASPEK ENERGI

#### Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan

[OJK F.6] [GRI 302-1, 302-2, 302-3]

Sebagai institusi yang bergerak di sektor perbankan, kebutuhan energi BSI terutama berasal dari dua sumber utama, yaitu listrik untuk mendukung operasional kantor dan BBM untuk kendaraan operasional. Sesuai karakteristik industrinya, BSI tidak menggunakan atau menjual energi dalam bentuk pemanas, pendingin, maupun uap, serta belum melakukan pengukuran atas energi yang bersumber dari luar organisasi. Selain itu, Bank juga tidak melakukan penjualan energi listrik. Penghitungan konsumsi energi dilakukan dengan mengumpulkan data pemakaian listrik dan BBM dari seluruh wilayah operasional dan mengonversinya ke dalam satuan gigajoule.

Untuk mengungkapkan intensitas energi, BSI menggunakan total konsumsi energi internal (listrik dan BBM) dalam gigajoule sebagai pembilang, sedangkan pembiayaan, pendapatan, dan jumlah pegawai digunakan sebagai penyebut. Pendekatan ini hanya mencakup energi yang dikonsumsi di dalam organisasi mengingat BSI belum menghitung energi yang digunakan di luar batas operasionalnya.

Sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan efisiensi energi, BSI juga mulai memanfaatkan sumber energi terbarukan melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah lokasi operasional, termasuk Kantor Cabang Mataram, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Mayestik, *Landmark Aceh*, dan Sport Center BSI Pejompongan. Pada tahun 2025 dan 2024, konsumsi energi dihitung berdasarkan penggunaan listrik dan BBM di seluruh jaringan operasional BSI, sedangkan pada tahun 2023 data masih terbatas pada Kantor Pusat The Tower. Rincian penggunaan energi tersebut disajikan sebagai berikut:

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

## Intensitas Pemakaian Energi

Energi	Satuan	2023	2024	2025*
Listrik	kWh	2.117.286	80.779.932	86.473.880
	Gigajoule	7.616	290.808	311.306
BBM	Liter	157.329	7.112.582	7.791.836
	Gigajoule	6.027	243.250	266.106
Total	Gigajoule	13.643	534.058	577.412
Jumlah Pembiayaan	Dalam Miliar Rupiah	240.316	278.481	318.844
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	Dalam Miliar Rupiah	22.250	25.298	28.265
Total Pegawai	Orang	17.909	17.234	16.581
Intensitas Pemakaian Energi	Pembiayaan: Gigajoule/Triliun Rupiah	0,06	1,92	1,81
	Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib: Gigajoule/Triliun Rupiah	0,61	21,11	20,43
	Pegawai: Gigajoule/Orang	0,76	30,99	34,82

Keterangan:

\*Pengukuran penggunaan energi dengan menggunakan digital *carbon tracking*Convert kWh ke Gigajoule: [convertunits.com](https://www.convertunits.com)Convert Liter ke Gigajoule: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

## Pemakaian Energi yang Terbarukan

Energi	Satuan	2023	2024	2025
Penggunaan Panel Surya di Landmark Aceh	kWp	-	37,4	42.300,00
Penggunaan Panel Surya di BSI Tower	kWh	-	-	30.880,00
Penggunaan Panel Surya di BSI KC Mayestik	kWh	-	-	-
Penggunaan Panel Surya di KC Mataram	kWh	52.926,8	58.795,20	42.913,10
Penggunaan Panel Surya di KC Bogor Pajajaran	kWh	-	-	3.676,50
Penggunaan Panel Surya di KC Tasikmalaya	kWh	-	-	6.378,70
Penggunaan Panel Surya di KC Basuki R. Surabaya	kWh	-	12.400,00	27.430,00
Penggunaan Panel Surya di Sportfield Pejompongan	kWh	-	-	-

## Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan [OJK F.7] [GRI 302-4, 302-5]

Pada tahun 2025, BSI semakin memperkuat agenda efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi *Sustainable Operations*. Melalui pengembangan infrastruktur hijau dan digitalisasi pengelolaan energi, BSI memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional selaras dengan prinsip ramah lingkungan. Inisiatif utama Bank meliputi pengoperasian 2 gedung *Green Building* bersertifikasi *Gold*, *Landmark* BSI Aceh dan BSI Tower Jakarta, serta perluasan pemanfaatan panel surya yang telah mencapai 8 lokasi, termasuk BSI Tower, Bogor Area, KC Tasik, Desa BSI Makassar, NTT, dan Sabang.

Peningkatan efisiensi juga dicapai melalui penggunaan 145 kendaraan listrik sebagai armada operasional, pengadaan lima unit *charging station* baru, serta penerapan 100% lampu LED di seluruh jaringan kantor. Seluruh kantor BSI kini menggunakan sistem pendingin udara berteknologi *inverter* dan *refrigerant* volume yang mampu menghemat energi, dilengkapi dengan pengaturan suhu ruangan yang dirancang sesuai standar efisiensi. Program *water treatment*, PLTS, serta fasilitas ramah lingkungan lainnya turut memperkuat pengurangan konsumsi energi berbasis fosil.

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

Penerapan *Digital Carbon Tracking* yang diperluas di 2025 menjadi fondasi utama pengukuran energi dan emisi BSI. Pengembangan ini memastikan perhitungan energi lebih akurat, periodik, dan mencakup seluruh titik operasional. Bank kini dapat memantau tren penurunan energi dan efektivitas inisiatif keberlanjutan secara berkelanjutan. Seluruh upaya ini mencerminkan kesiapan BSI untuk memasuki peta jalan *Net Zero Emission* yang telah disusun dan mulai diimplementasikan secara bertahap.

Selain itu, pengukuran pengurangan energi pada tahun 2025 sudah dapat dilakukan secara terukur dan dibandingkan dengan konsumsi energi tahun 2024. Oleh karena itu, data penggunaan energi tahun 2025 mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil langsung dari berbagai inisiatif efisiensi energi, sehingga memungkinkan BSI untuk menyajikan perhitungan energi secara kuantitatif dan akurat dibandingkan dengan tahun dasar 2024. Berikut adalah rincian energi BSI:

Uraian	Satuan	2024 (Baseline)	2025
Konsumsi Listrik	GJ	290.807,76	311.305,97
Konsumsi BBM	GJ	243.250,30	266.106,23
<b>Total Konsumsi Energi</b>	<b>GJ</b>	<b>534.058,06</b>	<b>577.412,20</b>

### Pengurangan Kebutuhan Energi atas Produk dan Layanan [GRI 302-5]

Selain penurunan konsumsi energi operasional, BSI juga mencatat pengurangan kebutuhan energi dari produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah melalui percepatan digitalisasi. Pada tahun 2025, peningkatan penggunaan BYOND by BSI, BSI Mobile, transaksi digital, serta *e-statement* telah mengurangi kebutuhan energi yang sebelumnya digunakan untuk layanan tatap muka, pemrosesan dokumen fisik, dan operasional cabang. Perseroan melakukan estimasi potensi pengurangan kebutuhan energi dari layanan digital yang dihitung dari penurunan konsumsi energi per transaksi seiring peralihan transaksi ke kanal digital. Penghitungan tersebut dilakukan menggunakan metode *Digital Carbon Tracking* dengan pendekatan perbandingan konsumsi energi antara transaksi digital dan transaksi fisik.

### BSI memiliki 2 Unit *Green Building Gold Certified*, *Landmark BSI Aceh* dan *BSI Tower Jakarta*

- 1 Konsep *Green Building* BSI, berfokus pada efisiensi energi & kenyamanan lingkungan
- 2 Lampu LED hemat energi, konsumsi daya hingga 77,25% lebih rendah dari standar SNI
- 3 Kaca *double-glass high performance* untuk mengurangi panas dan beban pendingin
- 4 Pemanfaatan panel surya kapasitas 37,4 kWp untuk mendukung energi bersih
- 5 Air alternatif: air hujan & air daur ulang untuk taman & *flushing toilet*
- 6 Sistem AC efisien dengan *Coefficient of Performance (COP)* tinggi



## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

### ASPEK AIR

#### Penggunaan Air [OJK F.8]

Seluruh kegiatan operasional Bank menggunakan pasokan air dari PDAM untuk kebutuhan domestik seperti toilet, dapur, area *wudhu*, dan fasilitas gedung lainnya. Dengan semakin meningkatnya fokus pada efisiensi sumber daya, BSI memastikan pengelolaan air dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air di seluruh lokasi operasional.

Selama 2025, BSI meningkatkan penerapan sistem *water treatment* dan pemanfaatan air daur ulang di gedung-gedung baru maupun fasilitas hijau seperti *Landmark* BSI Aceh dan BSI Tower Jakarta yang berstatus *Green Building Gold Certified*. Pengelolaan ini termasuk pemanfaatan air hujan dan air hasil *recycle* untuk *flushing* toilet dan penyiraman taman, sejalan dengan konsep bangunan hijau BSI. Program konservasi air juga diperkuat dengan hadirnya *Water Station* RO di Bandung dan Surabaya, yang tidak hanya mengurangi sampah plastik sekali pakai tetapi juga menekan konsumsi air komersial melalui penggunaan stasiun isi ulang.

BSI terus mendorong budaya hemat air melalui kampanye internal, pemasangan imbauan di area toilet dan *wudhu*, serta penerapan praktik *greywater reuse* di fasilitas tertentu, seperti pemanfaatan air *wudhu* untuk menyiram tanaman di Masjid BSI Cipali. Implementasi sistem pengolahan air limbah (IPAL) memastikan bahwa air yang dialirkan telah memenuhi baku mutu sesuai regulasi.

Sejalan dengan peningkatan akurasi data lingkungan lainnya, BSI mengintegrasikan pencatatan air ke dalam sistem pengelolaan yang lebih modern. Pada tahun 2024 dan 2025, cakupan pengukuran mencakup seluruh gedung pusat termasuk The Tower, Wisma Mandiri, Graha Mandiri, dan Dana Reksa, menjadikan data lebih komprehensif dibandingkan 2023. Data penggunaan air dari tiga tahun terakhir ditampilkan sebagai berikut:

Sumber	2023**	2024*	2025*
Air dari Pihak Ketiga	1.824	48.401	109.488
<b>Jumlah</b>	<b>1.824</b>	<b>48.401</b>	<b>109.488</b>

Keterangan:

- \* Penggunaan air di tahun 2024 dan 2025 mencakup penggunaan air yang berasal dari The Tower, Wisma Mandiri, Graha Mandiri dan Dana Reksa
- \*\* Penggunaan air di tahun 2023 hanya mencakup penggunaan air yang berasal dari Kantor Pusat The Tower

#### Water Station Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pada tahun 2025, BSI memperluas inisiatif *Water Station* sebagai bagian dari komitmen terhadap operasional hijau dan pengurangan sampah plastik di ruang publik. Setelah menerapkan fasilitas *Water Station* di Lapangan Gasibu, Bandung, BSI menambah titik layanan baru di Surabaya untuk memastikan akses air minum aman semakin luas dan mudah dijangkau masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya BSI dalam mengurangi konsumsi botol plastik sekali pakai, menekan emisi karbon dari rantai produksi air kemasan, serta mendukung implementasi SDGs 6 (*Clean Water and Sanitation*) dan 11 (*Sustainable Cities and Communities*).

*Water Station* BSI dilengkapi teknologi filtrasi berlapis untuk mengubah air tanah atau air PDAM menjadi air siap minum yang aman. Setiap lokasi menjalani uji laboratorium dan sertifikasi kelayakan sebelum dioperasikan. Pemantauan kualitas air dilakukan secara digital melalui sistem IoT, sehingga kondisi mesin dan standar kualitas dapat diawasi secara *real-time*. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari rangkaian program keberlanjutan BSI yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan, mendukung ekonomi sirkular, serta memperkuat budaya hemat energi dan sumber daya di lingkungan masyarakat.

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

## Penggunaan Fasilitas Air Minum Gratis

## 1. Masjid BSI Rest Area Cipularang KM 88A

**9.025**

Air minum dalam liter

**15.041**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 2. Masjid BSI Rest Area Cipali KM 116A

**20.012**

Air minum dalam liter

**33.353**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 3. Gasibu Running Track, Area VIP

**196.326**

Air minum dalam liter

**327.210**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 4. Plaza Setda A, Gedung Sate, Pemerintah Provinsi Jawa Barat

**51.610**

Air minum dalam liter

**86.018**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 5. Blok F, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat

**14.272**

Air minum dalam liter

**23.788**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 6. Masjid Agung Trans Studio Bandung

**9.328**

Air minum dalam liter

**15.547**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 7. Masjid Agung Tasikmalaya

**5.304**

Air minum dalam liter

**8.840**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 8. Masjid Raya At Taqwa Kota Cirebon

**14.074**

Air minum dalam liter

**23.457**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 9. Masjid Agung Indramayu

**7.400**

Air minum dalam liter

**12.333**

Air minum dalam kemasan 600ml

## 10. Masjid Al-Furqan, Universitas Pendidikan Indonesia

**2.843**

Air minum dalam liter

**4.738**

Air minum dalam kemasan 600ml

## TOTAL KONVERSI

**330.194**

Air minum dalam liter

**550.323**

Air Minum dalam Kemasan

Sejak awal pemasangan hingga akhir periode pelaporan 2025, 10 fasilitas Clean Drinking Water Station yang dihadirkan oleh BSI dan BSI Maslahat telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan sampah plastik dari air minum kemasan. Inisiatif ini tercatat berhasil mengurangi penggunaan sebanyak 550.323 botol plastik, sekaligus menekan emisi karbon sebesar 35,77 ton CO<sub>2</sub>e.

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

## ASPEK KEANEKARAGAMAN HAYATI

**Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati dan Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati [OJK F.9, F.10]**

Sampai dengan akhir 2025, seluruh jaringan operasional BSI tidak berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan konservasi maupun area dengan sensitivitas keanekaragaman hayati yang tinggi. Walaupun tidak memiliki risiko langsung terhadap area konservasi, BSI tetap menjalankan aksi pelestarian sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungannya.

Sepanjang 2025, BSI memperluas program penghijauan melalui penanaman beragam jenis pohon, termasuk pohon buah, trembesi, tabebuaya, dan MPTS, di beberapa lokasi seperti Sumatera Barat, Karawang, dan Pati. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan tutupan hijau, tetapi juga mendukung ekosistem lokal dan mengurangi potensi degradasi lahan.

Selain itu, melalui program “Sedekah Pohon untuk Negeri” bekerja sama dengan BYOND by BSI, Bank melanjutkan penanaman pohon endemik di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Program ini berkontribusi pada upaya rehabilitasi habitat Gajah Sumatera serta pelestarian spesies endemik lainnya yang menghadapi ancaman kehilangan habitat. Secara keseluruhan, BSI telah menanam sebanyak 15.000 pohon sepanjang tahun 2025 melalui berbagai program penghijauan yang terstruktur dan berkelanjutan.

## ASPEK EMISI

*Digital Carbon Tracking Initiative*

*“The First Sharia Bank in Indonesia Implemented Digital Carbon Tracking”*

## DIGITAL CARBON TRACKING INITIATIVE

## Regulatory Compliance

- SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 – Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan**
- RAKB BSI 2024–2025**
  - Digital *Carbon Tracking* ditetapkan sebagai aktivitas utama dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan.
  - Menjadi fondasi penyusunan *Roadmap Net Zero Emission* BSI.
- Kepatuhan terhadap standar internasional**
  - Perhitungan emisi menggunakan *GHG Protocol (Corporate Standard)*.
  - Selaras dengan praktik pengungkapan emisi untuk SUSBA, S&P *Global ESG Rating*, dan UNEP-FI PRB.

## Value Creation

- Pioneer*: BSI menjadi Bank Syariah pertama di Indonesia yang mengembangkan *Digital Carbon Tracking bankwide*.
- Syariah-Aligned*: Mendorong efisiensi dan keberlanjutan sebagai bagian dari prinsip *masalah* dan amanah.
- Innovative*:
  - Otomatisasi perhitungan emisi seluruh jaringan kantor.
  - Integrasi data energi, PLTS, EV, *Water Station RO*, *Green Building*, dan fasilitas operasional lainnya.
  - Dashboard* periodik untuk manajemen pusat dan regional.
- Strategic*: Menjadi dasar perhitungan tahun 2024 dan 2025 serta mendukung dalam penyusunan *Net Zero Emission Roadmap*.
- Transparent*: Meningkatkan kualitas pelaporan ke publik, regulator, dan lembaga pemeringkat ESG global.

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

**Digital Carbon Tracking**

Merupakan *platform* digital *bankwide* untuk pencatatan dan perhitungan emisi karbon BSI dalam satuan Ton CO<sub>2</sub>-eq yang mencakup:

- *Scope 1*: BBM kendaraan operasional dan generator.
- *Scope 2*: Konsumsi listrik seluruh jaringan (kantor pusat, kantor cabang, *green building*).

Sistem ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja emisi, penetapan target reduksi, dan pemantauan implementasi *Sustainable Operations*.

**Metodologi Perhitungan**

Menggunakan standar internasional:  
GHG *Protocol* – *Corporate Standard* untuk *Scope 1 & 2*.

**Past vs Now (2025)****Past (sebelum 2024)**

- Perhitungan emisi dilakukan manual.
- Data terbatas pada kantor pusat (The Tower).
- Tidak ada integrasi otomatis antar-unit.

**Now (2025)**

- Perhitungan emisi mencakup seluruh jaringan BSI (*bankwide*).
- Dijalankan melalui *platform* Digital Carbon Tracking.
- Diverifikasi oleh pihak independen untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas.
- Terintegrasi dengan program *Sustainable Operations*.



Wilayah	Emisi GRK Cakupan 1, 2, dan 3 (Ton CO <sub>2</sub> -eq)		
Kantor Pusat	10.132	Wilayah VI Bandung	6.412
Wilayah I Aceh	10.991	Wilayah VII Semarang	7.635
Wilayah II Medan	6.261	Wilayah VIII Surabaya	10.815
Wilayah III Palembang	7.464	Wilayah IX Kalimantan	8.113
Wilayah IV Jakarta 1	9.160	Wilayah X Makassar	4.971
Wilayah V Jakarta 2	7.777	<b>Jumlah</b>	<b>89.731</b>

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

**Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya [OJK F.11] [GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4] [FN-CB-410b.1, FN-CB-410b.2, FN-CB-410b.3, FN-CB-410b.4] [S1.MT.a, S1.MT.f, S2.MT.a1, S2.MT.b2, S2.MT.i3, S2.MT.k2]**

Sebagai bagian dari komitmen terhadap operasional berkelanjutan, BSI mengelola dan memantau emisi gas rumah kaca melalui Digital *Carbon Tracking*, sebuah platform *bankwide* yang mencatat dan menghitung emisi dalam satuan ton CO<sub>2</sub>-eq secara periodik. Tahun 2024 merupakan tahun awal penerapan penuh sistem yang mencakup seluruh wilayah operasional BSI, sehingga memberikan cakupan data yang lebih akurat dan komprehensif. Sementara itu, pada tahun 2023 perhitungan emisi masih terbatas pada penggunaan energi di kantor pusat The Tower, sebelum sistem digital diterapkan secara menyeluruh.

Penghitungan emisi pada tahun 2024 dan 2025 dilakukan menggunakan pendekatan *operational control* dan mengacu pada *Global Warming Potential (GWP)* dari *Greenhouse Gas Protocol* dan metodologi yang dikembangkan oleh *Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)*. Proses ini mencakup CO<sub>2</sub> yang dikonversi menggunakan metodologi CO<sub>2</sub>-eq terkini. BSI tidak menghasilkan emisi CO<sub>2</sub> biogenik sehingga tidak terdapat pelaporan khusus untuk kategori tersebut.

Emisi GRK yang dilaporkan terdiri dari:

- Cakupan 1: emisi langsung dari konsumsi BBM kendaraan operasional.
- Cakupan 2: emisi tidak langsung dari konsumsi listrik seluruh jaringan kantor, dihitung menggunakan pendekatan *location-based*.
- Cakupan 3: emisi tidak langsung lainnya mencakup perjalanan dinas udara yang dihitung menggunakan metodologi *GHG Protocol* dan emisi pembiayaan yang dihitung menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh *Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)*.

Pada tahun 2025, BSI meningkatkan kualitas inventaris emisi melalui integrasi otomatis dengan PLTS, penggunaan kendaraan listrik, *Water Station RO*, serta gedung hijau bersertifikasi. Peningkatan ini mendukung penyusunan *Roadmap Net Zero Emission* dan *Climate Risk Stress Testing*.

Selain total emisi, BSI menghitung intensitas GRK untuk menilai efisiensi emisi terhadap aktivitas bisnis. Intensitas dihitung berdasarkan ton CO<sub>2</sub>-eq per miliar rupiah pendapatan, dan ton CO<sub>2</sub>-eq per pegawai, dengan Scope 3 dilaporkan terpisah sesuai ketentuan GRI. Pendekatan pengukuran yang konsisten memastikan hasil pelaporan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Rincian jumlah emisi GRK dan intensitasnya pada tahun 2023–2025 disajikan pada tabel berikut:

**Emisi GRK Cakupan 1 dan Cakupan 2**

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Emisi GRK Cakupan 1	Ton CO <sub>2</sub> -eq	145	17.685	19.374
Emisi GRK Cakupan 2	Ton CO <sub>2</sub> -eq	1.577	65.719	70.356
<b>Total Emisi GRK Cakupan 1 dan 2</b>	<b>Ton CO<sub>2</sub>-eq</b>	<b>1.722</b>	<b>83.404</b>	<b>89.731</b>
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai <i>Mudharib</i>	Dalam Miliar Rupiah	26.456	30.854	35.202
Total Pegawai	Orang	24.875	23.977	25.165
	<b>Ton CO<sub>2</sub>-eq/Miliar rupiah</b>	<b>0,07</b>	<b>2,70</b>	<b>2,55</b>
	<b>Ton CO<sub>2</sub>-eq/Orang</b>	<b>0,07</b>	<b>3,48</b>	<b>3,57</b>

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

## Intensitas Emisi Cakupan 3

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Emisi GRK Cakupan 3 (Perjalanan Dinas)	Ton CO <sub>2</sub> -eq	598	583	480
Emisi GRK Cakupan 3 (Financed Emissions)	Ton CO <sub>2</sub> -eq	-	-	16.162.315
<b>Total Emisi GRK Cakupan 3</b>	<b>Ton CO<sub>2</sub>-eq</b>	<b>598</b>	<b>583</b>	<b>16.162.795</b>
Jumlah Pendapatan	Dalam Miliar Rupiah	26.456	30.854	35.202
Total Pegawai	Orang	24.875	23.977	25.165
<b>Intensitas Emisi GRK Cakupan 3 (Perjalanan Dinas)</b>	<b>Pendapatan: Ton CO<sub>2</sub>-eq/Miliar Rupiah</b>	<b>0,023</b>	<b>0,019</b>	<b>0,014</b>
	<b>Pegawai: Ton CO<sub>2</sub>-eq/Orang</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>	<b>0,019</b>
<b>Intensitas Emisi GRK Cakupan 3 (Financed Emissions)</b>	<b>Pendapatan: Ton CO<sub>2</sub>-eq/Miliar Rupiah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>459,12</b>

## Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan [OJK F.12] [GRI 305-5]

BSI terus memperkuat pengelolaan emisi GRK sebagai bagian dari komitmen terhadap operasional yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Sepanjang tahun 2025, Bank melanjutkan berbagai inisiatif pengurangan emisi melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya (PLTS), penerapan 100% lampu LED, penggunaan teknologi AC inverter, perluasan armada kendaraan listrik (EV), serta penyediaan Water Station RO untuk mengurangi emisi yang timbul dari konsumsi air minum kemasan. Berbagai langkah tersebut melengkapi program efisiensi energi lainnya sebagaimana dijelaskan pada Aspek Energi dalam laporan ini.

Padatahun pelaporan 2025, hasil pengelolaan emisi menunjukkan perkembangan yang dipengaruhi oleh penguatan metodologi penghitungan dan perluasan cakupan data. Untuk emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2, penurunan belum terlihat secara signifikan karena perhitungan emisi kini dilakukan secara bankwide melalui Digital Carbon Tracking, sehingga cakupan data menjadi lebih luas, representatif, dan akurat dibandingkan periode sebelumnya. Dengan pendekatan ini, inventaris emisi BSI memberikan gambaran yang semakin komprehensif atas jejak karbon operasional Bank.

Sementara itu, peningkatan pada emisi Cakupan 3 terutama dipengaruhi oleh penambahan kategori emisi yang dihitung pada periode pelaporan, khususnya emisi pembiayaan (financed emissions). Cakupan pengukuran yang semakin lengkap membuat pelaporan emisi Cakupan 3 tahun 2025 mencerminkan profil emisi BSI secara lebih menyeluruh serta memperkuat transparansi pengungkapan keberlanjutan Bank. Inventaris GRK BSI dihitung menggunakan metodologi GHG Protocol dengan konversi Global Warming Potential (GWP) untuk CO<sub>2</sub>, sedangkan perhitungan emisi pembiayaan mengacu pada metodologi yang dikembangkan oleh Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), sehingga hasil yang disajikan tetap konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun.

## GRAFIK EMISI GRK CAKUPAN 3 (FINANCED EMISSION)

Ton CO<sub>2</sub>-eq

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

### Pengelolaan Emisi ODS dan Emisi Non GRK

[GRI 305-6, 305-7]

Hingga Desember 2025, BSI tidak melakukan produksi, impor, maupun ekspor *Ozone Depleting Substances* (ODS). Untuk mendukung operasional yang ramah lingkungan, seluruh sistem pendingin ruangan di jaringan kantor BSI telah menggunakan refrigeran R32, yaitu refrigeran dengan nilai ODS nol dan efisiensi pendinginan yang lebih tinggi dibandingkan refrigeran konvensional. Penggunaan R32 ini juga sejalan dengan upaya efisiensi energi BSI melalui penerapan AC *inverter* dan standar bangunan hijau.

Sebagai perusahaan berbasis jasa keuangan yang tidak menjalankan proses pembakaran industri maupun kegiatan manufaktur, BSI tidak menghasilkan emisi udara signifikan seperti NOx, SOx, VOC, POP, HAP, atau *particulate matter*. Oleh karena itu, kategori emisi non-GRK tidak material bagi operasional Bank, dan sepanjang 2025 belum dilakukan pengukuran emisi non-GRK di seluruh wilayah kerja BSI.

## ASPEK LIMBAH DAN EFLUEN

### Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis [OJK F.13] [GRI 306-1, 306-3]

BSI menyadari bahwa aktivitas operasionalnya menghasilkan timbulan limbah, baik limbah non-B3 maupun limbah B3. Limbah non-B3 terutama berasal dari penggunaan kertas dalam proses administrasi dan korespondensi, serta limbah plastik dari konsumsi internal seperti kemasan makanan dan alat makan sekali pakai. Upaya pengurangan limbah non-B3 telah dilakukan melalui digitalisasi dokumen, penggunaan E-Doc, serta penerapan inisiatif *Green Business Culture*, termasuk penyediaan *Water Station* RO untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Selain itu, BSI juga menghasilkan limbah B3 seperti limbah elektronik, *toner* printer bekas, baterai, dan lampu TL. Sepanjang tahun 2025, limbah tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan maupun masyarakat karena telah dikelola melalui pihak pengolah berizin sesuai ketentuan yang berlaku.

BSI saat ini sedang melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sumber dan alur limbah untuk mengidentifikasi potensi dampak signifikan, termasuk titik timbulan dari sarana operasional baru seperti *Recycle Bottle Vending Machine*. Pemetaan mencakup klasifikasi limbah, lokasi timbulan, dan mekanisme pengelolaan. Data kuantitatif terkait total timbulan limbah akan disampaikan setelah proses pemetaan dan verifikasi selesai.

### Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen

[OJK F.14, F.15] [GRI 306-2, 306-3, 306-4, 306-5]

BSI mengelola limbah dan efluen dengan berpedoman pada prinsip keberlanjutan dan *maqashid* syariah (Hifdz Al-Bi'ah). Limbah yang dihasilkan dari operasional Bank mencakup limbah non-B3 seperti kertas, plastik, dan sisa makanan, serta limbah B3 berupa perangkat elektronik, baterai, lampu TL, dan tinta printer bekas. Seluruh limbah tersebut ditangani oleh pihak ketiga berizin sesuai ketentuan, sehingga BSI tidak melakukan pembakaran, penimbunan, ataupun pembuangan mandiri. Untuk limbah cair, pengolahannya dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dikelola oleh pengelola gedung, dan sebagian air hasil olahan digunakan kembali untuk kebutuhan sanitasi.

Sepanjang 2025, BSI masih melanjutkan pemetaan sumber, jenis, dan alur timbulan limbah untuk mengidentifikasi potensi dampak signifikan dan memastikan kesesuaian mekanisme pengelolaan dengan regulasi. Pemetaan ini juga mencakup aktivitas yang memunculkan timbulan baru, termasuk fasilitas *green building* dan inisiatif keberlanjutan lainnya. Data kuantitatif mengenai total timbulan limbah, komposisi, dan pengalihannya akan disampaikan setelah proses pemetaan dan standarisasi pencatatan selesai diterapkan di seluruh unit kerja.

Selama tahun 2025, tidak terdapat tumpahan bahan berbahaya atau insiden lain yang berdampak signifikan terhadap lingkungan maupun kesehatan.

## KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

### Reverse Vending Machine (RVM)

Sebagai bagian dari komitmen BSI dalam mengurangi sampah plastik dan mendorong ekonomi sirkular, Bank melanjutkan kolaborasi strategis dengan PlasticPay melalui penyediaan RVM di berbagai area publik dan jaringan kantor BSI. Program yang telah berjalan sejak 2021 ini bertujuan meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk memilah dan menyerahkan botol plastik bekas minuman agar dapat didaur ulang menjadi produk bernilai tambah, sekaligus mengurangi beban TPA dan potensi pencemaran lingkungan. Melalui aplikasi PlasticPay, pengguna cukup memasukkan botol plastik ke mesin, memindai *barcode*, dan memperoleh poin yang dapat ditukarkan dengan *merchandise*, dengan nilai setara Rp1 per poin. Sistem digital PlasticPay memungkinkan seluruh transaksi dan volume sampah tercatat secara *real-time* sehingga program dapat dimonitor secara terukur.

Hingga 2025, BSI telah mengoperasikan 70 unit RVM dan *Collection Point* di 90 lokasi, berhasil mengumpulkan 27.198,09 kg botol plastik dan mendorong partisipasi 15.473 masyarakat. Upaya ini juga berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon sebesar 143,99 ton CO<sub>2</sub>-eq. Seluruh botol plastik yang terkumpul telah diolah menjadi berbagai produk daur ulang yang memberi manfaat ekonomi sekaligus mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Produk-produk hasil daur ulang dari botol plastik tersebut ditampilkan pada ilustrasi berikut:



Sebagai bagian dari perluasan program pengelolaan sampah plastik berbasis teknologi, pada tahun 2025 BSI bersama PlasticPay berhasil memperluas jangkauan penempatan RVM dan *Collection Point* dengan rincian sebagai berikut:

	Satuan	2023	2024	2025
Titik Lokasi	Unit	50	70	90
Reduksi Sampah Plastik	Kg	20.487	21.432	27.198
Reduksi Jejak Karbon	Ton CO <sub>2</sub> -eq	108,4	113,4	144

### ASPEK PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

#### Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan [OJK F.16]

Sepanjang tahun 2025, BSI tidak menerima pengaduan apa pun yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas operasional BSI tidak menimbulkan gangguan atau dampak lingkungan yang memicu laporan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.

## KINERJA SOSIAL



### KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN ATAS PRODUK DAN/ATAU JASA YANG SETARA KEPADA KONSUMEN

[OJK F.17] [GRI 416-1, FS13, FS14, FS15, FS16] [FN-CB-240a.4]

BSI berkomitmen untuk memastikan seluruh produk dan layanan perbankan syariah dapat diakses secara setara oleh seluruh nasabah tanpa membedakan gender, suku, ras, kondisi fisik, maupun keyakinan. Setiap nasabah memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan sesuai standar operasional, regulasi perlindungan konsumen, serta prinsip syariah yang berlaku.

Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 22/2023, serta ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen. BSI juga menerapkan SPO Pelindungan dan Pengaduan Nasabah yang diterbitkan pada tahun 2024, sebagai panduan untuk memastikan keamanan, transparansi, dan keadilan sepanjang siklus produk dan layanan.

Dalam implementasinya, BSI menyediakan akses layanan yang setara, termasuk fasilitas ramah disabilitas dan lansia, perlindungan data dan aset nasabah, serta mekanisme *self-assessment* berkala untuk menilai

## KINERJA SOSIAL

efektivitas pelaksanaannya. Penguatan fitur digital, melalui BYOND by BSI, BSI Mobile, peningkatan jaringan agen, dan pusat layanan nasabah, memberikan kemudahan akses layanan kapan pun dan di mana pun.

Untuk mendukung penyelesaian isu layanan, BSI menyediakan berbagai saluran pengaduan seperti BSI Call 14040, BYOND by BSI, BSI Mobile, email, kantor cabang, dan Kantor Pusat. Kinerja penyelesaian pengaduan sesuai dengan SLA regulator, menegaskan komitmen BSI terhadap perlindungan konsumen dan kualitas layanan.

### BSI Agen

Sebagai bagian dari perluasan jangkauan layanan keuangan syariah serta upaya memperkuat ekosistem inklusi keuangan nasional, BSI terus meningkatkan keberadaan BSI Agen di wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh kantor cabang (*blank spot*). BSI Agen berperan sebagai perpanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan dasar secara cepat, mudah, dan terjangkau melalui skema Laku Pandai.

### JENIS LAYANAN



#### Perbankan

Cek Saldo, Tarik Tunai,  
Transfer & Setor Tunai



#### Pembayaran & Pembelian

Pulsa & Paket Data, Top Up wallet,  
BPJS, PDAM

### EKOSISTEM ISLAM



#### Layanan Haji

Pendaftaran & Pelunasan Haji



#### Donasi

Zakat & Infaq



#### Referral Produk

- Gadai
- Pembukaan Rekening  
Tabungan Haji



#### Program Pemerintah

- Program Keluarga Harapan
- Program Bantuan Sembako
- Program PIP
- Program Kartu Tani

### FITUR UTAMA



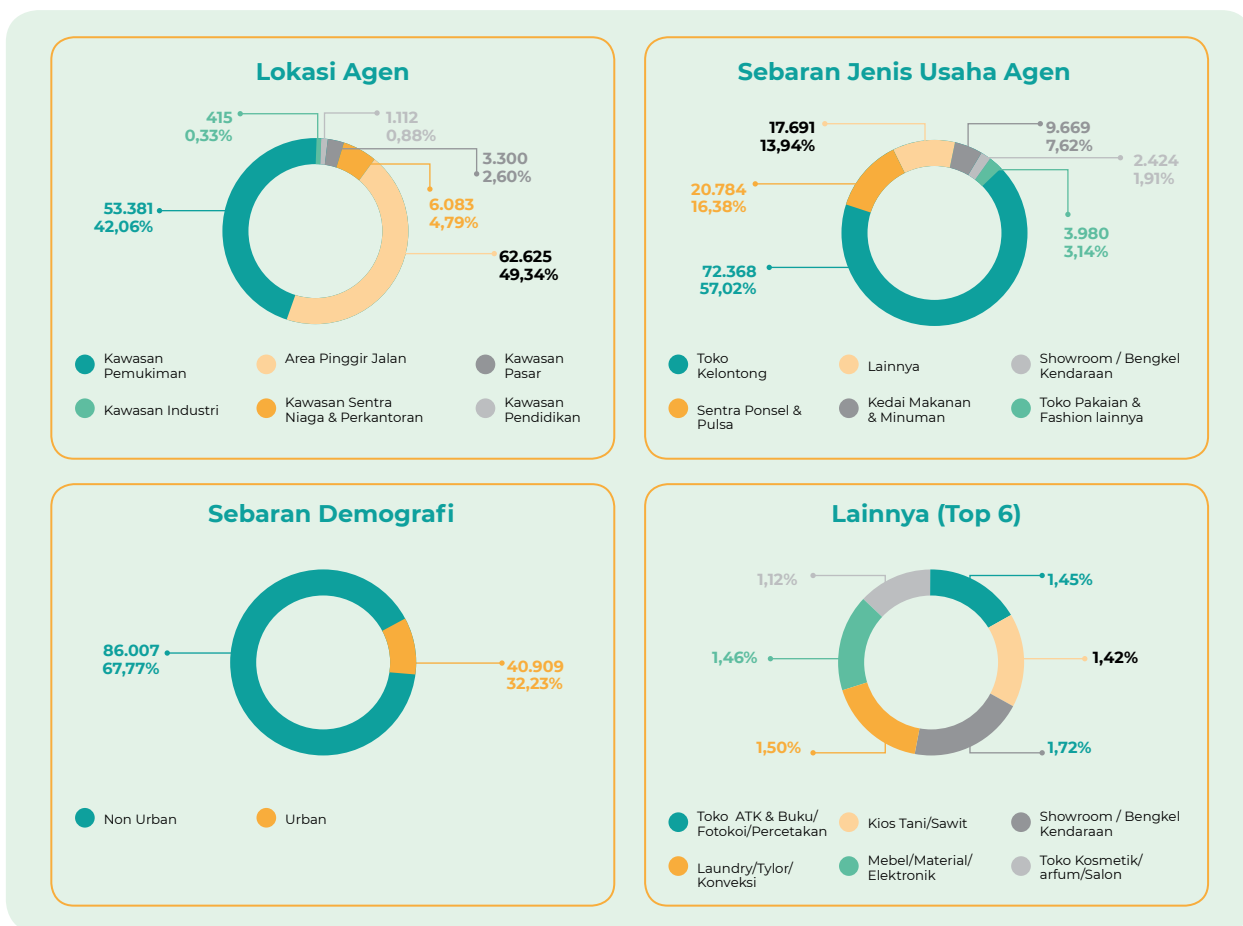
- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| X |  | Setor/ Tarik/ Transfer BSI & Bank Lain      | ✓ |
| ✓ |  | Pembayaran & Pembelian                      | ✓ |
| X |  | Layanan Haji (Pendaftaran & Pelunasan Haji) | ✓ |
| ✓ |  | Donasi                                      | ✓ |
| ✓ |  | Referral Produk (Tabungan & Gadai)          | ✓ |



## KINERJA SOSIAL

Pada 2025, jaringan BSI Agen bertambah menjadi 129.916 agen di seluruh Indonesia, tumbuh 6,39% dibandingkan 119.295 agen pada 2024. Peningkatan ini sejalan dengan strategi BSI dalam memperluas keberadaan layanan syariah, memperkuat ekosistem digital, dan mendukung transaksi inklusif, termasuk integrasi layanan melalui BYOND by BSI dan perluasan fitur pembiayaan mikro dan zakat/*infaq* digital. Rincian perkembangan BSI Agen sepanjang 2023–2025 disajikan pada tabel berikut:

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Jumlah Agen	Agen	86.200	119.295	126.916
Jumlah Agen Aktif	Agen	86.200	40.884	59.245
Jumlah Transaksi	Juta kali	19,6	26,9	30,7
Nilai Transaksi	Dalam Triliun Rupiah	43,80	59,02	75,25



Sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan syariah, BSI pada tahun 2025 berhasil menjangkau 176 kabupaten yang sebelumnya termasuk kategori *blank spot* melalui distribusi 3.063 BSI Agen. Perluasan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akses layanan keuangan yang merata hingga ke daerah terpencil. Rincian jumlah agen berdasarkan masing-masing provinsi disampaikan pada tabel berikut:

## KINERJA SOSIAL

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Agen
1.	Bali	3	19
2.	Bengkulu	4	135
3.	DKI Jakarta	1	13
4.	Gorontalo	5	95
5.	Jambi	2	62
6.	Jawa Tengah	1	19
7.	Jawa Timur	2	424
8.	Kalimantan Barat	4	110
9.	Kalimantan Selatan	1	12
10.	Kalimantan Tengah	10	579
11.	Kalimantan Timur	1	1
12.	Kalimantan Utara	2	4
13.	Kepulauan Bangka Belitung	5	72
14.	Kepulauan Riau	1	15
15.	Lampung	3	199
16.	Maluku	9	42
17.	Maluku Utara	5	42
18.	Nusa Tenggara Barat	1	5
19.	Nusa Tenggara Timur	20	11
20.	Papua	7	18
21.	Papua Barat	7	4
22.	Papua Barat Daya	5	22
23.	Papua Pegunungan	8	3
24.	Papua Selatan	4	6
25.	Papua Tengah	8	4
26.	Sulawesi Barat	3	13
27.	Sulawesi Selatan	5	202
28.	Sulawesi Tengah	6	146
29.	Sulawesi Tenggara	13	179
30.	Sulawesi Utara	11	257
31.	Sumatera Barat	4	175
32.	Sumatera Selatan	4	120
33.	Sumatera Utara	11	55
<b>Jumlah</b>		<b>176</b>	<b>3.063</b>

BSI Agen berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, khususnya bagi kelompok *unbanked* dan *underbanked*. Melalui skema Laku Pandai, BSI menyediakan *Basic Saving Account* (BSA) sebagai

produk tabungan dasar yang memungkinkan masyarakat membuka rekening tanpa harus datang ke kantor cabang, sekaligus mendukung fokus Pemerintah dan OJK dalam percepatan inklusi keuangan nasional.

## KINERJA SOSIAL

**Inklusi dan Literasi Keuangan**

Sebagai bagian dari komitmen untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang setara dan inklusif, BSI memperkuat penyediaan fasilitas ramah disabilitas di seluruh *outlet*, mencakup parkir khusus difabel, *ramp* akses, antrean prioritas, kursi roda, toilet difabel, dan ruang tunggu yang aman dan nyaman. Penguatan kompetensi pegawai melalui pelatihan layanan disabilitas memastikan bahwa setiap nasabah dapat dilayani secara profesional dan inklusif.

Selama 2025, BSI memperluas program pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan syariah bagi komunitas disabilitas melalui empat inisiatif utama:

- Program UMKM DifaMart dan Peternakan Mithik, yang berhasil mendorong penyandang disabilitas untuk naik kelas sebagai pelaku usaha mandiri dan meningkatkan peluang mereka untuk mengakses pembiayaan syariah.

- Program Mudik Bersama BUMN, yang menghadirkan fasilitas mudik bagi 385 peserta disabilitas sekaligus memberikan edukasi transaksi digital syariah dan pemahaman produk keuangan.
- Peringatan Hari Internasional Penyandang Disabilitas 2025 di Masjid BSI Cipularang, yang menghadirkan pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan bagi komunitas tunanetra (Pertuni) bekerja sama dengan Masjidpreneur.
- Edukasi digital keuangan syariah, termasuk pengenalan BYOND by BSI, penggunaan QRIS syariah, dan pemahaman dasar pengelolaan keuangan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha disabilitas.

Di samping itu, untuk memperluas manfaat bagi kelompok rentan, BSI juga berperan aktif sebagai penyalur berbagai program bantuan pemerintah. Pada tahun 2025, BSI telah menyalurkan dukungan kepada 3,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total realisasi mencapai 3,4 triliun. Berikut rincian penyaluran bantuan pemerintah:

No.	Jenis Bantuan Program Pemerintah	Penyaluran Bantuan Pemerintah	
		Σ KPM	Nilai Bantuan (Rp)
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	359,377	939.516.675.000
2.	Program Sembako	566,167	972.316.800.000
3.	Program Sembako Stimulus Ekonomi	538,121	215.248.400.000
4.	Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra)	489,698	440.728.200.000
5.	Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)	24,074	37.081.800.000
6.	Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST)	54	1.080.000.000
7.	Program Penyaluran Pupuk Subsidi	435,542	Dalam Bentuk Kuota (Kg)
8.	Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikdasmen	323,223	180.692.400.000
9.	Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah	95,717	71.735.625.000
10.	Program Indonesia Pintar (PIP) Pondok Pesantren	37,522	33.187.200.000
11.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah	740	110.977.846.802
12.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pondok Pesantren	95	24.470.155.000
13.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal	326	8.593.500.000
14.	Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Kemenag	1,077	12.975.600.000
15.	Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Kemenag - PUSPENMA	2,959	19.529.400.000
16.	Beasiswa Afirmasi Adiktif	10	120.000.000
17.	Bantuan Insentif Ma'had Aly	670	1.675.000.000
18.	Bantuan Halaqah Pondok Pesantren	60	3.000.000.000
19.	Bantuan Musabaqah Qira'atil Kutub	763	2.647.000.000

## KINERJA SOSIAL

No.	Jenis Bantuan Program Pemerintah	Penyaluran Bantuan Pemerintah	
		Σ KPM	Nilai Bantuan (Rp)
20.	Bantuan Kemitraan Pesantren Pendidikan Keagamaan Islam	40	4.000.000.000
21.	Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren	20	4.000.000.000
22.	Bantuan Subsidi Upah	525,853	315.511.800.000
23.	Bantuan Pemagangan	1,036	4.319.812.344
<b>Jumlah</b>		<b>3,403,144</b>	<b>3.403.407.214.146</b>

Guna memperkuat kapasitas agen serta memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah, BSI pada tahun 2025 kembali menyelenggarakan rangkaian Sosialisasi & *Gathering* BSI Agen yang diikuti oleh agen aktif maupun calon agen di berbagai provinsi.

Program ini menjadi bagian penting dari komitmen BSI untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang merata, aman, dan inklusif. Pelaksanaan kegiatan sepanjang 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
<i>Gathering</i> BSI Agen kepada Agen Travel Binaan Travel Umroh Sahid Tour Wilayah Solo	15 Januari 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan di <i>Islamic Ecosystem</i> dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kepada Nasabah Calon Agen dan Agen Eksisting di Balikpapan	6 Februari 2025	<i>Update</i> Fitur dan Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen bersama dengan Rekanan BPJS Kesehatan Kota dan Kabupaten Cirebon	11 Februari 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen Kelolaan Area Bandung Kota	12 Februari 2025	<i>Update</i> Fitur dan Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Pondok Pesantren Nurul Iman Parung Bogor	21 Februari 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Komunitas Wakaf Uang MUI Jakarta	26 Februari 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen dalam Kegiatan Rapat Kerja FSPP Provinsi Banten	13 Maret 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Komunitas Persis Jakarta	15 Maret 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> & Buka Puasa Bersama BSI Agen Kelolaan Area Banten	21 Maret 2025	<i>Update</i> Fitur dan Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Pimpinan Pondok dan Assatidz AI UMM Bogor	16 April 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Akuisisi & Edukasi Fitur BSI Agen kepada Pondok Pesantren Nurul Iman Parung Bogor	16 April 25	Edukasi fitur dan layanan BSI Agen untuk transaksi
Sosialisasi BSI Agen kepada Pimpinan Pondok Pesantren Tapak Sunan Jakarta	17 April 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pondok, Assatidz dan Santri Pondok Nurul Iman Parung Bogor	23 April 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha

## KINERJA SOSIAL

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pondok & Assatidz Daarussufwah Depok	24 April 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Mahasiswa Universitas Sultan Ajen Tirtayasa	24 April 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Area Surabaya Kota dan Surabaya Raya	24 April 2025	<i>Update</i> Fitur dan Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Pimpinan Pondok Pesantren mama Bakry Sadeng Bogor	30 April 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darul Furqon Bogor	30 April 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada UIN Suska Riau	3 Mei 2025	Akuisisi BSI Agen dan edukasi fitur dan layanan BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pondok dan Assatidz Pondok Pesantren Al Aulia Bogor	5 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pondok dan Assatidz Pondok Pesantren Markazul Qur'an Bogor	5 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Area Purwokerto	6 Mei 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Area Semarang Kota	7 Mei 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus MTA Solo	7 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pasar Kebayoran Lama	7 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Rektor dan Jajaran di STAMI Depok	8 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Area Padang pada Cluster Luar Kota Padang	9 Mei 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Bandung Kota & Bandung Raya	9 Mei 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Area Padang pada Cluster Dalam Kota Padang	12 Mei 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada BUMDES seluruh Buleleng	15 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi Layanan Pengelolaan Dana Desa dan Keagenan BSI di BUMDES Kabupaten Lombok Tengah	26 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada BMT Laznas Yogyakarta	26 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus & Assatidz Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor	26 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)	27 Mei 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha

## KINERJA SOSIAL

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
Gathering BSI Agen bersama dengan Komunitas SRC Bandung	4 Juni 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada MUI Jakarta	30 Juni 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan	22 Juli 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pondok Pesantren Gontor Ponorogo	23 Juli 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pesantren Gontor, BMT Al Husna, BMT Dana Barokah, SDIT Al Umar, Penyuluh Agama Kemenag dan Agen di Lingkungan Pondok Pesantren Watucongkol	23 Juli 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Gathering dan Silaturahmi BSI Agen Area Balikpapan	24 Juli 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Gathering dan Silaturahmi BSI Agen Area Banjarmasin	24 Juli 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Gathering dan Silaturahmi BSI Agen Area Pontianak	24 Juli 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Situbondo	24 Juli 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Gathering dan Silaturahmi BSI Agen Area Solo	25 Juli 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Gathering dan Silaturahmi BSI Agen Area Pekalongan	25 Juli 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Universitas Al Azhar Jakarta	25 Juli 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Gathering BSI Agen kelolaan Area Bekasi	20 Agustus 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada SRC Sehan Area Fatmawati	21 Agustus 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi Layanan Pengelolaan Dana Desa dan Keagenan BSI di BUMDES Kabupaten Lombok Utara	27 Agustus 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi kepada Seluruh BSI Agen terkait APUPPT via Daring	27 Agustus 2025	Menedukasi seluruh Agen terkait APUPPT dan Keamanan Transaksi di BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen di SMK Negeri Lebak Banten	9 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Universitas Padang	10 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Gathering BSI Agen kelolaan KCP Nusantara	11 September 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Gathering BSI Agen kelolaan Cluster Samarinda	12 September 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Pelatihan BSI Agen kepada KSPPS BMT UGT Nusantara	16 September 2025	Edukasi fitur dan layanan BSI Agen untuk transaksi

## KINERJA SOSIAL

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
Sosialisasi BSI Agen kepada Komunitas Petani Kabupaten Cikalong Bandung	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Area Bandung Raya	19 September 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Komunitas UMKM Kota Medan	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada BUMDES Pra EPIKS OJK Medan	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen dan Inisiasi Kerjasama dengan Antam	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen dengan KBIH Tour & Travel Cheria Holiday	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen & Penyaluran PIP kepada Pondok Pesantren kelolaan KC Cianjur & Sukabumi Pelabuhan Ratu	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen & Ngopi Emas kepada Nasabah Kelolaan Cluster Pondok Kopi	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen & Ngopi Emas kepada Nasabah Kelolaan Area Rawamangun	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan KC Rimbo Bujang	19 September 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada SOS & EPIKS OJK Area Bandar Lampung	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada LAZISNU Area Bandar Lampung	19 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen & Akuisisi kepada UIN Padang	19 September 2025	Akuisisi menjadi BSI Agen dan mengedukasi fitur dan layanan BSI Agen yang akan digunakan sebagai Mini Bank
Sosialisasi BSI Agen kepada EPIKS OJK Ciamis	30 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada MUI Jakarta	30 September 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Pelatihan <i>Capacity Building</i> SDM dan Penguatan Kelembagaan KDKMP, KOPWAN & KSPPS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkab Sidoarjo	8 Oktober 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan Area Palu	8 Oktober 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Koperasi dan KBIH Kota Bandung	17 Oktober 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Komunitas TDA Banjarmasin	29 Oktober 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
<i>Gathering</i> BSI Agen kelolaan KCP Kapuas	30 Oktober 2025	Meningkatkan loyalitas Agen serta <i>update</i> fitur dan program untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen

## KINERJA SOSIAL

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
Sosialisasi & <i>Gathering</i> BSI Agen Komunitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Nganjuk	30 Oktober 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Komunitas OCE OKE Jakarta	11 November 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada KDKMP Bogor	17 November 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus MPDI Jakarta	27 November 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada EPIKS OJK Jakarta	9 Desember 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi BSI Agen kepada KBIH dan Kemenhaj Kota Tangerang	9 Desember 2025	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses layanan keuangan masyarakat dan bisnis keagenan sebagai tambahan pendapatan usaha
Sosialisasi Program Akhir Tahun kepada Seluruh BSI Agen Secara Daring	9 Desember 2025	Sosialisasi program peningkatan transaksi BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Paguyuban SRC Bogor Dalam Acara Ulang Tahun SRC ke 17	9 Desember 2025	Edukasi BSI Agen & Sosialisasi Program BSI Agen untuk peningkatan transaksi

## ASPEK KETENAGAKERJAAN

## Kesetaraan Kesempatan Bekerja

[OJK F.18] [GRI 202-2, 405-1]

Selama 2025, BSI semakin memperkuat tata kelola ketenagakerjaan yang adil dan inklusif. BSI memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan kerja dan pengembangan karier yang setara, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang etnis, agama, kondisi fisik, usia, maupun karakteristik lainnya. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dilakukan melalui proses rekrutmen yang objektif, skema penilaian kinerja yang transparan, serta kebijakan promosi yang didasarkan pada kompetensi dan kinerja pegawai.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sosial di wilayah operasional, BSI juga menerapkan kebijakan perekrutan talenta lokal secara lebih terstruktur. BSI mendefinisikan talenta komunitas lokal sebagai individu yang berasal atau berdomisili pada provinsi lokasi operasional Bank. Selain itu, BSI mendefinisikan manajemen senior sebagai posisi setingkat *Regional CEO dan Group Head* yang memiliki kewenangan strategis dalam

pengambilan keputusan. Lokasi operasional signifikan adalah wilayah dengan konsentrasi pegawai terbesar atau kontribusi bisnis tertinggi terhadap kinerja Bank. Seluruh perhitungan rasio dilakukan menggunakan data pegawai tetap.

Pada tahun 2025, sebanyak 567 *Branch Manager* yang bertugas di 567 kantor cabang (54,9%) merupakan warga lokal, menunjukkan komitmen BSI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Untuk memastikan kesetaraan dalam akses pengembangan karier, BSI menjalankan berbagai kebijakan *Human Capital* seperti *SPO Human Capital*, PTO Pengelolaan Pembelajaran, PTO Penempatan & Penugasan, serta PTO Promosi yang memberikan akses pelatihan dan jenjang karier setara bagi seluruh pegawai. Selain itu, Bank juga memperkuat data dan pemantauan keragaman tenaga kerja, termasuk representasi gender di posisi strategis dan distribusi pegawai berdasarkan kelompok usia. Rincian keberagaman manajemen dan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

## KINERJA SOSIAL

Level Jabatan	Jenis Kelamin				Kelompok Usia							
	Pria	%	Wanita	%	Jumlah	<30	%	30-50	%	>50	%	Jumlah
<b>Manajemen</b>												
Dewan Komisaris	7	87,50%	1	12,50%	8	0	0,00%	3	37,50%	5	62,50%	8
Dewan Pengawas Syariah	6	100,00%	0	0,00%	6	0	0,00%	1	16,70%	5	83,30%	6
Direktur	10	100,00%	0	0,00%	10	0	0,00%	6	60,00%	4	40,00%	10
Executive Manager (PE)	2	25,00%	6	75,00%	8	0	0,00%	1	12,50%	7	87,50%	8
<b>Sub Total</b>	<b>25</b>	<b>78,13%</b>	<b>7</b>	<b>21,87%</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11</b>	<b>34,38%</b>	<b>21</b>	<b>65,63%</b>	<b>32</b>
<b>Pegawai</b>												
Senior Manager	67	0,40%	25	0,15%	92	0	0,00%	63	0,38%	29	0,17%	92
Middle Manager	412	2,48%	132	0,80%	544	0	0,00%	448	2,70%	96	0,58%	544
Manager	1.851	11,16%	632	3,81%	2.483	44	0,27%	2.259	13,62%	180	1,09%	2.483
Officer	3.510	21,17%	2.170	13,09%	5.680	736	4,44%	4.779	28,82%	165	1,00%	5.680
Staff	3.958	23,87%	3.824	23,06%	7.782	1.269	7,65%	6.494	39,17%	19	0,11%	7.782
<b>Sub Total</b>	<b>9.798</b>	<b>59,01%</b>	<b>6.783</b>	<b>40,91%</b>	<b>16.581</b>	<b>2.049</b>	<b>12,36%</b>	<b>14.043</b>	<b>84,69%</b>	<b>489</b>	<b>2,95%</b>	<b>16.581</b>
<b>Grand Total</b>	<b>9.823</b>	<b>59,13%</b>	<b>6.790</b>	<b>40,87%</b>	<b>16.613</b>	<b>2.049</b>	<b>12,33%</b>	<b>14.054</b>	<b>84,60%</b>	<b>510</b>	<b>3,07%</b>	<b>16.613</b>

BSI juga menunjukkan komitmen terhadap keberagaman yang diwujudkan melalui rekrutmen inklusif bagi penyandang disabilitas. Melalui program bibit, magang inklusif, serta pendampingan tutor di Change & Culture Academy, BSI memastikan kandidat disabilitas dapat mengikuti seluruh tahapan rekrutmen secara adil. Pada 2025, BSI mempekerjakan 1 (satu) pegawai perempuan disabilitas, yang ditempatkan pada posisi *back office* dan fungsi pendukung lain yang sesuai dengan kapabilitasnya.

Inisiatif-inisiatif tersebut memperkuat posisi BSI sebagai institusi yang memastikan lingkungan kerja setara, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat. Berikut rincian komposisi pegawai penyandang disabilitas:

Tahun	Jenis Kelamin				Kelompok Usia							
	Pria	%	Wanita	%	Total	<30	%	30-50	%	>51	%	Total
<b>2025</b>	-	-	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
2024	7	54%	6	46%	13	13	100%	-	-	-	-	13
2023	7	54%	6	46%	13	13	100%	-	-	-	-	13

Sebagai bagian dari penguatan program kesejahteraan dan keterikatan pegawai, Bank menerapkan kebijakan *annual increment* dan pemberian bonus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi pegawai. Selain itu, Bank juga memberikan apresiasi umrah bagi pegawai terbaik sebagai penghargaan atas komitmen dan pencapaian kinerja.

Dalam mendukung kesejahteraan pegawai secara menyeluruh, Bank menyelenggarakan berbagai program *well-being* terintegrasi yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan finansial. Pada aspek fisik, program meliputi *Health Talk*, *Virtual Sport Competition* (*walking* dan *running*), serta *Activity Challenge* untuk mendorong gaya hidup sehat. Dukungan terhadap kesehatan mental dilakukan melalui layanan konsultasi psikolog dan berbagai inisiatif yang bersifat spiritual. Peningkatan literasi dan kesejahteraan finansial pegawai difasilitasi melalui *Financial Talk*.

Selain itu, Bank menyediakan berbagai *employee club* sebagai wadah penyaluran minat dan bakat pegawai, yang berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan, inklusivitas, dan keterikatan pegawai di lingkungan kerja.

## KINERJA SOSIAL

**Rekrutmen dan Perputaran Pegawai [GRI 401-1]**

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dan berintegritas, BSI menjalankan proses rekrutmen yang berpedoman pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan transparansi. Seluruh tahapan seleksi dilakukan tanpa membedakan gender, agama, ras, usia, kondisi fisik, ataupun latar belakang lainnya, sesuai ketentuan dalam PTO Rekrutmen dan Seleksi BSI.

BSI meyakini bahwa pegawai yang unggul merupakan aset penting dalam mendorong kinerja bisnis dan operasional. Oleh karena itu, Bank bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal seperti pusat karier perguruan tinggi, media, dan lembaga pencari bakat untuk mendapatkan talenta terbaik. Sepanjang 2025, BSI merekrut 352 pegawai baru.

**Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Kelompok Usia**

(Dalam Orang)

Kelompok Usia	2023	2024	2025
21-30 tahun	229	512	290
31-40 tahun	24	49	45
41-50 tahun	17	15	12
>50 tahun	5	33	5
<b>Jumlah</b>	<b>275</b>	<b>609</b>	<b>352</b>

**Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Jenis Kelamin**

(Dalam Orang)

Uraian	2023	2024	2025
Pria	147	369	223
Wanita	128	240	129
<b>Jumlah</b>	<b>275</b>	<b>609</b>	<b>352</b>

**Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Kewarganegaraan**

(Dalam Orang)

Kewarganegaraan	2023			2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Indonesia	128	147	275	369	240	609	223	129	352
Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>147</b>	<b>275</b>	<b>369</b>	<b>240</b>	<b>609</b>	<b>223</b>	<b>129</b>	<b>352</b>

**Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Wilayah Kerja**

(Dalam Orang)

Wilayah	2023	2024	2025
Jawa	266	586	331
Luar Jawa	9	23	21
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>609</b>	<b>352</b>

### Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Jenjang Jabatan

(Dalam Orang)

Jenjang Jabatan	2023	2024	2025
Senior Manager	15	7	3
Middle Manager	15	23	13
Manager	15	42	32
Officer	212	491	265
Staff	18	46	39
<b>Jumlah</b>	<b>275</b>	<b>609</b>	<b>352</b>

Di samping pemenuhan kebutuhan organisasi yang berkembang, rekrutmen juga dilakukan untuk menjaga kesinambungan operasional dengan menggantikan pegawai yang keluar. Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatat sebanyak 1.001 pegawai yang berhenti bekerja, meningkat dibandingkan dengan 566 pegawai pada tahun 2024.

### Komposisi Pegawai Berhenti Bekerja Berdasarkan Kelompok Usia

(Dalam Orang)

Kelompok Usia	2023	2024	2025
21-30 tahun	212	176	238
31-40 tahun	323	268	452
41-50 tahun	96	68	152
>50 tahun	57	54	159
<b>Total</b>	<b>688</b>	<b>566</b>	<b>1.001</b>

### Komposisi Pegawai Berhenti Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

(Dalam Orang)

Uraian	2023	2024	2025
Pria	373	280	590
Wanita	315	286	411
<b>Total</b>	<b>688</b>	<b>566</b>	<b>1.001</b>

### Komposisi Pegawai Berhenti Bekerja Berdasarkan Wilayah Kerja

(Dalam Orang)

Wilayah	2023	2024	2025
Jawa	464	337	557
Luar Jawa	224	229	444
<b>Total</b>	<b>688</b>	<b>566</b>	<b>1.001</b>

Perputaran pegawai terjadi karena berbagai alasan seperti masa kontrak berakhir, pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, kondisi kesehatan, serta alasan pribadi lainnya. Pengajuan pengunduran diri wajib dilakukan sekurangngnya satu bulan sebelumnya, sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Untuk memastikan konsistensi dan transparansi pelaporan, tingkat perputaran pegawai dihitung menggunakan metode standar, yaitu jumlah pegawai yang berhenti bekerja selama periode pelaporan dibagi dengan jumlah rata-rata pegawai dalam tahun berjalan. Perhitungan ini mencakup seluruh kategori pemutusan hubungan kerja, termasuk pengunduran diri, pensiun, dan meninggal dunia, serta disajikan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah kerja.

## KINERJA SOSIAL

**Tingkat Perputaran Pegawai**

(Dalam Orang)

Uraian	2023	2024	2025
Pegawai Baru (Rekrutmen)	275	609	352
Mengundurkan Diri	606	477	751
Pensiun	61	72	93
Meninggal Dunia	21	17	18
<b>Tingkat Perputaran (Turnover) Pegawai</b>	<b>3,77%</b>	<b>3,21%</b>	<b>5,09%</b>

**Turnover Pegawai Berdasarkan Usia**

(Dalam Orang)

Uraian	2023	2024	2025
21-30 tahun	212	176	238
31-40 tahun	323	268	452
41-50 tahun	96	68	152
>50 tahun	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>159</b>

**Turnover Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

(Dalam Orang)

Uraian	2023	2024	2025
Pria	373	280	590
Wanita	315	286	411

**Turnover Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja**

(Dalam Orang)

Uraian	2023	2024	2025
Jawa	266	586	557
Luar Jawa	9	23	444

**Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi [OJK F.22] [GRI 404-1, 404-2]**

Sebagai bagian dari komitmen untuk membangun talenta yang unggul, BSI terus mendorong setiap pegawai untuk mengembangkan kemampuan diri melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur dan berjenjang. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan fokus pada aspek dasar, manajerial, dan kepemimpinan, melalui metode yang beragam seperti pelatihan kelas, *mentoring*, rotasi jabatan, pembinaan kepemimpinan, serta sesi umpan balik.

Seluruh inisiatif pengembangan mengacu pada pendekatan *experience–engagement–education* sebagaimana diatur dalam SPO *Human Capital*, dengan penyempurnaan kurikulum melalui platform pembelajaran digital, *Learning Management System* (LMS), program *leadership* baru, serta integrasi modul ESG bagi seluruh pegawai sejalan dengan RAKB 2025.

- **Experience:** Pengembangan melalui pengalaman langsung, seperti penugasan kerja, rotasi dan mutasi, penugasan proyek strategis, detasering, magang internal maupun eksternal, serta *on-the-job training*.
- **Engagement:** Pembelajaran melalui interaksi personal, antara lain melalui *coaching*, *counselling*, dan *mentoring* yang diberikan oleh atasan atau fasilitator yang ditunjuk.
- **Education:** Pembelajaran secara sistematis melalui kelas tatap muka, pembelajaran mandiri, hingga pelatihan berbasis digital sesuai kurikulum pembelajaran BSI.

Sesuai dengan pendekatan tersebut, BSI menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan seperti seminar, *workshop*, *knowledge sharing*, dan kelas pengembangan kompetensi lainnya. Untuk memastikan program tepat sasaran, penetapan kebutuhan pelatihan dilakukan melalui *Training Needs Analysis*

## KINERJA SOSIAL

yang mencakup perencanaan kinerja, *review*, serta evaluasi. Mekanisme ini memastikan setiap program pengembangan mendukung pencapaian KPI pegawai dan selaras dengan rencana pengembangan karier mereka.

## Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	Jumlah Peserta (dalam orang)		
	2023	2024	2025
Senior Manager	2.369	1.534	1.077
Middle Manager	13.381	7.866	7.390
Manager	71.757	73.023	30.403
Officer	178.424	120.222	69.301
Staff	255.105	167.341	92.027
<b>Total</b>	<b>521.036</b>	<b>369.986</b>	<b>200.197</b>

## Statistik Pelatihan dan Pengembangan Pegawai BSI

Uraian	Satuan	2023	2024	2025
Program Pelatihan	Jenis	1.118	688	462
Jumlah Kepesertaan Pelatihan	Orang	521.036	369.986	200.197
Rata-rata Durasi Jam Pelatihan Per Pegawai	Jam/Pegawai	78	15	69
Biaya Pelatihan	Dalam Miliar Rupiah	90,64	141,59	141,77

## Rata-rata Jam Pelatihan Pegawai [OJK F.22]

Uraian	Jumlah Pegawai yang Memperoleh Pelatihan			Jam Pelatihan			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pegawai		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Keseluruhan</b>	<b>17.862</b>	<b>17.308</b>	<b>16.489</b>	<b>1.392.792</b>	<b>258.103</b>	<b>1.182.406</b>	<b>78</b>	<b>15</b>	<b>69</b>
<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>									
Pria	10.543	10.228	9.739	594.990	141.623	698.433	56	13,8	69,15
Wanita	7.367	7.080	6.750	797.802	116.480	483.973	108	16,4	69,45
<b>Berdasarkan Kategori Jabatan</b>									
Senior Manager	95	91	90	14.938	233	5.473	157,24	3	54
Middle Manager	446	483	528	53.475	1.939	39.464	119,90	4	73
Manager	2.235	2.343	2.456	246.884	12.771	180.665	110,46	5	71
Officer	5.798	5.760	5.653	496.120	202.423	437.064	85,57	35	74
Staff	9.288	8.631	7.765	581.375	40.737	519.740	62,59	5	64

## KINERJA SOSIAL



### Jumlah Pegawai yang Memperoleh Pelatihan

2023	17.862
2024	17.308
2025	16.540



### Jam Pelatihan

2023	1.392.792
2024	258.103
2025	1.182.406



### Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pegawai

2023	78
2024	15
2025	69

Pada tahun 2024, rata-rata jam pelatihan menunjukkan penurunan karena adanya penyesuaian metodologi pencatatan yang kini hanya memasukkan pelatihan yang memenuhi standar kategori layanan pembelajaran sesuai PTO Pengelolaan Pembelajaran. Kegiatan budaya seperti *Taujih*, PHBI, dan *podcast* internal tidak lagi dihitung sebagai pelatihan. Selain itu, jumlah pegawai pada 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sementara fokus pelatihan diarahkan pada penguatan kompetensi IT, *Operation*, dan *Sales* yang banyak dilakukan secara *offline* dengan biaya yang lebih tinggi. Berakhirnya program pelatihan massal SPPUR (2021–2023), yang sebelumnya menyumbang volume pelatihan besar, turut mempengaruhi penurunan jam pelatihan pada 2024.

Namun, memasuki tahun 2025, rata-rata jam pelatihan kembali meningkat seiring optimalisasi platform pembelajaran digital, penambahan kurikulum teknis untuk mendukung transformasi digital, serta peningkatan modul ESG yang diwajibkan bagi seluruh pegawai. Penguatan LMS, peningkatan *micro-learning*, dan penambahan pelatihan *leadership* juga turut mendorong peningkatan partisipasi.

Sebagai bagian dari pembinaan karier yang menyeluruh, BSI menyediakan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun bagi pegawai yang memasuki masa purnabakti. Program ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan formal yang memastikan pelatihan berlangsung terencana dan komprehensif dengan melibatkan pasangan pegawai. Pada 2025, pelatihan ini diikuti oleh 90 pegawai, dengan rincian peserta sebagai berikut:

Pelatihan	Jumlah Peserta (dalam orang)		
	2023	2024	2025
Pelatihan Persiapan Masa Pensiun	90	216	90

### Penilaian Kinerja Pegawai [GRI 404-3]

BSI menerapkan sistem penilaian kinerja yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan setiap pegawai memberikan kontribusi optimal terhadap strategi dan tujuan Bank. Proses penilaian ini dijalankan berdasarkan Kebijakan Sistem Penilaian Kinerja Karyawan dan dilakukan secara konsisten melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penetapan sasaran korporasi, penurunan target ke unit kerja, hingga penetapan KPI individu.

Pendekatan ini memastikan adanya kesinambungan antara tujuan perusahaan, unit kerja, dan pegawai, sehingga tercipta budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada pencapaian hasil. Melalui proses evaluasi yang rutin, BSI memastikan setiap pegawai mendapatkan arahan pengembangan dan umpan balik yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja serta *engagement* pegawai.

Siklus pengelolaan kinerja tahunan terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, perencanaan kinerja, yaitu penyusunan KPI individu. Kedua, *mid-year review*, yang dilakukan untuk menilai progres dan memberikan koreksi serta pembinaan bila diperlukan. Ketiga, evaluasi akhir tahun, yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja secara menyeluruh.

BSI juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara atasan dan pegawai selama proses pengelolaan kinerja. Melalui dialog ini, manajer dapat memberikan arahan, umpan balik, atau rekomendasi perbaikan guna membantu pegawai mencapai kinerja yang lebih baik. Seluruh tahap penilaian dilakukan melalui Sistem Informasi Pegawai (SIP) yang memudahkan penyimpanan, *monitoring*, serta pengarsipan data kinerja.

## KINERJA SOSIAL

Hasil evaluasi kinerja akhir tahun menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan pegawai pada tahun berikutnya. Pada tahun 2025, sebanyak 16.581 pegawai telah menerima *performance and career development review*, yang terdiri dari 9.798 pegawai pria dan 6.783 pegawai wanita. Dari hasil penilaian tersebut, 5.365 pegawai menerima promosi dan 3.059 pegawai memperoleh mutasi atau rotasi penugasan.

### Tinjauan Rutin Pegawai dan Jenjang Karier

Tahun	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Peninjauan	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier		
		Promosi	Mutasi/Rotasi	Demosi
2025	100% (16.581 orang pegawai)	5.365	3.059	0
2024	100% (17.234 orang pegawai)	5.150	5.699	0
2023	100% (17.909 orang pegawai)	2.435	4.869	0
2022	100% (18.581 orang pegawai)	1.144	5.690	0

### Kebebasan Berserikat [GRI 2-30, 402-1]

BSI berkomitmen menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan bagi seluruh pegawai. Dalam menjaga lingkungan kerja yang kondusif, Bank menyediakan ruang komunikasi yang terbuka agar pegawai dapat menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pendapat. Hal ini menjadi bentuk penghargaan BSI terhadap hak dasar pekerja dan prinsip keadilan sosial.

Peraturan Perusahaan (PP) yang disepakati antara manajemen dan Serikat Pekerja berlaku bagi seluruh pegawai BSI, baik mereka yang bergabung sebagai anggota serikat maupun yang tidak. Dengan demikian, seluruh pegawai memperoleh perlakuan yang sama terkait hak, kewajiban, serta syarat kerja sesuai ketentuan PKB dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

BSI menjamin kebebasan pegawai untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sesuai koridor hukum. Bank telah membentuk Serikat Pekerja Bank Syariah Indonesia sebagai wadah resmi bagi pegawai. Hingga akhir 2025, jumlah anggota Serikat Pekerja mencapai 8.732 orang atau 52,66% dari total pegawai.

### Jumlah Peserta Serikat Pekerja

Serikat Pekerja	Jumlah Pegawai Per Desember 2025	Jumlah Anggota SP	Persentase
Anggota Serikat Pekerja BSI	16.581	8.732	52,66%

Untuk menjaga keharmonisan hubungan kerja, BSI memiliki mekanisme penyampaian keluhan sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang menjadi pedoman dalam proses penyampaian, penyelesaian, dan musyawarah atas perselisihan hubungan industrial. Mekanisme ini memastikan setiap keluhan pegawai dapat ditangani secara adil, transparan, dan konstruktif. Berikut adalah mekanisme penanganan keluhan pegawai:

## KINERJA SOSIAL



Untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif, BSI menerapkan ketentuan pemberitahuan perubahan jam operasional sesuai dengan SPO Cabang PT Bank Syariah Indonesia. Setiap penyesuaian jadwal operasional wajib diinformasikan kepada kantor cabang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diberlakukan, dan kepada seluruh karyawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya agar proses penyesuaian dapat dilakukan dengan baik.

Kewajiban pemberitahuan ini juga tercantum dalam PKB Serikat Pekerja BSI, yang mensyaratkan manajemen untuk melakukan komunikasi transparan serta melibatkan perwakilan pegawai melalui proses konsultasi dan negosiasi sebelum keputusan akhir ditetapkan. Dengan demikian, seluruh pegawai mendapatkan kepastian mengenai mekanisme perubahan operasional serta perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan mereka.

### Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19][GRI 409-1]

BSI senantiasa memperkuat sistem pencegahan pekerja anak dan kerja paksa melalui kebijakan ketenagakerjaan yang semakin terstruktur dan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok. BSI memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen hanya menerima kandidat berusia minimum 24 (dua puluh empat) tahun, sesuai dengan standar Perseroan, serta menerapkan ketentuan jam kerja wajar 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan.

Penguatan aspek keberlanjutan juga dilakukan pada proses pengadaan melalui verifikasi lebih mendalam terhadap pemasok. Setiap rekanan wajib menyerahkan dokumen kepatuhan yang menegaskan tidak adanya tenaga kerja di bawah umur ataupun praktik kerja paksa. Komitmen ini diperiksa secara berkala melalui mekanisme evaluasi pemasok, sejalan dengan kebijakan pengadaan berkelanjutan BSI.

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak terdapat unit kerja maupun pemasok yang dikategorikan memiliki risiko material terkait insiden pekerja anak dan kerja paksa. BSI

## KINERJA SOSIAL

juga tidak menemukan adanya dampak sosial negatif sepanjang rantai pasok yang terkait dengan isu tersebut. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan serta konsistensi penerapan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab di seluruh lingkungan Bank.

### Cuti Melahirkan [GRI 401-3]

BSI menerapkan kebijakan cuti melahirkan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan keluarga dan kesehatan reproduksi pegawai. Kebijakan cuti melahirkan dalam PTO Cuti dan Izin BSI diselaraskan kembali dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang menekankan perlindungan optimal bagi ibu dan anak pada masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan. Melalui kebijakan ini, BSI memastikan pegawai wanita memperoleh hak cuti melahirkan 90 hari serta akses perpanjangan cuti apabila memenuhi kondisi yang ditentukan undang-undang.

Penguatan kebijakan juga mencakup dukungan bagi pegawai pria sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. BSI memberikan cuti pendampingan melahirkan selama 2 (dua) hari kerja apabila melahirkan di dalam kota yang sama dengan penempatan terakhir pegawai dan 4 (empat) hari kerja apabila melahirkan di luar kota, yang jarak tempuhnya melebihi 80km dari kota penempatan terakhir pegawai. Cuna memastikan peran ayah dalam proses persalinan dan pemulihan keluarga dapat dijalankan dengan baik. Sepanjang tahun 2025, 317 pegawai wanita menggunakan hak cuti melahirkan, sementara 295 pegawai pria mengambil cuti pendampingan sebagai wujud keterlibatan aktif dalam masa kelahiran anak.

Uraian	2023		2024		2025	
	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria
Jumlah pegawai yang berhak cuti	5.816	9.438	5.719	9.206	6.665	9.578
Jumlah pegawai yang mengambil hak cuti	372	398	391	343	317	295
Jumlah pegawai yang kembali setelah cuti	368	398	388	343	317	295
Jumlah pegawai yang tetap bekerja hingga 12 bulan setelah mengambil cuti	343	398	373	343	317	295
<i>Return to work rate</i>	98,92%	100,00%	99,23%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Retention rate</i>	93,21%	100,00%	96,13%	100,00%	100,00%	100,00%

### Sistem Penetapan Remunerasi 3P

*Pay for Position* pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya.

*Pay for Person* pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

*Pay for Performance* pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya

### Sistem Remunerasi, Kompensasi, dan Manfaat Pegawai [OJK F.20] [GRI 202-1, 401-2, 405-2]

BSI berkomitmen menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, transparan, dan selaras dengan prinsip kesetaraan. Kebijakan remunerasi dirancang untuk memberikan penghargaan finansial maupun non-finansial yang proporsional terhadap kontribusi pegawai, sekaligus mempertimbangkan kemampuan Bank dan kondisi pasar tenaga kerja terkini. Penyesuaian remunerasi dilakukan secara berkala untuk memastikan daya saing BSI sebagai institusi perbankan syariah nasional.

Dalam pelaksanaannya, BSI mengacu/mengambil nominal tertinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

## KINERJA SOSIAL

BSI juga melakukan analisis berkala terhadap perbandingan gaji dasar dan remunerasi antara pegawai perempuan dan laki-laki di setiap kelompok jabatan. Rasio remunerasi pegawai perempuan terhadap laki-laki adalah 100% pada setiap kelompok jabatan, karena struktur kompensasi ditetapkan berdasarkan jabatan, tanggung jawab, dan kinerja tanpa perbedaan gender. Selain itu, BSI menyediakan berbagai manfaat kerja tanpa perbedaan, termasuk jaminan kesehatan, program pensiun, cuti, dan fasilitas kesejahteraan lainnya.

Untuk tenaga alih daya yang mendukung operasional Bank, BSI mewajibkan seluruh penyedia tenaga kerja untuk membayar upah di atas UMP/UMK, menyediakan manfaat kerja sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjamin hak-hak tenaga kerja *outsourcing* secara setara. Ketentuan ini ditegakkan melalui perjanjian kerja sama dan proses pengawasan kepatuhan yang dilakukan secara berkala.

Dalam memastikan kesetaraan dan keadilan remunerasi, BSI secara berkala melakukan *benchmarking* dan survei gaji industri dengan memanfaatkan referensi pasar dan konsultan sumber daya manusia. Penetapan remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan grade jabatan, tanggung jawab pekerjaan, kinerja, serta standar biaya hidup dan ketentuan UMP/UMK di masing-masing wilayah operasional.

BSI memastikan kebijakan remunerasi dijalankan selaras dengan ketentuan regulator, termasuk peraturan OJK terkait pelaporan keberlanjutan dan aspek kesetaraan gender, sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil dan transparan.

Selain itu, BSI membangun budaya organisasi yang inklusif dengan menolak segala bentuk bias, termasuk bias gender, dalam pengelolaan remunerasi, kompensasi, dan manfaat pegawai. Upaya ini diperkuat melalui berbagai inisiatif internal serta kolaborasi dengan Danantara dalam mendorong kesetaraan gender dan lingkungan kerja yang saling menghormati dan menghargai.

Perseroan memastikan bahwa imbal jasa pegawai tingkat terendah pada seluruh provinsi dalam cakupan pelaporan telah memenuhi atau

melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang berlaku. Secara umum, imbal jasa pegawai tingkat terendah telah memiliki ratio yang cukup tinggi, yaitu 178% dari UMP terendah. Adapun imbal jasa pegawai pada daerah kota/kabupaten yang memiliki upah minimum lebih tinggi maka sesuai ketentuan UMP/UMK yang berlaku.

Perseroan juga menerapkan kebijakan remunerasi yang setara bagi pegawai tingkat terendah tanpa membedakan gender. Hal ini tercermin dari rasio imbal jasa pegawai tingkat terendah terhadap UMP/UMK yang menunjukkan angka yang sama untuk pegawai laki-laki dan perempuan di seluruh provinsi dalam cakupan pelaporan. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan imbal jasa entry level antara laki-laki dan perempuan pada lokasi operasional yang dilaporkan, dengan rasio 100%. Perhitungan ini menggunakan UMP/UMK 2025 sebagai acuan minimum di setiap provinsi dan dihitung dengan membandingkan imbal jasa pegawai tingkat terendah terhadap UMP/UMK yang berlaku pada lokasi tersebut.

Sebagai kelanjutan dari penerapan sistem remunerasi yang kompetitif, BSI memperkuat strategi penghargaan karyawan pada tahun 2025 dengan pendekatan total *reward* yang mencakup aspek finansial, non-finansial, serta dukungan kesejahteraan jangka panjang. Struktur remunerasi dirancang untuk memotivasi pegawai dalam memberikan kinerja terbaik, mendukung pengembangan kompetensi, serta memastikan keberlangsungan talenta yang sejalan dengan transformasi digital dan agenda Keuangan Berkelanjutan yang diusung Bank. Kebijakan ini juga menjadi sarana strategis bagi BSI untuk mempertahankan pegawai berkinerja tinggi serta menarik talenta terbaik di industri perbankan syariah.

Dalam pelaksanaannya, BSI menerapkan prinsip *fairness* dan *competitiveness*, dengan proses penetapan remunerasi yang berbasis kinerja, risiko, dan kebutuhan organisasi. Bank secara konsisten mengikuti Survei Gaji Tahunan oleh lembaga independen untuk menjaga daya saing struktur remunerasi. Seluruh keputusan remunerasi



dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, suku, agama, kondisi fisik, atau latar belakang lainnya, melainkan berdasarkan pencapaian kinerja, masa kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI). Pendekatan ini memastikan setiap pegawai memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh kompensasi dan *benefit*.

Pemberian *reward* mencakup bonus tahunan, fasilitas kesehatan, cuti, pembiayaan pegawai, dan manfaat kesejahteraan lainnya yang disesuaikan dengan kinerja pegawai, unit kerja, dan Bank secara keseluruhan. Di samping itu, BSI menyediakan apresiasi non-finansial seperti program Umrah bagi pegawai terbaik, program *recognition* berbasis inovasi, bantuan kedukaan dan musibah, serta Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) yang semakin diperluas pada tahun 2025. Pendekatan ini sejalan dengan budaya kerja berhasanah dan penguatan *employee engagement* di seluruh lingkungan kerja.

Sebagai bagian dari upaya retensi jangka panjang, BSI melanjutkan implementasi *Retention Program* yang diberikan kepada pegawai tetap terpilih. Sementara itu, perbedaan manfaat antara pegawai tetap dan tenaga alih daya tetap berlaku sesuai regulasi, di mana pegawai tetap menerima manfaat penuh seperti BPJS, asuransi tambahan, program pensiun, dan cuti keluarga. BSI memastikan penyedia tenaga alih daya memenuhi ketentuan upah minimum, hak ketenagakerjaan, serta standar perlindungan sesuai peraturan yang berlaku.

## KINERJA SOSIAL

Bentuk Manfaat	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak
Gaji pokok	√	√
Asuransi Jiwa/BPJS Kesehatan	√	√
Tunjangan Kesehatan, termasuk tunjangan kelahiran	√	√
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Disabilitas – Termasuk dalam fasilitas BP Jamsostek	√	√
Jaminan Pensiun (JP) – Termasuk dalam fasilitas BP Jamsostek	√	√
Kesempatan Memiliki Saham	√	-
Tunjangan Hari Raya	√	√
Tunjangan Cuti Tahunan	√	√

### Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Lainnya [GRI 201-3]

Sebagai bentuk komitmen dalam memastikan keberlanjutan kesejahteraan pegawai setelah masa kerja berakhir, BSI menyelenggarakan berbagai program pensiun yang dirumuskan sesuai regulasi yang berlaku. Program-program ini bertujuan memberikan perlindungan finansial yang memadai bagi pegawai ketika memasuki masa purna bakti. Salah satunya adalah Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan program iuran pasti, yang diperuntukkan bagi pegawai tetap melalui skema iuran bersama antara pegawai dan Bank, dilengkapi dengan manfaat pendukung lainnya.

Selain DPLK, BSI juga menjalankan Program Jaminan Hari Tua (JHT) melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Pensiun (BPJS Pensiun). Formulasi kontribusi tetap sama: pegawai menyumbang 5% dan perusahaan 10% untuk Program Iuran Pasti, sementara kontribusi JHT 2% pegawai dan 3,7% perusahaan, dan Jaminan Pensiun (BPJS Pensiun) dengan porsi 1% pegawai dan 2% perusahaan. Pada 2025, mekanisme administrasi iuran semakin terintegrasi dengan sistem *Human Capital Information System* (HCIS)

dan website DPLK, sehingga pencatatan iuran, investasi/pengembangan, status kepesertaan, dan simulasi manfaat dapat diakses dengan lebih transparan oleh pegawai.

Pada tahun 2025, BSI juga memperkuat proses aktuarial imbalan kerja dengan melakukan penilaian menggunakan metode PSAK 219 pada tanggal 31 Desember 2025. Hasilnya menunjukkan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp404,347 miliar dan aset program sebesar Rp137,497 miliar dengan tingkat pendanaan 100% dalam pasar uang syariah. Dalam program iuran pasti yang dikelola oleh DPLK terpilih dengan jumlah iuran sebesar Rp200,343 milyar. Seluruh kewajiban pensiun disajikan secara akurat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai standar akuntansi terbaru serta kebijakan risiko ketenagakerjaan yang diperbarui di 2025.

Sepanjang 2025, BSI juga melakukan penyelarasan data kepesertaan pensiun untuk memastikan seluruh pegawai tetap terdaftar dalam skema yang sesuai dengan status kepegawaian dan kebijakan Bank. Rincian jumlah pegawai dalam masing-masing program pensiun disajikan pada tabel berikut:

No	Uraian	2023	2024	2025
1.	Program Pensiun Manfaat Pasti (PPUKP DPLK BRI atau Pooled Fund)	17.151	16.645	16.293
2.	Program Pensiun Iuran Pasti	17.871	17.408	17.074
3.	Program Jaminan Hari Tua	17.855	17.271	16.609
4.	Program Jaminan Pensiun	17.855	17.271	16.609

## Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman

[OJK F.21]

BSI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas sebagai bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan. Sepanjang tahun 2025, Bank terus memperkuat implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui pemantauan rutin, penyempurnaan prosedur keselamatan di seluruh unit kerja, serta penilaian berkala terhadap kesiapan fasilitas kerja untuk mencapai target *zero accident*. Upaya ini tidak hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga kesehatan psikis dan mental pegawai melalui program dukungan mental *health* serta kampanye internal terkait kesejahteraan.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang komprehensif, BSI menyediakan fasilitas asuransi kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta menyempurnakan integrasi data perlindungan pegawai ke dalam *Human Capital Information System* (HCIS). Dengan demikian, *monitoring* hak dan manfaat pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien.

Selain itu, BSI memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, harmonis, dan bebas dari tindakan tidak terpuji melalui penerapan *Respectful Workplace Policy* (RWP). Kebijakan ini secara resmi diterbitkan pada Januari 2026 sebagai penguatan komitmen Perseroan dalam membangun budaya kerja yang saling menghormati dan berintegritas. RWP berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah, seluruh pegawai, hingga mitra kerja eksternal, serta menjadi pedoman dalam mencegah pelecehan, kekerasan, diskriminasi, maupun perilaku tidak hormat lainnya.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melakukan berbagai persiapan implementasi kebijakan tersebut, termasuk penyusunan kerangka kebijakan, penguatan mekanisme pengendalian internal, serta pengembangan program sosialisasi yang selanjutnya dilaksanakan setelah kebijakan diterbitkan.

Dengan rangkaian inisiatif tersebut, BSI memastikan terciptanya ruang kerja yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan seluruh insan BSI.

## Kesehatan dan Keselamatan Kerja

[GRI 403-1, 403-2, 403-7, 403-8]

BSI terus memperkuat implementasi K3 sebagai bagian dari komitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas pegawai. Pada 2025, seluruh penerapan K3 dijalankan sesuai ketentuan nasional, termasuk UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, serta UU Keselamatan Kerja, dan diintegrasikan ke dalam SOP Human Capital dan Peraturan Perusahaan yang diperbarui secara berkala. Seluruh pegawai, kontraktor, dan pihak terkait yang beraktivitas di lingkungan BSI diwajibkan mematuhi pedoman tersebut sebagai bentuk tata kelola operasional yang baik.

Walaupun sistem K3 BSI belum mengacu pada standar internasional seperti ISO 45001, proses inti K3 telah diterapkan secara konsisten, seperti identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian risiko yang relevan dengan operasional perbankan. Untuk meningkatkan efektivitas penerapannya, pada 2025 BSI memperluas mekanisme *monitoring* melalui integrasi data risiko K3 ke dalam sistem internal sehingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan komprehensif.

Sebagai bagian dari penguatan pengelolaan risiko, BSI melaksanakan *Risk and Threat Assessment* (RTA) di seluruh jaringan kantor. RTA mencakup penilaian kesiapan fasilitas gedung, keamanan fisik dan digital, infrastruktur data center, serta kondisi lingkungan kerja sesuai profil risiko masing-masing lokasi. Temuan RTA digunakan untuk memperbarui SOP, meningkatkan fasilitas keselamatan, dan memastikan tindak lanjut atas langkah mitigasi di seluruh unit kerja.

Selain aspek pencegahan, BSI memperkuat kesiapsiagaan darurat melalui pelatihan dan simulasi evakuasi, inspeksi fasilitas, serta peningkatan sarana keselamatan. Pegawai memiliki hak menghentikan pekerjaan apabila menghadapi situasi yang tidak aman tanpa risiko sanksi, serta dapat melaporkan kondisi berbahaya melalui kanal komunikasi internal yang dilindungi dari tindakan pembalasan. Setiap insiden yang terjadi ditangani melalui investigasi formal berbasis *root cause analysis*, kemudian diikuti penetapan tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan sesuai prinsip *hierarchy of controls*.

## KINERJA SOSIAL

Dalam aspek kesehatan, BSI menyediakan perlindungan komprehensif melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi tambahan, serta program kesehatan fisik dan mental yang terintegrasi dalam program internal Bank. Sosialisasi terkait praktik kerja aman dan kesehatan kerja dilaksanakan secara berkala untuk memperkuat budaya K3 di seluruh organisasi.

BSI juga mengelola risiko K3 yang muncul dari hubungan bisnis. Seluruh mitra pengelola gedung, penyedia jasa keamanan, petugas kebersihan, teknisi, layanan *cash-in-transit*, dan penyedia fasilitas data center diwajibkan memenuhi ketentuan K3 yang tertuang dalam perjanjian kerja, termasuk penggunaan APD, sertifikasi kompetensi teknis, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan gedung. BSI melakukan pemantauan melalui induksi K3, inspeksi lapangan, serta mekanisme pelaporan kondisi berbahaya; pekerjaan akan dihentikan apabila ditemukan ketidaksesuaian hingga tindakan perbaikan dilakukan.

Pada 2025, seluruh inisiatif K3 BSI menjangkau 100% pegawai, 100% pekerja pihak ketiga di lokasi kerja, serta seluruh lokasi operasional signifikan. Dengan kerangka ini, BSI memastikan bahwa sistem K3 berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

	Faktor Lingkungan & Prosedur	Faktor Manusia & Komunikasi
<b>Keselamatan</b>	<p>Program RTA memastikan fasilitas seluruh kantor BSI memenuhi standar K3 sesuai Standar Prosedur Operasional Human Capital, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</li> <li>• <i>Fire hydrant dan fire pump</i>.</li> <li>• Sistem pengendali asap.</li> <li>• Sistem alarm.</li> <li>• <i>Water sprinkle</i>.</li> <li>• Petunjuk jalur evakuasi.</li> <li>• Pembuatan ERP (<i>Emergency Response Plan</i>).</li> <li>• Penyediaan SOP (Standar Operasional Prosedur) tanggap darurat.</li> <li>• Memastikan Sistem proteksi gedung berfungsi secara Otomatis dan Terintegrasi saat <i>General Alarm/Fire Drill</i>.</li> <li>• Memastikan Sarana evakuasi sudah dilengkapi dengan tanda penunjukan dan sudah memenuhi standar operasional Gedung saat terjadi Gempa bumi, Kebakaran dan Ancaman BOM.</li> </ul>	<p>Secara rutin melaksanakan komunikasi, kampanye program keselamatan, dan sosialisasi K3 rutin untuk seluruh pegawai BSI terkait prosedur K3 dan prosedur evakuasi jika terjadi kondisi kedaruratan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fire drill</i>.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman penggunaan APAR dan APAB dan <i>first response</i> saat terjadi kebakaran.</li> <li>• Penanganan gempa bumi.</li> <li>• Penanganan kondisi ancaman terorisme.</li> <li>• Penunjukan <i>Captain Floor</i> per lantai.</li> <li>• Pembentukan ERT (<i>Emergency Response Team</i>).</li> <li>• Pembuatan <i>WhatsApp Group</i> untuk sarana komunikasi.</li> <li>• Mengadakan pelatihan tanggap darurat.</li> <li>• Mengadakan <i>training</i> penggunaan APAR.</li> <li>• Melakukan simulasi keadaan darurat.</li> </ul>
<b>Kesehatan</b>	<p>Memastikan kondisi seluruh kantor BSI nyaman dan sehat bagi pegawai dan seluruh pengunjung dan memastikan Standar Prosedur Operasional untuk <i>maintenance</i> lingkungan kerja yang sehat dimiliki oleh kantor-kantor BSI yang mencakup, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fogging</i> berkala</li> <li>• Memasang UV-C Filter udara</li> <li>• Memastikan Sirkulasi Tata Udara Berfungsi dengan baik, termasuk SAG dan RAG Program</li> </ul> <p><i>Employee Wellbeing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Psychological Wellbeing Program</i></li> <li>• <i>Financial Wellbeing Program</i></li> <li>• <i>Physical Wellbeing Program</i></li> <li>• <i>Workplace Wellbeing Program</i></li> </ul>	<p>Melaksanakan berbagai kampanye kesehatan dan <i>medical check up</i> rutin bagi seluruh pegawai BSI, antara lain yang berfokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan paru-paru dan saluran pernapasan</li> <li>• Mencegah penyakit jantung dan hipertensi</li> <li>• Kesehatan gigi</li> <li>• Masalah pencernaan, seperti GERD, <i>maag</i>, batu empedu dan diare</li> <li>• Mencegah komplikasi diabetes gaya hidup sehat</li> <li>• Kesehatan mata</li> <li>• <i>Low back pain</i></li> <li>• Menjaga kesehatan di bulan Ramadan</li> </ul>

Faktor Lingkungan & Prosedur	Faktor Manusia & Komunikasi
<p>Untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia terbaik, BSI secara continue melaksanakan berbagai program untuk menciptakan pengalaman pegawai yang bermakna di BSI seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Psychological wellbeing</i> (contohnya: konseling kesehatan mental dengan psikolog, klub-klub pegawai yang ingin menyalurkan hobi, Forum LKS Bipartit)</li> <li>• <i>Physical wellbeing</i> (contohnya: klinik kesehatan, wellness atau program edukasi kesehatan, dan layanan <i>medical check up in house</i>)</li> <li>• <i>Financial Wellbeing</i> (contohnya: program edukasi perencanaan keuangan, dan paket remunerasi dan <i>benefit</i> yang layak dan kompetitif bagi pegawai)</li> <li>• <i>Workplace Wellbeing</i> (contohnya: tersedianya fasilitas ruang laktasi, <i>day care</i>, serta <i>fitness center</i>)</li> </ul>	<p>Menyelenggarakan sosialisasi dan komunikasi kesehatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Healthy Talk</i></li> <li>• <i>Let's Walk &amp; Be Health</i></li> <li>• <i>News Letter dan Infosehat</i></li> </ul>

### Pelibatan Pegawai dalam Sistem K3

[GRI 403-4, 403-5]

BSI memperkuat keterlibatan pegawai dalam penerapan K3 melalui mekanisme konsultasi rutin, rapat evaluasi, serta kanal pelaporan seperti *Employee Care, Logic*, dan media internal. Pegawai didorong untuk memberikan masukan dan melaporkan kondisi berbahaya sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Untuk memastikan kesiapsiagaan, BSI menugaskan *floor warden* di setiap lantai yang telah memperoleh pelatihan K3, termasuk simulasi tanggap darurat, identifikasi bahaya, penggunaan APAR, dan prosedur evakuasi. Selain itu, seluruh pegawai mengikuti pelatihan K3 dasar yang mencakup pemahaman risiko kerja, pelaporan kondisi tidak aman, dan prosedur darurat.

Melalui partisipasi aktif dan peningkatan kompetensi ini, BSI memastikan seluruh pegawai berperan langsung dalam menjaga keselamatan dan meningkatkan kinerja K3 di seluruh unit kerja.

### Program Kesehatan BSI [GRI 403-3, 403-6]

Dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan pegawai, BSI menyediakan fasilitas asuransi kesehatan yang mencakup pegawai, pasangan, serta hingga tiga orang anak. Selain perlindungan medis, BSI menjalankan *Wellness Program*, yaitu rangkaian inisiatif untuk membangun gaya hidup sehat melalui edukasi, layanan kesehatan preventif, dan aktivitas fisik yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pegawai.

*Wellness Program* mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu:

- *Wellness Fair*  
Dilaksanakan di Region Office dan Kantor Pusat, berisi rangkaian kegiatan seperti:
  1. Sosialisasi manfaat asuransi kesehatan
  2. Pemeriksaan kesehatan (Mini MCU, fisioterapi, pemeriksaan mata, QRA, konsultasi gizi)
  3. *Booth* makanan dan minuman sehat
  4. *Dokter Corner*
  5. Kegiatan olahraga seperti *Zumba* atau aerobik
- *MCU In-House*  
Bank bekerja sama dengan rumah sakit mitra untuk menyediakan *Medical Check Up* di kantor pusat dan jaringan agar pegawai lebih mudah mengakses layanan pemeriksaan kesehatan.
- *Let's Walk & Be Healthy*  
Program kompetisi jalan kaki berbasis virtual yang bertujuan mendorong kebiasaan hidup aktif dan meningkatkan kebugaran.
- *Health Talk*  
Edukasi kesehatan yang dilakukan secara *hybrid* bersama dokter spesialis dengan berbagai tema, antara lain: kesehatan di bulan Ramadhan, hidup produktif, perawatan kulit, serta menjaga kesehatan di musim pancaroba.
- *Newsletter & InfoSehat*  
E-publikasi yang berisi *tips* kesehatan, konsultasi dokter, informasi *provider* baru, serta rangkuman kegiatan *Wellness Program*.

## KINERJA SOSIAL

BSI juga menyediakan BSI *Medical Unit* di Lantai 10 Gedung The Tower sebagai layanan kesehatan tingkat pertama bagi seluruh pegawai. Unit ini berfungsi untuk menangani keluhan kesehatan umum dan memberikan akses kuratif secara cepat. Di samping fasilitas tersebut, BSI memiliki BSI *Club* yang rutin menyelenggarakan beragam aktivitas olahraga guna membangun budaya hidup sehat dan memperkuat kebersamaan pegawai.

Dalam konteks kesehatan kerja, BSI menyediakan layanan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko kesehatan di lingkungan kerja melalui pemantauan kesehatan berkala, penilaian kondisi kerja, serta tindak lanjut jika ditemukan potensi bahaya. Seluruh layanan diberikan oleh tenaga medis kompeten dan dilaksanakan sesuai prosedur internal serta regulasi nasional.

BSI memastikan semua pegawai memiliki akses setara terhadap layanan kesehatan, termasuk fasilitas pelaporan kondisi berisiko tanpa ancaman pembalasan, sehingga aspek kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan mendukung kesejahteraan pegawai secara menyeluruh.

### Pelatihan K3 [GRI 403-5]

Sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, BSI secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pelatihan K3 bagi pegawai dan pihak terkait. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan respons darurat, serta pemahaman risiko di lingkungan kerja.

Rangkaian pelatihan K3 yang dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi:

- Pembekalan dan Sertifikasi *Business Continuity Management Contingency Plan* (BCMCP) untuk memastikan setiap unit kerja mampu merespons insiden dan mempertahankan kelangsungan operasional.
- *Wellness Program* sebagai edukasi pencegahan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup pegawai.
- Sertifikasi *Disaster Leadership Management*, yang membekali pegawai dengan kompetensi kepemimpinan dalam menghadapi situasi darurat.
- Pelatihan Petugas Keamanan, yang mencakup:
  - » Penanganan konflik,
  - » Prosedur pengamanan kantor,
  - » Penanganan bencana gempa bumi,

- » Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan,
- » Respons terhadap aksi atau situasi mengancam lainnya.

Pelatihan tersebut menjadi bagian penting dari sistem K3 BSI untuk memastikan seluruh pegawai memahami tanggung jawab keselamatan dan mampu bertindak cepat dalam kondisi darurat.

### Kinerja K3 [GRI 403-9, 403-10]

Sepanjang tahun 2025, BSI berhasil mempertahankan lingkungan kerja yang aman melalui implementasi beragam program K3 yang konsisten dan terstruktur. Hasilnya, tidak terdapat insiden kecelakaan kerja maupun fatality yang melibatkan pegawai maupun pihak eksternal seperti kontraktor, subkontraktor, dan mitra kerja. BSI juga tidak menerima laporan penyakit akibat kerja selama periode pelaporan.

Sejalan dengan peningkatan kejadian kecelakaan kerja pada tahun 2025, Perseroan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mengidentifikasi akar penyebab dan memperkuat pengendalian risiko. Perseroan meningkatkan pelatihan dan sosialisasi K3, memperketat pengawasan terhadap aktivitas berisiko, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan investigasi insiden guna mencegah kejadian serupa.

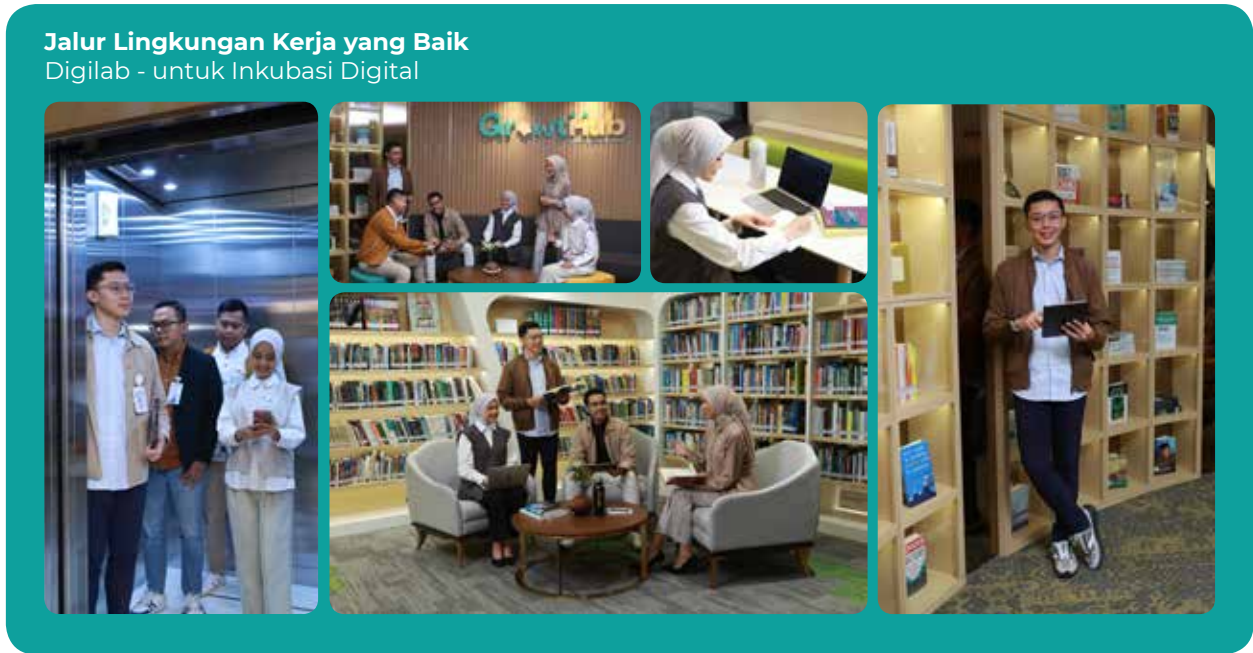
Selain itu, Perseroan meningkatkan inspeksi rutin dan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan penerapan standar keselamatan secara konsisten. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, melindungi kesejahteraan pegawai, dan menurunkan tingkat kecelakaan kerja secara berkelanjutan.

## KINERJA SOSIAL

Rincian tingkat kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

Tahun	Tingkat Kecelakaan Kerja			
	Ringan	Sedang	Berat	Fatal/Kematian
2025	Nihil	23	Nihil	1
2024	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2023	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2022	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Menciptakan Tujuan bagi Karyawan - BSI lebih dari sekadar Lembaga Keuangan tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial.



## KINERJA SOSIAL

BSI menciptakan *work life balance* bagi pegawai

## ASPEK MASYARAKAT

## Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar

[OJK F.23] [GRI 203-1, 413-1, 413-2, 411-1]

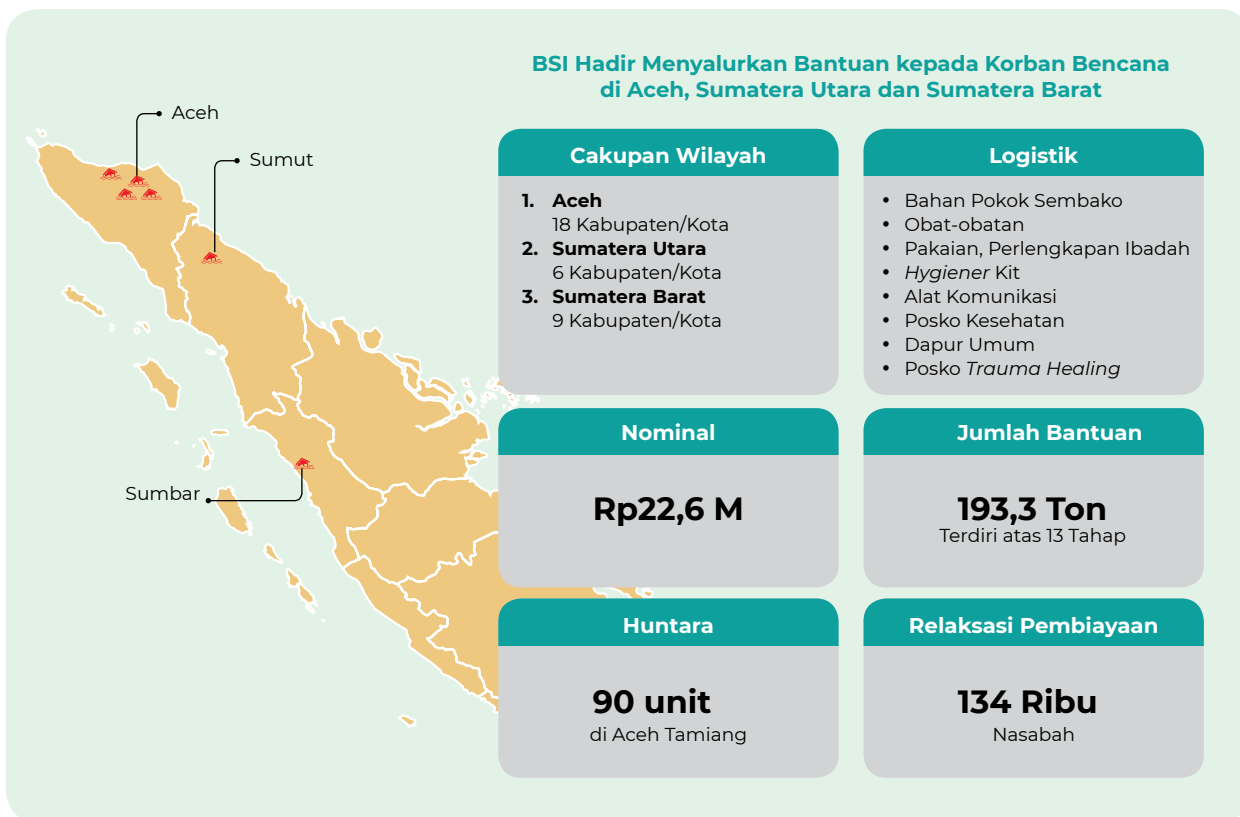
Pada tahun 2025, BSI semakin memperkuat kontribusinya terhadap masyarakat sekitar melalui rangkaian program pemberdayaan dan pembangunan sosial yang terintegrasi. Selain membuka akses kesempatan kerja, BSI menjalankan program yang mencakup pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta dukungan terhadap ekosistem sosial di wilayah operasional. Program Desa BSI, perluasan Sentra UMKM BSI, dan inkubasi UMKM binaan menjadi bagian dari upaya BSI untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan inklusivitas layanan keuangan syariah.

BSI juga memberikan dukungan infrastruktur sosial yang semakin luas pada 2025, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan, pembangunan sentra UMKM baru, penyediaan sarana air minum bersih melalui *Water Station* RO, serta dukungan infrastruktur dasar di desa-desa binaan. Program ini dilaksanakan secara pro bono sesuai dengan kebijakan program sosial BSI dan berkontribusi pada peningkatan akses layanan dasar, perluasan peluang ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Di bidang lingkungan, BSI turut memperkuat dampak positif melalui penanaman pohon produktif, program Sedekah Pohon, penyebaran

RVM PlasticPay di ratusan titik, serta kampanye *green lifestyle* yang mendukung pengurangan sampah plastik dan edukasi lingkungan. Seluruh inisiatif ini tidak hanya mendukung masyarakat tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan di area operasional BSI.

Sampai dengan akhir tahun 2025, BSI tidak mencatat adanya insiden yang berpotensi melanggar hak masyarakat adat atau menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap komunitas lokal. Dengan demikian, tidak ada proses remediasi, investigasi, maupun tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas operasional BSI berjalan sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan penghormatan penuh terhadap hak-hak masyarakat.



Sebagai wujud kepedulian sosial dan respons tanggap bencana, BSI hadir menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Bantuan disalurkan secara terstruktur mencakup wilayah terdampak di 33 kabupaten/kota, dengan total nilai bantuan mencapai Rp22,6 miliar dan volume logistik sebesar 193,3 ton yang terdiri atas bahan pokok, obat-obatan, perlengkapan ibadah, hygiene kit, alat komunikasi, hingga layanan posko kesehatan. Selain bantuan darurat, BSI turut mendukung pemulihan pascabencana melalui pembangunan 90 unit hunian sementara (huntara) serta relaksasi pembiayaan bagi 134 ribu nasabah terdampak. Inisiatif ini mencerminkan komitmen BSI dalam memberikan dampak sosial yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

**Kontribusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**  
[OJK F.25] [GRI 203-2, 413-1, 413-2]

Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI menjalankan tanggung jawab sosialnya secara menyeluruh melalui berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan para pemangku kepentingan.

Seluruh program dirancang dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Maqashid Syariah serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, BSI secara aktif melibatkan masyarakat di seluruh wilayah operasional melalui program-program berbasis kebutuhan lokal, antara lain Program Desa BSI dan Sentra UMKM BSI. Program-program tersebut disusun berdasarkan pemetaan dan keterlibatan pemangku kepentingan, sehingga intervensi sosial dan ekonomi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Meskipun kegiatan operasional perbankan tidak menimbulkan dampak fisik langsung terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar, BSI tetap melakukan evaluasi berkala terhadap kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang. Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang tahun 2025, tidak ditemukan dampak aktual maupun potensi dampak signifikan terhadap komunitas lokal.

Pada aspek ekonomi, BSI terus memperkuat kontribusinya melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan komunitas yang memberikan dampak ekonomi tidak langsung

## KINERJA SOSIAL



bagi masyarakat. Program Desa BSI dan Sentra UMKM BSI mendorong peningkatan pendapatan, perluasan akses pasar, serta penguatan literasi keuangan syariah. Selain itu, melalui kolaborasi dengan BSI Maslahat, BSI turut melaksanakan berbagai inisiatif pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Seluruh pelaksanaan program sosial kemasyarakatan BSI dilakukan bersama Yayasan Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) sebagai mitra strategis resmi. BSI Maslahat bertanggung jawab atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara profesional, transparan, dan akuntabel. Program-program tersebut menjangkau berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk fakir, miskin, muaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran zakat dilaksanakan melalui kerja sama dengan BAZNAS RI, termasuk melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS BSI sejak tahun 2021 untuk memperkuat tata kelola zakat internal Bank.

Komitmen BSI dalam pelaksanaan program sosial masyarakat memastikan bahwa setiap dana yang dikelola memberikan manfaat yang optimal dan tepat sasaran. Selain mendukung pemberdayaan ekonomi, berbagai inisiatif juga mencakup peningkatan sarana pendidikan, pembangunan fasilitas pendukung UMKM, penyediaan akses air bersih melalui Water Station RO, serta partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan program sosial BSI berlandaskan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku,

antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ketentuan internal Bank, serta Fatwa DSN-MUI No. 123/2018. Secara keseluruhan, tujuan utama pelaksanaan program sosial BSI adalah membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, memperkuat dukungan publik, memberdayakan UMKM, serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BSI juga menggunakan sejumlah tolok ukur untuk menilai kontribusi program sosial terhadap peningkatan akses layanan dasar, perluasan peluang ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan cakupan penerima manfaat, kesesuaian program dengan kebutuhan komunitas setempat, jenis dukungan yang diberikan, serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Selain itu, BSI turut memperhatikan indikator seperti jumlah UMKM atau kelompok masyarakat yang didampingi, pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan, peningkatan akses terhadap fasilitas atau layanan dasar, serta potensi peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi efektivitas program.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak dan distribusi program sosial sepanjang tahun 2025, berikut disajikan realisasi penyaluran dana sosial serta distribusi dana ZISWAF berdasarkan program penyaluran:

### Realisasi Penyaluran Implementasi Program Sosial Perusahaan

Uraian	2023	2024	2025
Penyaluran Implementasi Program Sosial Perusahaan	268.617.144.447	385.375.965.605	400.035.566.113

Pilar	Komposisi (%)	Pencairan (Rp Miliar)	Jumlah Orang yang Terdampak ('000)
Pilar Ekonomi	6,6%	26,4	591,1
Pilar Pendidikan	28,7%	114,8	23
Pilar Kemanusiaan	37,2%	148,8	599,1
Pilar Kesehatan	3%	11,8	27,3
Pilar Dakwah dan Advokasi	9,5%	38,2	45,9
Amil	15%	60	-

#### BSI UMKM Center

Peran BSI UMKM Center semakin penting sebagai pusat penguatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku UMKM yang menjadi bagian utama portofolio KUBS BSI. Seiring meningkatnya pembiayaan UMKM, UMKM Center berfungsi sebagai wadah inkubasi usaha, pendampingan, literasi keuangan, dan fasilitasi akses pasar. Hingga tahun 2025, BSI mengoperasikan empat UMKM Center di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan total binaan sebanyak 5.649 UMKM, terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran. Ke depan, BSI menargetkan ekspansi UMKM Center ke wilayah lain untuk memperluas jangkauan pemberdayaan.

#### Pembiayaan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

BSI terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan kapasitas pembiayaan serta program pendampingan yang lebih komprehensif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan BSI dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari portofolio KUBS, di mana UMKM menjadi penerima manfaat utama dalam kerangka pembiayaan berkelanjutan BSI.

Hingga Desember 2025, penyaluran pembiayaan UMKM mencapai Rp52,58 triliun atau 16,52% terhadap total penyaluran pembiayaan tahun 2025. Sementara itu, realisasi pembiayaan Inklusif Makroprudensial mencapai Rp107,66 triliun atau 33,86% terhadap total pembiayaan (Selain pembiayaan kepada bank lain). Realisasi tersebut secara nominal tumbuh 10,06% dibandingkan posisi Desember 2024 yang mencapai Rp97,82 triliun. Realisasi tersebut masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan regulator yaitu sebesar minimal 30%.

BSI memahami bahwa UMKM memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, UMKM terus diberdayakan agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing global. Untuk itu, BSI memperluas akses pembiayaan, membuka peluang pasar baru, dan menyediakan pendampingan usaha sesuai kebutuhan pelaku UMKM.

Proporsi terbesar pembiayaan UMKM BSI, sekitar 32,13%, dialokasikan untuk perdagangan besar dan eceran. Di sisi lain, BSI memastikan layanan pembiayaan bagi UMKM tetap mudah dijangkau melalui jaringan *outlet* yang tersebar di 1.190 titik di seluruh Indonesia.

## KINERJA SOSIAL

## Portofolio UMKM Per Sektor

(Dalam Miliar Rupiah)

Sektor	2023	%	2024	%	2025	%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	9.482	20,85%	11.422	21,79%	11.815	22,49%
Perikanan	757	1,67%	715	1,36%	587	1,11%
Pertambangan dan Penggalian	253	0,56%	261	0,50%	378	0,72%
Industri Pengolahan	3.057	6,72%	3.516	6,71%	2.749	5,23%
Listrik, Gas, dan Air	163	0,36%	592	1,13%	316	0,60%
Konstruksi	1.548	3,40%	1.558	2,97%	1.616	3,07%
Perdagangan Besar dan Eceran	14.651	32,22%	16.527	31,53%	16.893	32,13%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.452	5,39%	3.028	5,78%	3.304	6,28%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	983	2,16%	1.412	2,69%	1.496	2,85%
Perantara Keuangan	1.198	2,63%	1.014	1,93%	724	1,38%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.653	3,64%	1.752	3,34%	1.855	3,53%
Jasa Pendidikan	3.042	6,69%	3.350	6,39%	3.315	6,30%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.961	6,51%	3.501	6,68%	3.865	7,35%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.133	6,89%	3.630	6,93%	3.529	6,71%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	136	0,30%	137	0,26%	137	0,26%
<b>Jumlah</b>	<b>45.469</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.415</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.578</b>	<b>100,00%</b>

Uraian	Satuan	2023	2024	2025
Penyaluran UMKM	Dalam triliun rupiah	45,47	52,42	52,58
UMKM Binaan	UMKM	3.009	4.478	5.649
Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat	Dalam triliun rupiah	20,98	25,69	25,78

Selain menyediakan pembiayaan, BSI juga aktif memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui program pendampingan dan pelatihan. Saat ini, BSI mengoperasikan UMKM Center di 4 (empat) kota besar, Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dan berencana memperluas keberadaannya ke wilayah lain agar semakin banyak UMKM yang dapat merasakan manfaatnya.

UMKM Center berfungsi sebagai inkubator bisnis yang menyediakan pelatihan, pembinaan, serta pendampingan usaha, termasuk dukungan untuk memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi halal. BSI juga mendorong UMKM binaannya untuk tampil pada berbagai expo dan bazar, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memfasilitasi *business matching* dengan pembeli luar negeri untuk memperluas akses pasar global. Pendekatan ini sekaligus memperkuat integrasi UMKM ke dalam rantai pasok dan ekosistem pasar yang lebih luas, sehingga daya saing produk dapat meningkat secara berkelanjutan.

Keberadaan UMKM Center menjadi salah satu cara BSI menjaring potensi UMKM baru sekaligus membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saing. Pada tahun 2025, UMKM binaan BSI mencapai 5.649 pelaku usaha, dengan sebagian besar bergerak di sektor *food & beverage* dan *fashion*. Sejalan dengan hal tersebut, hingga Desember 2025 BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar

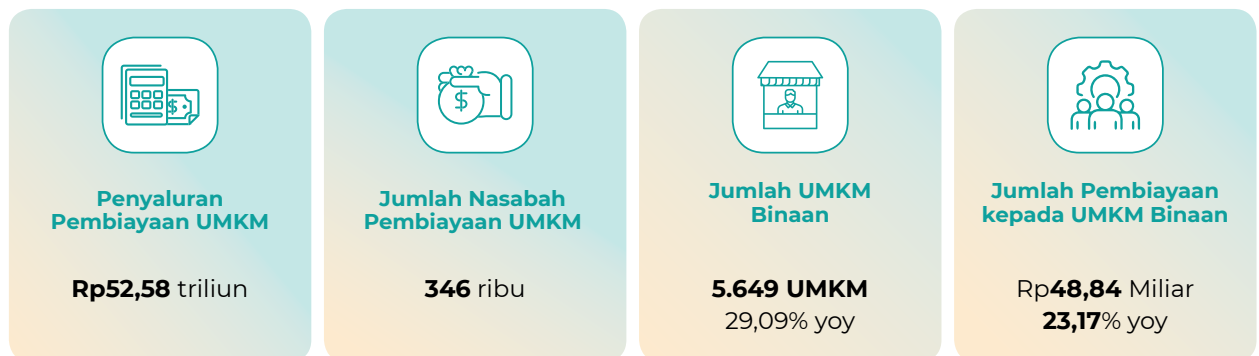
## KINERJA SOSIAL

Rp48,84 miliar bagi UMKM binaan melalui UMKM Center. Pembiayaan ini diarahkan untuk usaha-usaha yang memiliki ketahanan, berorientasi keberlanjutan, serta siap bertransformasi secara digital dan berkembang ke pasar yang lebih luas.

BSI juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat ekosistem UMKM. Portal UMKM BSI membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global, sementara Portal Salam Digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan mikro secara digital. Pemanfaatan teknologi ini memastikan bahwa layanan KUBS tidak hanya menjangkau secara fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan pelaku UMKM dalam proses bisnis yang semakin terdigitalisasi.

Untuk memperluas jejaring dan peluang pasar, BSI rutin menyelenggarakan berbagai ajang seperti BSI UMKM Festival dan BSI International Expo, serta mengembangkan program penguatan kewirausahaan seperti Talenta Wirausaha BSI (TWB) dan Aceh Muslimpreneur (AMP).

Melalui berbagai inisiatif ini, BSI berharap dapat terus mendorong pertumbuhan UMKM dan berkontribusi dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.



### Talenta Wirausaha BSI

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyelenggarakan program Talenta Wirausaha BSI (TWB) sebagai ajang kompetisi sekaligus wadah pelatihan dan pembinaan bagi para wirausaha muda berbakat di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bentuk nyata komitmen BSI dalam memperkuat sektor UMKM melalui pengembangan generasi muda yang memiliki ide usaha inovatif maupun ingin meningkatkan kapasitas bisnis yang telah dirintis.

Fokus BSI terhadap pemberdayaan UMKM sejalan dengan visi untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui TWB dan berbagai inisiatif lainnya, BSI mendorong UMKM agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan. TWB menghadirkan rangkaian kegiatan kompetisi, pelatihan, pendampingan, hingga pemberian penghargaan dan bantuan modal bagi wirausaha pemula (*start-up*) maupun pelaku usaha yang sedang melakukan pengembangan usaha (*scale-up*).

Program ini terbuka bagi empat kategori peserta, yaitu pemula, rintisan, berdaya, dan santri. Kategori pemula diperuntukkan bagi wirausaha yang masih mengembangkan ide bisnis; kategori rintisan bagi pelaku usaha yang telah mencapai omzet tahunan sekitar Rp500 juta; kategori berdaya bagi pelaku usaha dengan omzet setidaknya Rp500 juta dan memiliki masa usaha minimal dua tahun; serta kategori santri yang berasal dari lingkungan pesantren.

## KINERJA SOSIAL

Jenis usaha yang dapat berpartisipasi meliputi makanan dan minuman, *fashion*, teknologi, ekonomi kreatif & jasa, serta agribisnis. Tahapan kegiatan TWB meliputi *kick-off*, *onboarding*, *workshop*, seleksi & penjurian, *bootcamp*, hingga *grand final* dan *awarding*.

Program TWB telah dilaksanakan sejak 2022 hingga 2025. Jumlah pendaftar TWB Tahun 2024 - 2025 mencapai 9.961 peserta, meningkat dibandingkan 8.386 pada 2023, dan 5.416 peserta pada 2022. BSI berharap TWB dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. BSI juga menempatkan generasi muda Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru dan inovasi usaha yang berkelanjutan.

BSI akan terus mendukung pemberdayaan UMKM nasional melalui pembiayaan, layanan digital, serta pengembangan kapasitas kewirausahaan. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita ke-3 Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, memperkuat industri kreatif, dan memperluas pembangunan infrastruktur.

### BSI Aceh Muslimpreneur

BSI Aceh Muslimpreneur (BSI AMP) merupakan program pengembangan wirausaha muda Aceh yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, pendampingan, serta kompetensi bisnis berbasis syariah. Sejak diluncurkan pada tahun 2023, program ini mendorong tumbuhnya UMKM yang lebih inovatif, berdaya saing, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu mendorong pelaku usaha Aceh untuk "naik kelas" dan menjangkau pasar internasional.

BSI AMP dirancang untuk melahirkan talenta wirausaha unggul yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah dan nasional. Peserta dibagi dalam tiga kategori, yaitu Starter (pemilik ide bisnis), *Scale-Up* (omzet ≤ Rp200 juta dan masa usaha kurang dari dua tahun), dan *Sustainable* (omzet > Rp200 juta dengan masa usaha lebih dari dua tahun). Seluruh peserta melalui proses seleksi yang ketat, meliputi kurasi, pelatihan intensif, dan pendampingan bisnis komprehensif agar siap berkembang secara berkelanjutan.

Dukungan BSI terhadap UMKM Aceh juga diwujudkan melalui program pembiayaan, pendampingan usaha, serta peran BSI UMKM Center. Antusiasme ini menunjukkan komitmen kuat generasi muda Aceh untuk mengembangkan usaha berbasis syariah.

Melalui BSI AMP, BSI berharap dapat membuka peluang yang lebih luas bagi wirausaha muda Aceh untuk tumbuh secara mandiri, berdaya saing, dan memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi daerah. Program ini membuktikan bahwa pengembangan kapasitas dan kewirausahaan mampu menghasilkan transformasi nyata bagi pelaku UMKM Aceh.

### ***Inspiration Story***

#### **Joni Anwar Afrizul – BSI Scholarship Mahasiswa**

Joni Anwar Afrizul merupakan mahasiswa Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia merupakan anak sulung dari lima bersaudara yang berasal dari kawasan pedesaan di Kota Padang, Sumatera Barat. Terlahir dari ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang merupakan ibu rumah tangga, kondisi ekonomi keluarga sempat membuat Joni merasa bahwa berkuliah di perguruan tinggi negeri ternama adalah sebuah hal yang sulit diwujudkan. Bahkan, ia sempat berpikir bahwa pendidikannya akan berhenti setelah lulus SMA dan melanjutkan membantu orang tua di sawah. Pada masa SD hingga SMP, ia menjalani kehidupan seperti anak pada umumnya, lebih banyak bermain dan belum menunjukkan prestasi akademik yang menonjol. Keterbatasan fasilitas belajar di rumah, termasuk penerangan yang kurang memadai, membuatnya tidak pernah membayangkan bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Perjalanan hidupnya mulai berubah ketika ia menempuh pendidikan di MAN Insan Cendekia Padang Pariaman. Di sana, kesadaran akan kondisi ekonomi keluarga membuatnya semakin termotivasi untuk berjuang mengangkat derajat keluarganya. Sejak kelas 10, Joni mulai aktif bergabung dalam tim Olimpiade kimia dan berlatih dengan penuh kesungguhan. Usaha yang konsisten tersebut membuahkan hasil ketika ia berhasil meraih Medali Perak Olimpiade Sains Nasional (OSN) Kimia 2024. Selain itu, ia juga menorehkan berbagai prestasi dalam ajang sains lainnya seperti Kompetisi Sains Madrasah (KSM), KoSSMI, Kompetisi Sains Ruangguru (KSR), serta berbagai lomba kimia tingkat universitas. Rangkaian prestasi tersebut mengantarkan Joni memperoleh BSI Scholarship saat masih duduk di bangku SMA, yang kemudian menjadi titik awal munculnya harapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Dengan dukungan penuh dari kedua orang tuanya, Joni bertekad untuk merantau demi meraih mimpinya berkuliah di ITB. Ia sempat mengalami kekecewaan karena tidak lolos melalui jalur SNBP, namun tidak menyerah dan kembali berjuang melalui jalur SNBT. Dalam proses persiapan tersebut, Joni juga mendapatkan dukungan dari BSI Scholarship melalui program bimbingan belajar gratis yang membantunya mempersiapkan diri menghadapi ujian. Berkat usaha yang terus dilakukan, doa yang tidak pernah putus dari dirinya dan orang tuanya, serta dukungan dari BSI, Joni akhirnya berhasil lolos melalui jalur SNBT dan resmi menjadi bagian dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

#### **Sri Martini & Siti Saroh – Program Kemanusiaan “Ibu Tangguh”**

Kehilangan pasangan hidup saat pandemi menjadi titik terberat bagi banyak perempuan kepala keluarga, termasuk Sri Martini dari Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dan Siti Saroh dari Depok, Jawa Barat. Dalam duka yang mendalam, keduanya harus menguatkan diri demi anak-anak dan keluarga. Bu Sri melanjutkan usaha kecil berjualan ayam geprek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Bu Siti mencoba membuat keripik pisang dan menjualnya di depan rumah sambil merawat anaknya yang masih berusia satu tahun. Meski penuh keterbatasan, keduanya memilih untuk tidak menyerah pada keadaan.

Melalui dukungan Program Ibu Tangguh, perlahan kehidupan mereka mulai berubah. Bu Sri mendapatkan bantuan modal dan pembinaan usaha yang membantunya mengembangkan bisnis hingga mampu membuka kios nasi uduk dan warung kelontong sendiri. Sementara itu, Bu Siti berhasil mengembangkan usaha keripiknya menjadi sebuah toko bernama Salsa Snack Store yang kini juga menampung berbagai produk camilan dari produsen lokal. Dari usaha kecil yang dimulai dengan penuh perjuangan, kini Bu Siti mampu meraih omzet hingga sekitar Rp10 juta setiap bulan.

Kisah mereka menjadi bukti bahwa dari keterpurukan dapat lahir kekuatan baru. Dengan ketekunan, keberanian untuk bangkit, serta dukungan yang tepat, para ibu kepala keluarga mampu membangun kemandirian ekonomi dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Bu Sri Martini dan Bu Siti Saroh bukan hanya sosok ibu yang tangguh, tetapi juga inspirasi bahwa dari usaha sederhana, harapan besar dapat tumbuh dan memberi manfaat bagi banyak orang di sekitarnya.






## KINERJA SOSIAL

## Kegiatan Implementasi Program Sosial Perusahaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

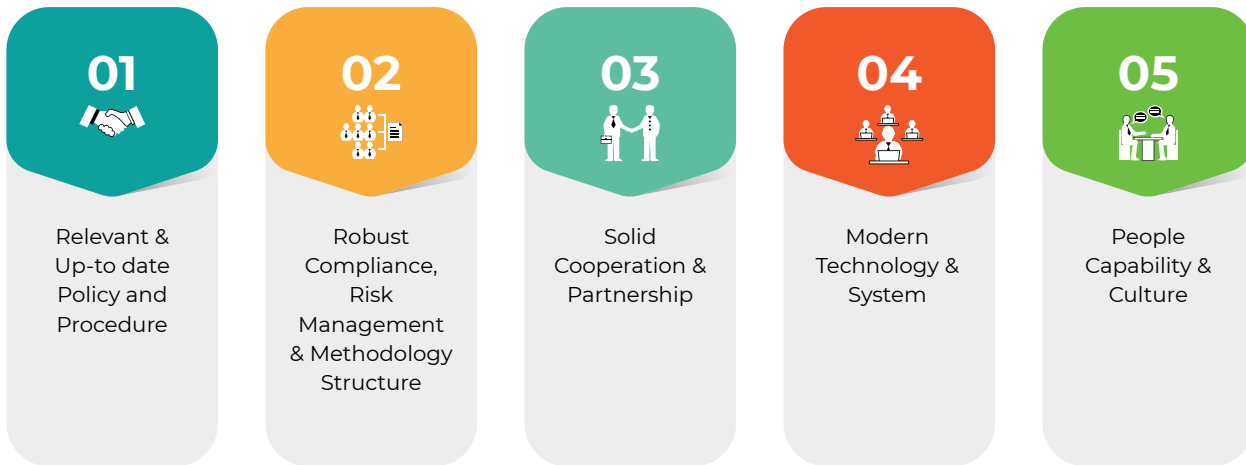
[GRI 413-1]

Jenis Kegiatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan Kegiatan	Capaian
<b>PILAR EKONOMI</b>			
DESA BSI		<p>Desa BSI merupakan program pemberdayaan wilayah binaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi desa dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kemudian penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran, serta penerapan teknologi tepat guna. Program Desa BSI bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial di desa-desa di Indonesia, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengembangan ekonomi desa melalui penguatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Peningkatan pendapatan masyarakat (mustahik) dengan mengoptimalkan sumber daya ekonomi lokal melalui penerapan teknologi yang tepat guna.</li> </ol> <p>Melalui program Desa BSI, BSI dan BSI Masalah bercita-cita untuk lebih banyak membangun desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ekonomi, sehingga nantinya mampu menjadi desa yang berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam membantu desa binaan, BSI menerapkan strategi mulai dari aspek hulu hingga hilir. Mulai dari mengelola dan mendayagunakan dana ZIS kepada para mustahik penerima manfaat program, program pembinaan pengembangan kluster usaha, hingga akses pembiayaan dan kemudahan akses ke pasar. Melalui program ini, BSI ingin memfasilitasi mustahik (penerima manfaat) melalui penguatan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.</p>	<p>BSI telah berkontribusi dengan mengintervensi 4.019 KK/12.021 jiwa kategori miskin melalui program Desa BSI sebanyak 23 Desa dari Periode 2018-2025 (Mengintervensi 922 KK yang berhasil keluar dari garis kemiskinan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Desa Program Tahun 2018-2021 (Jumlah 200 KK/728 Jiwa)</li> <li>17 Desa Program Tahun 2021-2023 (Jumlah 1.503 KK / 5.329 Jiwa)</li> <li>3 (tiga) Desa baru pada Tahun 2024-2025 (Jumlah 380 KK/1.313 Jiwa)</li> <li>UMKM sebanyak 54 binaan pada tahun 2022-2025 (Jumlah 1.936 KK/5.251 jiwa)</li> </ul>
<b>PILAR PENDIDIKAN</b>			
PESANTREN BERDAYA BSI		<p>Program Pesantren Berdaya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pesantren melalui pengembangan sumber daya ekonomi dan kewirausahaan. Usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi masing-masing pesantren, seperti usaha <i>laundry</i> dan lainnya.</p>	<p>BSI telah mengintervensi 2.830 penerima manfaat santri Dhuafa yang berada di 19 Kabupaten, 8 Provinsi dengan 35 Pesantren dari tahun 2022-2025.</p>
BSI SCHOLARSHIP		<p>BSI <i>Scholarship</i> merupakan program beasiswa tingkat sarjana (SI) bertujuan untuk membentuk pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah, dan bisa menjadi teladan dalam membangun keumatan, khususnya di bidang industri ekonomi syariah. Program ini terdiri dari BSI Inspirasi yang menggunakan dana zakat dan BSI Prestasi yang menggunakan dana <i>infaq</i>. Selain bantuan uang kuliah, program BSI <i>Scholarship</i> juga memiliki program pembinaan, seperti <i>mentorship</i>, literasi ekonomi syariah, pembinaan karakter, keislaman, dan kepemimpinan. Program ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.</li> <li>Akses yang sama ke pendidikan teknis, kejuruan dan pendidikan tinggi.</li> <li>Memperluas beasiswa pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang.</li> </ol> <p>Program beasiswa BSI <i>Scholarship</i> ini terdiri dari dua jenis yaitu program BSI <i>Scholarship</i> Prestasi dan program BSI <i>Scholarship</i> Inspirasi. Program BSI <i>Scholarship</i> Prestasi merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa berprestasi dari berbagai kampus dan jurusan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Program BSI <i>Scholarship</i> Inspirasi adalah beasiswa yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera.</p>	<p>BSI telah memberikan pendidikan kepada 10.221 mahasiswa dan pelajar tingkat SMP-SMA selama 2021-2025 di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 107 kampus dan 256 sekolah.</p>

## KINERJA SOSIAL

Jenis Kegiatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan Kegiatan	Capaian
RUMAH QUR'AN BSI		Program Rumah Qur'an BSI merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mendukung penguatan nilai-nilai keislaman dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan Al-Qur'an. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan pembelajaran dan pembinaan hafizh Al-Qur'an bagi masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Perseroan dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.	BSI telah memberikan pengajaran kepada 138 Santri akhwat dan ikhwan hafizh qur'an dari tahun 2023-2025 di 8 lokasi yang tersebar di 5 Provinsi, dan telah meluluskan sebanyak 53 santri hafizh 30 juz.
<b>PILAR KESEHATAN</b>			
CARE AND RESCUE		Program CARE AND RESCUE adalah inisiatif BSI yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Program ini bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kebutuhan darurat pada saat terjadi bencana.</li> <li>2. Membentuk kesiapsiagaan terhadap adanya potensi bahaya.</li> <li>3. Membantu pemulihan masyarakat dan wilayah pasca bencana.</li> </ol>	BSI telah berkontribusi dengan memberikan bantuan kepada 27 ribu penerima manfaat dan 107 lembaga di seluruh Indonesia.
<b>PILAR KEMANUSIAAN</b>			
BANTUAN LANGSUNG		Program pemberian bantuan langsung merupakan bukti komitmen Perseroan dalam membangun ekonomi syariah yang bermanfaat bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk advokasi, pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung.	BSI telah memberikan manfaat kepada 599 ribu jiwa penerima manfaat selama tahun 2025 baik berupa Program Respons Bencana, Pelayanan Kesehatan Kemanusiaan seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Kebencanaan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat</li> <li>2. Bantuan Air Minum Gratis di Masjid BSI.</li> <li>3. Paket makan gratis Warteg Mobile</li> <li>4. Serta bantuan Palestina dan lainnya.</li> </ol>
<b>PILAR DAKWAH DAN ADVOKASI</b>			
PEMBERDAYAAN MASJID		Program Pemberdayaan Masjid bertujuan untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid agar berdaya dan mandiri dengan potensi yang dimiliki di sekitar masjid. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	BSI telah mengintervensi 30 Jiwa dan terbentuknya 12 unit Bisnis di 3 Masjid binaan yang tersebar di wilayah Indonesia melalui program Masjid BSI Empowerment (pemberdayaan ekonomi berbasis masjid).
MASJID BSI		Program Masjid BSI bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana tempat ibadah yang layak, nyaman, dan inklusif bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendukung aktivitas peribadatan sekaligus menghadirkan ruang singgah yang aman dan nyaman bagi jamaah dan pengunjung sebagai bagian dari kontribusi Perseroan dalam memperkuat fungsi sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.	Penyediaan sarana tempat ibadah Masyarakat yang juga sebagai destinasi yang menyediakan tempat nyaman bagi para pengunjung atau jamaah untuk beribadah dan beristirahat sejenak. Saat ini jumlah Masjid BSI sudah mencapai 9 Masjid yang tersebar di 6 Provinsi.

## KINERJA SOSIAL



### PRIVASI DAN KEAMANAN DATA NASABAH [GRI 418-1] [FN-CB-230a.1, FN-CB-230a.2]

Di tengah meningkatnya digitalisasi layanan keuangan, BSI memandang perlindungan data pribadi nasabah sebagai aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan keamanan aktivitas perbankan syariah. Oleh sebab itu, seluruh proses pengelolaan data pribadi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, serta penguatan tata kelola berbasis risiko.

BSI menerapkan Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pemutakhiran, penggunaan, hingga pemusnahan data pribadi nasabah. Kebijakan ini disusun mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, serta peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait pelindungan data.

Untuk memastikan pengelolaan keamanan informasi berlangsung sesuai standar internasional, BSI telah memperoleh dan menerapkan ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mencakup mekanisme pengendalian akses, enkripsi, deteksi ancaman, serta pemantauan keamanan secara berkelanjutan. BSI juga bekerja sama dengan pihak independen untuk melakukan *monitoring* privasi dan melaporkan temuan secara berkala kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

### Kepatuhan terhadap UU PDP dan Penguatan Keamanan Data Nasabah

Sesuai Undang-undang No. 27 Tahun 2022 (UU PDP), BSI sebagai pengendali dan pemroses data pribadi memiliki kewajiban hukum sebagai berikut:

- Memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang sah.
- Melakukan perekaman seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi.
- Melindungi, menjaga keamanan, dan kerahasiaan data pribadi.
- Menunjuk Pejabat/ Petugas Pelindungan Data Pribadi.
- Menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA) untuk aktivitas berisiko tinggi.
- Melakukan pemrosesan data pribadi yang terbatas, spesifik, legal, transparan, dan sesuai tujuan pemrosesan.
- Menyediakan bukti persetujuan sah dari subjek data.

Untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut, BSI secara berkala melakukan *gap assessment* kepatuhan UU PDP.

Sebagai tindak lanjut penerapan PDP di BSI, telah dibentuk Unit Kerja Data Protection (DPR).

## KINERJA SOSIAL

**Penguatan Sistem Pelindungan Data dan Insiden Tahun 2025**

BSI membangun kerangka pelindungan data yang diperkuat oleh Data Protection Group, yang mengelola lima komponen kunci: tata kelola privasi, siklus pemrosesan data, kontrol keamanan, respons insiden, dan pemeliharaan bukti kepatuhan. Sistem keamanan yang diterapkan mencakup mitigasi risiko multi-lapis, termasuk pengendalian akses, enkripsi, pemantauan aktivitas siber, dan pelaporan insiden.

Apabila terdapat pengaduan terkait keamanan siber dari nasabah, BSI melakukan validasi internal dan melakukan eskalasi kepada KOMINFO sesuai ketentuan. Selain itu, BSI juga mewajibkan mitra eksternal untuk mematuhi standar keamanan informasi melalui klausul kontraktual yang diawasi secara rutin.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pengaduan substansial terkait pelanggaran privasi maupun insiden kehilangan, pencurian, atau kebocoran data nasabah di seluruh jaringan operasional BSI. Hasil ini mencerminkan efektivitas tata kelola keamanan informasi serta kesiapan BSI dalam menghadapi potensi risiko digital.

**Pengaduan Nasabah [OJK F.24]**

Dalam rangka memperkuat pelindungan konsumen dan meningkatkan kualitas layanan, BSI terus mengembangkan sistem penanganan pengaduan nasabah yang terintegrasi di

seluruh jaringan operasional. *Customer Care Group* bertanggung jawab mengelola seluruh pengaduan melalui proses verifikasi, eskalasi, dan penyelesaian yang mengikuti standar operasional dan ketentuan regulator. Sepanjang tahun 2025, BSI berhasil menyelesaikan 85,59% pengaduan dalam waktu maksimal 4 (empat) hari kerja, lebih cepat dari *Service Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan regulator dan 14,41% diselesaikan tepat waktu.

Seluruh kanal layanan telah terhubung dengan *monitoring* sistem internal sehingga memastikan transparansi status pengaduan serta konsistensi kualitas layanan. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui:

- BSI Call 14040
- BYOND by BSI
- BSI Mobile
- Email [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)
- Kantor Cabang BSI di seluruh Indonesia
- Kantor Pusat

BSI menyediakan panduan pengaduan yang lebih komprehensif melalui *website* [bankbsi.co.id](http://bankbsi.co.id), termasuk persyaratan dokumen, tahapan penyelesaian, serta SLA yang berlaku. Seluruh mekanisme ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan respons yang cepat, perlindungan data nasabah, dan penyelesaian yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme pengaduan yang tersedia pada *website* [bankbsi.co.id](http://bankbsi.co.id) dan *Annual Report* adalah sebagai berikut:

**Penanganan Pengaduan Nasabah Bank Syariah Indonesia**

Nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan melalui BSI Call 14040 dan menerima nomor pengaduan. Untuk pengaduan secara tertulis disampaikan melalui seluruh kantor **cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)**



Nasabah akan menerima informasi penyelesaian pengaduan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 10 hari kerja berikutnya



Pengaduan nasabah akan diproses oleh unit kerja pengaduan Bank Syariah Indonesia.

## KINERJA SOSIAL

## Syarat Penyampaian Pengaduan

## Jenis Pengaduan

**Lisan**  
(BSI Call 14040)

**Tertulis**

kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: contactus@bankbsi.co.id

## Nasabah

**Dokumen Pengaduan:**  
Identitas Nasabah yang masih berlaku Dokumen lainnya terkait pengaduan

## Jenis Pengaduan

**Perwakilan Nasabah**  
Belum Diperkenankan

**Dokumen Pengaduan:**

- Asli dan fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah yang berlaku
- Surat kuasa bermeterai yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan kepada perseorangan, lembaga, atau badan hukum yang mewakilinya bertindak untuk dan atas nama nasabah
- Dokumen lainnya terkait dengan pengaduan nasabah

"Penanganan pengaduan juga dapat disampaikan oleh Nasabah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), layanan mediasi Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan dengan kondisi pengaduan tersebut telah terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh Bank Syariah Indonesia."

Sepanjang tahun 2025, terdapat 445.114 pengaduan nasabah yang diterima oleh BSI dan seluruh pengaduan telah selesai ditindaklanjuti. Berikut adalah rincian pengaduan nasabah:

Jenis Pengaduan	2023		2024		2025	
	Jumlah	Status Penyelesaian	Jumlah	Status Penyelesaian	Jumlah	Status Penyelesaian
Kejahatan Eksternal	5.150	Selesai	8.390	Selesai	15.111	Selesai
Layanan	1.118	Selesai	-	Selesai	26	Selesai
Produk	28.461	Selesai	12.357	Selesai	22.155	Selesai
Proses/Transaksi dan Fasilitas	435.122	Selesai	338.533	Selesai	407.822	Selesai
<b>Jumlah</b>	<b>469.851</b>	<b>Selesai</b>	<b>359.280</b>	<b>Selesai</b>	<b>445.114</b>	<b>Selesai</b>

# TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK DAN/ATAU JASA KEBERLANJUTAN

## INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK/JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.26]

Sepanjang tahun 2025, BSI terus memperluas inovasi produk dan layanan berkelanjutan untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau sebagaimana disyaratkan dalam berbagai regulasi nasional serta standar internasional ESG. Salah satu pencapaian utama adalah penguatan instrumen pembiayaan syariah berkelanjutan melalui *Sustainability Sukuk* BSI, sukuk ESG syariah pertama di Indonesia yang didukung portofolio pembiayaan KUBL dan KUBS. Instrumen ini dirancang untuk memberikan dampak positif ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus memenuhi mandat pembiayaan berkelanjutan nasional.

Pada tahun 2025, BSI meningkatkan inisiatif tersebut melalui penerbitan *Sustainability Second Tier Sukuk*, yang berfungsi sebagai instrumen pendanaan jangka panjang untuk memperkuat permodalan Bank sekaligus memperluas dukungan bagi proyek-proyek hijau dan kegiatan usaha ramah lingkungan. Langkah ini menegaskan komitmen BSI dalam membangun *pipeline* produk ESG syariah yang kredibel, terukur, dan sesuai prinsip syariah.

Di ranah digital, BSI melakukan penyempurnaan signifikan pada SuperApps BYOND by BSI, termasuk integrasi fitur keamanan tingkat lanjut, otomasi analitik transaksi, dan perluasan layanan sosial-spiritual. Penguatan keamanan siber diterapkan untuk memastikan perlindungan data nasabah sesuai standar ISO/IEC 27001:2022 dan ketentuan UU PDP 2022. Transformasi BYOND juga menjadi bagian dari strategi BSI untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang inklusif, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat luas.

Dalam pengembangan produk sosial syariah, BSI meluncurkan *ESG Mutual/ Maslahat Fund*, instrumen investasi berkelanjutan yang memberikan pilihan bagi nasabah untuk berinvestasi pada portofolio yang mengintegrasikan prinsip syariah

dan kriteria ESG. Produk ini membantu memperluas akses masyarakat terhadap investasi yang bertanggung jawab serta mendukung akselerasi pembiayaan hijau dan sosial.

Inovasi-inovasi tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan portofolio Keuangan Berkelanjutan BSI, sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai pelopor perbankan syariah yang berorientasi ESG dan berperan aktif dalam mendukung agenda transisi energi serta pembangunan berkelanjutan nasional.

## PRODUK/JASA YANG SUDAH DIEVALUASI KEAMANANNYA BAGI PELANGGAN

[OJK F.27] [GRI 416-1, 416-2, 417-1, 417-2, 417-3]

Memasuki tahun 2025, BSI terus memperkuat tata kelola evaluasi keamanan dan kepatuhan produk sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan konsumen dan penerapan praktik perbankan yang bertanggung jawab. Setiap produk dan layanan baru wajib melalui proses evaluasi komprehensif sesuai SPO Produk dan/ atau Aktivitas Baru (SPO PAB), mencakup analisis struktur produk, potensi risiko operasional, *cyber & fraud risk*, serta kajian dampak kesehatan dan keselamatan bagi pengguna. Seluruh hasil evaluasi menjadi dasar pengajuan persetujuan ke OJK sebelum produk diluncurkan ke publik.

BSI juga memperkuat standar evaluasi terhadap seluruh produk digital seiring peningkatan keamanan siber, integrasi fitur pada aplikasi BYOND by BSI, serta penerapan ISO/IEC 27001:2022. Seluruh kategori produk signifikan, termasuk pembiayaan berkelanjutan, layanan digital, dana pihak ketiga, serta produk sosial syariah seperti instrumen investasi berkelanjutan *ESG Mutual/ Maslahat Fund*, telah melalui penilaian dampak kesehatan dan keselamatan, serta evaluasi kepatuhan komunikasi dan periklanan produk (100%).

## TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK DAN/ATAU JASA KEBERLANJUTAN

Untuk memastikan keterbukaan informasi, seluruh materi pemasaran, iklan, dan edukasi produk dikembangkan mengikuti prinsip syariah, serta ketentuan etik komunikasi. *Group Marketing Communication* juga melakukan *media monitoring* dan klarifikasi publik untuk mengantisipasi potensi kesalahan informasi terkait produk.

Sepanjang 2025, BSI tidak mencatat adanya insiden ketidakpatuhan, penarikan produk, atau pelanggaran terkait dampak kesehatan dan keselamatan produk, maupun pelanggaran terhadap regulasi atau kode etik komunikasi. Seluruh pengaduan yang masuk terkait informasi produk berhasil diselesaikan tanpa menimbulkan denda atau tindakan administratif.

### DAMPAK PRODUK/JASA [OJK F.28]

Pada tahun 2025, BSI terus memperkuat penilaian dampak atas setiap produk dan layanan sebagai bagian dari implementasi keuangan berkelanjutan, perlindungan konsumen, dan tata kelola risiko yang bertanggung jawab. Setiap produk dievaluasi tidak hanya dari sisi manfaat bisnis, tetapi juga dari dampak lingkungan, sosial, serta potensi risiko bagi nasabah dan masyarakat.

Dari sisi dampak positif, produk dan layanan BSI memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang memenuhi kriteria KKUB, penerbitan instrumen keberlanjutan seperti *Sustainability Sukuk Tier-2*. Selain itu, peluncuran *ESG Mutual/Maslahat Fund* semakin memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan BSI dengan menyediakan pilihan investasi syariah yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan. Seluruh inisiatif ini berkontribusi pada pengurangan emisi, pelestarian lingkungan, pemberdayaan UMKM, serta perluasan akses layanan dan investasi syariah bagi masyarakat. Pemanfaatan *Digital Carbon Tracking* turut meningkatkan akurasi pengukuran dan evaluasi dampak iklim atas portofolio pembiayaan BSI secara lebih transparan dan komprehensif.

Di sisi sosial, produk digital *BYOND by BSI*, jaringan BSI Agen, dan layanan berbasis komunitas memberikan akses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau terutama bagi

kelompok rentan dan wilayah *blank spot*. Produk-produk tersebut memperluas inklusi keuangan, meningkatkan literasi syariah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

BSI juga mengidentifikasi adanya potensi dampak negatif, khususnya terkait risiko pengelolaan Data Pribadi nasabah. Untuk itu, Bank menerapkan Kebijakan Privasi yang komprehensif dan memperkuat tata kelola data melalui pembentukan PMO untuk perlindungan data, penunjukan PPDP, dan pembentukan Unit Data *Protection*. Seluruh pengelolaan data diselaraskan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan standar ISO/IEC 27001:2022.

Selain itu, BSI memastikan seluruh fitur, risiko, manfaat, dan ketentuan produk disampaikan secara jelas dan transparan melalui berbagai kanal komunikasi, sehingga risiko kesalahpahaman maupun dampak negatif akibat kesalahan informasi dapat diminimalkan. Pendekatan ini memperkuat integritas produk dan memberi nasabah pemahaman yang lebih baik sebelum menggunakan layanan BSI.

### JUMLAH PRODUK YANG DITARIK KEMBALI [OJK F.29]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keamanan dan kualitas layanan, BSI menerapkan mekanisme *Product Review & Quality Assurance* untuk seluruh produk pendanaan, pembiayaan, dan layanan digital, termasuk *BYOND by BSI*, *ESG Mutual/Maslahat Fund*, pembiayaan KKUB, serta instrumen pasar modal seperti *Sustainability Sukuk Tier-2*. Sepanjang tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh produk memenuhi standar kepatuhan, keamanan, dan kelayakan operasional. Dengan demikian, tidak terdapat produk atau layanan BSI yang ditarik kembali selama periode pelaporan.

## TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK DAN/ATAU JASA KEBERLANJUTAN

### SURVEI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK DAN/ATAU JASA

[OJK F.30]

Sebagai upaya penguatan *customer experience*, BSI secara konsisten melakukan Survei *Satisfactory, Loyalty, and Engagement* (SLE) yang mencakup pengalaman pelanggan di kantor cabang, platform digital, BSI Agen, BYOND by BSI, *Contact Center*, hingga layanan sosial syariah seperti ZISWAF. Tahun 2025 mencatat peningkatan nilai SLE menjadi 66,50% dengan kategori "*Engaged*," dipengaruhi oleh perbaikan fitur BYOND, peningkatan kualitas layanan

cabang, perluasan jaringan BSI Agen, serta penguatan keamanan data nasabah melalui implementasi ISO/IEC 27001:2022 dan penguatan Data *Protection Unit*.

BSI juga memperluas pengukuran kepuasan untuk produk berkelanjutan, termasuk *financing green*/KKUB, *Sustainability Sukuk*, dan layanan zakat-digital, sehingga pengelolaan kualitas layanan semakin terarah dan berbasis kebutuhan nasabah. Hasil survei ini menjadi landasan pengembangan layanan dan inovasi digital BSI untuk tahun-tahun berikutnya.

#### Survei Kepuasan Pelanggan

Keterangan	Kepuasan Nasabah (Dalam Persentase)					
	2023		2024		2025	
	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
<i>Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) Index</i>	60,60%	<i>Rationally Royal</i>	64,91%	<i>Engaged</i>	66,50%	<i>Engaged</i>

## VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

[OJK G.1] [GRI 2-5]



Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelaporan keberlanjutan, BSI terus melakukan penyempurnaan proses penyusunan laporan dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021, serta standar global *Consolidated GRI Standards* 2021. Pada tahun 2025, BSI juga memastikan bahwa seluruh pengungkapan terkait Keuangan Berkelanjutan, aspek ESG, dan kinerja operasional yang relevan telah selaras dengan praktik terbaik industri serta pembaruan metodologi yang digunakan dalam *Digital Carbon Tracking* dan penilaian risiko keberlanjutan.

Untuk menjamin kredibilitas dan keandalan laporan, BSI menunjuk PT BSI Group Indonesia sebagai pihak *assurance* independen yang melakukan verifikasi menggunakan AA1000 Assurance Standard v3 *Type 2 Moderate Level*,

mencakup evaluasi terhadap keakuratan data, kelengkapan pengungkapan, dan konsistensi proses penyusunan laporan. Proses penunjukan lembaga *assurance* dilakukan melalui persetujuan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris guna menjaga integritas tata kelola pelaporan keberlanjutan.

Sepanjang proses verifikasi, BSI memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan serta seluruh informasi yang disampaikan telah diperiksa melalui mekanisme internal *review* lintas unit, termasuk ESG Group, *Compliance*, *Risk Management*, dan *Data Protection*. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa laporan tahun 2025 disusun secara objektif, transparan, dan sejalan dengan komitmen BSI untuk meningkatkan kualitas pelaporan dari tahun ke tahun.

# LEMBAR UMPAN BALIK

## [OJK G.2 GRI 2-26]

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, serta pelaksanaan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini disusun dengan mengacu pada ketentuan OJK dan standar GRI, serta menjadi landasan dialog yang transparan antara BSI dan para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan kualitas pelaporan, kami sangat mengapresiasi masukan, kritik, dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara setelah membaca laporan ini. Tanggapan dapat disampaikan melalui e-mail maupun dengan mengirimkan kembali formulir ini melalui pos untuk kami gunakan sebagai bahan perbaikan Laporan Keberlanjutan pada periode berikutnya.

- Mohon beri tanda ceklis (√) pada kolom setuju atau tidak setuju.

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perusahaan.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca.		

- Mohon berikan nilai mengenai topik material yang terdapat dalam laporan Keberlanjutan ini (nilai 1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).

(.....) Kinerja Ekonomi                      (.....) Portofolio Produk dan Jasa                      (.....) Privasi Nasabah

- Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini.

---



---

### Identitas Pemangku Kepentingan

Nama :  
 Pekerjaan :  
 Institusi/Perusahaan :  
 Kontak (telepon, email) :

### Kategori Pemangku Kepentingan

(.....) Pemegang Saham dan investor                      (.....) Pelanggan                      (.....) Karyawan  
 (.....) Pemerintah                      (.....) Media                      (.....) Mitra Usaha  
 (.....) Masyarakat dan Komunitas                      (.....) Lainnya, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirimkan kepada:

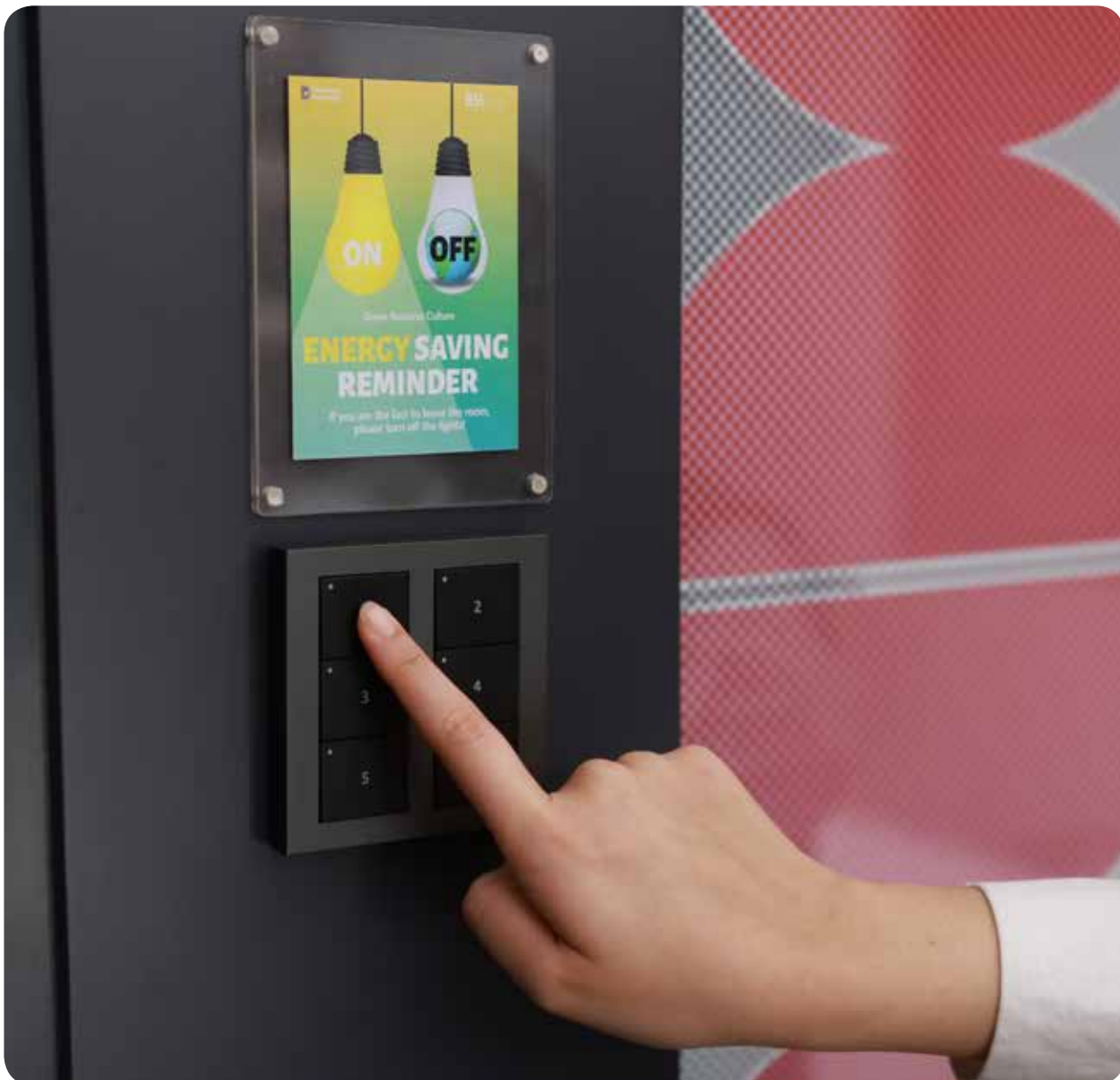
<p><b>Muhammad Syukron Habiby</b>                  Senior Vice President                  Environmental Social &amp; Governance Group                  PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk</p>	<p><b>Head Office</b>                  Gedung The Tower                  Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi,                  Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930                  Telepo : +62 21 30405999                  Fax : +62 21 30421888                  Email : esg.group@bankbsi.co.id</p>
--	---

# TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA

## [OJK G.3]

Pada tahun 2025, BSI tidak menerima tanggapan, masukan, maupun keberatan atas Laporan Keberlanjutan periode sebelumnya melalui kanal komunikasi pemangku kepentingan, termasuk email, *website* Perseroan, Customer Care Group,

maupun mekanisme engagement yang dilakukan secara berkala. Ketiadaan umpan balik tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat isu material atau ketidakjelasan informasi yang memerlukan tindak lanjut perbaikan atas laporan sebelumnya.



# DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

NO. INDEKS	NAMA INDEKS	HALAMAN
<b>STRATEGI KEBERLANJUTAN</b>		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	23
<b>IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN</b>		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi	37
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup	39
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial	40
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	43
C.2	Alamat Perusahaan	46
C.3	Skala Perusahaan	47
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	54
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	56
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan	56
<b>PENJELASAN DIREKSI</b>		
D.1	Penjelasan Direksi	58
<b>TATA KELOLA KEBERLANJUTAN</b>		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan	89
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan	93
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan berkelanjutan	95
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	20
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan	98
<b>KINERJA KEBERLANJUTAN</b>		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	133
<b>KINERJA EKONOMI</b>		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	134
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan.	137
<b>KINERJA LINGKUNGAN</b>		
<b>Aspek Umum</b>		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	151
<b>Aspek Material</b>		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	152
<b>Aspek Energi</b>		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	152
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	153
<b>Aspek Air</b>		

## DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51/POJK.03/2017

NO. INDEKS	NAMA INDEKS	HALAMAN
F.8	Penggunaan Air	155
	<b>Aspek Keanekaragaman Hayati</b>	
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	157
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	157
	<b>Aspek Emisi</b>	
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	159
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	160
	<b>Aspek Limbah dan Efluen</b>	
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	161
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	161
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada)	161
	<b>Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup</b>	
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	162
<b>KINERJA SOSIAL</b>		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/ atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen	163
	<b>Aspek Ketenagakerjaan</b>	
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	172
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	180
F.20	Upah Minimum Regional	181
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	185
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	176
	<b>Aspek Masyarakat</b>	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	190
F.24	Pengaduan Masyarakat	201
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	191
	<b>Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan:</b>	
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan	203
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan	203
F.28	Dampak Produk/Jasa	204
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	204
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	205
<b>LAIN-LAIN</b>		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, Jika Ada	206
G.2	Lembar Umpan Balik	207
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	208
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	209

# INDEKS ISI CONSOLIDATED SET OF GRI STANDARD

<b>Pernyataan penggunaan</b>	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI untuk periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 sesuai dengan ("in accordance") pada Consolidated Set of GRI Standard.
<b>GRI 1 yang Digunakan</b>	GRI 1: Landasan 2021
<b>Standar Sektor GRI yang berlaku</b>	G4 Suplemen Sektor Keuangan

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan		Halaman	Yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
	No. Indeks	Judul		Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>PENGUNGKAPAN UMUM</b>							
<b>GRI 2: Pengungkapan Umum 2021</b>	<b>Organisasi dan Praktik Pelaporan</b>						
	2-1	Informasi mengenai organisasi	46, 47, 52				
	2-2	Entitas organisasi yang termasuk dalam laporan keberlanjutan	12				
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak	12				
	2-4	Penyajian kembali informasi	12				
	2-5	<i>Assurance</i> oleh Pihak Eksternal	206				
	<b>Aktivitas dan Karyawan</b>						
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya	46, 54, 55, 56				
	2-7	Karyawan	48				
	2-8	Pekerja yang bukan merupakan karyawan	48, 52				
	<b>Tata Kelola Keberlanjutan</b>						
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	69, 89				
	2-10	Nominasi dan seleksi badan tata kelola tertinggi	72				
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi	69				
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	89				
	2-13	Pendelegasian wewenang untuk tanggung jawab mengelola dampak	89				
2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	66, 89					
2-15	Konflik kepentingan	71					
2-16	Mengomunikasikan hal-hal kritis	77, 78					

## INDEKS ISI CONSOLIDATED SET OF GRI STANDARD

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan			Yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
	No. Indeks	Judul	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	93				
	2-18	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	73				
	2-19	Kebijakan remunerasi	74				
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi	74				
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan	74				
	<b>Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan</b>						
	2-22	Pernyataan mengenai strategi pembangunan berkelanjutan	23, 58, 59				
	2-23	Komitmen kebijakan	31				
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan dalam organisasi	31				
	2-25	Proses remediasi dampak negatif	35				
	2-26	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	77, 207				
	2-27	Kepatuhan hukum dan peraturan	76				
	2-28	Keanggotaan Asosiasi	56				
	<b>Keterlibatan Pemangku Kepentingan</b>						
	2-29	Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan	20				
	2-30	Kesepakatan perundingan kolektif	179				
<b>TOPIK MATERIAL</b>							
<b>GRI 3: Topik Material 2021</b>	3-1	Proses Penentuan Topik Material	14				
	3-2	Daftar Topik Material	14				
	3-3	Manajemen Topik Material	17				
<b>TOPIK EKONOMI</b>							
	<b>Kinerja Ekonomi</b>						
<b>GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016</b>	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	147				
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	30, 151				
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	184				
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	148				

## INDEKS ISI CONSOLIDATED SET OF GRI STANDARD

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan		Halaman	Yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
	No. Indeks	Judul		Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
	<b>Keberadaan Pasar</b>						
<b>GRI 202: Keberadaan Pasar 2016</b>	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	181				
	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat	172				
	<b>Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>						
<b>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016</b>	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	148, 190				
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	148, 191				
	<b>Praktik Pengadaan</b>						
<b>GRI 204: Praktik Pengadaan 2016</b>	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	149				
	<b>Anti-Korupsi</b>						
<b>GRI 205: Anti-Korupsi 2016</b>	205-1	Operasi dinilai untuk risiko yang terkait dengan korupsi	78				
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	80				
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	82				
<b>DAMPAK LINGKUNGAN</b>							
	<b>Energi</b>						
<b>GRI 302: Energi 2016</b>	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	152				
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	152				
	302-3	Intensitas energi	152				
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	153				
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	153				
	<b>Emisi</b>						
<b>GRI 305: Emisi 2016</b>	305-1	Emisi Gas Rumah Kaca (CO <sub>2</sub> ) (Cakupan 1) Langsung	159				
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	159				
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	159				
	305-4	Intensitas Emisi GRK	159				

## INDEKS ISI CONSOLIDATED SET OF GRI STANDARD

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan			Yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
	No. Indeks	Judul	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
	305-5	Pengurangan emisi GRK	160				
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	161				
	305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara yang signifikan lainnya	161				
	<b>Limbah</b>						
<b>GRI 306: Limbah 2020</b>	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	161				
	306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah	161				
	306-3	Limbah yang dihasilkan	161				
	306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan	161				
	306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan	161				
<b>DAMPAK SOSIAL</b>							
	<b>Kepegawaian</b>						
<b>GRI 401: Kepegawaian 2016</b>	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	174				
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	181				
	401-3	Cuti Melahirkan	181				
<b>GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen 2016</b>	<b>Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen</b>						
	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	179				
<b>GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018</b>	<b>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>						
	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	185				
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	185				
	403-3	Layanan Kesehatan Kerja	187				
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	187				
403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	187, 188					

## INDEKS ISI CONSOLIDATED SET OF GRI STANDARD

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan		Halaman	Yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
	No. Indeks	Judul		Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	187				
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	185				
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	185				
	403-9	Kecelakaan kerja	188				
	403-10	Penyakit akibat kerja	188				
	<b>Pelatihan dan Pendidikan</b>						
	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	176				
<b>GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016</b>	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	176				
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	178				
	<b>Keanekaragaman dan Kesempatan Setara</b>						
<b>GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016</b>	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	172				
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	181				
	<b>Kerja Paksa atau Wajib Kerja</b>						
<b>GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016</b>	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	180				
	<b>Hak Masyarakat Adat</b>						
<b>GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016</b>	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat Adat	190				
	<b>Masyarakat Lokal</b>						
<b>GRI 413: Masyarakat Lokal 2016</b>	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	190, 191				
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki	190, 191				

## INDEKS ISI CONSOLIDATED SET OF GRI STANDARD

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan		Halaman	Yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
	No. Indeks	Judul		Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</b>							
<b>GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016</b>	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	163, 203				
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	203				
<b>Pemasaran dan Pelabelan</b>							
<b>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016</b>	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	203				
	417-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	203				
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	203				
<b>Privasi Pelanggan</b>							
<b>GRI 418: Privasi Pelanggan 2016</b>	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	35, 200				
<b>G4 Suplemen Sektor Keuangan</b>							
<b>G4 Suplemen Sektor Keuangan</b>	FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial yang spesifik yang diaplikasikan pada lini bisnis.	23				
	FS2	Prosedur untuk memeriksa dan menyaring risiko lingkungan dan sosial pada lini bisnis.	95				
	FS3	Proses untuk memonitor implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial, termasuk dalam perjanjian atau transaksi	137				
	FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf untuk menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis.	93				
	FS5	Interaksi dengan klien/ penanam modal/mitra bisnis terkait risiko serta kesempatan terkait lingkungan dan sosial.	20				

## INDEKS ISI CONSOLIDATED SET OF GRI STANDARD

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan		Halaman	Yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
	No. Indeks	Judul		Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, menurut ukuran (contoh: mikro/ SME/besar), dan menurut sektor	137				
	FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.	137				
	FS8	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan lingkungan yang spesifik untuk setiap lini bisnis.	137				
	FS9	Cakupan dan frekuensi audit serta prosedur penilaian risiko	31				
	FS10	Persentase dan jumlah perusahaan yang dimiliki dalam portofolio institusi yang telah berinteraksi dengan organisasi yang melaporkan tentang isu lingkungan atau sosial	137				
	FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.	163				
	FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.	163				
	FS15	Kebijakan untuk rancangan dan penjualan produk dan layanan yang adil.	163				
	FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat.	163				

# SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARD BOARD (SASB) STANDARDS COMMERCIAL BANK

Topik	Metrik	Indeks	Halaman
<b>Sustainability Disclosure Topics &amp; Metrics</b>			
Data Security	(1) Number of data breaches, (2) percentage that are personal data breaches, (3) number of account holders affected	FN-CB-230a.1	200
	Description of approach to identifying and addressing data security risks	FN-CB-230a.2	200
Financial Inclusion & Capacity Building	Number of participants in financial literacy initiatives for unbanked, underbanked, or underserved customers	FN-CB-240a.4	163
Incorporation of Environmental, Social and, Governance Factors in Credit Analysis	Description of approach to incorporation of environmental, social and governance (ESG) factors in credit analysis	FN-CB-410a.2	137
Financed Emissions	Absolute gross financed emissions, disaggregated by (1) Scope 1, (2) Scope 2 and (3) Scope 3	FN-CB-410b.1	159
	Gross exposure for each industry by asset class	FN-CB-410b.2	159
	Percentage of gross exposure included in the financed emissions calculation	FN-CB-410b.3	159
	Description of the methodology used to calculate financed emissions	FN-CB-410b.4	159
Business Ethics	Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated with fraud, insider trading, antitrust, anticompetitive behaviour, market manipulation, malpractice, or other related financial industry laws or regulations	FN-CB-510a.1	76
	Description of whistleblower policies and procedures	FN-CB-510a.2	77
Systemic Risk Management	Global Systemically Important Bank (GSIB) score, by category	FN-CB-550a.1	95
	Description of approach to integrate results of mandatory and voluntary stress tests into capital adequacy planning, longterm corporate strategy, and other business activities	FN-CB-550a.2	95
<b>Activity Metric</b>			
	(1) Number and (2) value of checking and savings accounts by segment: (a) personal and (b) small business	FN-CB-000.A	137
	(1) Number and (2) value of loans by segment: (a) personal, (b) small business, and (c) corporate	FN-CB-000.B	137

# INDEKS IFRS S1 DAN S2

Indeks IFRS S1 dan IFRS S2 ini disajikan untuk memberikan referensi yang jelas dan terstruktur mengenai keterkaitan antara pengungkapan keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia (Peersero) Tbk dengan ketentuan dalam IFRS *Sustainability Disclosure Standards*. Indeks ini menunjukkan lokasi pengungkapan yang relevan dalam laporan ini yang mencerminkan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk yang berkaitan dengan iklim.

Penyusunan indeks ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan keterbandingan informasi, serta mendukung pemahaman pengguna laporan mengenai bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan dapat memengaruhi prospek, kinerja keuangan, dan ketahanan nilai PT Bank Syariah Indonesia (Peersero) Tbk dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

## INDEKS IFRS S1

	Pengungkapan	Halaman
<b>Tata Kelola</b>		
SI.G.a	Peran dan tanggung jawab pengawasan Dewan Pengurus	100, 101
SI.G.b	Keahlian dan kompetensi untuk mengawasi isu keberlanjutan	101
SI.G.c	Frekuensi dan proses penerimaan informasi keberlanjutan	101, 102
SI.G.d	Pertimbangan risiko dan peluang keberlanjutan dalam pengambilan keputusan	101
SI.G.e	Pengawasan atas target serta keterkaitannya dengan remunerasi	102
SI.G.f	Peran manajemen, pendelegasian, dan integrasi dengan pengendalian internal	103
<b>Strategi</b>		
SI.S.a	Risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang mempengaruhi prospek usaha	105, 106, 107
SI.S.b	Horizon waktu yang digunakan (jangka pendek, menengah, dan panjang)	105
SI.S.c	Dampak terhadap model bisnis dan rantai nilai	112
SI.S.d	Respons strategis serta <i>trade-off</i> yang dipertimbangkan	115
SI.S.e	Dampak keuangan saat ini dan yang diantisipasi	105
SI.S.f	Ketahanan strategi dan model bisnis	108
<b>Manajemen Risiko</b>		
SI.RM.a	Proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko	119, 123, 124, 125
SI.RM.b	Penggunaan <i>input</i> , parameter, dan analisis skenario	119, 125, 127
SI.RM.c	Proses pemantauan serta perubahan proses yang dilakukan	119
SI.RM.d	Integrasi ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan	117, 121
<b>Metrik dan Target</b>		
SI.MT.a	Metrik yang disyaratkan sesuai Standar ISSB yang berlaku	159
SI.MT.b	Metrik kinerja spesifik entitas	129, 130
SI.MT.c	Definisi, metodologi, asumsi, dan keterbatasan	129, 130
SI.MT.d	Penetapan target serta periode dasar	-
SI.MT.e	Tonggak pencapaian, revisi, dan pemantauan kinerja	-
SI.MT.f	Persyaratan konsistensi dan keterbandingan	159

## INDEKS IFRS S1 DAN S2

## INDEKS IFRS S2

Pengungkapan		Halaman
<b>Tata Kelola</b>		
<b>Pengawasan Dewan atas risiko dan peluang terkait iklim</b>		
S2.G.a1	Tanggung jawab dan mandat pengawasan iklim dalam TOR, mandat, deskripsi peran, dan/atau kebijakan	101
S2.G.a2	Penilaian dan pengembangan keahlian serta kompetensi yang diperlukan	101
S2.G.a3	Alur informasi, termasuk frekuensi dan metode penyampaian pembaruan terkait iklim	101, 102
S2.G.a4	Pertimbangan risiko dan peluang iklim dalam strategi, transaksi material, manajemen risiko, dan <i>trade-off</i>	101
S2.G.a5	Pengawasan atas penetapan target, pemantauan kemajuan, serta keterkaitannya dengan remunerasi atau metrik kinerja	102
<b>Peran Manajemen dalam Proses Tata Kelola</b>		
S2.G.b1	Pendelegasian tanggung jawab iklim kepada peran manajemen atau komite, serta pengaturan pengawasannya	100, 103
S2.G.b2	Pengendalian dan prosedur yang mendukung pengawasan oleh manajemen	103, 104
S2.G.b3	Integrasi pengendalian dan prosedur dengan fungsi internal lainnya	103, 104
<b>Strategi</b>		
<b>Identifikasi Risiko dan Peluang Terkait Iklim</b>		
S2.S.a1	Deskripsi risiko dan peluang terkait iklim yang memengaruhi prospek usaha	105, 106, 107
S2.S.a2	Klasifikasi risiko iklim, termasuk risiko fisik dan risiko transisi	105, 106
S2.S.a3	Horizon waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang) serta keterkaitannya dengan perencanaan	105
<b>Dampak terhadap Model Bisnis dan Rantai Nilai</b>		
S2.S.b1	Dampak saat ini dan yang diantisipasi terhadap model bisnis dan rantai nilai	112
S2.S.b2	Konsentrasi risiko dan peluang berdasarkan geografi, aset, atau aktivitas operasional	110
<b>Respons Strategis dan Perencanaan Transisi</b>		
S2.S.c1	Perubahan terhadap strategi, model bisnis, dan alokasi sumber daya	115
S2.S.c2	Tindakan mitigasi dan adaptasi, baik secara langsung maupun tidak langsung	115
S2.S.c3	Rencana transisi terkait iklim, termasuk asumsi dan ketergantungan utama	115
S2.S.c4	Kemajuan terhadap rencana dan target yang telah ditetapkan	115
<b>Dampak Keuangan</b>		
S2.S.d1	Dampak keuangan saat ini terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas	105
S2.S.d2	Dampak keuangan yang diantisipasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang	105
S2.S.d3	Implikasi terhadap investasi, pendanaan, dan sumber daya	107
S2.S.d4	Kondisi di mana informasi kuantitatif tidak dapat disajikan	116
<b>Ketahanan Iklim dan Analisis Skenario</b>		
S2.S.e1	Penilaian ketahanan strategi dan model bisnis terhadap risiko iklim	108
S2.S.e2	Ketidakpastian dan kapasitas adaptasi	108
S2.S.e3	<i>Input</i> analisis skenario, skenario yang digunakan, asumsi, dan horizon waktu	108

## INDEKS IFRS S1 DAN S2




Pengungkapan		Halaman
S2.S.e4	Cakupan operasi yang termasuk dalam analisis	108
S2.S.e5	Periode pelaporan analisis skenario	108
<b>Referensi Metrik</b>		
S2.S.f1	Topik pengungkapan lintas industri dan berbasis industri	112
<b>Manajemen Risiko</b>		
<b>Proses Risiko Terkait Iklim</b>		
S2.RM.a1	<i>Input</i> dan parameter yang digunakan, termasuk sumber data dan cakupan operasi	119, 124, 125
S2.RM.a2	Penggunaan analisis skenario iklim untuk identifikasi risiko	121
S2.RM.a3	Metode penilaian probabilitas dan besaran dampak risiko iklim	119, 124
S2.RM.a4	Prioritasi risiko iklim relatif terhadap risiko lainnya	119, 121
S2.RM.a5	Pendekatan pemantauan risiko iklim	125, 127
S2.RM.a6	Perubahan proses manajemen risiko sejak periode pelaporan sebelumnya	123
<b>Proses Peluang Terkait Iklim</b>		
S2.RM.b1	Proses identifikasi, penilaian, prioritas, dan pemantauan peluang terkait iklim	123, 124
S2.RM.b2	Penggunaan analisis skenario iklim untuk identifikasi peluang	-
<b>Integrasi dengan Manajemen Risiko Perusahaan</b>		
S2.RM.c1	Keterkaitan proses risiko dan peluang iklim dengan kerangka manajemen risiko perusahaan	117, 118, 121
<b>Metrik dan Target</b>		
<b>Metrik Lintas Industri dan Berbasis Industri</b>		
S2.MT.a1	Pengungkapan kategori metrik lintas industri	159
S2.MT.a2	Pengungkapan metrik berbasis industri yang terkait dengan model bisnis dan aktivitas	129, 130
<b>Kinerja terhadap Target Terkait Iklim</b>		
S2.MT.b1	Target yang ditetapkan oleh entitas dan target yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan	128
S2.MT.b2	Metrik yang digunakan oleh tata kelola dan manajemen untuk mengukur kemajuan	128, 159
<b>Metrik Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</b>		
S2.MT.c1	Emisi GRK bruto absolut untuk Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3	128
S2.MT.c2	Pendekatan pengukuran, <i>input</i> , dan asumsi yang digunakan	129, 130
S2.MT.c3	Perubahan metodologi pengukuran dan alasan perubahan	129, 130
S2.MT.c4	Pemisahan emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2 berdasarkan kelompok konsolidasi dan <i>investee</i> lainnya	130
S2.MT.c5	Emisi Cakupan 2 berbasis lokasi serta penggunaan instrumen kontraktual	128
S2.MT.c6	Kategori emisi Cakupan 3 serta pengungkapan emisi pembiayaan, jika relevan	129
<b>Metrik Paparan Risiko dan Peluang Iklim</b>		
S2.MT.d1	Risiko transisi: jumlah atau persentase aset atau aktivitas yang terekspos	112
S2.MT.d2	Risiko fisik: jumlah atau persentase aset atau aktivitas yang terekspos	-
S2.MT.d3	Peluang terkait iklim: jumlah atau persentase aktivitas usaha yang selaras	137
<b>Penempatan Modal</b>		

## INDEKS IFRS S1 DAN S2

Pengungkapan		Halaman
S2.MT.e1	Belanja modal atau investasi yang mendukung mitigasi dan adaptasi risiko iklim	115, 137
<b>Penetapan Harga Karbon Internal</b>		
S2.MT.f1	Penerapan harga karbon dalam proses pengambilan keputusan	131
S2.MT.f2	Harga per ton dan pendekatan perhitungan	-
<b>Keterkaitan Remunerasi Eksekutif</b>		
S2.MT.g1	Pengaruh pertimbangan iklim terhadap remunerasi	-
S2.MT.g2	Persentase remunerasi terkait iklim yang diakui pada periode berjalan	-
<b>Target Terkait Iklim</b>		
S2.MT.h1	Target kuantitatif dan kualitatif, termasuk target emisi GRK	24, 128
S2.MT.h2	Metrik target, tujuan, cakupan, wilayah geografis, atau unit usaha	24
S2.MT.h3	Periode target, tahun dasar, tonggak pencapaian, dan target antara	24
S2.MT.h4	Target absolut atau intensitas	-
S2.MT.h5	Keterkaitan target dengan perjanjian internasional	128
<b>Tata Kelola, Peninjauan, dan Revisi Target</b>		
S2.MT.i1	Validasi target dan metodologi oleh pihak ketiga	-
S2.MT.i2	Proses peninjauan target	-
S2.MT.i3	Metrik yang digunakan untuk memantau kemajuan	128, 159
S2.MT.i4	Revisi yang dilakukan dan dasar pertimbangannya	-
<b>Pelaporan Kinerja terhadap Target</b>		
S2.MT.j1	Kemajuan dan tren kinerja terhadap target	-
<b>Pengungkapan Tambahan Target Emisi GRK</b>		
S2.MT.k1	Jenis gas yang dicakup	131
S2.MT.k2	Cakupan Cakupan 1, 2, dan/atau 3	129, 159
S2.MT.k3	Target bruto atau neto serta keterkaitannya dengan dekarbonisasi sektoral	-
S2.MT.k4	Rencana penggunaan kredit karbon dan asumsi ketergantungan	-
S2.MT.k5	Verifikasi atau sertifikasi skema kredit karbon	-
S2.MT.k6	Jenis kredit karbon dan mekanisme offset yang mendasari	-
S2.MT.k7	Asumsi keberlanjutan dan integritas kredit karbon atau offset	-
<b>Referensi Metrik Lintas Industri dan Berbasis Industri</b>		
S2.MT.l1	Pertimbangan atas Standar Keberlanjutan IFRS serta panduan metrik lintas industri dan berbasis industri	12

# TAUTAN STANDAR GRI DENGAN TPB

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Dukungan disampaikan melalui tautan antara program/kegiatan yang dilakukan BSI dengan GRI Standard dan SDGs, sesuai panduan Kompas TPB yang diterbitkan oleh GRI, *United Nations Global Compact*, dan *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, sebagaimana tabel di bawah ini:

TPB	TUJUAN	RELEVANSI GRI STANDAR	PENGUNGKAPAN	JUDUL INDIKATOR
	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.	GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
		GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
			203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, menurut ukuran (contoh: mikro/SME/besar), dan menurut sektor.
			FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.
			FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.
			FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.
	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.	GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	411-1	Insiden Pelanggaran yang Melibatkan Hak-Hak Masyarakat Adat
		GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-2	Operasi dengan Dampak Aktual dan Potensial Negatif yang Signifikan pada Komunitas Lokal
	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.	GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)
			305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK
			305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
			305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)
		305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
		GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah			



## TAUTAN STANDAR GRI DENGAN TPB

TPB	TUJUAN	RELEVANSI GRI STANDAR	PENGUNGKAPAN	JUDUL INDIKATOR				
			306-3	Limbah yang dihasilkan				
			306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan				
			306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan				
			GRI 401: Kepegawaian 2016	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu			
			GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan kerja			
				403-9	Kecelakaan kerja			
	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030.	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	403-10	Penyakit akibat kerja				
			404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan				
				Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	
						2-10	Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	
						GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
						GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
GRI 401: Kepegawaian 2016 G	401-1	Perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan						
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu						
401-3	Cuti Melahirkan							
404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan							
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir						
GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	405-1	Keberagaman badan tata kelola dan karyawan						
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki						
	Memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.	GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah				
			306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah				
	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat.	GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi				
			302-2	Konsumsi energi di luar organisasi				
			302-3	Intensitas energi				
			302-4	Reduksi konsumsi energi				
			302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa				

## TAUTAN STANDAR GRI DENGAN TPB

TPB	TUJUAN	RELEVANSI GRI STANDAR	PENGUNGKAPAN	JUDUL INDIKATOR
	Berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-7	Karyawan
			2-30	Perjanjian kerja bersama
		GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
		GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
		GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi
			302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
			302-3	Intensitas energi
			302-4	Reduksi konsumsi energi
			302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa
		GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan
			401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
			401-3	Cuti Melahirkan
		GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
		GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
			403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
			403-3	Layanan kesehatan kerja
			403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja
			403-5	Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
			403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait dengan hubungan bisnis
			403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-9	Kecelakaan kerja			
403-10	Penyakit akibat kerja			
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1		Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan		
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir		
GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	405-1	Keberagaman badan tata kelola dan karyawan		
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki		




## TAUTAN STANDAR GRI DENGAN TPB

TPB	TUJUAN	RELEVANSI GRI STANDAR	PENGUNGKAPAN	JUDUL INDIKATOR
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, ukuran, dan sektor
			FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.
			FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.
			FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.
			FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat.
	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, ukuran, dan sektor
	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-7	Karyawan
		GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan
		GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
			404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir
		GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial yang spesifik yang diaplikasikan pada lini bisnis.
			FS2	Prosedur untuk memeriksa dan menyaring risiko lingkungan dan sosial pada lini bisnis.
			FS3	Proses untuk memonitor implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial, termasuk dalam perjanjian atau transaksi
			FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf untuk menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis.
			FS5	Interaksi dengan klien/penanam modal/ mitra bisnis terkait risiko serta kesempatan terkait lingkungan dan sosial.

## TAUTAN STANDAR GRI DENGAN TPB

TPB	TUJUAN	RELEVANSI GRI STANDAR	PENGUNGKAPAN	JUDUL INDIKATOR		
			FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.		
			FS9	Cakupan dan frekuensi audit serta prosedur penilaian risiko		
			FS10	Persentase dan jumlah perusahaan yang dimiliki dalam portofolio institusi yang telah berinteraksi dengan organisasi yang melaporkan tentang isu lingkungan atau sosial		
			FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.		
			FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.		
			FS15	Kebijakan untuk produk dan layanan keuangan yang adil		
			FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat.		
	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan		
		GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah		
			306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah		
			306-3	Limbah yang dihasilkan		
			306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan		
			306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan		
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan		
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.		
			Menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab	GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi
					302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
302-3	Intensitas energi					
302-4	Reduksi konsumsi energi					
302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa					
GRI 305: Emisi 2016	305-1			Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)		
	305-2			Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK		
	305-3			Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya		
	305-6			Emisi zat perusak ozon (BPO)		
	305-7			Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya		

## TAUTAN STANDAR GRI DENGAN TPB

TPB	TUJUAN	RELEVANSI GRI STANDAR	PENGUNGKAPAN	JUDUL INDIKATOR		
	Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya karena perubahan iklim adalah tantangan global yang memengaruhi setiap orang.	GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah		
			306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah		
			306-3	Limbah yang dihasilkan		
			306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan		
			306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan		
		GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa		
			GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat perubahan iklim	
				GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi
					302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
					302-3	Intensitas energi
GRI 305: Emisi 2016	302-4	Reduksi konsumsi energi				
	302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa				
	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)				
	305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK				
	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	GRI 305: Emisi 2016	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya		
			305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)		
			305-7	Nitrogen oksida		
			305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)		
			305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK		
			305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya		
			305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya		
	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)		
			305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK		
			305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya		
			305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)		
			305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya		

## TAUTAN STANDAR GRI DENGAN TPB

TPB	TUJUAN	RELEVANSI GRI STANDAR	PENGUNGKAPAN	JUDUL INDIKATOR
	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola
			2-10	Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
			2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi
			2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak
			2-15	Benturan kepentingan
			2-16	Komunikasi hal-hal penting
			2-23	Komitmen kebijakan
			2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif
			2-26	Mekanisme pemberian umpan balik/saran dan menyampaikan kekhawatiran
			2-29	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan
		GRI 205: Anti Korupsi 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
			205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi
			205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
		GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja
			403-9	Kecelakaan kerja
			403-10	Penyakit akibat kerja
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa		
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa		
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran		
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan		
	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			

# Independent Assurance Statement

## No. 0467/KSP-IV/2026

### To the management and stakeholders of PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

We were appointed by PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ('BSI') to perform an assurance engagement on its Sustainability Report 2025 ('the Report'). The engagement was carried out by our assurance team, which possesses extensive professional expertise, technical competence, and relevant experience in sustainability reporting. The team comprised certified sustainability reporting specialists and certified sustainability reporting assurers, ensuring a high level of proficiency and quality in the execution of the engagement.

### Independence

We conducted the assurance engagement independently and objectively. We were not involved in the preparation of any key part of the Report, nor did we provide any services to BSI during 2025 that could compromise our independence or create a conflict of interest in connection with this assurance engagement.

### Assurance Standards, Levels, and Criteria

Our assurance procedures were performed in accordance with the AA1000 Assurance Standards v3 (AA1000AS v3) issued by AccountAbility and the International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised), 'Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information', issued by the International Auditing and Assurance Standards Board.

Through the design of our evidence-gathering procedures to achieve a moderate level of assurance in accordance with AA1000AS v3, readers may obtain reasonable confidence that the risk of material misstatement or error has been reduced to a low level, though not eliminated entirely. Moreover, BSI's adherence to the AccountAbility Principles (AP) was evaluated in accordance with the criteria of AA1000AP (2018) on Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact. In addition, the Report, within the agreed scope, was assessed according to the GRI Standards criteria.

### Limitations

Our scope of work was confined to reviewing the accuracy and reliability of specified data, as well as conducting interviews with data providers, persons in charge of data collection and processing, as well as persons in charge of sustainability performance-related information.

### Responsibility

BSI is responsible for the preparation of the Report and all information and statements contained therein, including the establishment of sustainability management objectives, performance management processes, data collection systems, and other related performance initiatives.

In conducting this engagement, our responsibility to the management of BSI is limited to verifying the statements relating to its sustainability performance, as defined within the agreed scope, and to providing our conclusion based on the work performed.

### Methodology

To assess the accuracy of selected statements and specific data sets disclosed in the Report, as well as the systems and processes used to manage and report them, several procedures were applied during the assurance engagement.

These procedures included reviewing the Report, relevant internal policies, supporting documentation, management and information systems, and conducting interviews with personnel responsible for sustainability management and reporting. The process also involved tracing data back to the original source data and performing more detailed verification on selected data samples.

### Scope of Assurance

We provided a Type 2 assurance engagement under AA1000AS v3. This involved:

- 1) Assessment of BSI's adherence to the AA1000AP (2018); and
- 2) Assessment of the accuracy and quality of the specified sustainability performance information contained in the Report, in relation to the agreed scope of the GRI Standards:
  - 203. Indirect Economy Impact
  - 404. Training and Education
  - 417. Marketing and Labelling

### Conclusions

Conclusions in regard to adherence to the AA1000AP (2018) principles of Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact include the following findings:

### Inclusivity

BSI has shown its commitment to creating an inclusive work environment by promoting diversity, equal opportunities, and respect for all employees. The assessment indicates that comprehensive policies and procedures are in place that take into account the different needs and backgrounds of all stakeholders.

Moreover, BSI has implemented initiatives and programs aimed at creating a diverse and inclusive workplace, such as training and awareness programs on diversity and inclusion. Additionally, BSI has established appropriate channels and mechanisms for feedback and suggestions from stakeholders. By continuing its efforts to promote inclusion and diversity, BSI can enhance stakeholder trust and engagement, as well as improve long-term business sustainability.

### Materiality

BSI has shown a strong commitment to materiality principles in its sustainability framework. The assessment of BSI's materiality process emphasizes transparency, engagement, and focus on significant sustainability topics essential to BSI and its stakeholders. BSI has successfully identified key material issues relevant to its operations and incorporated them into its sustainability reporting process.

However, BSI should continue to enhance its materiality assessment process by incorporating a more robust stakeholder engagement framework. For instance, BSI could leverage enabling technologies to develop materiality mechanisms that improve accessibility, availability, and reliability of information to support stakeholder understanding of the company's progress towards achieving its sustainability objectives.

### Responsiveness

BSI has established clear mechanisms for responding to stakeholder concerns transparently and ensuring prompt follow-up. Additionally, BSI has demonstrated a proactive approach regularly seeking feedback and establishing appropriate customer service methods.

However, to further enhance stakeholder engagement, BSI should continue prioritizing trust-building efforts and strengthening its relationships with the communities, investors, and other key stakeholders.

### Impact

BSI has demonstrated a strong commitment to addressing stakeholder concerns and actively engaging with the local community. The company's approach to assessing and managing its social, environmental, and economic impacts on its investors, society, and other key stakeholders reflects a robust commitment to sustainability and ethical business practices.

### Conclusion on the accuracy and quality of the specified sustainability performance.

Based on our limited assurance engagement, we have not identified any indications that the data in the Report, within the agreed scope, have been materially misstated.

All key assurance findings are presented in this report, while detailed observations and follow-up recommendations have been provided separately to BSI management.

Jakarta, 6 April 2026

**PT SUCOFINDO (PERSERO)**

Engagement Leader



**AA1000**  
Licensed Report  
000-432/V3-VFE0U

**Syaeful Bahrie**

Certified Assurance Practitioner No. 10024117

Certified Sustainability Reporting Assurer No. A-PK2I3-2501-008

*Sucofindo is an independent and state-owned company based in Indonesia that offers a wide range of inspection, testing of industrial products, marine survey, quality assurance and quality control, certification of management system such as ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001, as well as certification of various product standards. Sucofindo is member of IDSurvey Holding Company.*

*Sucofindo is known for its high level of professionalism and competence, and its services are recognized not just in Indonesia, but also internationally. Sucofindo has a variety of technologies and equipment that helps them provide expertise and support their client's business objectives. Over the years, Sucofindo has gained a reputation for its reliability, integrity, and consistency with delivering quality services.*





**PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk**

**Kantor Pusat**

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27  
Kelurahan Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan 1293

**Kontak**

BSI Call - 14040  
Telp. 62081584114040  
[contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)

Facebook: Bank Syariah Indonesia  
Instagram: @banksyariahindonesia  
Youtube: Bank Syariah Indonesia  
Twitter: bankbsi\_id